Dr. Drs. I Made Girinata, M.Ag

Kawasan Suci

Pura Tanah Lot dan Destinasi Wisata

Apa, Mengapa dan Bagaimana

IHDN PRESS

Dr. Drs. I Made Girinata, M.Ag

Kawasan Suci Pura Tanah Lot dan Destinasi Wisata

Apa, Mengapa dan Bagaimana

IHDN Press
2018

Judul :

Kawasan Suci Pura Tanah Lot dan Destinasi Wisata Apa, Mengapa dan Bagaimana

Penulis :

Dr. Drs. I Made Girinata, M.Ag

Diterbitkan oleh :

IHDN PRESS

ISBN : 978 602 52589 2 3

Redaksi :

Jalan Ratna No. 51 Denpasar
Kode Pos 80237
Telp/Fax: 0361 226656
Email: ihdnpress@gmail.com / ihdnpress@ihdn.ac.id
Web: ihdnpress.ihdn.ac.id / ihdnpress.or.id

Cetakan pertama : Agustus 2018

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
Dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
Jalan Ratna No 51 Denpasar, Telp/Fax. 0361- 226656 Kode Pos 80239
Website: www.ihdn.ac.id email: ihdndenpasar@kemenag.go.id

Sambutan Rektor IHDN Denpasar

Om Swastyastu,

Angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha Beliau, karya saudara Dr. Drs. I Made Girinata, M.Ag akhirnya bisa dipublikasi sehingga bermanfaat banyak baik bagi kepentingan pengembangan ilmu maupun terhadap pendidikan masyarakat secara umum. Permasalahan Pariwisata senantiasa seksi untuk dibicarakan khususnya di Bali, karena banyak membawa dampak perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik, tetapi secara bersamaan juga disinyalir berdampak pada tergerusnya nilai-nilai budaya luhur yang sudah tertata dengan baik pada masyarakat Bali. Promosi pariwisata budaya misalnya, disatu sisi masyarakat dunia akan mengenal dan banyak belajar dari budaya lokal Bali, tetapi disisi lain, ada kekhawatiran nilai-nilai lihur yang ada di dalamnya justru ditinggalkan oleh orang Bali sendiri.

Penulis menggambarkan dengan jelas apa, bagaimana dan mengapa komodifikasi terhadap wilayah yang disucikan, khususnya areal suci Pura Tanah Lot sebagai tujuan wisata. Melalui pemaparan yang imiah dan tanpa memihak, Dr. Girinata menuturkan tentang alasan daerah tersebut sebagai destinasi wisata. Isu yang paling sentral yang dijadikan alasan adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kemiskinan di wilayah tersebut berkurang secara drastik dan bahkan memunculkan beberapa orang kaya baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Berbagai fasilitas saat ini sedang gencar dibangun sehingga wilayah tersebut menjadi daerah yang sangat di tata dengan baik. Tentu, uraian yang ditampilkan di dalam karya ini diawali dengan adanya permasalahan BNR beberapa tahun silam. Berpijak dari itu, penulis menarasikan dengan sangat menarik bagaimana kronologi tersebut dari awal sampai saat ini. Semoga karya ini memberikan inspirasi bagi

seluruh kalangan masyarakat, baik akademisi, pemerhati, praktisi pariwisata, maupun pemangku kebijakan.

Om Shantih, Shantih, Shantih, Om

Denpasar, 21 Agustus 2017
Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
NIP. 196712311994031023

Pengantar Penulis

Om Swastyastu,

Atas *asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, melimpahkan rahmat-Nya dan karena kerja keras penulis, karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Wacana komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot di Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan muncul sejak berdirinya Bali Nirwana Resort (BNR) dan pembangunan-pembangunan lain untuk jasa pelayanan pariwisata karena berada pada zona kesucian. Sejak itu terjadi banyak protes, tidak setuju atas pembangunan BNR karena dipandang menodai kesucian pura. Karya ini bertujuan untuk mengeyahui, memahami, dan menganalisis alasan, proses, dan implikasi dari komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot.

Semoga karya ini dapat dipakai bahan pertimbangan bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku pariwisata untuk mengambil kebijakan dalam perkembangan pariwisata di tengah desakan budaya global. Demikian juga dapat memotivasi desa adat yang lain di Bali untuk menjaga identitas budaya yang dipakai sebagai modal dasar dalam perkembangan pariwisata tanpa kehilangan aspek kebudayaan yang bersifat produktif. Disamping itu, karya ini dapat menggugah kesadaran para pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan kontribusinya kepada *desa pakraman* di Bali sebagai wujud implementasi perkembangan pariwisata budaya berbasis masyarakat. Di samping itu, tidak memarginalkan budaya dan masyarakat lokal sehingga tercipta hubungan timbal balik yang selaras antara pariwisata dan kebudayaan.

Om Shantih, Shantih, Shantih, Om

Denpasar, 21 Agustus 2018
Penulis

I Made Girinata

Daftar Isi

Sambutan Rektor iii
Kata Pengantar v
Daftar Isi vii

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Sekilas Desa Pakraman Beraban 13
A. Gambaran Umum Desa Beraban 13
B. Keberadaan Pura Tanah Lot 29

Bab III Alasan Komodifikasi Kawasan Suci Pura Tanah Lot 43
A. Pengembangan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata 43
B. Daya Tarik Kawasan Suci Pura Tanah Lot sebagai Objek Wisata 62
C. Pemerintah Kabupaten Tabanan Membutuhkan Modal Finansial 78
D. Desa Pakraman Beraban Membutuhkan Masukan Finansial 85
E. *Kuren* Membutuhkan Masukan Finansial 88
F. Reinterpretasi Makna Kesucian Kawasan Suci Pura Tanah Lot 96
G. Pemertahanan Kesucian Lewat Tindakan Preventif dan Kuratif 112
H. Kesucian Bisa Dipulihkan dengan Ritual 123

Bab IV Proses Komodifikasi Kawasan Suci Pura Tanah Lot 129
A. Kunjungan Gratis Berubah Menjadi Donasi 129
B. Dari Donasi Menjadi Karcis 131
C. Pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Suci Pura Tanah Lot 133
D. Hubungan Segi Tiga dalam Pengelolaan Kawasan Suci Pura Tanah Lot 153
E. Keterlibatan Pengusaha Lokal dalam Mengelola Kawasan Suci Pura Tanah Lot 155
F. Tanah sebagai Komoditas 160

G. Keterlibatan Masyarakat Sipil 169

Bab V Implikasi Komodifikasi Kawasan Suci Pura Tanah Lot 175

A. Implikasi Religius Magis 175
B. Implikasi Ekologis 191
C. Implikasi Soaial Ekonomi 205
D. Implikasi Sosial Budaya 223
E. Implikasi Ideologis 231

Bab VI Penutup 237

Daftar Pustaka 247
Tentang Penulis 257

BAB I
PENDAHULUAN

Upaya memahami sistem kemasyarakatan umat Hindu di Bali dengan keunikan budaya tidak bisa lepas dari pemahaman tentang adat dan kebudayaan. Di Bali adat telah dijadikan tata cara pelaksanaan ajaran agama Hindu sehingga antara adat dan kebudayaan telah terjalin hubungan secara harmonis yang merupakan rangkaian saling mendukung. Agama merupakan sumber untuk menemukan asal, hakikat, dan tujuan hidup; adat digunakan untuk merealisasikan diri dalam kehidupan; sedangkan kebudayaan merupakan sarana untuk mendapatkan nilai kehidupan. Atau dengan kata lain agama berisi tentang tujuan hidup, adat berisi cara-cara tentang menjalani kehidupan, sedangkan kebudayaan berisi tentang nilai kehidupan.

Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu merupakan suatu kebudayaan yang sangat unik. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai perbedaan serta variasi adat dan budaya tiap-tiap desa adat yang terakumulasi dalam konsep *desa, kala, patra*. Selanjutnya dalam perkembangannya kebudayaan masyarakat umat Hindu Bali merupakan suatu sinkretisme antar kebudayaan yang terjadi sejak ribuan tahun melalui terjadinya kontak antara penduduk Bali dan dunia luar, seperti Cina, Mesir, Jepang, India, dan Eropah. Namun, dalam pengambilan unsur-unsur luar itu sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Bali tidak langsung mengambil unsur-unsur luar seutuhnya, tetapi disaring sedemikian rupa dan dimodifikasi sesuai dengan kebudayaan Bali sehingga unsur serapan tersebut tidak kentara dan seakan-akan menjadi asli Bali (Sumadi, 2004: 8).

Bali sebagai sebuah pulau kecil yang hanya merupakan sebuah titik di tengah-tengah Kepulauan Indonesia, tetapi mempunyai nama besar karena berbagai keunikan atau karakteristiknya yang telah mengundang banyak perhatian dari berbagai pelosok dunia. Karakteristik itu terimplementasi pada aktivitas kehidupan umat Hindu yang mempunyai dimensi sangat luas, baik secara kolektif maupun individual.

Dipandang dari perspektif bermakna individual atau kolektif beberapa sifat dan karakter masyarakat Hindu Bali yang dianggap paling dominan selama ini adalah masyarakat Hindu Bali memiliki sifat *herodianis* dalam arti selalu siap membuka pintu untuk

menyongsong kehadiran orang asing dan kebudayaan luar. Masyarakat Bali memiliki sifat ramah dan luwes dalam menghadapi siapa saja dan berbagai perbedaan. Masyarakat (etnis) Bali sangat yakin akan makna *ontologis* hukum karma sehingga pada hakikatnya memiliki sifat yang jujur. Masyarakat Hindu Bali memiliki sifat kreatif dan estetis dalam penciptaan budaya. Secara *kosmologi* masyarakat Hindu Bali sangat kuat menekankan keseimbangan yang meliputi keseimbangan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan antara manusia dengan alam lingkungan sebagaimana tercermin dalam falsafah *tri hita karana.* Masyarakat Hindu Bali juga memiliki sifat religius dan sifat kolektif yang tinggi. Sifat religius teraplikasi pada aktivitas yang selalu disibukkan dengan ritual agama yang sangat kompleks dan sifat itu merupakan karakteristik masyarakat Hindu Bali. Di pihak lain sifat kolektif karena masyarakat Hindu Bali dilahirkan, dibesarkan, dan dikembangkan dalam sistem sosial yang menekankan kebersamaan dan sistem interaksi primer dalam adat, dalam kekerabatan yang integratif, dan dalam sistem kelompok dengan konsekuensi melahirkan sifat toleransi dan gotongroyong.

Sementara itu Sujana (1994: 48) menjelaskan bahwa manusia Bali adalah etnis Bali. Manusia etnis Bali adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu (khususnya Pulau Bali). Di antara etnik-etnik yang ada di Nusantara, etnis Bali memiliki kesadaran (*consciousness*) yang kuat tentang adanya kesatuan budaya Bali, bahasa Bali, dan kesatuan keagamaan Hindu. Di samping itu, manusia etnis Bali dianggap memiliki kesadaran yang kuat akan perjalanan sejarahnya dan memiliki ikatan-ikatan sosial dan solidaritas kuat yang berpusat pada pura, organisasi sosial, serta sistem komunal. Kesadaran kolektif tentang kesatuan budaya Bali, bahasa Bali, dan agama Hindu membuat manusia etnis Bali memiliki emosi etnosentris kebalian yang relatif kuat.

Sejalan dengan perkembangan waktu, sifat individual, dan sifat kolektif yang menjadi ciri umat Hindu di Bali kini mengalami perubahan yang sangat drastis. Sujana (1994: 52) menjelaskan bahwa kini masyarakat Hindu Bali sudah memasuki eksistensi yang lebih ke atas, yaitu menjadi manusia ekonomis (*economic man*) atau manusia industri (*industrial man*). Artinya, manusia yang memiliki sifat dengan penghargaan tinggi terhadap nilai materi dan uang, menghargai efisiensi, mengutamakan investasi, dan sangat kuat

berorientasi kepada kesenangan dan kenikmatan (sifat *hedonis* terhadap *comportable values*). Semenjak Bali memasuki era industrialisasi pariwisata, manusia Bali bercorak manusia ekonomis semakin tumbuh dan berkembang. Hal itu disebabkan oleh kehadiran industri pariwisata telah membawa banyak dampak kepada rakyat Bali, khususnya umat Hindu. Proses industri pariwisata telah menghasilkan manusia-manusia Bali yang semakin majemuk dan berambisi untuk menguasai status, materi, dan uang. Artinya, masyarakat Hindu di Bali semakin memandang materi dan uang sebagai poros jalinan sosial yang penting. Sebagaimana halnya tempat suci (*pura*) yang pada awalnya hanya digunakan sebagai tempat suci untuk memuja Tuhan, tetapi dewasa ini tidak sedikit *pura* digunakan sebagai tempat objek pariwisata. Salah satu di antaranya adalah Pura Tanah Lot. Pura itu tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat umat Hindu melaksanakan persembahyangan menyampaikan rasa bakti kepada Tuhan dan manifestasi-Nya, tetapi juga dijadikan media produksi untuk mendapatkan keuntungan.

Pitana (1994:4) menyatakan bahwa kini perkembangan kepariwisataan telah membawa energi dobrak yang sangat dahsyat sehingga mampu menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat struktural bagi masyarakat dan kebudayaan Bali. Keberhasilan perkembangan kepariwisataan Bali secara signifikan menjadi motor penggerak dalam perubahan sosial ekonomi budaya di Bali. Perkembangan lain, seperti pendidikan, komunikasi, transportasi, dan sebagainya juga merambah Bali sejalan dengan proses pembangunan dan modernisasi. Keberhasilan pariwisata Bali telah menjadi catatan tersendiri dalam pembicaraan pariwisata internasional. Di balik itu juga tidak sedikit persoalan yang sangat besar mengancam berkelanjutan (*sustainability*) pembangunan itu sendiri menyangkut aspek tata cara keberagamaan, lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Sebagaimana juga terjadi di Desa Pakraman Beraban, yaitu dengan pesatnya perkembangan pariwisata Pura Tanah Lot, tampak terjadinya perubahan pola kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban dalam dimensi sosial, ekonomi, dan budaya.

Aspek tata cara keberagamaan umat Hindu di Bali lebih menunjukkan bentuk ekspresif. Pada aspek lingkungan terdapat opini bahwa pemanfaatan sumber daya alam Bali sudah mengancam karena banyak bangunan yang berdiri di daerah-daerah yang semestinya dijauhkan dari pembangunan fisik. Pada aspek sosial ekonomi tampak

adanya opini yang menyatakan bahwa manfaat pariwisata terdistribusi secara tidak merata. Ketidakmerataan itu menyangkut lapisan masyarakat, terutama antardaerah sehingga setiap kali terjadi program pengembangan pariwisata selalu terjadi tarik-menarik antardaerah dalam konteks penyediaan lahan dan sumber-sumber penunjang lainnya. Pariwisata juga masih belum dapat dipandang berpihak untuk dinikmati orang kecil. Di pihak lain pada aspek sosial budaya tercermin pada interaksi sosial kehidupan masyarakat yang lebih menonjolkan sifat individualistis dengan menggeser nilai-nilai kebersamaan (gotong royong). Fenomena yang sama juga telah terjadi di Desa Pakraman Beraban, yaitu hasil pendapatan pariwisata Pura Tanah Lot hanya dapat dirasakan secara nyata bagi Desa Pakraman Beraban, baik secara individual terhadap masyarakat yang dapat kesempatan menjadi karyawan maupun dalam tatanan struktural sebagai lembaga *desa pakraman*. Jika dilihat dari karakteristik, Pura Tanah Lot merupakan pura umum (*dang kahyangan*). Dalam perkembangannya juga telah mengancam keberlangsungan lahan produktif karena proses alih fungsi lahan terus terjadi hingga saat sekarang.

Pariwisata dapat dipandang sebagai salah satu sektor andal dalam meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga dalam perjalanannya telah terjadi sederetan masalah, terutama dalam pengembangan pariwisata. Secara struktural pemerintah dalam menyukseskan pengembangan pariwisata dilakukan dengan cara merebut persetujuan masyarakat melalui penerapan otoritas sosial dan kepemimpinan. Di samping itu, globalisasi dengan ideologi kapitalis sangat besar berpengaruh pada perkembangan pariwisata. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata justru menimbulkan hegemoni terhadap desa-desa di Bali, khususnya desa adat yang terikat dalam sistem sosial budaya sehingga menimbulkan berbagai masalah yang berujung pada munculnya konflik sosial. Begitu pula pariwisata Pura Tanah Lot, dalam perkembangannya menunjukkan terjadinya hegemoni pemerintah yang sangat kuat, terutama ketika pembebasan lahan untuk para kaum kapitalis.

Utama (*Bali Post* 24 Desember 2011:1) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadi konflik-konflik dalam masyarakat sesungguhnya disebabkan oleh adanya kelompok kepentingan yang beraroma pada masalah ekonomi serta adanya pergeseran pola pikir masyarakat komunal ke masyarakat yang individual. Atas dasar

pertimbangan dan interpretasi makro tak dapat dimungkiri bahwa konflik-konflik yang terjadi tak bisa lepas dari pengaruh perkembangan pariwisata.

Pura Tanah Lot yang dijadikan sebagai objek pariwisata terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan merupakan salah satu contoh tak terhindar dari berbagai masalah. Sebagai daerah tujuan wisata, Pura Tanah Lot telah memberikan banyak kontribusi, terutama berupa uang. Kontribusi sangat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat setempat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kesejahteraan dari hasil pengelolaan Pura Tanah Lot juga dirasakan oleh sejumlah *desa pakraman* yang diberikan dana. Adapun pembagian dana setiap *desa pakraman* di Kecamatan Kediri sebanyak Rp 5.000.000,00 setiap tahun, kecuali Desa Beraban yang mendapat imbalan 60% dari hasil pendapatan objek wisata.

Karena banyaknya pendapatan yang diperoleh sejak pura Tanah Lot dijadikan objek wisata budaya, selanjutnya pengelolaan pura kian baik daripada sebelumnya. Di samping itu, untuk memberikan pencitraan yang lebih baik kepada wisatawan, maka pengelolaan dilakukan secara profesional, termasuk penataan fisiknya dengan menata sedemikian rupa di sekitar pura. Penataan di lingkungan pura Tanah Lot terus dilakukan agar memberikan suasana simpatik dan memesona wisatawan yang berkunjung.

Ketika Tanah Lot ditata menjadi sebuah tempat yang memesona dan disediakan untuk dinikmati oleh wisatawan, maka proses perubahan terus terjadi yang ditandai oleh dinamika kehidupan masyarakat umat Hindu Desa Pakraman Beraban terus melaju. Sejak itu mulai terjadi bentuk-bentuk komodifikasi dalam berbagai bentuk penyediaan untuk konsumsi wisatawan. Di samping itu, muncul upaya-upaya menjadikan sesuatu agar siap jual demi keuntungan ekonomi. Terjadi proses mengemas dan menjual objek-objek kebudayaan dan bermacam-macam gaya hidup masyarakat. Namun, selanjutnya di balik perubahan yang semakin melaju akhirnya menimbulkan berbagai macam permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat sebagai sumber kebahagiaan (*tri hitta karana*) yang meliputi: (1) *parhyangan* (hubungan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*), (2) *pawongan* (hubungan manusia dengan sesama), dan (3) *palemahan* (hubungan manusia dengan alam lingkungan).

Pura Tanah Lot berfungsi sebagai tempat suci untuk tempat persembahyangan umat Hindu, tetapi sekarang fungsinya bertambah sebagai objek pariwisata budaya. Secara tradisi untuk memasuki pura Tanah Lot umat memakai pakaian sembahyang adat Hindu Bali, tetapi sekarang dengan memakai pakaian rekreasi pun tidak masalah untuk masuk pura. Dahulu sesuai dengan tradisi pada kegiatan ritual keagamaan para *pangemong* bergotong royong *ngaturang ayah* membuat perlengkapan sarana upacara, tetapi belakangan ini sarana tersebut mulai dibeli. Bahkan, jika sebelumnya ketika mau ke pura Tanah Lot tanpa dibebani biaya, tetapi sekarang dikenai biaya retribusi.

Perkembangan pariwisata Tanah Lot juga berimplikasi pada terjadinya signifikansi perubahan pola kehidupan sosial masyarakat Desa Pakraman Beraban sebagai pendukung utama pura Tanah Lot ditandai adanya konservasi lahan, yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi industri pariwisata. Alih fungsi lahan pertanian produktif telah banyak menjadi penyediaan kebutuhan wisatawan. Profesi pertanian tidak lagi menjadi favorit untuk menopang segala bentuk kebutuhan hidup karena dianggap membutuhkan banyak biaya dan tidak seimbang dengan hasil produksi. Atas dasar pertimbangan praktis, pragmatis, dan spekulatif sehingga mengarah pada penjualan lahan produktif karena tidak lagi perlu kerja keras, tetapi memiliki banyak uang. Terkait dengan tata cara membuat bangunan, sebelumnya ketentuan *asta kosala-kosali* dipandang dapat menjadi kanopi dalam mewujudkan suasana yang nyaman, harmonis, dan selamat bagi yang menghuni. Namun, sekarang dilakukan dengan mengadopsi model bangunan dengan ciri khas yang tidak jelas sumbernya karena yang dijadikan landasan adalah nilai estetika.

Adat dan budaya sebagai warisan leluhur yang dinilai sebagai media pemersatu dan karakteristik orang Hindu Bali, seperti pakaian adat, tarian adat, lagu-lagu adat, dan upacara adat kini telah dijadikan komoditas dijual untuk mendapatkan uang. Pertemuan para pemuda yang dahulu hanya terjadi secara insidental untuk membahas sesuatu hal penting dalam merancang progam. Akan tetapi, kini hampir setiap saat terlihat di beberapa tempat ada pertemuan kolompok-kelompok pemuda dengan pembicaraan yang tak jelas sambil minum-minum.

Perubahan status sosial kekeluargaan warga masyarakat Desa Pakraman Beraban mulai tampak, yaitu masyarakat mulai selektif dalam melakukan penataan lahan tempat tinggal atau pekarangan. Jika

dahulu lahan kosong yang hanya tersisa beberapa meter dibiarkan begitu saja, tetapi kini diupayakan menjadi sarana bangunan untuk pelayanan pariwisata. Sebagai bukti beberapa bangunan tempat suci diupayakan dibangun ulang dengan konstruksi bertingkat agar di bawahnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan.

Kini fenomena sosial kehidupan makro masyarakat Desa Pakraman Beraban tampak tidak beraturan. Selain itu, ketidakpastian mewarnai berbagai aspek kehidupannya, baik individual maupun struktural. Semula upacara hanya dilaksanakan sangat sederhana dan terukur sesuai dengan kemampuan, tetapi sekarang upacara dipandang dapat mengangkat harkat dan martabat dalam status sosial sehingga dilakukan dengan besar-besaran. Secara struktural organisasi sosial kemasyarakatan yang semula dijunjung sebagai wadah vital pemersatu melakukan kerja gotong royong. Namun, sekarang diukur dengan nilai ekonomi. Warga yang tidak bisa melaksanakan kewajiban, dikenai denda.

Pengembangan wisata Tanah Lot pada struktur formal sarat akan adanya hegemoni pihak elite yang berpihak pada kapitalis. Akibat dari hal itu kerap kali terjadi riak-riak konflik terhadap masyarakat Desa Pakraman Beraban yang terakumulasi pada adanya kepentingan status individu, baik dalam sebuah struktur maupun kepentingan kelompok atas dasar pertimbangan komersial. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan yang berimplikasi pada ekspresi konflik sosial secara struktural terhadap masyarakat Desa Pakraman Beraban selaku *pangemong* pura Tanah Lot. Di samping itu, juga terhadap masyarakat *desa pakraman* lainnya se-Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Puncak penghegomonian terjadi pada tahun 1990-an ketika BNR (Bali Nirwana Resort) mulai menginjakkan kaki untuk membangun sebuah hotel di sekitar pura Tanah Lot. Ketika itu pemerintahan orde baru masih berjayanya. Pada waktu itu terjadi dominasi penghegomonian dalam hal pembebasan lahan tanah yang masih produktif. Dominasi tersebut mutlak berada di tingkat elite (Pemerintah Daerah Tabanan) sebagai peran utama yang berpihak pada pemilik modal (kapitalis). Secara struktural pihak pemerintah mengumandangkan berbagai wacana kepada masyarakat pemilik tanah lengkap dengan gaya kemiliterannya hampir tanpa hambatan yang berarti. Walaupun pada saat itu ada beberapa warga masyarakat

yang dalam hatinya menolak, karena faktor tekanan psikologis disertai dengan gertakan yang melibatkan lembaga peradilan dan pengaruh beberapa tokoh masyarakat Desa Pakraman Beraban yang berkepentingan, sebagai warga tanpa pengalaman akhirnya bungkam seribu bahasa. Saat itu harga tanah mutlak ditentukan oleh pihak elite (Pemerintah Daerah Tabanan) sehingga nilainya sangat jauh jika dinadingkan dengan daerah tujuan wisata lainnya.

Konsekuensi dari semua itu akhirnya di masyarakat umat Hindu sebagai garis terdepan kalangan intelektual yang peduli atas nilai kesucian pura Tanah Lot dan peduli atas nasib para warga masyarakat melakukan demonstrasi protes besar-besaran. Namun, apa yang terjadi BNR bisa kokoh berdiri seperti sekarang ini. Pergolakan yang cukup akbar terjadi lagi beberapa bulan pada tahun 2014, yaitu terjadi pembicaraan yang cukup alot antara tiga pilar, pemerintah, swasta (jasa wisata), dan masyarakat Desa Pakraman Beraban terkait dengan mekanisme struktur pengelolaan wisata Tanah Lot. Hasil akhir pembicaraan berujung pada termarginalisasinya sebuah perusahaan yang sejak awal merintis perkembangan pariwisata Tanah Lot hingga seperti sekarang ini. Akibat dari kemajuan perkembangan wisata Tanah Lot juga berimplikasi pada nuansa tatanan struktural Desa Pakraman Beraban sebagaimana halnya saat pemilihan calon *bedesa pakraman.* Artinya, sebelumnya dilakukan melalui suatu penunjukan seorang figur, tetapi sekarang tidak sedikit orang berebut untuk mencalonkan diri karena jabatan *bendesa pakraman* tak terpisahkan dari struktur pengembangan wisata Tanah Lot.

Keberadaan masyarakat Desa Pakraman Beraban merupakan wilayah terdepan dalam perkembangan wisata Tanah Lot sangat penting diteliti. Dikatakan demikian karena sejalan dengan perkembangan wisata Tanah Lot terlihat adanya perkembangan masyarakat Hindu dalam tataran pola hidup, budaya, dan sosial religius terjadi secara dinamis seirama dengan perkembangan pariwisata global. Berdasarkan fakta-fakta dapat diidentifikasi adanya komodifikasi ruang. Di satu sisi komodifikasi dapat menghasilkan keuntungan materi, sedangkan di sisi lain merupakan ancaman terhadap kawasan tempat suci Pura Tanah Lot yang berstatus sebagai *pura kahyangan jagat*. Di samping itu, juga ancaman dalam bentuk konflik antarkepentingan, yaitu antara pemerintah dan penduduk setempat.

Konsep Komodifikasi

Komodifikasi berasal dari kata komoditas. Marx memberikan makna segala yang diproduksi dan diperjualbelikan. Komodifikasi (*commodification*) adalah suatu proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditas sehingga menjadi komoditas (Piliang, 2006:21). Komodifikasi memiliki makna yang luas dan tidak hanya menyangkut masalah produksi barang dan jasa yang diperjualbelikan, tetapi termasuk juga di dalamnya barang dan jasa yang didistribusikan dan dikonsumsikan. Akibat dari ekonomi uang yang berdasarkan spirit menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya mengakibatkan munculnya gejala komodifikasi di berbagai sektor kehidupan.

Maunati (2006:245) menjelaskan bahwa kebudayaan-kebudayaan asli menjadi sebuah *trend* yang sedang berkembang untuk dikonsumsi. Sehubungan dengan itu mau tidak mau hal ini mengarahkan orang pada komodifikasi kebudayaan sejalan dengan diberikannya layanan-layanan wisata dengan menjual aspek-aspek budaya, sosial, dan agama. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud komodifikasi dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang sebelumnya oleh masyarakat Desa Pakraman Beraban bukan komoditas kemudian menjadi komoditas dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi oleh wisatawan. Kerajinan menganyam atau membuat topi, misalnya, pada awalnya dibuat untuk sarana kelengkapan menunjang aktivitas pertanian agar terhindar dari teriknya matahari, bukan diproduksi yang sengaja untuk tujuan komersial. Namun, pada masa kini banyak topi mengalami komodifikasi karena sengaja dibuat untuk tujuan dijadikan barang/ jasa perdagangan, khususnya untuk kepentingan pariwisata yang datang ke Tanah Lot.

Mudana (2005:38) menjelaskan bahwa komodifikasi tidak semata-mata dilakukan oleh pelaku ekonomi, seperti pemodal pariwisata. Masyarakat lokal pun berpotensi, bahkan sering melakukannya. Hanya karena mereka "memiliki hak" untuk mengomodifikasinya, tidak banyak pihak lain yang meributkannya. Sebaliknya, karena pemodal (besar) pariwisata pada umumnya bukan bagian dari masyarakat lokal, komodifikasi terhadap manusia dan kebudayaan setempat, lebih-lebih dengan intensitas yang sangat besar, jelas akan mendapat kritik.

Komodifikasi dalam pengembangan pariwisata adalah untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan

mutu serta daya tarik wisata, mempertahankan norma-norma, nilai-nilai agama, kehidupan budaya dan alam Bali yang berwawasan lingkungan, mencegah pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan.

Pariwisata dalam penelitian ini adalah dasar yang menjadi landasan proses terjadinya komodifikasi kawasan suci pura Tanah Lot yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Beraban karena bersentuhan langsung dan menjadi daerah tujuan wisata. Perkembangan pariwisata menimbulkan dinamika kehidupan masyarakat berupa kreativitas praktik-praktik budaya penuh nilai estetika yang menarik bagi wisatawan. Dengan demikian kondisi wilayah dan kreativitas budaya masyarakat tidak bisa dilepaskan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata atau kegiatan perjalanan wisatawan, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha jasa yang terkait dengan bidang pariwisata tersebut sehingga secara otomatis juga berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial religiusitas masyarakat Desa *Pakraman* Beraban.

Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26, Tahun 2007 (dalam Adhika, 2012:3), kawasan merupakan penataan ruang adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Selanjutnya kawasan lindung yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di pihak lain kawasan budi daya yang dimaksudkan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam konteks penelitian ini kawasan yang dimaksud adalah kawasan Pura Tanah Lot.

Apa yang dimaksud dengan ruang kawasan suci Pura Tanah Lot mengacu pada kawasan suci yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3, Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai dengan status pura. Di dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali, kawasan tempat suci termasuk kawasan lindung (perlindungan setempat) yang mengacu

pada norma dan ketentuan tentang radius kesucian tempat suci (pura). Ketentuan ini diatur dalam *bhisama* dengan radius kesucian disesuaikan dengan status pura tersebut, seperti *pura sad kahyangan, pura dang kahyangan,* dan pura lainnya. Untuk *pura dang kahyangan* radius kawasan tempat suci yang ditetapkan adalah *apeneleng* agung yang kemudian disetarakan dengan ukuran jarak dua kilometer.

Pura Tanah Lot termasuk dalam katagori *pura dang kahyangan* sehingga berdasarkan *bhisama* PHDI, maka radius kawasan tempat suci Pura Tanah Lot dua kilometer dihitung dari sisi luar tembok (*panyengker*) pura yang meliputi ruang daratan, lautan, dan ruang udara. Demikian juga Perda nomor 16 Tahun 2009 tentang wilayah yang masuk dalam kawasan radius kesucian Pura adalah dua kilometer untuk puluhan Pura berstatus Pura Dang Kahyangan. Dalam radius tersebut tidak diperbolehkan membangun apapun termasuk fasilitas hiburan dan pariwisata. Di sinilah letak persoalannya apabila penduduk setempat memiliki pedoman sendiri warisan leluhur yang ukuran luas antaranya berbeda dengan yang ditetapkan *bhisama* PHDI. Masalah ini juga dijadikan sebagai fokus penelitian ini yang digali dari informasi masyarakat Desa Pakraman Beraban.

BAB II

SEKILAS DESA PAKRAMAN BERABAN

A. Gambaran Umum Desa Beraban

1. Lokasi dan Geografi

Desa Beraban mempunyai luas wilayah 692 ha dengan jarak 35 km dari ibu kota Provinsi Bali (Denpasar), 14 km dari ibu kota Kabupaten Tabanan, dan 8 km dari pusat Kecamatan Kediri. Jarak tempuh dari Denpasar memerlukan waktu kurang lebih enam puluh menit perjalanan. Untuk menuju Desa Beraban merupakan yang tempat keberadaan Pura Tanah Lot, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh dengan kondisi jalan yang relatif sangat bagus. Dari arah timur jalur wisata Nusa Dua dan Kuta melalui Desa Canggu dipersiapkan jalan lebar yang disebut *Sunset Road* agar para wisatawan mendapatkan kenyamanan dan kepuasan menikmati perjalanan antara Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot.

Batas-batas wilayah yang mengelilingi Desa Beraban dapat dilihat dari empat penjuru, yaitu Desa Pandak Gede (di sebelah utara), Sungai Sungi (di sebelah timur), Samudra Indonesia (di sebelah selatan), dan Sungai Kutikan (di sebelah barat).

Desa Beraban merupakan salah satu desa yang berkategori desa pantai. Secara topografis dan geografis, Desa Beraban merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0--50 m di atas permukaan laut. Curah hujan tergolong cukup tinggi hingga mencapai rata-rata 1.175 mm per tahun dan suhu rata-rata mencapai **28—34^{o} C.** Secara umum kondisi tanah Desa Beraban tergolong sangat subur yang dimanfaatkan oleh penduduknya sebagai lahan persawahan dengan tanaman produktif berupa padi dan palawija. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa penduduk Desa Beraban menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dengan pola tanam dua kali padi dan diselingi satu kali palawija dalam kurun waktu satu tahun.

Luas tanah Desa Beraban yang dikategorikan sangat subur mencapi 312,28 ha mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 1999 yang mencapai 313,28 ha atau selama kurun waktu lima tahun menurun hingga 10%. Luas tanah tegalan 21,69 ha yang dimanfaatkan oleh penduduk dengan sistem tanam tumpang sari. Tanah *ayahan* desa 124,47 ha. Peruntukan untuk perkantoran seluas 0,20 ha. Tanah untuk

tempat suci (peribadatan) seluas 2,71 ha. Dimanfaatkan untuk tempat kuburan (*setra*) seluas 0,45 ha. Fasilitas untuk sekolah dan kesehatan (puskesmas) seluas 3,13 ha, dan pemanfaatan untuk kawasan suci Tanah Lot 16,2 ha. Pengunaan tanah dari keseluruhan luas wilayah di desa ini dapat dilihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penggunaan Tanah di Desa Beraban Tahun 2014

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas/Hektare
1	Tanah *ayahan desa*	124,47
2	Tanah sawah	312,28
3	Tanah tegalan/ kebun	21,69
4	Tanah perkantoran	0,20
5	Tanah kuburan/*setra*	0,45
6	Tanah pura/ peribadatan	2,71
7	Tanah sekolah dan puskesmas	3,13
8	Kawasan suci Tanah Lot	16,2
	Jumlah	481,13

Sumber: Diolah dari Data Dasar Profil Desa Beraban (2014)

2. Sejarah Desa Beraban

Dibandingkan dengan popularitas Tanah Lot apalagi sekarang disertai dengan keberadaan BNR yang pernah mengalami kontroversi terhadap umat Hindu Bali pada umumnya, Desa Beraban hampir tak dikenal di kalangan para wisatawan terutama mancanegara. Nama Desa Beraban hampir tidak pernah muncul di peta pariwisata ataupun di buku panduan wisatawan. Para wisatawan hampir tidak pernah mengidentifikasi jika Tanah Lot dan BNR berada di desa ini, padahal mereka, baik yang berada di BNR maupun menikmati wisata Tanah Lot, sedang berada di desa ini.

Asal usul keberadaan Desa Beraban berdasarkan fakta sejarah sangat sulit ditemukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa sumber informasi yang menjelaskan keberadaan Desa Beraban hampir selalu terkait dengan keberadaan Pura Tanah Lot dan Pura Luhur Pakendungan.

Menurut *Eka Likita Desa Pakraman Beraban* (2009: 4) asal usul keberadaan Desa Beraban adalah sebagai berikut.

Dikaitkan dengan prasasti berupa sebuah lontar tua yang masih tersimpan di salah satu keluarga di Desa Beraban (Geria Batu Buah) pada kulit lontar itu tertera "Empu Pranadnyana Siwa 2". Di dalam lontar tersebut ada tertulis tahun Icaka 1116, "*titi paksa ruwa welas* "merupakan awal cerita yang diceritakan berlangsungnya permusyawarahan para empu di Toh Langkir (Gunung Agung). Diceritakan pula zaman keemasan Dinasti Dalem di Gelgel, pergeseran / perpindahan permukiman di Desa Beraban, serta kedatangan Dang Hyang Dwijendra di Pura Tanah Lot. Isi lontar juga menjelaskan asal usul berkaitan erat dengan pergeseran/ perpindahan permukiman penduduk yang semula bermukim di sepanjang pantai mengalih ke tengah.

Permukiman di pesisir pantai diawali dengan kedatangan "Dalem Kresna Kepakisan" ke Bali pada awal tahun 1380. Beliau diiringi oleh para arya, para rsi, dan banyak pengikutnya yang lain. Tersebut juga di dalam lontar itu beliau beserta rombongan menuju tempat yang dianggap suci, yakni SILA NGUNGANG yang kini disebut Batungaus (di sebelah timur pura Tanah Lot).

Beberapa pengikut beliau tidak ikut melanjutkan perjalanan, bahkan membuat permukiman di sepanjang pantai ke barat, yang namanya disesuaikan dengan keadaan alam dan lingkungan, seperti Batu Ngemped, Batu Gang, dan sebagainya. Dikisahkan juga di dalam lontar "Empu Pradnyana Siwa" adanya seorang gadis cantik yang lahir dari "Pilahingwatu". Di permukiman Batu Gang (Batugaing) kejelitaan itulah yang pada akhirnya mengundang bencana, yaitu "Ki Dawang" pelarian dari "Kunir Lidah" (sekarang disebut Nyitdah), menggoda si anak gadis tersebut, yang akhirnya menimbulkan keributan dan kegaduhan di seluruh permukiman tersebut "KEBEREBEHAN DENING KALA". Untuk menenangkan suasana para rsi/ bagawanta mendirikan suatu pura prahyangan penyimpan kala yang sekarang disebutr pura "Kali Pisang". Yang terletak di Pangkung Tibah di sebelah barat Desa Beraban. Dari kata

"BEREBEHAN" inilah berubah menjadi "BERABAN". Pada zaman pemerintahan Dalem, khususnya Dalem Baturenggong, struktur politik dan kenegaraan Keraton Gelgel lebih mendekati sistem negara kesatuan. Semua penguasa daerah di Bali bertanggung jawab langsung kepada penguasa tertinggi di Gelgel. Dengan restu Gelgel diangkatlah Ki Bendesa Beraban selaku penguasa di Desa Beraban, didampingi oleh para rsi / bagawanta. Pada saat Ki Bendesa Berabanlah datangnya "Dang Hyang Dwijandra" (tahun 1578) di Desa Beraban dan melakukan penyucian diri di "Gili Bio", yang artinya pulau di tengah laut (sekarang dengan nama Pura Tanah Lot).

Sesaat Dang Hyang Dwijendra meninggalkan Desa Beraban. Beliau sempat menghadiahkan sebuah Keris pusaka atau pasupati yang diberikan nama "Ki Baru Gajah". Beberapa tahun kemudian Ki Bendesa Beraban membuktikan keampuhan Keris pusaka tersebut terhadap musuhnya "Ida Dalem", I bhuta Raja Kala Bebaung" yang sedang merajalela di Baliling (Buleleng). Setelah tewasnya Ibhuta Raja Kala Bebaung, Ki Bendesa Sakti Beraban menuntut janji terhadap Ida Dalem. Dalem dengan berat hati dan terpaksa menyerahkan permaisurinya yang sedang hamil tua dengan syarat agar jangan dicampuri sebelum kandungan tersebut lahir. Putra Dalem kemudian lahir dalam perjalanan di Nyitdah serta diberikan nama Satrya Pungakan Dalem.

Keris itu kemudian diserahkan kepada Satrya Pungakan Dalem, yang akhirnya karena suatu dan lain hal keris itu pindah ke tangan arya serta kini disimpan di Puri Kediri. Pada tahun 1686 Kerajaan Dalem pindah dari Gelgel ke Klungkung (Puri Semara Pura). Politik, sistem, dan kenegaraan lebih mendekati sistem konfederasi, yaitu fungsi Klungkung tidak lagi sebagai penguasa politik tertinggi.

Pada saat itu pula Kerajaan Menguwi mencapai puncak kejayaannya serta sempat memporakporandakan Desa Beraban dalam menjalankan ekspansinya. Pada saat jatuhnya Menguwi terjadi lagi perpindahan permukiman penduduk, seperti Pasekan pindah ke Gegelang, Batu Ngemped dan Njung Pura ke Dukuh. Itu pulalah merupakan tonggak awal pembenahan struktur desa, yang sudah barang tentu perubahan-perubahannya mengikuti perkembangan zaman dan era pembangunan. Lahirnya beberapa banjar/dusun. Setelah terkepungnya kerajaan Menguwi oleh laskar Tabanan dan Badung barulah ada ketenangan dan ketenteraman, termasuk pula Desa Beraban mulai berbenah diri mengaktifkan banjar yang ada di

wilayah Desa Beraban. Adapun *bebanjaran* yang mewilayahi Desa Beraban pemberian namanya telah dikaitkan/disesuaikan dengan letak, denah, dan peringatan pada suatu peristiwa.

Sangat erat kaitannya dengan peristiwa atau kejadian seorang gadis cantik (bernama PARIENG WARINGIN) yang pernah membawa bencana atau malapetaka "*keberebehan*" sehingga merupakan kesan dan kenangan yang tidak bisa dihapuskan maka wujud dan figur si "PARIENG WARINGIN" diwujudkan dalam struktur desa membujur dari utara kearah selatan menuju laut. Paling ujung utara merupakan hulu atau kepala adalah Banjar "ULU DESA" turun yang merupakan leher Banjar "GEGELANG" berasal dari kata "LANGGA" berarti tenggorokan. Banjar "BATU BUAH" (sekarang BATANBUAH) merupakan "payudara", Banjar Beraban, terletak di titik tengah antara batas utara dan selatan (laut) merupakan "NAVEL" desa terbukti *parahyangan* "PUSER TASIK", di Banjar Beraban sehingga nama banjar disamakan dengan nama desa. Banjar Batu Gang (sekarang Batugaing) merupakan boga (vagina).

Adapun Banjar Dukuh atau Kukuh yang berarti "tahan", merupakan orang - orang yang kuat menahan diri untuk melepaskan keduniawian, yang juga merupakan tangan kanannya di sebelah kiri adalah Banjar Sinjuana berasal dari kata "sindhu dan wana" yang berarti hutan rawa. Konon dulu sebelum Kerajaan Menguwi merupakan batas wilayah Beraban. Banjar yang terakhir terletak di tapal batas timur desa, sekarang merupakan permukiman orang-orang yang diberikan nama suaka pada zaman kerajaan Menguwi. Mereka berjanji untuk memenuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Desa Beraban. Dari kata Janji lahirlah banjar Nyanyi.

Buku karangan Ngurah Oka Supartha (1995) dengan judul *Pura Luhur Tanah Lot di Sagara Kidul* yang diterbitkan oleh Panitia *Karya* disusun terkait dengan penyelenggaraan *Karya Agung Mamungkah, Melaspas,* dan *Ngenteg Linggih* Pura Tanah Lot. Isinya identik dengan yang dijelaskan dalam *Eka Likita Desa Pakraman Beraban*, tetapi secara keilmuan relatif belum memuaskan. Pengungkapan mengenai keberadaan Desa Beraban sekalipun masuk akal, secara filsafat ilmu belum dapat dipandang sebagai bagian dari ilmu sejarah. Namun, hasil karya dari beberapa buku yang ada perlu diapresiasi karena telah mampu memberikan sedikit jawaban atas ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan Desa Beraban dan Pura Tanah Lot. Dengan demikian, untuk selanjutnya tetap bermanfaat

dan sangat penting untuk menuju rekonstruksi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Supartha (1995:15--16) dalam buku berjudul *Pura Luhur Tanah Lot di Sagara Kidul* menjelaskan sebagai berikut.

> Ada seorang gadis cantik yang bernama Parieng Waringin yang terlupakan. Akibat melupakan gadis cantik Parieng Waringin maka terjadilah bencana tak henti-hentinya di delapan banjar Desa Adat Beraban. Agar bencana tidak terjadi lagi, maka kedelapan banjar hendaknya selalu mengenang dan mengingat si gadis cantik yang bernama Parieng Waringin setiap hari. Cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membujurkan tubuh si gadis cantik Parieng Waringin di *palemahan* kedelapan banjar di Desa Adat Beraban dengan menaruh kepala si gadis di bagian utara dan kakinya di bagian selatan. Arah itu sebagaimana kondisi topografi sekarang.

Menurut Supartha sebagaimana kutipan di atas sesuai dengan identitas keadaan geografis Desa Beraban sekarang, yaitu (a) di utara atau ulu (kepala) si gadis dinamakan Banjar Ulundesa, (b) di bagian lehernya dinamakan Banjar Gegelang dengan mengambil ilustrasi bahwa pada zaman dahulu ukuran kecantikan seorang gadis terletak pada lehernya, (c) di bagian payu daranya dinamakan Banjar Batubuah yang kemudian berubah bunyi menjadi Batanbuah, (d) di tengah (antara bagian utara dan selatan) atau nadi (pusar) disebut kedelapan banjar yang dinamakan Banjar Beraban, (e) di bagian vaginanya dinamakan Banjar Batu Gaing, yang berasal dari kata *watu* (batu) gang, (f) di bagian tangan kanannya yang kukuh bernama Banjar Dukuh, yaitu tangan menyatakan kukuhnya hati dan kehidupan ini, (g) di bagian tangan kirinya dinamakan Banjar Sinjuana yang berasal dari kata sindu dan wana yang berarti hutan dan rawa, (h) sebagai *banjar* yang kedelapan adalah Banjar Nanyi sebagai tubuh si Parieng Waringin dikaitkan dengan kata janji, yaitu janji orang-orang setempat (Banjar Nyanyi). Janji itu diucapkan saat diberikan suaka politik begitu kerajaan Mengwi dikalahkan oleh kerajaan Badung dan kerajaan Tabanan. Sebelumnya kerajaan Mengwi pernah berkuasa di Dsa Beraban. Saat itu pernah dilakukan upacara penyucian terhadap Pura Luhur Pakendungan dan Pura Luhur Tanah Lot. *Pangemong* Pura Luhur Bhoma adalah warga *Banjar* Nyanyi yang bernenek

moyang di Desa Adat Munggu dan Desa Adat Pererenan di wilayah Kerajaan Mengwi pada zaman astanagara.

Sumber lain menjelasksan terkait dengan asal usul Desa Beraban adalah cerita perjalanan Dang Hyang Nirartha (Ida Pedanda Sakti Bawu Rawuh) dalam perjalanan beliau menuju Klungkung (Semarapura) mulai dari Pura Rambut Siwi menuju Pura Srijong yang diiringi oleh I Kelik bertugas membawakan *pacanangan* Dang Hyang Nirartha dan *memundut* keris yang diberikan nama Ki Baru Gajah. Sampailah perjalanan Dang Hyang Nirartha di sebuah tempat bernama Desa Beraban. Saat itu cuaca sangat panas karena I Kelik tidak kuasa menahan haus dan lapar, maka dia berkeinginan mencari warung nasi. Dia menemukan sebuah warung nasi yang tiada lain berjualan adalah istri Ki Bendesa Sakti Beraban. I Kelik sendirian membeli nasi, sedangkan Dang Hyang Nirartha terus melanjutkan perjalanan. Sehabis makan I Kelik berusaha mengejar dan menyusul Dang Hyang Nirartha dan dapat disusulnya karena Dang Hyang Nirartha istirahat di suatu tempat yang bernama Tegal Jenggala Jimbar (sekarang bernama Desa Adat Pererenan yang berasal dari kata *mareren* berarti mengaso atau istirahat). Kata *mareren* diambil dari kata ketika Dang Hyang Nirartha mengaso atau *mereren*. I Kelik ikut mengaso, tetapi seketika terkejut karena baru ingat akan keris Ki Baru Gajah tertinggal di warung nasi.

Pada saat yang bersamaan diceritakan bahwa istri Ki Bendesa Beraban terkejut melihat ada sebilah keris di tempatnya. Keris itu pun lalu dipungutnya dan pada saat yang bersamaan datang suaminya. Berdasarkan keadaan itu selanjutnya Ki Bendesa bergegas ingin mengembalikan keris itu dan segera menyusul Dang Hyang Nirartha. Setelah berhasil bertemu dan keris mau dikembalikan, tetapi Dang Hyang Nirartha menolak. Menurutnya sudah tidak pantas lagi beliau memilikinya dan itu merupakan milik Ki Bendesa. Keris itu pun dianugerahkan kepada Ki Bendesa disertai *bhisama* (pesan) bahwa keris itu hendaknya dijaga dengan baik dan hanya digunakan untuk melawan musuh yang sangat sakti.

Cerita di atas menunjukkan bagaimana pemahaman tentang keberadaan Desa Beraban tidak bisa lepas dari kisah perjalanan Dang Hyang Nirartha. Cerita ini justru sangat populer di kalangan masyarakat tentang kaitannya dengan Pura Luhur Tanah Lot dan Pura Luhur Pakendungan. Beliau juga dijuluki sebutan Dang Hyang Dwijendra dan Pedanda Sakti Bawu Rauh.

3. Struktur Pemerintahan Desa Beraban

Desa Beraban dipandang dari struktur pemerintahan sebagaimana halnya desa-desa lainnya di Bali terdiri atas desa dinas dan *desa pakraman*. Terkait dengan lokasi penelitian ini penggalian data dilakukan mencakup Desa Beraban sebagai desa dinas atau adminitratif dan/ atau sebagai *desa pakraman*. Di Bali, baik desa dinas maupun *desa pakraman*, merupakan dua hal yang bersinergis melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan desa karena membawahi masyarakat yang sama.

Dharmayuda (2001:1) menjelaskan bahwa sejak zaman Bali Kuno (sekitar abad 9) masyarakat Bali telah mengenal masyarakat desa yang disebut "*kraman*". Tempat atau wilayah di mana *kraman* berada disebut "desa" atau *desa pakraman* (*wanua*, tani). *Desa pakraman* ini pada awalnya merupakan kelompok cikal bakal atau keturunan pendiri permukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu. Kemudian dengan masuknya kekuasaan Hindu Jawa abad 14, mulailah desa di bawah pengaruh raja-raja. Keadaan ini menunjukkan bahwa desa berfungsi ganda, yakni sebagai kelompok cikal bakal pemuja leluhur atau religius dan fungsi desa sebagai kelompok sosial politik yang dibina oleh raja (keturunan Majapahit abad 16). Raja dalam mengawasi desa-desa dibantu oleh seorang *perbakal* (sekarang perbekel) dan sekaligus sebagai agen perubahan di dalam masyarakat desa. Apabila terdapat pertentangan di desa, tidak lagi hanya tetua atau *prajuru* yang bertugas mendamaikan, tetapi perbekel atau punggawa ikut memecahkan tanpa mengesampingkan musyawarah. Dharmayuda juga menjelaskan bahwa desa merupakan republik kecil yang memiliki hukum atau aturan budaya adatnya sendiri. Susunan pemerintahan bersifat demokratis dan memiliki otonomi serta dengan karakteristik memiliki pura/ *kahyangan tiga*.

Masuknya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda ke Bali Selatan (1906--1908) menggantikan posisi kerajaan atas desa-desa di Bali. Pemerintah Belanda memanfaatkan perbekel sebagai wakilnya untuk mengawasi keadaan di desa. Dengan Perbekel yang diangkat sendiri, Belanda membangun satu lembaga administrasi di tingkat desa dengan membentuk desa baru bentukan pemerintah kolonial. Dengan demikian, muncul dua desa, yaitu desa lama (desa adat atau desa *pakraman* dan desa baru (desa dinas). Namun, sesungguhnya pemerintah kolonial telah bertindak kontradiktif, yaitu di satu pihak ingin melestarikan desa (*pakraman*) yang mandiri dengan hukum

adatnya dan di pihak lain mewujudkan kepemimpinan desa baru (dinas) yang lepas dari akar budayanya.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 menjelaskan seperti berikut.

> Desa adat Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun, dalam ikatan kahyangan tiga, mempunyai wilayah tertentu, kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi membantu pemerintah, pemerintah desa/kelurahan, dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Parimartha (2004) menjelaskan bahwa wujud dua desa itu (desa adat dan desa dinas) patut dipahami sebagai unsur laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia. Keduanya penting dan tampak relevan dalam kehidupan yang saling melengkapi satu sama lain. Apabila desa dinas merupakan bentuk formal dari sistem terbawah pemerintahan, maka desa adat adalah bentuk informal dari lembaga kemasyarakatan desa.

Seiring dengan perkembangan zaman bahwa desa adat sudah dipandang tidak sesuai lagi, maka Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03, Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*. Isi peraturan ini menjelaskan sebagai berikut.

> *Desa Pakraman* adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, hak asal usul yang bersifat istimewa bersumber pada agama Hindu, bersumber kebudayaan Bali, berdasarkan *tri hita karana*, mempunyai *kahyangan tiga/kahyangan desa*. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa *pakraman* adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi, dan pemberdayaan *krama desa.*

Sejak 21 Maret 2001 Peraturan Daerah ini sudah dinyatakan berlaku dan telah diundangkan. Dengan demikian banyak desa adat di Bali mengubah nama menjadi *desa pakraman.*

Sebagaimana penjelasan Dharmayuda dan Parimartha di atas sejalan dengan pendapat I Wayan Wetra mantan Perbekel Desa Beraban bahwa penduduk Desa Beraban sekarang adalah cikal bakal pendiri permukiman generasi sebelumnya. Sebagai kelompok masyarakat, mereka yang ada sekarang berada pada dua struktur, yaitu sebagai kelompok ahli waris leluhur dengan adat istiadatnya (*desa pakraman*) dan sebagai kelompok dalam struktur ikatan sosial politik (desa dinas). Sebagai desa dinas, Desa Beraban terdiri atas sepuluh dusun dinas dan lima belas *banjar pakraman* sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Tabel 2.2
Wilayah *Banjar* dan Dusun di Desa Beraban Tahun 2014.

No	Nama *Banjar Pakraman*	Nama Dusun	Keterangan Letak Nama Desa
1	Ulun Desa	Ulun Desa	Beraban
2	Gegelang	Gegelang	Beraban
3	Batan Buah Kaja	Batan Buah Kaja	Beraban
4	Batan Buah	Batan Buah	Beraban
5	Beraban	Beraban	Beraban
6	Batu Gaing Kaja	Batu Gaing Kaja	Beraban
7	Batu Gaing	Batu Gaing	Beraban
8	Enjung Pura	Batu Gaing	Beraban
9	Dukuh	Dukuh	Beraban
10	Sinjuana Kaja	Sinjuana	Beraban
11	Sinjuana Tengah	Sinjuana	Beraban
12	Sinjuana Kelod	Sinjuana	Beraban
13	Nyanyi	Nyanyi	Beraban

14	Pasti	Pasti	Pandak Gede
15	Kebon	Kebon	Pandak Gede

Sumber: Diolah dari Kantor Desa Pakraman Beraban (2014)

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa secara kedinasan, Dusun Pasti dan Dusun Kebon terletak di wilayah Desa Pandak Gede, sedangkan secara adat, Banjar *Pakraman* Pasti dan Banjar *Pakraman* Kebon termasuk bagian wilayah Desa *Pakraman* Beraban. Menurut keterangan warga sebagai generasi penerus tidak mengetahui secara pasti penyebab dan sejak kapan Banjar *Pakraman* Pasti dan Banjar *Pakraman* Kebon menjadi bagian dari Desa Pakraman Beraban (I Wayan Arwata, wawancara 22 April 2014).

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Berbicara tentang Bali identik dengan agama Hindu karena penduduknya mayoritas beragama Hindu. Hampir setiap desa di Bali didominasi oleh penduduk yang beragama Hindu dengan karakteristik setiap rumah terdapat bangunan tempat suci (*sanggah/ merajan*) dan di setiap desa terdapat pura yang disebut *kahyangan tiga*. Demikian pula halnya di Desa Beraban mayoritas penduduknya beragama Hindu dan terdapat pemeluk agama lain, seperti Islam, Protestan, Katolik, dan Budha. Data yang menunjukkan keadaan penduduk berdasarkan agama Desa Beraban dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.3
Keadaan Penduduk Desa Beraban Menurut Agama

No	Nama Agama	Jumlah (Orang)
1	Hindu	6.151
2	Islam	25

3	Protestan	9
4	Katolik	14
5	Budha	5
	Jumlah	6.204

Sumber: Monografi Desa Beraban (2014)

Data pada Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Beraban mayoritas beragama Hindu dan tata cara melsaksanakan ajaran keagamaan masih eksis sampai sekarang. Terbukti bahwa di Desa *Pakraman* Beraban terdapat 61 jenis tempat suci pura yang diklasifikasikan menjadi tiga buah pura *kahyangan jagat* (*ang kahyangan*), yaitu (1) Pura Luhur Tanah Lot, (2) Pura Dangin Bingin, dan (3) Pura Luhur Pakendungan. Pura Desa sebanyak 57 buah, dengan perincian 7 buah berada di areal kawasan suci Tanah Lot, sedangkan 50 buah terdapat di tiap-tiap *banjar pakraman*, dan sebuah *pura swagina* yang terletak di areal persawahan. Di samping, itu juga terdapat beberapa pura yang *diempon* atau di-*sungsung* oleh ikatan beberapa keluarga (*sosoh*/ klan) tertentu disebut pura *panti* dan pura *dadia*. Di tiap-tiap keluarga juga terdapat tempat suci khusus untuk persembahyangan keluarga disebut dengan *sanggah/ merajan*. Dengan demikian, di wilayah Desa *Pakraman* Beraban terdapat banyak pura berdasarkan status dan *pangempon*-nya, sehingga hampir setiap petak kepemilikan ada tempat sucinya. Keberadaan tempat suci (pura) di Desa *Pakraman* Baraban merupakan media bagi masyarakat dalam mewujudkan rasa bakti ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan manifestasi-Nya, sebagai salah satu penerapan ajaran *tri hita karana.*

Masyarakat Desa *Pakraman* Beraban yang mayoritas beragama Hindu dalam mengimplementasikan ajaran keagamaan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada *Eka Likita Desa* dan penterapannya dijalankan oleh pimpinan lembaga desa *pakraman*. Ketentuan itu sebagaimana termuat pada Bab III *Trityas Sargah* bidang *Parhyangan* sebagai berikut.

> *Desa Pakraman nenten prasida kapasahang ring kawentenan Agama Hindu sane katinutin antuk I Karma Desa. Indike punika wantah rumaga "Dwi Tunggal" yaning inargamayang sekadi padewekan I Manusa. Desa Pakraman*

lan agama, Hindu satmaka pragayan Purusa lan Pradana utawi Stula lan Atma Sarira. Agama Hindu satmaka jiwan Desa Pakraman, Desa Pakraman satmaka angga sariraning agama.

Dwaning rumaga Dwi Tunggal, janten pisan pakilitan ipun nenten prasida antuk masahang. Sinalih tunggil nenten kantun nyejer utawi rusak, janten sampun I Krama Desa pacang tan prasida ngamangguhang utawi mikolihang kerahajengan sekala niskala utawi kasutreptyaning kahuripan ring jagate praside ngawetuang kadurmanggalan ring I Krama Desa, ring Desa Pakraman lan pamargin Agama Hindu druwene nenten ajeg.

Riantukan sekadi asapunika sepatutnyane Agama Hindu lan Desa Pakraman punika manggda setata prasida ajeg (rumaga Dwi Tunggal) turmaning sumangdane I Krama Desa ngemangguhang lan mikolihang kerahajengan sekala miwah niskala utawi kasutreptyaning mahurip ring jagate patut stata titenin lan kaparidabdab.

Indik Tri Hita Karana kemanggehang pinaka dasar tuntunan utawi paridabdab I Krama Desa ngardinin kasutreptian kahuripan. Wyakti dahating manut pisan dudonan nyane ring sor puniki:

Kapertama : Paiketan I Krama ring Ida Sanghyang Widhi Wasa, sane kacihnayang olih I Krama Desa, tan mari miara utawi ngupapira sahananing kahyangan, pinaka genah I Krama Desa ngastawa Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Kaping Kalih: Paiketan I Krama Desa sareng I Krama tiyosan, sane kacihnayang antuk paiketan I Krama Desa ring pasikian raga sajeroning Dsa Pakraman, Banjar Pakraman lan sekeha-sekeha, sane kadasarin olih saling paras paros sarpanaya, segalak sagilik lan saguluk tur kaiket antuk manah salunglung sabaya antaka.

Kaping Tiga: Paiketan I Krama Desa ring palemahanyane sane kacihnayang antuk I Krama Desa tan mari miara lan ngupapira setra, tegal/kebun, bangket lan telajakan-telajakan pinaka genah

I Krama Desa mautsaha mangda prasida mikolihang.

Isi kutipan di atas menjelaskan bahwa masyarakat Desa *Pakraman* Beraban yang mayoritas beragama Hindu dalam menjalankan segala aktivitasnya tak bisa lepas dari ajaran agama Hindu. Masyarakat dengan agama tak bisa dilepaskan karena merupakan dwitunggal kalau diibaratkan sebagai diri manusia. Antara desa *pakraman* dan warga masyarakat merupakan *purusa* dan *pradana*, atau *stula* dan *atma sarira*. Agama diibaratkan sebagai jiwa desa *pakraman*, sedangkan desa *pakraman* ibarat badan agama. Karena keduanya menyatu, tak bisa dipisahkan salah satu dari keduanya. Andai kata salah satu mengalami kerusakan atau ketimpangan, sudah pasti Desa *Pakraman* Beraban tidak akan mendapatkan keharmonisan dan kebahagiaan. Selain itu, dipastikan akan terjadi kekacauan terhadap krama Desa *Pakraman* Beraban. Oleh karena itu, masyarakat Desa *Pakraman* Beraban selalu berusaha menjaga keharmonisan hubungan antara keduanya berdasarkan falsafat *tri hita karana* yang terimplementasi pada tiga sasaran berikut ini.

1. Hubungan warga masyarakat terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, yang dibuktikan oleh warga masyarakat dengan selalu menjaga dan memelihara semua tempat suci (pura) sebagai tempat masyarakat melaksanakan sujud bakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa.*
2. Hubungan warga masyarakat dengan sesama warga dan orang lain diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga Desa *Pakraman* Beraban di tiap-tiap banjar, organisasi-organisasi sosial yang ada, dilandasi atas rasa saling kasih sayang, sama-sama menghadapi, baik suka maupun duka, untuk satu tujuan.
3. Hubungan warga masyarakat terhadap lingkungan alam, khususnya terkait dengan wilayah diwujudkan dengan selalu memelihara dan menjaga keutuhan kuburan (*setra*), areal perkebunan, *telajakan* dan tempat lainnya yang digunakan warga masyarakat sebagai tempat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Harmonisasi tata pelaksanaan keagamaan di Desa *Pakraman* Beraban sampai saat sekarang disebabkan oleh antuasias seluruh

warga masyarakat menjunjung aturan yang tersusun, baik dalam bentuk *awig-awig* maupun *pararem.* Selain itu, juga petunjuk dari lembaga umat *Parisada Hindu Dharma Indonesia*.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) merupakan majelis umat Hindu yang mengatur kehidupan sosial keagamaan umat Hindu di Indonesia sesuai dengan anggaran dasar yang ditetapkan dalam *Maha Sabha VI,* PHDI mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengembangkan dan membina kehidupan keagamaan sesuai dengan kitab suci *Weda.* Selain itu, juga berkewajiban meningkatkan pengabdian umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tugas lainnya adalah mengembangkan tri kerukunan hidup beragama, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antaraumat beragama dan pemerintah, serta mengembangkan dan membina hubungan baik dengan setiap orang dan badan-badan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan (Arwati, 1995:185).

Setiap jenjang *Parisada Hindu Dharma Indonesia* memegang peranan penting dalam memberikan tuntunan dan pembinaan secara intern mengenai keagamaan. Di pihak lain pengamalan pengamanan kehidupannya dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh peranan Badan Pembina Pelaksana Lembaga Adat dan Majelis Pembina Lembaga Adat. Di tingkat *banjar* dan desa adat karena desa adat mempunyai hak otonomi, yaitu mengatur ke dalam sesuai dengan Perda No.6, Tahun 1986 (khusus untuk daerah Bali) maka klian adat atau *bendesa pakraman* dapat mengatur bersama-sama dengan *krama adat* melalui paruman dengan musyawarah dan mufakat sehingga kerukunan intern dapat diwujudkan. Sampai saat ini terbukti bahwa sampai saat ini kehidupan sosial keagamaan umat Hindu di Bali masih sangat mantap yang dilandasi oleh ajaran agama yang disebut dengan *tat twam asi.* Ajaran *tat twam asi* mengandung nilai-nilai susila yang dapat menimbulkan sikap toleransi, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dengan pemahaman masyarakat terhadap ajaran *tat twam asi* solidaritas umat lebih berkembang sehingga tercipta hubungan yang harmonis di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan (Ngurah, 1998: 102).

Penghayatan dan pengamalan ajaran *tat twam asi* bagi umat Hindu di Bali tidak hanya tampak pada hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan timbal balik antara sesama, bahkan hubungan antara makhluk yang lebih rendah. Ajaran *tri kaya*

parisudha juga merupakan landasan bagi umat Hindu dalam melaksanakan tata krama kehidupan bermasyarakat. Ajaran ini direfleksikan dalam wujud penerapan ajaran *catur paramita* yang merupakan empat sifat budi luhur manusia yang timbul atas dasar cinta kasih. *Catur paramita* terdiri atas *maitri*, yaitu sikap kasih sayang terhadap semua makhluk; *karuna,* yaitu sikap tolong-menolong; *upeksa*, yaitu sikap menghargai orang lain; dan *Mudita,* yaitu sikap saling simpati terhadap sesama manusia (Prajaniti, 1971: 26).

Desa *Pakraman* Beraban dalam menjalankan aktivitas keagamaannya tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *Parisada Hindu Dharma Indonesia* (PHDI), dengan aktif melakukan koordinasi secara langsung, terutama dengan PHDI di tingkat Kabupaten Tabanan. Secara teoretis segala bentuk upacara *yadnya* yang dilaksanakan masyarakat Desa Pakraman Beraban bersumber pada lima pokok jenis *yadnya* (*panca yadnya*) yakni *dewa yadnya*, *resi yadnya*, *pitra yadnya, manusa yadnya* dan *bhuta yadnya*. Sekalipun kelima yadnya tersebut memiliki perbedaan, sesungguhnya dalam setiap aktivitas upacara *yadnya* kelima *yadnya* itu pasti dan harus berjalan bersama-sama secara sinergis. Namun, dalam intensitas yang berbeda bergantung pada upacara yang ditonjolkan sebagai upacara pokok. Selanjutnya kelima jenis *yadnya* itu teraplikasi dalam berbagai bentuk dan jenis upacara *yadnya*. Dewa *yadnya,* misalnya, ada upacara *ngenteg linggih, odalan,* perayaan hari suci, dan sebagainya. Dalam *pitra yadnya* ada *sawa wedana, sawa prateka*, *mapendem,* dan sebagainya. Kemudian dalam rsi *yadnya* ada upacara *mapodgala*, upacara *mawinten,* dan sebagainya. Dalam *manusa yadnya* ada upacara *pagedongan*, upacara *dapetan*, upacara *nyambutin*, upacara *pawiwahan,* dan sebagainya. Dalam upacara *bhuta yadnya* ada upacara *masegeh*, upacara *macaru*, upacara *tawur,* dan sebagainya.

Triguna (1994:74) menjelaskan bahwa upacara jika dipandang dari tata cara pelaksanaannya, bahwa upacara keagamaan di Bali dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal seluruh upacara dikaitkan untuk kepentingan alam bawah atau *bhuta*, alam tengah atau manusi, dan alam atas atau alam dewa. Di pihak lain secara horizontal keanekaragaman upacara dipahami dalam kehidupan klan kecil dan klan besar. Selain itu, perbedaan upacara didasarkan atas tingkatan

upacara, yakni *nista* atau kecil, *madya* atau menengah, dan *utama* atau besar.

Sebagaimana pendapat Triguna bahwa segala upacara keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa *Pakraman* Beraban secara vertikal upacara yadnya dilaksanakan dengan tujuan agar para makhluk bawahan (*bhuta kala*) tidak mengganggu. Dengan demikian, kehidupan masyarakat menjadi harmonis dan segala aktivitasnya senantiasa mendapat restu dan anugerah dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa.*

Di Desa *Pakraman* Beraban ada suatu tradisi sampai saat sekarang masih terlaksana, yaitu pelaksanaan upacara *ngaben* dilakukan tidak secara langsung membakar mayat sampai menjadi abu. Akan tetapi, dilakukan pembakaran secara simbolis di dalam lubang kuburan. Selanjutnya mayat ditimbun kembali sebagaimana halnya tata cara mengubur mayat (upacara *mapendem*).

B. Keberadaan Pura Tanah Lot

Secara administratif, Pura Tanah Lot berlokasi di wilayah Desa *Pakraman* Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

1. Asal Usul Pura Tanah Lot

Pura Tanah Lot merupakan salah satu pura umum di Bali yang berstatus sebagai pura *dang kahyangan*. Belum ditemukan bukti sejarah yang menjelaskan kapan, siapa, dan atas dasar apa Pura Tanah Lot didirikan. Seperti halnya beberapa pura *dang kahyangan* di Bali, dalam beberapa tulisan, seperti lontar *Dwijendra Tattwa*, dan buku Ketut Soebandi tentang "Sejarah Pura-Pura di Bali", disebutkan bahwa Pura Tanah Lot juga dikaitkan dengan sejarah perjalanan rohaniwan bernama Maha Resi Dang Hyang Nirartha ketika perjalanannya dari Jawa ke Bali pada sekitar tahun 1489 Masehi. Tidak dijelaskan bahwa Dang Hyang Nirartha yang membangun Pura Tanah Lot. Beliau hanya disebutkan sempat istirahat karena kelelahan dan menginap hanya satu malam. Malam harinya Dang Hyang Nirartha sempat mengajarkan ajaran-ajaran keagamaan kepada para penduduk dan menyarankan agar mendirikan tempat pemujaan di batu karang yang berada di tengah laut sebagai tempat memohon keselamatan. Keesokan harinya beliau melanjutkan perjalanan lagi menuju arah timur. Sumber-sumber tulisan itu secara logika belum dapat dipandang sebagai data yang kuat untuk membuktikan bahwa Pura Tanah Lot didirikan oleh Dang Hyang Nirartha. Secara logika

dengan waktu yang sangat singkat sungguh tidak mungkin dapat membangun sebuah pura.

Menurut sejarah dalam buku Nyoko (1973) pada sekitar tahun 1324 Masehi di Bali ada seorang raja bernama Sri Tapolung atau Sri Gajah Waktra ahli waris Raja Sri Masula Masuli. Raja Sri Tapolung amat sakti, pintar, tetapi sombong. Kemudian pada tahun 1343 Raja Sri Tapolung berhasil ditundukkan oleh ekspedisi Patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Setelah kembalinya Gajah Mada ke Majapahit, di Bali saat itu ada seorang raja bernama Dedela Nata amat sakti tidak setuju dengan perintah Gajah Mada dan bisa memengaruhi sebagian penduduk Bali sehingga keadaan Bali saat itu sangat kusut. Atas dasar itulah kemudian, yaitu pada tahun 1350 Masehi Gajah Mada menugaskan Dalem Ketut salah seorang putra Sri Kresna Kepakisan untuk datang ke Bali sebagai raja.

Sejak Dalem Ketut menjadi raja, keadaan Pulau Bali bisa kembali seperti biasa dan aman. Dalem Ketut mempunyai empat orang anak, yaitu Dalem Samprangan, Dalem Tarukan, perempuan, dan Dalem Ketut Kelesir. Setelah itu Dalem Ketut diganti oleh anaknya, yaitu Dalem Samprangan. Namun, rakyat tidak senang sehingga terjadi kekacauan, bahkan rakyat Bali Aga melakukan berontak. Akhirnya, atas permintaan rakyat, Dalem Ketut Ngelesir bersedia menggantikannya. Pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir dalam kurun waktu 1380 – 1460 dipandang sangat berhasil, di antaranya menjadikan pusat kerajaan Gelgel menjadi Pura Dasar, Pura Besakih dijadikan sebagai salah satu *sad kahyangan* untuk pusat seluruh Bali.

Berdasarkan isi beberapa sumber sebagaimana dijelaskan di atas, diketahui bahwa jauh sebelum kedatangan Dang Hyang Nirartha, yaitu pada tahun 1324 sampai dengan tahun 1460, di Bali sudah terjadi aktivitas keberagamaan yang sangat mantap. Di samping itu, masyarakat sudah mempunyai pengetahuan untuk membuat pura sebagai bukti hingga sekarang adalah Pura Dasar Gelgel dan Pura Besakih. Sehubungan dengan itu, dapat dinterpretasikan bahwa kedatangan Dang Hyang Nirartha pada tahun 1489, sebagai pemberi pengetahuan di bidang keagamaan agar masyarakat lebih mantap dalam menjalankan ajaran keagamaan.

Terkait dengan Pura Tanah Lot, bukan tidak mungkin bahwa Dang Hyang Nirartha juga lebih mengingatkan lagi masyarakat sekitar Pura Tanah Lot agar lebih memperhatikan kebesaran Tuhan (*Ida Sang*

Hyang Widhi Wasa) dan segala manifestasi-Nya dengan cara selalu melakukan sujud bakti dan membuatkan tempat-tempat pemujaan. Apalagi keberadaan Dang Hyang Nirartha di Tanah Lot (sekarang Desa Beraban) hanya satu malam. Karena kepintarannya dalam bidang ajaran agama dan memiliki ilmu batin yang tinggi, sehingga beliau dapat merasakan getaran-getaran spiritual di sekitar Tanah Lot tepatnya pada seonggok batu karang di tengah laut yang patut diperhatikan dan akan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada saat itu bisa saja telah terjadi aktivitas pemujaan bagi masyarakat Desa Beraban. Namun, kondisi yang sangat terbatas menyebabkan masyarakat hanya melakukan secara sederhana dengan simbol persembahan di atas batu karang, terutama bagi para nelayan. Akhirnya terdapat pura seperti sekarang ini seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan masyarakat setempat. Dengan adanya beberapa sumber yang menyatakan bahwa Pura Tanah Lot dikaitkan dengan Dang Hyang Nirartha, dapat dimaknai sebagai hal yang positif sebagaimana pendapat Adhika (2012: 56), yaitu dengan tujuan memperkuat sendi-sendi dan kebudayaan Hindu yang terjadi di Bali. Setelah membaca, masyarakat menjadi termotivasi dalam meningkatkan aktivitas keberagamaannya dan dapat menjaga kelestarian dari warisan leluhurnya.

2. Struktur Pura Tanah Lot

Struktur atau denah pura di Bali dibangun atas tiga bagian, yaitu (1) *jaba* atau *jaba pisan* (halaman luar), (2) *jaba tengah* (halaman tengah), dan (3) *jeroan* (halaman paling dalam). Ada juga pura yang terdiri atas dua halaman, yaitu *jaba pisan* (halaman luar) dan *jeroan* (halaman dalam). Bahkan, Pura Besakih sebagai pura umat Hindu terbesar di Bali terdiri atas tujuh halaman.

Pembangunan halaman pura seperti itu didasarkan atas konsepsi makrokosmos (bhuwana agung). Pembangunan pura menggunakan tiga halaman melambangkan *tri loka* (tiga *bhuwana*), yaitu *bhur loka* (simbol bumi), *bhwah loka* (simbol langit), dan *swah loka* (simbol surga). Pembangunan pura dengan dua halaman melambangkan alam atas (*urdhah*), yaitu lambang akasa dan lambang bawah (*ardhah*), yaitu lambang *pritiwi*. Di pihak lain pembagian pura atas tujuh halaman adalah lambang s*apta loka* (tujuh lapisan/ tingkatan alam ke atas yang terdiri atas *bhur loka, bhwah loka, swah*

loka, maha loka, jana loka, tapa loka, dan satya loka. Ketujuh lapisan itu merupakan simbol pendakian spiritual manusia mulai dari masa kehidupan hingga pada lapisan ketujuh (*satya loka*) yang merupakan alam *Brahman,* yaitu tujuan akhir manusia kembali kepada asalnya (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*). Pura yang hanya terdiri atas satu halaman adalah simbolis dari *ekabhuwana* (Titib, 2003: 101).

Pembangunan tempat suci yang dibuat dengan beberapa halaman dalam struktur vertikal secara filosofis dimaknai bahwa *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) berada lebih tinggi (terhormat) daripada umat manusia yang menghormati Beliau. Sebaliknya dalam struktur horizontal terimplementasi dengan pembuatan tempat suci (pura) menggunakan konsep *tri mandala* sebagai lambang dari *Tri Bhuwana*. Oleh karena itu, dalam perkembangannya konsep *tri mandala* menjiwai semua tempat suci (pura) umat Hindu, khususnya di Bali diimplikasikan secara struktur dengan identitas *nista mandala (jaba sisi), madya mandala (jaba tengah*), dan *utama mandala (jeroan).* Pada tiap-tiap mandala terdapat bangunan *pelinggih* atau bangunan tempat suci sesuai dengan fungsinya. Jadi, dari struktur bangunan tempat suci (pura), keseluruhan *mandala* merupakan bagian dari tempat suci yang harus dijaga kesuciannya.

Tri mandala juga merupakan sebuah media untuk menuntun umat Hindu ketika menjalankan aktivitasnya memasuki tempat suci (pura), agar dapat menerapkan ajaran etika yang menyentuh falsafah *tri kaya parisudha*. *Tri kaya parisudha* merupakan tiga jenis perbuatan yang harus disucikan. Pertama, *kayika parisudha* artinya perbuatan yang harus disucikan maknanya ketika memasuki areal *nista mandala* (*jaba sisi*) kita sudah terbebas dari segala perbuatan yang melanggar norma. Kedua, *wacika parisudha* artinya berkata-kata yang suci, maknanya ketika kita melangkah menuju areal *madya mandala* (*jaba tengah*) hendaknya menghindari ucapan-ucapan yang kotor seperti membicarakan kejelekan orang lain. Ketiga, *manacika parisudha* artinya fikiran yang suci dan hening, maknanya bahwa ketika kita memasuki areal *utama mandala (jeroan)* sebagai tempat sthana manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa (istha dewata)*, hendaknya pikiran terfokus sujud bakti ke hadapan Beliau.

Jarak antara *mandala* satu dan *mandala* yang lain pada umumnya dibatasi oleh bentuk bangunan terdapat pada tempat sirkulasi keluar masuknya umat, yang dibuat dalam bentuk candi. Antara *nista mandala* dan *madya mandala* dibatasi oleh *candi bentar*,

sedangkan antara *madya mandala* dan *utama mandala* dibatasi oleh *candi kurung* (*gelung kori*). Karakteristik hiasan dan ornamen *candi kurung* berupa gambar *bhoma*, pohon-pohonan, dan disertai dengan jenis-jenis binatang.

Penggunaan hiasan dan ornamen seperti itu tak lepas dari filsafat pendirian pura. Pura merupakan simbol gunung. Gunung terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, puncak gunung sebagai simbol *sthana Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan *istha dewata* sehingga semua bangunan *pelinggih* di *utama mandala* berfungsi sebagai sthana Beliau. Kedua, badan gunung (antara puncak dan kaki gunung) yang dalam kenyataannya merupakan hutan. Hutan didominasi oleh tumbuhan pohon kayu disimbolkan dalam bentuk gambar *bhoma* yang dalam bahasa Belanda berarti tumbuhan kayu. Atas dasar falsafah itulah *kori agung* sebagai simbol pertengahan gunung dihiasi dengan *bhoma* dan jenis-jenis satwa yang ada di hutan. Ketiga, kaki gunung yang merupakan bagian pesisir disimbolkan dengan *candi bentar*. Bentuk hiasan dan ornamennya disesuaikan dengan keadaan tumbuhan dan makhluk hidup yang ada di bagian pesisir (Titib, 2002: 217).

Keberadaan struktur Pura Tanah Lot seperti sekarang ini secara filsafat mengandung makna penerapan *tri mandala*. Secara fisik struktur Pura Tanah Lot berbeda dengan pura-pura lainnya karena areal untuk menuju *utama mandala* tidak menggunakan bangunan *kori agung,* tetapi menggunakan bangunan *candi bentar*. Namun, penerapan falsafah *tri mandala* terlihat pada tata cara umat Hindu ketika melakukan persembahyangan pada saat upacara *odalan.* Tahap pertama umat Hindu melakukan penyucian diri secara simbolis di *taman beji* yang posisinya di bawah sebelah utara di luar pura (*nista mandala*). Setelah itu dilanjutkan menuju *madya mandala* diatur oleh petugas dengan melewati batas pintu terbuat dari besi dan menunggu sampai umat selesai melakukan persembahyangan di *utama mandala* (*jeroan*). Hal itu dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.

Suasana umat melaksanakan persembahyangan pada saat hari *odalan* (koleksi, Girinata, 2015)

Pura Tanah Lot dilengkapi dengan beberapa jenis bentuk bangunan *pelinggih,* yaitu *satu meru tumpang* lima dengan posisi menghadap ke barat, *satu meru tumpang* tiga menghadap ke selatan, satu *pelinggih pepahatan,* satu *pelinggih pamekel,* satu *pelinggih pemekel meru tumpang* lima, satu *pelinggih pamekel meru* tumpang tiga, satu *piyasan meru tumpang* lima, dan satu *piyasan meru tumpang* tiga. Susunan tempat di tiap-tiap *pelinggih* dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut.

Beberapa *palinggih di utama mandala* (koleksi, Girinata, 2015)

3. *Pangempon* Pura Tanah Lot

Setiap pura yang ada di Bali sudah pasti ada hubungannya dengan *pengempon*, yaitu seorang dan/atau sekumpulan orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap segala hal yang bersangkut-paut dengan pura mulai dari proses pendirian, pemeliharaan, dan tata cara pelaksanaan upacara *yadnya* yang diselenggarakan di pura bersangkutan. *Pengempon* yang dimaksud bisa saja karena keterlibatannya secara langsung sejak awal proses pendirian sebuah pura. Namun, bisa juga sebagai ahli waris dari nenek moyangnya (generasi sebelumnya) yang mempunyai tanggung jawab moral untuk meneruskan. Dengan demikian, istilah warisan bagi masyarakat umat Hindu di Bali tidak saja dikonotasikan dalam bentuk harta benda, tetapi juga berupa tempat suci (pura).

Karakteristik peradaban umat Hindu Bali menunjukkan bahwa warisan berupa tempat suci /pura merupakan harta yang paling utama dibandingkan dengan harta benda. Bahkan, dirasakan memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan menggunakan alat ukur mengenai seberapa besar nilai instriknya. Dikatakan demikian, karena dalam warisan tempat suci/ pura terdapat nilai rohani yang diyakini sebagai sumber utama dan penentu terhadap apa yang dialaminya selama menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai bukti bahwa hampir setiap umat Hindu di Bali, baik dalam keadaan menghadapi kesusahan, kebahagiaan, maupun mewujudkan cita-citanya agar sukses, selalu melakukan komunikasi lisan dengan persembahan dan doa agar sukses dalam menjalani kehidupan. Bahkan, merendah mohon maaf jika merasa telah melakukan kesalahan dalam hidupnya sehingga mengalami penderitaan.

Tempat suci/ pura juga dapat dipandang memiliki nilai sosial yang tinggi karena bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang dalam interaksi sosial di masyarakat. Dalam peradaban kehidupan umat Hindu di Bali, stratifikasi sosial atau lapisan sosial kemasyarakatan terkait dengan *soroh* (klan) masih kental yang dalam praktiknya memosisikan kelompok-kelompok masyarakat dengan status lebih tinggi dan lebih rendah terfomulasi pada struktur tradisional yang disebut *catur warna* dan *kasta*. Tiap-tiap *soroh* (klan) memiliki tempat suci melekat dengan sikap panatisme sehingga terjadi kecenderungan tidak boleh sembahyang di tempat suci *soroh* (klen) yang lain, terutama mereka yang merasa pada posisi lebih tinggi pantang sembahyang di tempat *soroh* (klan) yang lebih rendah.

Fenomena itu tidak saja terjadi pada tatanan melakukan sembahyang di suatu tempat suci, tetapi juga merembet pada tatanan yang lebih luas, yaitu menyangkut keberlangsungan tata keberagamaan dan budaya.

Pura Tanah Lot sebagaimana halnya pura-pura *dang kahyangan* lainnya juga memiliki *pangempon*. Konotasi *dang kahyangan* diartikan sebagai pura yang berstatus umum untuk memuliakan (sebagai bentuk penghormatan) atas jasa para tokoh rohaniwan pada zaman dahulu yang banyak membantu umat masyarakat, baik mengatasi permasalahan yang dihadapi maupun memberikan tuntunan pengetahuan. Beliau dijadikan sebagai panutan karena memiliki pengetahuan agama dan kerohanian yang tinggi serta berperilaku yang baik. Para tokoh rohaniwan zaman dahulu sering sekali melakukan perjalanan atau *tirthayatra* (perjalanan ke tempat-tempat suci atas niat suci dan tujuan yang suci), baik atas perintah raja maupun atas kehendak sendiri.

Sebagaimana dipaparkan dalam lontar *Dwijendra Tattwa* bahwa setiap perjalanan seorang rohaniwan/ orang suci selalu disertai dengan pengikut (abdi). Dalam perjalanan beliau biasanya disertai dengan melakukan perenungan-perenungan pada suatu tempat yang menurut beliau ada suatu vibrasi atau getaran-getaran suci sambil membantu warga penduduk yang kena musibah dan memberikan pencerahan rohani. Di tempat yang menurut beliau baik dan ada getaran kesucian, maka penduduk yang ada di sana disarankan membuat bangunan tempat suci dan selanjutnya sebagai *pangemong* agar selalu melakukan persembahyangan mohon keselamatan ke hadapan manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan sebutan sesuai dengan pesan beliau. Perkembangan selanjutnya karena status dari pura sebagai pura umum, sebagai *pangempon* adalah sekumpulan orang dalam suatu ikatan (sekarang Desa *Pakraman*) yang terdekat bertugas sebagai *pangemong*.

Pangempon Pura Tanah Lot memiliki sejarah yang unik karena status seluruh warga masyarakat Desa *Pakraman* Beraban tidak sebagai *pangempon* secara mutlak. Menurut penuturan salah seorang tokoh yang dituakan sebagai *pangempon* dan keterangan *Jro Mangku* yang dibenarkan oleh warga masyarakat lainnya sebagai berikut.

> *"Dugase dumun sekonden tamu wisata rame mriki tur dereng wenten sane ngelola sekadi mangkin sane ngempon pura driki ajak tiang duang kelompok nika. Sane makrane sawireh driki*

*wenten palinggih pokok kekalih, inggih punika Meru tumpang lima majeng kauh, sane malih siki Meru tumpang telu (tiga) majeng kelod. Malih siki wenten palinggih pasimpangan Ratu Dalem Nusa Penida (Dalem Ped) magenah ring ungkur Meru tumpang lima. Indik pangempon ring palinggih Meru tumpang lima melenan sareng pangempon palinggih Meru tumpang telu (tiga). Tiyang sareng kalih selaku pangempon ten pisan uning napi sujatine soroh tiyang, tiyang sampun napet sekadi niki. Santukan melenan pangempon, ngantos upakara odalan taler melenan, sami nyeje-nyeje maduwe pamangku. Duk dumun taen wenten masalah ring pangempon indik ngaku sami paling dumunan, paling tegehan, sareng ngaku paling pantes, sakewala ten je ngantos ribut pisan. Raris disampune rame tamu rawuh mriki, mangde ten sinah singsal pikayun pare pangempon, turmaning mangde apisan makarya banten odalan, rapatan tiyang pare pangemong makejang. Hasil rapat raris nyidayang ngodalin acepokan wantah ring dina Buda (*Rebo*) Wage Wuku Langkir sekadi mangkin. Taler masalah biya napi je dados asiki. Minab sangkaning sweca Sasuhunan driki, ring sajroning pangempon akeh saling juang indik makurenan lan masomahan. Sekadi tiyang pangempon ring meru tumpang 3 nyuwang anak luh ring pangempon meru tumpang lima. Ane lenan ken tiyang wenten masih nyuang nak luh patuh cara tiyang. Masekat nika naler dadine jeg luwung tiyang paturu pangempon (Arwata, Pamangku, Karsa, wawancara 9 Mei 2015).*

Isi inti penjelasan di atas bahwa sebelum tamu atau wisatawan ramai berkunjung ke Tanah Lot, *pangempon* terbagi menjadi dua kelompok ditentukan oleh jenis *palinggih meru* yang ada. *Meru tumpang lima* mempunyai *pangempon*, demikian juga *meru tumpang telu* (tiga) mempunyai *pangempon*. Ke-dua kelompok sama-sama tidak mengetahui klan/*soroh* apa yang dianut. Cara menyiapkan upakara (*banten*) pada saat melaksanakan upacara *odalan* pun berbeda. Setiap *palinggih meru* mempunyai *pamangku* sendiri-sendiri. Dulu pernah terjadi ketidakharmonisan antara *pangempon*. Semua merasa paling dulu, mengaku paling pantas, dan mengaku paling tinggi, tetapi tidak sampai keras berpengaruh ke luar. Selanjutnya setelah tamu atau wisatawan ramai datang berkunjung, semua

pangempon melakukan rapat menyatukan persepsi utamanya supaya tidak terjadi *odalan* dua kali dalam waktu yang berbeda. Hasil rapat sepakat melaksanakan sekali *odalan* pada hari *Buda Wuku Langkir* sampai sekarang. Mungkin juga berkat anugerah dari manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi* yang ber-sthana di Pura Tanah Lot sampai terjadi beberapa *pangempon* memperistri wanita dari *pangempon* yang berbeda.

Menurut penuturan mantan *Bendesa Pakraman* Beraban, jumlah *pangempon* Pura Tanah Lot sampai sekarang dari dua kelompok sebanyak 400 KK. Semula hanya *pangempon* yang mempunyai tanggung jawab tentang segala hal yang menyangkut di Pura Tanah Lot melalui swadaya. Namun, pada perkembangan selanjutnya, mengingat Pura Tanah Lot sebagai sumber terjadinya perkembangan pariwisata seperti sekarang dan telah berkontribusi besar terhadap Desa Pakraman Beraban, warga masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, maka Desa Pakraman Beraban akhirnya ikut berkontribusi dalam beberapa hal terkait dengan kegiatan di Pura Tanah Lot. Keterlibatannya dikemas dengan istilah ring satu dan ring dua. Ring satu adalah tetap sebagai *pangempon* pura yang bertanggung jawab segala hal menyangkut kegiatan di pura. Di pihak lain ring dua adalah Desa *Pakraman* Beraban yang bergerak membantu hal-hal yang diperlukan, misalnya ketika mengadakan karya upacara besar atau *odalan* melalui pengerahan tiap-tiap *banjar pakraman* sesuai dengan pembagian Kepala Desa *Pakraman*. Bilamana kegiatan didukung dengan kepanitiaan, kelengkapan susunan struktur kepanitiaan juga melibatkan warga masyarakat *desa pakraman* yang ditunjuk oleh *bendesa pakraman*. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan diposisikan sebagai penasehat (Arwata, wawancara 31 Mei 2015).

4. Batas Wilayah Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Setiap tempat suci agama Hindu, baik statusnya sebagai pura umum (*kahyangan jagat*) untuk memuja kebesaran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* maupun untuk memuja jasa para *Dhang Guru Suci* (*Dhang Kahyangan*), pura teritorial, *pura swaghina*, maupun *pura kawitan,* semuanya memiliki batasan atau lebih populer disebut dengan kawasan. Batasan atau areal dibuat dengan maksud untuk menjaga nilai kesucian tempat suci. Implementasinya bahwa di sepanjang kawasan tidak diperkenankan membangun permukiman dan

melakukan bentuk-bentuk kegiatan yang dikategorikan dapat menimbulkan pencemaran (*keletehan/cemer*) terhadap pura.

Jangkauan atau jarak yang ditetapkan sebagai kawasan suci diatur berdasarkan ketentuan masyarakat internal di tempat keberadaan *pura* (tempat suci). Tanda-tanda pembatas biasanya menggunakan tanda secara alami yang telah disepakati sejak turun-temurun, seperti saluran air, jalan, sungai, dan jenis tanaman pohon. Namun, khusus mengenai tempat suci yang berstatus pura umum atau *kahyangan jagat*, ketetapan jarak kawasan yang disucikan juga harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) tentang Tata Ruang dan *Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia* (*PHDI*) Pusat. Konsekuensi ketentuan kawasan antara Perda dan *Bhisama PHDI* Pusat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masyarakat *pangempon* hampir di setiap pura yang berstatus *kahyangan jagat* tidak terjadi sinkronisasi, sehingga berpeluang menimbulkan konflik.

Ketentuan batas atau kawasan terhadap tempat suci (pura) sesungguhnya implementatif dari arti dan makna kata *pura* itu sendiri dengan tujuan agar nilai kesucian tempat suci (*pura*) tetap terjaga. Subagiasta (1997:381) menjelaskan arti kata pura adalah sesuatu yang dikelilingi oleh tembok. Kemudian *pura* bermakna "benteng, kota, kerajaan, dan istana". Penekanan kata sesuatu yang dikelilingi oleh tembok merupakan adagium bahwa ada hal penting yang harus dijaga keutuhannya. Titib (1989:12--13) menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Dinasti Sri Krsna Kapakisan (pada zaman Bali Kuno), ada dua hal penting yang harus dijaga keutuhannya, yaitu tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) disebut dengan *kahyangan* atau *parhyangan* dan tempat untuk pemimpin atau raja pada saat itu disebut dengan *pura.* Subagiasta (1997: 355) menyebutkan nama kerajaan-kerajaan di Bali pada saat pemerintahan Dinasti Dalem Baturenggong disebut dengan *Swecapura* (Raja Gegel), *Smarapura* (Raja Klungkung), *Linggastrapura* (Raja Samprangan), Bandanapura (Raja Badung), dan *Kawyapura* (Raja Mengwi). Selanjutnya pada tahun 1489 ketika pemerintahan Bali dipegang oleh Raja Dalem Baturenggong ditandai dengan kedatangan Dang Hyang Nirartha. Pada waktu itu tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang semula disebut *kahyangan* atau *parhyangan* diganti dengan sebutan *pura*. Di pihak lain tempat raja yang semula disebut *pura* diganti dengan *keraton* dan/ atau *pura* diganti dengan sebutan *puri.*

Berdasarkan kata pura yang diartikan, baik sebagai benteng maupun sesuatu yang dikelilingi tembok, konsekuensi logis yang dimaksud mengandung imbauan agar sesuatu yang dinilai sangat penting tetap terjaga kelestariannya, baik secara *sekala* maupun *niskala.* Implementasi makna itu kemudian disebut dengan istilah *karang kekeran*. Warna (1989: 309 dan 326) menyatakan bahwa istilah *karang kekeran* diartikan sebagai pekarangan/ wilayah yang sudah dipastikan (dalam pembahasan ini dimaksud adalah ukuran pasti yang dipakai sebagai batas-batas wilayah atau areal pura untuk dijaga kesuciannya) sesuai dengan kesepakatan *pengempon pura* yang sekarang populer disebut dengan kawasan tempat suci *pura*.

Kawasan suci Pura Tanah Lot dalam pembahasan ini dimaksudkan adalah terjadinya suatu proses perkembangan kawasan suci. Sejak semula kawasan suci itu diterapkan oleh *pengempon* pura sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3, Tahun 2005 yang diperbarui dengan Perda Nomor 16, Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.

Berdasarkan keterangan *bhisama* dari para *panglingsir* Desa Pakraman Beraban yang dituturkan oleh beberapa warga bahwa pada awalnya batas-batas kawasan yang harus dijaga kesuciannya adalah di sebelah utara berbataskan jalan kecil (*munduk*) yang berada pada bagian sebelah utara jalan menuju Pura Pakendungan. Batas di sebelah timur adalah Sungai Yeh Sungi. Di sebelah barat berbataskan Sungai Kutilan. Sedangkan batas di bagian selatan adalah laut dengan jangkauan *apaneleng* (sejauh mata memandang). Jika diukur jarak antara Pura Tanah Lot dan batas-batas yang ditentukan kuang lebih mendekati satu kilometer. Sesuai dengan batas-batas yang ditentukan, warga masyarakat tidak diperkenankan melakukan kegitan yang dapat dipandang menimbulkan *kacuntakaan* atau *kaletehan* (I Wayan Arwata, I Nyoman Arsa, wawancara 31 Mei 2015).

Seiring dengan lajunya perkembangan pariwisata di Bali, di satu sisi pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu kebijakan pembangunan nasional. Hal itu menyebabkan banyaknya pengembangan kawasan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata. Pengembangan kawasan dan fasilitas dimaksudkan agar para wisatawan semakin betah berkunjung dan mendapatkan rasa aman. Konsekuensinya adalah semakin banyak tamu yang datang, sudah tentu lebih banyak uang yang dikeluarkan

oleh wisatawan, dan semakin banyak pula pendapatan yang masuk (Adhika, 2012: 38).

Tanah Lot merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Bali dan dipandang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tabanan. Sehubungan dengan itu, dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi, maka proses pengembangan pelayanan pun terjadi. Sebagaimana yang terjadi bahwa semula di kawasan suci Pura Tanah Lot hanya terdiri atas hamparan tanah pertanian. Namun, sekarang hampir seluruhnya digunakan sebagai tempat pelayanan wisata, seperti kios-kios, parkir, dan kantor sekretariat pengelola. Bahkan, pada tahun 1993--1997 dibangun sebuah hotel besar berbintang lima (BNR) dengan posisi bangunan masuk wilayah zona kawasan suci di bagian sebelah timur yang ditetapkan oleh Desa *Pakraman* Beraban sebagai karang *kekeran.*

Sempat terjadi protes oleh tokoh-tokoh/elite masyarakat Bali dalam bentuk demonstrasi terhadap proses pengembangan pelayanan pariwisata, terutama tentang pembangunan BNR. Isi protes mengingat Pura Tanah Lot termasuk dalam pura *kahyangan jagat*. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan *Bhisama* PHDI Pusat, minimal jarak dua km dari tembok pura terbebas dari permukiman. Karena pembangunan BNR masuk dalam zona kawasan suci, patut dihentikan. Perjuangan dipandang tidak berhasil disebabkan oleh kegagalan masyarakat sipil melakukan hubungan politik dengan pemerintah (Mudana, 2005).

Ketentuan luas kawasan suci menurut pemerintah sesuai *Bhisama* PHDI Pusat dengan ketentuan masyarakat Desa *Pakraman* Beraban jelas berbeda pandangan. Masyarakat berpegang teguh pada ketentuan tradisi yang memandang kawasan adalah sebatas *karang kekeran*. Jika diukur, bahkan kurang dari 1 km sebab yang dijadikan landasan untuk menjaga nilai kesucian kawasan adalah hanya tidak diperkenankan melaksanakan upacara kematian. Di samping itu, juga masyarakat mempunyai kepentingan dalam mendukung program pariwisata. Ketika terjadi protes di kalangan para tokoh/elite terhadap pendirian BNR masyarakat Desa Beraban tidak ada yang ikut bergerak. Pernyataan itu sesuai dengan pengakuan seorang warga pemilik lahan di lokasi kawasan suci Pura Tanah Lot (Suteria, wawancara 31 Mei 2015).

BAB III
ALASAN KOMODIFIKASI
KAWASAN SUCI PURA TANAH LOT

A. Pengembangan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata

Daya tarik utama pariwisata Bali bersumber pada keunikan budaya dan adat istiadatnya. Kehidupan dan gaya hidup orang Bali yang religius dan unik membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung, di samping memang ditunjang oleh adanya keindahan alam. Pariwisata Bali adalah pariwisata agama, budaya, yang menyebabkan Bali dapat diterima ssbagai pariwisata dunia. Sejarah pertumbuhan pariwisata Bali melalui proses yang cukup panjang. Selanjutnya berimbas ke daerah-daerah kabupaten lainnya di Bali dengan karakteristiknya masing-masing sebagai unggulan daya tarik wisatawan. Salah satu di antaranya wisata Tanah Lot yang dimiliki Kabupaten Tabanan. Sejarah perkembangan wisata Tanah Lot sebagai tindak lanjut dari perkembangan pariwisata Bali sebagaimana uraian berikut.

Perkembangan Pariwisata Bali

Luas Provinsi Bali 5.632,86 km2 atau 0,29% dari luas Kepulauan Indonesia. Bali memiliki keunikan budaya dan keindahan alamnya menjadi potensi sangat penting sebagai daya tarik wisata sejak awal perkembangan kepariwisataan daerah ini. KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschapij*) merupakan sebuah perusahaan pelayaran pemerintah kolonial Belanda telah mempromosikan keunikan budaya dan keindahan alam pulau dewata kepada wisatawan mancanegara pada tahun 1920-an (Pitana, 2006:6-7) ; Ardika, 2007:75). Keunikan-keunikan sebagai daya tarik wisata yang dimiliki Bali dipromosikan oleh orang asing bukan oleh orang Bali atau orang Nusantara. Dalam konteks ini wisata yang dimaksudkan adalah wisata internasional (mancanegara) dan wisata dalam negeri (domestik), sejalan dengan perkembangan kepariwisataan Bali.

Menurut Withington (dalam Subrata, 2012:203), Bali sudah dijadikan kebiasaan sebagai tempat berlibur oleh Soekarno sejak tahun 1950-an. Setelah pulau Bali ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata internasional pada tahun 1970-an kepopulerannya melampaui kepopuleran kawasan-kawasan pegunungan yang dahulu gencar dipromosikan oleh orang-orang Belanda.

Daya tarik Bali bagi wisatawan dan menarik untuk dikunjungi dapat dibuktikan ketika terjadi tragedi Bom Bali I (tahun 2002) dan Bom Bali II (tahun 2005). Para wisatawan tak terpengaruh untuk datang dan Bali tetap menjadi target sebagai daerah tujuan wisata dunia. Suatu bukti bahwa perkembangan kepariwisataan Bali menimbulkan suatu persepsi bahwa Bali tidak saja menjadi milik orang Bali, melainkan sudah menjadi milik dunia. Vickers (1989) (dalam Maunati, 2006:243) menyatakan bahwa Barat membangun citra Bali sebuah pulau surga. Menurut sejarah, Bali sering ditunjuk sebagai contoh keberhasilan industri pariwisata oleh pemerintah Indonesia, khususnya karena perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang-peluang lapangan kerja.

Menurut Spillane (2003:13--18) menjelaskan bahwa karakteristik kecenderungan pariwisata global didominasi oleh kaum tua yang dikenal sebagai pemburu kebudayaan (*cultural hounds*). Faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan perjalanan wisata terkait dengan kesenian, tempat bersejarah, dan kepurbakalaan (*archaeological*). Wiasatawan ini merupakan potensi bagi pengembangan dan perkembangan pariwisata. Mereka mempunyai dua unsur pokok, yaitu uang dan waktu. Hal yang sama juga diungkapkan Richard bahwa salah satu kecenderungan global adalah tumbuhnya kesadaran wisatawan untuk memahami pusaka budaya masa lalu. Hal itu dimaksudkan untuk mencari autentisitas dan identitas bagi wisatawan bersangkutan. Upaya memahami pusaka budaya masa lalu mendapatkan pujian sebagai "*exemplary case*" pariwisata yang berhasil, tidak saja dilakukan dalam wilayah negara sendiri, tetapi juga dilakukan secara lintas negara (Ardika, 2007:47). Pusaka budaya masa lalu dianggap sebagai modal (*cultural capital*) dalam pengembangan pariwisata budaya. Wisatawan senantiasa tertarik untuk mengetahui bagaimana orang lain dapat hidup dalam lingkungan berbeda dari lingkungan mereka sendiri. Wisatawan melakukan kontak atau hubungan dengan masyarakat lokal serta mengapresiasi adat-istiadat dan kesenian.

Kehadiran wisatawan mancanegara di Bali sudah mulai banyak jumlahnya sejak tahun 1920-an. Bali merupakan salah satu di antara tujuan wisata (DTW) yang berhasil dalam perolehan devisa dan kini dijadikan sebagai salah satu tumpuan utama pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah. Pada tahun yang sama Bali mulai dibanjiri oleh orang Eropa dan Amerika yang ingin

menyaksikan produk-produk budaya masyarakat Bali (Hindu) yang terkait erat dengan ritual keagamaan. Orang Bali melibatkan hampir semua bentuk seni dalam ritual dan adatnya sehingga menimbulkan berbagai macam budaya, seperti seni tari, musik gamelan, drama tradisionil, seni patung, seni kriya, seni dekorasi, dan seni lukis berjejalan memenuhi kehidupannya. Oleh karena itu, tak mengherankan apabila Bali sering dianggap sebagai "surga seni" (McPhee, 1996 ; dalam Soedarsono, 1999 : 118). Pariwisata Bali sebagai sebuah industri memiliki nilai ekonomi yang sangat dominan.

Sejalan dengan perkembangan kepariwisataan Bali, Pemerintah Daerah Bali mengembangkan industri pariwisata berdasarkan Perda No. 3/1974, berisi tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata Bali berdasarkan konsep pariwisata budaya. Kemudian dalam perjalanannya, Perda tersebut direvisi dengan Perda No.3/1991 tentang Pariwisata Budaya, yaitu Bali sebagai daerah tujuan wisata mengembangkan daerahnya berdasarkan visi pembangunan berwawasan budaya. Selain itu, setiap upaya industrialisasi pariwisata diharapkan berlandaskan kebudayaan Bali. Dengan demikian, pembangunan sektor pariwisata harus berlandaskan budaya Bali. Begitu pula pembangunan sektor-sektor lainnya di wilayah Bali berwawasan budaya Bali (Geriya,1989:45). Berkembangnya pariwisata Bali tidak terlepas dari komponen masyarakat, pelaku pariwisata (industri), pemerintah, akademi, dan pers. Sehingga masyarakat Bali sebagai pelaku budaya Bali memegang peranan penting di dalam mengembangkan kepariwisataan di Bali.

Budaya Bali menekankan pada suatu keseimbangan dan harmoni, yang merupakan potensi untuk dikembangkan sebagai modal dasar pengembangan kepariwisataan. Selain itu produk-produk pariwisata dikembangkan berdasarkan budaya Bali. Akhirnya, perkembangan kepariwisataan Bali dengan dinamikanya mengalami pasang surut disertai dengan berbagai kendala dan permasalahan. Nurjaya (2005:2-6) dalam tulisanya berjudul “Peranan Pariwisata dalam Penguatan Budaya Bali” memaparkan terjadinya perkembangan kepariwisataan dari masa ke masa.

Pada masa sebelum tahun 1920 wisatawan pertama yang mengunjungi Bali adalah Heer H. Van Kol, sorang anggota parlemen Belanda, yaitu pada 4 Juli 1902. Kol dianggap "wisatawan" karena kedatangannya ke Bali semata-mata untuk menghibur diri setelah

mengunjungi Sumatra dan Jawa. Sekembalinya ke Belanda Kol menulis buku *Uit Onze* Kolonien yang diterbitkan di Leiden pada tahun 1902. Buku ini banyak menyinggung keadaan Bali.

Masa berikutnya merupakan pengembangan pariwisata Bali mulai melembaga sekitar tahun 1920--1940 yang ditandai dengan mulai aktifnya perusaaan pelayanan KPM (*Koninklijk Paketvarrt Maatschapij)* pada awal dasa- warsa 1920-an mempropagandakan Bali sebagai daerah tujuan wisata. KPM membuka kantor di Singaraja pada tahun 1925. Pada masa ini dibangun Hotel Bali di Denpasar dan pesanggrahan di Kintamani. Belakangan datang Robert Koke dan Miss Manx yang lebih dikenal dengan nama Bali Ketut Tantri dari Amerika yang secara patungan kemudian membangun hotel di Pantai Kuta. Pada masa itu datang penulis dan seniman pelukis bernama Walter Spies yang menetap di Bali, Miguel Covarrobias yang menulis *Island of Bali*. Satu hal yang menjadi catatan penting pada masa itu adalah mulai dikirimnya rombongan kesenian pertama dari Peliatan Ubud keliling Eropa untuk mementaskan kesenian Bali di sana. Sejak saat itu nama Bali sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki budaya tinggi dan unik semakin dikenal di Eropa.

Masa-masa tahun 1940--1960, merupakan masa ketika terjadi Perang Dunia II (zaman pendudukan Jepang). Masa itu merupakan masa terganggunya pariwisata dan terhenti sejenak. Di samping karena masalah keamanan, masalah ekonomi juga sangat buruk sehingga perhatian berwisata berkurang. Keadaan juga tidak segera pulih karena berkecamuknya perang revolusi kemerdekaan Indonesia sampai akhir tahun 1949. Satu hal yang penting pada saat itu adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14/1947 tentang PB I. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20/1948. Sejak saat itu wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan menginap di hotel atau makan di restoran dikenai pajak. Pada tahun 1958 Dewan Tourisme Indonesia yang bekerja sama dengan biro perjalanan wisata Amexo dan Thomas Cook berhasil membawa 4.500 orang wisatawan, berangkat dengan menggunakan lima kapal pesiar yaitu, Stadendam, Kungsholm, Lurline, Caronia, dan Bergensjord.

Masa tahun 1960--1980 adalah merupakan pariwisata modern, yaitu pada tahun 1963 Presiden Soekarno membangun Hotel Bali Beach (sekarang Grand Bali Baach) di Sanur menggunakan dana pampasan perang Jepang. Pembangunan hotel Bali Beach ini merupakan tonggak awal pengembangan pariwisata di Bali pada

zaman kemerdekaan, yang ditangani oleh pemerintah. Hal ini kemudian diikuti dengan rahabilitasi bandara Ngurah Rai sampai selesai. Sejak saat itu Bali benar-benar terbuka untuk dunia. Pada masa ini pengembangan kepariwisataan Bali mulai dilaksanakan secara terencana dengan disusunnya rekomendasi pembangunan kepariwisataan Bali oleh SCETO pada tahun 1973.

Hasil studi SCETO merekomendasikan bahwa Bali memerlukan *tourist resort* yang terpisah dari masyarakat, tanahnya tidak produktif dan memiliki aksesibilitas. Untuk saat itu daerah yang paling cocok dikembangkan dan memenuhi kriteria yang diajukan SCETO adalah Nusa Dua. Workshop PATA 1974 yang diselenggarakan di Bali menjadi salah satu pilar pembangunan kembali pariwisata Bali karena dunia luar kembali percaya kepada potensi dan kemampuan Bali untuk berkembang sebagai daerah tujuan wisata dunia. Pada tahun 1974 diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3/1974 tentang Pariwisata Budaya. Selanjutnya Peraturan Daerah ini direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 3/1991.

Selanjutnya memasuki masa tahun 1980-an, yaitu antara tahun 1980--2000 merupakan masa keemasan kepariwisataan Bali. Kemajuan pariwisata yang sedemikian pesat telah banyak mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Bali. Seiring dengan perkembangan kemajuan pariwisata di Bali seiring itu pula pembangunan sarana dan prasarana berlangsung sangat cepat. Pariwisata menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Bali.

Berbicara tentang pariwisata dewasa ini, baik nasional maupun internasional, tidak bisa melepaskan diri dari membicarakan Bali. Pariwisata ternyata menjadi napas kehidupan masyarakat Bali dan masyarakat luar. Upaya memeratakan pendapatan perekornomian masyarakat Bali, dikeluarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 15/1988 tentang lima belas Kawasan Wisata. Untuk menarik wisatawan lebih banyak datang ke Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan bebas visa berkunjung singkat (selama dua hari) untuk beberapa negara. Pada masa ini kunjungan wisatawan yang datang ke Bali mengalami "*booming*". Upaya mengantisipasi perkembangan pariwisata yang hampir tidak terkendali maka diterbitkanlah UU No. 9/1991 tentang kepariwisataan. Peraturan Daerah No.3/199I diterbitkan sebagai penyempurnaan Perda No. 3 1974 tentang Pariwisata Budaya. Pada masa ini UNDP bekerja sama

dengan Konsultan Hassa and Assoc merivisi hasil studi konsultan SCETO.

Selain Nusa Dua, selanjutnya pengembangan pariwisata meluas di seluruh wilayah kabupaten di Bali dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Identitas Tanah Lot sebagai salah satu daerah Kabupaten Tabanan menjadi tujuan wisata di Bali terkenal di mancanegara patut dibanggakan. Hampir setiap hari para wisatawan beriringan berkunjung menikmati keindahan pesona yang dimiliki Tanah Lot. Terlebih saat hari libur sekolah, wisatawan domestik yang melaksanakan liburan ke Bali, wisata Tanah Lot merupakan salah satu agenda penting bagi mereka untuk dikunjungi. Pernyataan salah satu anggota rombongan wisata dari Surabaya bernama R. Syahari yang sudah tiga kali berturut-turut mengisi liburannya berwisata ke Bali justru termotivasi karena daya tarik wisata Tanah Lot. Dia mengungkapkan satu pernyataan tentang ketertarikannya terhadap Tanah Lot dengan pengakuan bahwa "keindahan Tanah Lot wah luar biasa, alami, dan belum pernah saya menemukan nuansa alam seperti ini di tempat lain". Oleh karena itu, dia sangat senang mengabadikan diri dengan suasana sekitar Pura Tanah Lot (Syahari, wawancara 2 Juni 2015). Salah satu kegiatan R. Syahari sebagaimana terlihat pada gambar 3.1

Para wisatawan sedang melakukan aktivitas foto-foto, Koleksi (Girinata, 2015)

Terkait dengan upaya memeratakan pendapatan perekornomian masyarakat Bali, dikeluarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 15/1988 tentang Lima Belas Kawasan Wisata yang isinya termasuk Tanah Lot, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
15 Kawasan Wisata di Bali

No	Kawasan	Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Daerah Tk.II
1	Nusa Dua	Kel. Benoa penuh, Kec. Kuta, Kab. Dati II Badung
2	Sanur	Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kab. Dati II Badung
3	Kuta	Desa Kerobokan, Desa Canggu, Desa Kuta, Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Dati II Badung
4	Jimbaran	Desa Tuban, Desa Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Dati II Badung
5	Ubud	Desa Ubud, Kedewatan, Peliatan, Petulu, Mas, dan Desa Lod Tunduh, Kec. Ubud, Kab. Dati II Gianyar.
6	Kintamani	Desa Sukawana, Kintamani, Batur Kaja, Batur Kelod, Batur Tengah, Kedisan, Abang, Songan, Trunyan, Desa Buahan, Kec. Kintamani, Kab. Dati II Bangli.
7	Nusa Penida	Kec. Nusa Penida, Kab. Dati II Klungkung.
8	Ujung Karangasem	Desa Tumbu, Kec. Karangasem, Kab. Dati II Karangasem.
9	Candidasa	Desa Bugbug, Nyuh Tebel, Ulakan, Desa Manggis, Kec. Karangasem, Kab. Dati

		IIKarangasem.
10	Kalibukbuk	Desa Pemaron, Tukad Mungga, Anturan, Kalibukbuk, Kaliasem, Tirtasari, dan Temukus, Kec. Banjar, dan Kab. Dati II Buleleng.
11	Teluk Terima	Desa Sumber Klampok, Pejarakan, Pulau Menjangan, Kec. Grokgak, Kab. Dati II Buleleng.
12	Gilimanuk	Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Dati II Jembrana.
13	Candikusuma	Desa Baluk, Tukadaya, Tuwed, dan Sangiang Cerik, Kec. Melaya, Kab. Dati II Jembrana.
14	Bedugul	Desa Candikuning, Pancasari, Munduk, Kec. Baturiti, Kec. Banjar, dan Kec. Sukasada, Kab. Dati II Tabanan dan Kab. Dati II Buleleng.
15	Tanah Lot	Desa Beraban dan Belalang, Kec. Kediri, Kab. Dati II Tabanan.

Sumber: Diolah dari SK Gubernur Nomor 15, Tahun 1988 tentang Lima Belas Kawasan Wisata di Bali
Keterangan: SK ini ditandatangani oleh Gubernur Ida Bagus Mantra pada 13 Januari 1988, sebelum Kota Denpasar menjadi bagian Kabupaten Badung.

Gagasan penetapan sejumlah kawasan itu dapat dikatakan sebagai cikal bakal terjadinya eksploitasi para pemodal pariwisata. Gagasan Ida Bagus Mantra saat itu yang bertujuan bahwa Bali memang harus dibuka untuk pariwisata. Namun, pihak-pihak pada masa kepemimpinan selanjutnya menyalahkan pancingan yang berupa gagasan itu disalahgunakan, sehingga memunculkan kaum kapitalisme yang saat itu dikendalikan oleh pusat semakin serakah ingin menanam modalnya di Bali. Buktinya ketika pemerintahan selanjutnya (Gubernur Ida Bagus Oka) membuat keputusan bahwa dari lima belas kawasan wisata sebelumnya dikembangkan lagi melalui

dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 528, Tahun 1993 tentang 21 Kawasan Pariwisata pada 6 Oktober 1993 sehingga ada penambahan lagi enam kawasan wisata. Selanjutnya keputusan itu diperdakan ke dalam Perda Nomor 4, Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Bali pada 2 Juli 1996 di Bali.

Belakangan Perda Nomor 4, Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Bali diamandemen oleh Perda Nomor 4 Tahun 1999 (*Kompas*, 23 Desember 2004). Perda ini menetapkan Tanah Lot bukan lagi sebagai kawasan wisata, melainkan objek (dan daya tarik) wisata seperti halnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 470, Tahun 1998 14 Juli 1988. Surat keputusan itu menetapkan Tanah Lot dan 23 tempat wisata lainnya di Kabupaten Tabanan sebagai objek dan daya tarik wisata (Tanah Lot tidak lagi menjadi kawasan wisata) yang sekaligus mencabut Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 31, Tahun 1988 sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
21 Kawasan Wisata di Bali

No	Kawasan	Desa/Kelurahan	Kab./Kodya
1	Nusa Dua	Benoa, Jimbaran, Tuban, Ungasan, Pecatu	Badung
2	Kuta	Kuta, Kerobokan, Canggu	Badung
3	Tuban	Kuta, Tuban	Badung
4	Sanur	Sanur Kaja, Sanur Kauh, Sanur, Serangan, Kesiman Petilan.	Denpasar
5	Ubud	Ubud, Kedewatan, Peliatan, Mas, Petulu, Lod Tunduh, Sayan, Singakerta, Melinggih Kaja, Malinggih Kelod, Puhu, Keliki	Gianyar
6	Pantai Lebih	Candraarti, Ketewel, Sukawati, Saba, Pering,	Gianyar

		Keramas, Lebih, Siut (Tulikup)	
7	Tanah Lot	Beraban, Belalang, Pangkung Tibah, Pandak Gede, Sudimara	Tabanan
8	Pantai Soka	Lalanglinggah, Antap, Beraban, Tegalmengkeb, Kelating, Tibubiu	Tabanan
9	Bedugul/ Pancasari	Dusun Taman Tanda (Batunye), dan Candikuning.	Tabanan
10	Air Sanih	Bukti, Pancasari, Wanagiri, Munduk, Gesing, Gobleg, Umejero	Buleleng
11	Kalibukbuk	Kalibukbuk, Pemaron, Tukad Mungga, Anturan, Kaliasem, Temukus, Tigawasa	Buleleng
12	Batuampar	Penyambangan, Banyupoh, Pamuteran, Sumberkimo, Pejarakan	Buleleng
13	Gilimanuk	Gilimanuk	Jembrana
14	Candikusuma	Baluk, Banyubiru, Tukadaya, Tuwed, Melaya	Jembrana
15	Palasari	Belimbing, Ekasari	Jembrana
16	Perancak	Perancak, Air Kuning, Yeh Kuning, Penyaringan, Delod Berawah, Yeh Embang, Yeh Embang Kangin, Yeh Sumbul, Medewi, Pulukan	Jembrana
17	Kintamani	Sukawana, Kintamani, Batur Kaja, Batur Kelod, Batur	Bangli

		Tengah, Kedisan, Abang, Songan A, Songan B, Trunyan, Buahan	
18	Nusa Penida	Suana, Batununggul, Kutampi, Ped, Toyapakeh, Sakti, Lembongan, Jungutbatu	Klungkung
19	Candidasa	Padangbai, Ulakan, Manggis, Nyuh Tebel, Bugbug, Pratima, Subagan	Karangasem
20	Ujung	Tumbu, Seraya Barat	Karangasem
21	Tulamben	Tulamben, Datah, Purwakerti, Bunutan	Karangasem

Sumber: SK Gubernur No. 528, Th.1993 tentang
21 Kawasan Wisata di Bali

Penjelasan tabel di atas menunjukkan terjadinya penyebaran kawasan wisata cukup luas melalui proses yang tak terkendali. Dengan demikian, konsekuensinya diikuti dengan kebutuhan lahan yang cukup luas.

Masa tahun 2000 – sekarang, merupakan masa keindahan kepariwisataan Bali karena setelah krisis tahun 1997--1998 banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali. Bahkan, tahun 2000 dianggap sebagai jumlah kunjungan wisatawan tertinggi. Namun, citra Bali yang telah berkembang dengan baik tiba-tiba saja hancur dalam hitungan detik. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa Bom di Bali pada 12 Oktober 2002 yang meluluhlantakkan Legian, Kuta. Peristiwa yang memilukan itu kini disebut "Tragedi Bom Bali 1". Peristiwa yang sama juga terjadi 12 September 2005, yang dinamai "Tragedi Bom Bali II". Peristiwa ini membuat kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis. Namun, di balik kejadian itu Bali menjadi sorotan dunia dan tentu yang belum tahu Bali berkeinginan untuk datang secara langsung. Berkat pencitraan positif terhadap situasi Bali, tahun 2008 ada tanda-tanda Bali kembali bangkit dalam bidang kepariwisataan.

Uraian di atas memberikan gambaran sekilas tentang perkembangan kepariwisataan Bali dengan berbagai fenomena permasalahan yang dihadapi. Pasang surut pariwisata memengaruhi tingkat kunjungan ke objek wisata dan daya tarik budaya. Dengan demikian, faktor keamanan sangat besar pengaruhnya terhadap arus kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata

Tanah Lot dalam Perkembangan Pariwisata

Identitas Tanah Lot sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bali terkenal di mancanegara patut dibanggakan. Hampir setiap hari para wisatawan menyemut berkunjung menikmati keindahan pesona yang dimiliki Tanah Lot. Terlebih saat hari libur sekolah, wisatawan domestik yang melaksanakan liburan ke Bali, Tanah Lot merupakan salah satu agenda penting bagi mereka untuk dikunjungi. Pernyataan salah seorang anggota rombongan wisata dari Surabaya yang sudah tiga kali berturut-turut mengisi liburannya berwisata ke Bali justru termotivasi karena Tanah Lot. Dia seolah tak sanggup mengungkapkan satu pernyataan tentang ketertarikannya terhadap Tanah Lot. Dia hanya menyatakan "keindahan Tanah Lot wah luar biasa, alami, dan belum pernah saya menemukan nuansa alam seperti ini di tempat lain" (Klara, wawancara 5 Juni 2015). Salah satu potret rombongan wisatawan yang berkunjung ke Tanah Lot terlihat pada gambar 5.2 berikut.

Wisatawan sedang melihat cendera mata di kios
(koleksi Girinata, 2015)

Pesatnya wisatawan datang ke Tanah Lot merupakan kebanggaan bagi Desa *Pakraman* Beraban khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tabanan karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi tak terhindarkan dari berbagai bentuk wacana, baik di bidang sistem pengelolaan, ketenaga kerjaan, perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung, maupun pendapatan yang dihasilkan. Hampir tak ada yang pernah mencoba merenungkan mengapa Tanah Lot bisa berkembang seperti sekarang ini atau mencari tahu siapa sebenarnya tonggak awal yang menjadikan Tanah Lot bisa terkenal di dunia pariwisata. Selanjutnya berinisiatif memberikan sekadar tanda penghargaan agar dikenang oleh generasi selanjutnya.

Upaya untuk mendapatkan data tentang siapa tokoh pertama yang mempromosikan dan sejak kapan Tanah Lot mulai dikunjungi oleh para wisatawan tidaklah mudah. Namun, yang pasti bermula dari proses sejarah perkembangan wisata Pulau Bali secara umum sekalipun masih terjadi kesimpangsiuran pendapat di antara para pakar. Beberapa pakar pariwisata mengasumsikan ada beberapa faktor sebagai modal yang menarik para wisatawan berkunjung ke Bali sebagaimana terangkum dalam *Buku Ajeg Bali* yang diterbitkan Bali Post pada kutipan berikut.

> Ardika, berpendapat bahwa daya tarik utama pariwisata Bali bersumber pada keunikan budaya dan adat istiadatnya. Kehidupan dan gaya hidup orang Bali yang religius dan unik membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung, di samping memang ditunjang oleh adanya keindahan alam. Di pihak lain menurut Kompiang, pariwisata Bali adalah pariwisata agama, budaya, dan kerakyatan. Konsep pariwisata inilah yang menyebabkan Bali dapat diterima oleh dunia sebagai bagiannya, bukan lagi hanya merupakan bagian dari kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kompiang, tidak hanya memerlukan promosi ke berbagai negara atau ke luar, tetapi juga harus melakukan perbaikan ke dalam. Untuk itu jati diri manusia Bali harus diperkuat. Hal yang sama diungkapkan Sukadana, yang didapat dari pernyataan wisatawan sewaktu menjadi *guide* bahwa para tamu wisatawan tertarik berkunjung ke Bali karena keunikan gaya hidup yang dimiliki masyarakatnya. Meskipun tidak menolak adanya

> perkembangan untuk memperlengkap infrastruktur pariwisata. Namun, menurutnya harus sesuai dengan koridor yang berwawasan budaya. Sementara itu Pitana (saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata periode 2004) menjelaskan pandangannya tentang konsep *ajeg* Bali sebagai sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan. Budaya Bali menurutnya identik dengan pertanian atau dengan kata lain *agrarian based culture*. Jadi, ia menilai bila pertanian maupun petani Bali habis, otomatis akan mematikan pariwisatanya. Pandangan yang tegas juga terucap dari Dharmadi ketika menjabat sebagai *General Manager* Inna Putri Bali bahwa pariwisata budaya mengandung pembatasan yang tegas. Artinya, segala sesuatu yang bertentangan, merusak, maupun memerosotkan nilai-nilai budaya yang luhur harus secara tegas dilarang (*Bali Post*, 2004:50--54).

Pendapat beberapa pakar di atas menunjukkan adanya suatu kepedulian terhadap Pulau Bali. Mereka dengan antusias mengembangkan Bali sebagai daerah tujuan wisata. Namun, budaya yang menunjukkan karakteristik masyarakat Bali utamanya bidang pertanian tidak sampai hilang dikorbankan untuk pelayanan pariwisata.

Pada tahun 1970-an Tanah Lot tidak tampil asri seperti sekarang ini karena jauh dari sentuhan promosi sehingga tidak dikenal oleh para wisatawan. Saat itu tujuan wisatawan hanya sampai di Ubud dan Pantai Sanur. Saat itu Tanah Lot sama sekali tak muncul sebagai daerah tujuan wisata. Sebagai warga masyarakat Kabupaten Tabanan yang memiliki predikat lumbung beras, penduduk Desa Beraban di tempat keberadaan Tanah Lot, sudah pasti sebagian besar sumber penghidupan masyarakat bertumpu pada pengolahan lahan pertanian. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu sampai sekarang, perkembangan wisata Tanah Lot semakin pesat dan dikelola dengan mekanisme yang tertsruktur. Menurut penuturan salah seorang tokoh warga Desa Pakraman Beraban yang bernama Pan Arsa bahwa dulu ada seseorang bernama Putu Pager berasal dari Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan memiliki keterampilan melukis. Ketika sudah mulai ada wisatawan yang berkunjung ke Tanah Lot, Pager dengan dibantu dua orang warga Desa Beraban bernama I Gusti Nyoman Nodyo dan Nyoman Teher menyusun

program dalam mempromosikan Tanah Lot sebagai tujuan wisata agar mendapat dukungan dari masyarakat. Saat itu berapa pemasukan dana dari hasil retribusi wisatawan dan ke mana distribusinya belum ada transparansinya kepada masyarakat Desa Beraban. Pada saat itu masyarakat juga belum antusias penuh dalam merespons wisata yang menjanjikan dapat meningkatkan taraf hidup. Profesi mengolah tanah pertanian masih menjadi pekerjaan pokok untuk menunjang segala kebutuhan hidup mereka (Arsa, wawancara 19 Mei 2015).

Penjelasan Pan Arsa di atas, ternyata identik dengan pernyataan Mudana (2005:287--290) dalam hasil penelitiannya bahwa Putu Pager sesungguhnya seorang berpribadi polos, bisa melukis, dan mempunyai profesi bidang pariwisata. Bukti karyanya adalah pada tahun 1970-an berhasil menjadikan Desa Sanur sebagai daerah yang ramai dikunjungi wisatawan. Pucuk pimpinan pemerintahan Kabupaten Tabanan saat itu dipegang oleh Stat Dharmanaba secara kebetulan bertemu dengan Putu Pager di sebuah Restaurant Beach Market. Karena Putu Pager diketahui berhasil mengembangkan Desa Sanur sebagai daerah tujuan wisata, akhirnya diminta oleh Stat Dharmanaba untuk ikut membantu mengembangkan objek dan daya tarik wisata Tanah Lot yang saat itu sudah mulai dikunjungi para wisatawan menjadi semakin berkembang. Dengan demikian, pemasukan pariwisata Tanah Lot bisa dinikmati oleh masyarakat melalui pengembangan profesinya masing-masing.

Karena kepeduliannya terhadap daerah Kabupaten Tabanan, akhirnya Putu Pager menyanggupi sekaligus sebagai koordinator dibantu dua orang warga Desa Beraban bernama I Gusti Nyoman Nodyo dan Nyoman Teher. Atas dasar ketekunannya, Putu Pager berhasil membangkitkan Tanah Lot menjadi daerah tujuan wisata terkenal dan kedatangan tamu wisata semakin meningkat. Dalam mengembangkan Tanah Lot sebagai tujuan wisata, Putu Pager tetap berpegang teguh menjaga kelestarian budaya dan pertanian. Selain penampilan Tanah Lot, aktivitas pertanian justru sebagai modal yang dijual untuk para wisatawan di tempat-tempat lain di Kabupaten Tabanan. Salah satu di antaranya adalah Desa Jatiluwih.

Tidak dalam kurun waktu terlalu lama, akselerasi perkembangan wisata Tanah Lot mengalami gerakan jauh ke depan dengan menunjukkan tanda-tanda dinamika kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Beraban mengalami percepatan yang signifikan. Dibandingkan dengan sebelum Tanah Lot berkembang sebagai daerah

tujuan wisata, mengolah tanah pertanian merupakan sumber kehidupan penduduk Desa Beraban. Saat itu tidak selamanya penduduk dapat memanfaatkan lahan pertaniannya untuk menanam padi karena sulitnya mendapatkan air. Jika mendapatkan air, setelah tanaman padi tumbuh diganggu oleh hama tanaman padi. Salah satu upaya cukup berat juga telah dilakukan agar pengolahan lahan pertanian bisa berjalan lancar, yaitu bergotong royong membuat terowongan sepanjang tujuh km, sebagaimana keterangan salah seorang warga yang saat itu sebagai prakarsa membuat terowongan berikut ini.

> *Dugase dumun Pak (pernyataannya kepada peneliti), ajak nyama brayan tiyange keweh pesan ken ajengan. Wenten carik sakewala toya ten wenten, diprade ne nyidayang nanem padi disubane masaning-masa serange ajak merane ne. Yadyastun keto tiyang ajak makejang ten je suud-suud nanem padi santukan ajengan pokok tyange tuwah nasi. Lantas ajak tyang para petani makejang gotong-royong ngae terowongan medawa 7 km. Dugase nika ajak makejang megarapan ngandelang lima dogen. Disubane pragat, toyane sube masih mejalan, nanging ten masih nyidayang carike pepek maan yeh. Duwaning mule minab pituduh Widhi, dugase pidan saje keweh pesan ngalih ajengan, nanging mangkin masekat rame tamyu ne melali meriki, jeg nincap pesan kehidupan nyama brayan tityang. Ten je ade nyaman tyange ngoyong driki, sami ngelah geginan tur akehan mekarya ring objek wisata teken di hotel BNR. Akeh masih nyaman tyange ane ngelah tongos medagang drika. Jeg demen masyarakat tyange mangkin kasekat rame tamyune melali meriki, sakewala ngancan medikan ane ajak tyang megae di carik. Cerik-cerike ten ade jani bisa megae carik malah lyu ane ngadep carik* (Wetra, wawancara 21 Mei 2015).

Pesatnya pengembangan Tanah Lot menjadi destinasi pariwisata terkenal seperti sekarang, tentu melalui suatu proses. Destinasi Tanah Lot merupakan salah satu aset potensial dalam membantu pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga proses perkembangannya juga merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintahan Kabupaten Tabanan. Sehingga, untuk mendapatkan data tentang pengembangan pariwisata Tanah Lot tidak bisa lepas dari

fase-fase kepemimpinan yang pernah menjadi pemimpin pemerintahan daerah Bali. Karena masalah kepariwisataan terutama tentang pengembangannya secara yuridis merupakan legalitas dari pemerintah. Tiap-tiap pemimpin dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi berbeda yang dituangkan dalam bentuk program-program untuk menggali pendapatan dan membangun wilayahnya. Untuk pemerintahan daerah Bali, pembangunan yang dinilai paling potensial sampai saat sekarang adalah di bidang pariwisata. Seluruh wilayah kabupaten di Bali menjadi destinasi pariwisata, namun hanya beberapa mengalami pengembangan yang pesat salah satu di antaranya, adalah Tanah Lot. Pengembangan destinasi Tanah Lot yang didukung dengan fasilitas pembangunan pelayanan jasa wisata banyak memanfaatkan lahan pertanian yang pruduktif, dan melanggar ketentuan batas yang ditetapkan PHDI dan aturan Desa Pakraman Beraban merupakan tempat keberadaan Tanah Lot. Sehingga, untuk mendapat pandangan tentang proses pengembangan pariwisata Tanah Lot, juga dapat dilihat dari fase-fase kepemimpinan pulau Bali yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bali setelah Negara Republik Indonesia meraih kemerdekaan. Dalam sejarah pemerintahan Provinsi Bali sampai saat sekarang pernah dipimpin oleh sebelas Gubernur sebagaimana tertera pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Jumlah Gubernur Bali yang Pernah Menjabat

NO	GUBERNUR	MASA PEMERINTAHAN (Tahun)	KETERANGAN (Pemimpin Presiden)
1	Anak Agung Nyoman Pandji Tisna	1946-1947	Presiden Ir. Soekarno
2	Anak Agung Gde Oka	1947-1950	Ir. Soekarno
3	Anak Bagus Sutedja	1950-1958	Ir. Soekarno

4	I Gusti Bagus Oka	1958-1959	Ir. Soekarno
5	Anak Bagus Sutedja (terpilih kembali)	1959-1965	Ir. Soekarno
6	I Gusti Putu Merta	1965-1967	Ir. Soekarno
7	Kolonel Inf. Soekarmen	1967-1971, 1971-1978	Presiden Soeharto Pemimpin Orde Baru
8	Prof. Dr. Ida Bagus Mantra	1978-1983, 1983-1988	Presiden Soeharto
9	Prof.dr. Ida Bagus Oka	1988-1993, 1993-1998	Presiden Soeharto
10	Drs. Dewa Made Beratha	1998-2003, 2003-2008	Orde Reformasi: - B.J Habibie - Abdurahman Wahid - Megawati Soekarnoputri - Susilo Bambang Yudhoyono
11	Made Mangku Pastika	2008-2013, 2013-2018	- Susilo Bambang Yudhoyono - Joko Widodo

Tabel: 5.3: Nama-nama Gubernur Bali sejak tahun 1946-2016.

Data kepemimpinan (gubernur) pada tabel di atas, yang pernah pemimpin Provinsi di Bali merupakan hal penting untuk mengetahui perkembangan pariwisata Bali hingga sampai pada pengembangannya di Tanah Lot (Desa Beraban Tabanan).

Di tahun 1920-1940, perkembangan pariwisata Bali mulai melembaga, yang saat itu kedatangan wisatawan dari negara Amerika pada tahun 1925 bernama Robert Koke dan Miss Manx yang dikenal dengan Beli Ketut Tantri. Pada tahun inilah mulai dibangunnya beberapa fasilitas seperti Hotel Bali di Denpasar, dan Hotel di Kuta. Perkembangan pariwisata selanjutnya mengalami pasang surut antara tahun 1940-1960. Perkembangan pariwisata modern terjadi antara tahun 1960-1980-an pada masa kepemimpinan Gubernur Ida Bagus Mantra, Bali baru terbuka untuk dunia dengan pengembangan pariwisata dilaksanakan secara terencana dan disusunnya rekomendasi pembangunan pariwisata Bali oleh SCETO.

Masa keemasan pariwisata Bali antara tahun 1980-2000 yang puncaknya pada kepemimpinan Prof. dr. Ida Bagus Oka sebagai perpanjangan dari partai penguasa Orde Baru yang sarat dengan gaya kepemimpinan otoriter. Pada saat itulah dikeuarkannya SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali No.15/1988 tentng 15 kawasan wisata di seluruh wilayah Bali dengan mengutamakan pariwisata budaya. Salah satunya dipandang potensial untuk Kabupaten Tabanan adalah Tanah Lot.

Tanah Lot sebagai daerah tujuan wisata (DTW) dimulai pada waktu Bupati Tabanan dijabat oleh Soegianto tahun 1980. Soegianto mengharapkan agar DTW yang ada di Kabupaten Tabanan dapt mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD). Ketika itu dari pihak perusahaan swasta CV. Ary Jasa Wisata yang dipimpin I Gusti Gede Ayadi mempunyai tujuan yang sama untuk mengembangkan Tanah Lot sebagai ikon atraksi wisata.

Terbatasnya anggaran yang ada saat itu tidak mampu membangun fasilitas penunjang pariwisata dan penataan Pura Tanah Lot sebagai ikon wisata sehingga pengembangan pariwisata hanya terbatas pada areal pantai saja. Perkembangan awal dari hasil pendapatan pengelolaan wisata Tanah Lot hanya mampu dipergunakan untuk membangun jalan setapak menuju Pura Tanah Lot dan pengadaan dua buah toilet. Namun upaya pihak swasta tak urung upayanya untuk mencari bantuan sehingga pada tahun 1984 bantuan pertama diberikan oleh Gubernur Bali (Prof. Dr. Ida Bagus Mantra

sebesar 32,5 juta rupiah yang peruntukannya untuk pemugaran Pura Tanah Lot. Saat itu pula atas perantara Menteri Pariwisata dan Kebudayaan (Prof.Dr. Fuad Hasan) menjalin hubungan dengan duta besar Jerman Barat, Mr.Walow juga memberikan sumbangan pemugaran Pura Tanah Lot sebesar 55 juta rupiah (Krisna Arta Widani, 2015: 53). Nampaknya pihak swasta memiliki pemikiran yang serius dalam meningkatkan potensi Pura Tanah Lot sebagai DTW sehingga selalu berusaha mencarikan bantuan dana demi peningkatan tersedianya pelayanan kepada wisatawan. Selanjutnya lagi mengajukan bantuan kepada Gubernur Bali dan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan tempat parkir seluas 2 hektar dan membuatkan bangunan pasar seni untuk menampung para pedagang keliling yang saat itu berkeliaran di areal DTW Tanah Lot. Bantuan itu akhirnya keluar pada tahun 1989 sehingga pembangunan pasar seni dan parkir bisa terwujud.

Seiring dengan berjalannya waktu DTW Tanah Lot terus mengalami peningkatan , namun di balik peningkatan itu juga muncul riak-riak permasalahan yang kompleksitas sampai munculnya pengelolaan oleh tiga pihak dan terakhir dikelola oleh dua pihak. Pengembangan pariwisata ke Tanah Lot sampai sekarang memberikan angin segar dan disambut baik oleh masyarakat Desa *Pakraman* Beraban. Hal itu terjadi karena telah mampu mengubah tatanan dan pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil pertanian. Sekarang pariwisata Tanah Lot merupakan bagian dari kehidupan masyarakat serta sumber pendapatan bagi Desa *Pakraman* Beraban dan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

B. Daya Tarik Kawasan Suci Pura Tanah Lot sebagai Objek Wisata

Kata“kawasan” (bahasa jawa kuno) disebut *kawaśan* yang berarti daerah (*waśa*). Sedangkan menurut bahasa Sansekerta kawasan berarti "memerintah") yaitu, daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu seperti, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi. Sehingga, istilah kawasan jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata, adalah daerah dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata dan memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (Nurhayati, 2008:11).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26, Tahun 2007 tetang penataan ruang, meperjelas arti kawasan pariwisata dengan membagi atas dua bentuk yaitu, (1) Kawasan pariwisata murni, yaitu suatu areal yang secara khusus disediakan untuk menampung berbagai kegiatan pariwisata, dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang untuk memudahkan bagi kegiatan pariwisata, dimana pengelolaannya ditangani oleh suatu badan baik pemerintah maupun swasta atau kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. (2) Kawasan pariwisata terbuka, yaitu kawasan yang bobotnya digunakan untuk pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata tersebut, kegiatan lainnya dari masyarakat umum seperti pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya masih terbuka, yang diatur dan ditata agar mendukung pengembangan pariwisata.

Sedangkan kata "objek wisata", adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut SK. MENPARPOSTEL No. KM. 98/PW.102 / MPPT-87 mengartikan, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik, dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Objek wisata dapat berupa wisata alam seperti, gunung, danau, sungai, pantai, laut, dan berupa objek bangunan seperti, museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan yang lainnya. Suatu tempat/daerah agar dapat dikatakan sebagai objek wisata, harus memenuhi hal pokok berikut.

1. Adanya *something to see*, adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat.
2. Adanya *something to buy*, adalah sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli.
3. Adanya *something to do*, adalah sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

Umumnya, di beberapa daerah atau negara untuk memasuki suatu objek wisata, setiap wisatawan diwajibkan untuk membayar biaya atau karcis masuk yang merupakan biaya retribusi untuk pengemabangan dan peningkatan kualitas objek wisata. Beberapa objek wisata ada yang dikelola oleh pemerintah, dan ada pula yang dikelola oleh pihak swasta. Objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta dapat berupa, objek wisata alami, dan objek wisata buatan.

Pengertian tentang kawasan wisata dan objek wisata seperti uraian dia tas, bahwa Tanah Lot dapat diartikan sebagai daerah dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata dan memiliki fungsi utama lindung atau budi daya, dan juga dapat dimaknai sebagai objek wisata. Tanah Lot merupakan salah satu sumber alam yang memiliki sumber daya wisata, menarik untuk dilihat dengan kekhasannya, sehingga di dalamnya terjadi berbagai aktivitas kepariwisataan.

Leiper (dalam Pitana 2005:101) menjelaskan bahwa daya tarik destinasi wisata merupakan interaksi dari berbagai elemen. Bali memiliki beberapa daerah tujuan wisata terkenal, seperti Pantai Kuta, Nuda Dua, Sanur, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Ubud, Pura Besakih, Pura Tanah Lot, dan beberapa tempat lainnya. Setiap objek tidak memiliki elemen yang sama sebagai daya tarik wisata, tetapi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Ardika (2007: 75) bahwa kepariwisataan di daerah Bali bertumpu pada budaya dan keindahan alam. Pada kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai destinasi pariwisata terkenal, juga disebabkan oleh unsur budaya, keindahan alam, ddi samping juga karena elemen elemen lain, seperti kemagisan Pura Tanah Lot dan kawasan sucinya, juga disebabkan oleh beberapa ritual yang ada.

Budaya dan Keindahan Alam Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Bali merupakan pulau kecil, tetapi menyimpan potensi budaya dan keindahan alam yang didukung religiusitas masyarakatnya dan mampu membius wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, untuk datang menikmati potensi yang adiluhung. Peradaban masyarakat Bali mengimplentasikan sistem kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari mengutamakan keseimbangan atau keselarasan di tengah perbedaan-perbedaan sehingga menjadikan segala sesuatu yang ada pada lingkungan di mana mereka berada mempunyai nilai. Dalam perkembangan selanjutnya segala potensi peninggalan masa lalu, sekarang masih menjadi daya tarik wisatawan dan dapat diajadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat dalam dunia pariwisata. Salah satu di antaranya adalah Pura Tanah Lot. Selain kemagisannya, ada dua sumber utama dari wisata kawasan suci Pura Tanah Lot juga sebagai daya tarik wisatawan.

Ardika (2006:78) menegaskan bahwa berkembangnya Bali sebagai daerah tujuan wisata mengimplikasikan komponen budaya

Bali telah diproduksi dijadikan komoditas untuk dikonsumsi oleh para wisatawan sehingga menimbulkan kesan komersialisasi dan mungkin saja terjadi penurunan kualitas budaya Bali dalam tatanan holistik. Di pihak lain, masyarakat dan pemerintah daerah Bali tampak semakin gencar melakukan pembinaan-pembinaan, mengembangkan kebudayaan yang ada, dan dimanfaatkan sebagai tempat berlomba ketika melaksanakan kegiatan berskala besar dengan kemasan baru demi sebuah identitas. Untuk menyeimbangkan dan menghilangkan kesan terjadinya penurunan kualitas budaya Bali, maka diperlukan antisipasi semua pihak, terutama kalangan masyarakat dan pemerintah daerah Bali agar budaya Bali dengan berbagai komponennya masih menjadi bagian budaya Bali yang statis dan dinamis.

Menurut Pitana (2008:204), dalam majalah *Travel and Leisure Pariwisata,* Bali dalam konteks pariwisata dunia dipandang masih mempunyai "*taksu*" yang cukup baik dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lainnya di dunia. Terbukti dari cukup seringnya Bali mendapatkan berbagai penghargaan secara internasional, mengalahkan Hawaii, Canary Islands, Phuket, dan lain-lain. Pada tahun 2001--2004 empat kali secara berturut-turut Bali mendapatkan predikat sebagai "daerah tujuan wisata pulau terbaik" di dunia. Pitana juga mengatakan bahwa dalam berbagai kajian tentang pariwisata Bali dengan pariwisata budayanya selalu mendapatkan pujian sebagai "*exemplary case*" pariwisata yang berhasil, dalam membangun pariwisata dalam aspek ekonomi, dan dalam melestarikan kebudayaan. Sebagai bukti bahwa Bali memang sebagai daerah tujuan wisata sangat menarik untuk dikunjugi para wisatawan, yaitu ketika terjadinya tragedi Bom Bali I (tahun 2002) dan Bom Bali II (tahun 2005), ternyata tidak mengurungkan niat para wisatawan, baik internasional maupun domestik, berwisata ke Bali.

Vickers (dalam Maunati, 2006:243) menyatakan bahwa sekitar tahun 1920-an Bali mulai dibanjiri oleh orang Eropa dan Amerika yang ingin menyaksikan produk-produk budaya masyarakat Bali (Hindu) yang terkait erat dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, orang Bali akhirnya melibatkan hampir semua bentuk budaya, ritual, tempat suci (pura), serta adatnya, seperti tari, musik gamelan, drama tradisional, seni patung, seni dekorasi, seni lukis berjejalan memenuhi kehidupannya (McPhee, 1996 dalam Soedarsono, 1999:118).

Dwyer dan Forsyth (1996) berpendapat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara pariwisata dan lingkungan. Lingkungan

mencakup tiga jenis sumber daya, yaitu (1) *natural resources,* seperti gunung, pantai, wilayah yang masih liar, hutan, gurun, laut, danau, flora dan fauna, ilkim, sinar matahari, temperatur, dan sebagainya; (2) *man-made resources*, seperti kota historis dan modern, kota dan desa, hiburan, campuran antara rekreasi dan olahraga, monumen, situs, bangunan dan relief, museum, dan sebagainya; dan (3) *human resources* menyangkut populasi penduduk suatu tempat tujuan, asosiasi, nilai, identitas, aktivitas seni dan budaya mereka.

Berdasarkan pendapat Dwyer dan Forsyth tersebut, diketahui bahwa posisi dan bentuk pura kawasan suci Pura Tanah Lot tampak merupakan *man-made resources* (sumber daya buatan) atau salah satu unsur budaya. di samping itu, juga meliputi laut dan pantai. Kawasan tersebut juga merupakan *natural resources* (sumber daya manusiawi) bila berbagai aktivitas atau praktik budaya yang terkait dengan pura Tanah Lot ikut dipertimbangkan. Di kawasan suci Pura Tanah Lot secara reguler dapat digelar acara kesenian, seperti tarian-tarian tradisional semacam tari kecak. Hal itu dipadukan dengan adanya tambahan campur tangan kekuatan adikodrati yang magis, metafisis, dan mitos-mitos tentang cerita-cerita lokal yang mengandung kesakralan dan kesucian Pura Tanah Lot. Kawasan suci Pura Tanah Lot juga merupakan *human resources* karena sesuai dengan catatan monografi Desa Beraban sesungguhnya penopang kehidupan penduduknya masih memprioritaskan bidang pertanian. Oleh karena itu, dahulu sebelum mengalami perkembangan pesat seperti sekarang, di kawasan suci hanya terbentang sawah yang luas melengkapi nuansa indahnya panorama dan vibrasi kesucian Pura Tanah Lot.

Hal tersebut merupakan salah satu bukti kepariwisataan budaya Bali memiliki beraneka ragam produk wisata, baik *man-made resources* (sumber daya buatan), *natural resources* (sumber daya manusiawi), maupun *human resources*. Selain itu, juga terdapat atraksi alam serta berbagai sarana, prasarana kepariwisataan beserta infrastuktur pendukungnya.

Modal utama DTW Pura Tanah Lot adalah tempat suci (pura) dan keindahan alamnya. Potensi yang menarik wisatawan untuk datang ke Tanah Lot karena Pura Tanah Lot berupa bangunan fisik yang tua dan kokoh merupakan faktor utama sebagai promotor pergerakan wisatawan untuk melihat secara langsung. Pura Tanah Lot memiliki nilai sejarah sangat tinggi dari warisan budaya. Adanya *event* atau upacara *odalan* yang berlangsung dua kali setahun

memberikan kontribusi daya tarik wisatawan untuk melihat prosesi keagamaan dan kebudayaan yang ada di Bali khususnya di Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Daya tarik pendukung bahwa di kawasan suci Pura Tanah Lot juga digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam skala besar, seperti lomba layang-layang, bahkan di sebelah barat tak jauh dari Pura Tanah Lot tiap tahun diadakan lomba *balap motocross*. Di samping itu, juga digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam skala besar, seperti pegelaran Tari Cak Lima Ribu yang dipentaskan oleh Bupati Tabanan pada 29 September 2006.

Menurut Ni Putu Sri Ratnawati, Kepala Bidang Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan, pegelaran Tari Cak Lima Ribu dilakukan untuk membangkitkan potensi seni budaya masyarakat yang kini sudah semakin surut. Tujuan lain dengan dilaksanakannya di lokasi pariwisata kawasan suci Pura Tanah Lot merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Tabanan di bidang kepariwisataan untuk mempromosikan wisata Tanah Lot agar semakin dikenal di mancanegara (wawancara, 9 Juli 2015). Kegiatan-kegiatan seperti ini memberikan peluang, baik bagi para peserta maupun penonton, dari luar Bali menyempatkan diri mengisi waktu luangnya berkunjung ke wisata Pura Tanah Lot.

Terkait dengan keindahan kawasan Tanah Lot sebelum perkembangan dan pengembangan pariwisata seperti saat ini adalah sebuah wilayah yang tidak terkenal (populer) karena kepariwisataannya, tetapi sekadar dikenal di sekitarnya karena keindahan dan kesuciannya. Kenyataannya memang estetika daya tarik wisata Tanah Lot sulit dicari bandingannya dengan objek dan daya tarik wisata lainnya di mana pun di dunia. Sebelum dikenal sebagai objek dan daya tarik wisata populer, pura ini sangat populer, terutama di kalangan umat Hindu di Bali sebagai pura *dang kahyangan.* Sebelum mengalami perkembangan pesat seperti sekarang ini keindahan secara alami kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai daerah pertanian padi yang tergolong sangat subur dan menjadi salah satu pendukung penting bagi pencapaian Kabupaten Tabanan menjadi "kabupaten lumbung beras" di Bali. Oleh karena itu, pesona keindahan disertai kemagisan Pura Tanah Lot menyebabkan daya tarik bagi setiap orang yang pernah mengunjunginya.

Pitana (2005:101) menjelaskan bahwa daya tarik destinasi wisata merupakan interaksi dari berbagai elemen, seperti budaya, pertanian, religiusitas, wilayah, keindahan alam, dan sebagainya. Wilayah sebagai salah satu elemen merupakan tumpuan dalam mengidentifikasi daya tarik terhadap kawasan suci Pura Tanah Lot. Hal itu sejalan dengan pendapat Ardika (2007: 75) yang menjelaskan bahwa selain budaya, kepariwisataan Bali juga bertumpu pada keindahan alamnya.

Keindahan pemandangan alam yang dimiliki oleh ruang kawasan suci Pura Tanah Lot menjadi daya tarik wisata berupa berdirinya sebuah bangunan suci pura di atas batu karang disertai tumbuhan perdu di tengah laut lepas. Di sepanjang pinggiran pantai kawasan Pura Tanah Lot dihiasi tebing batu karang dengan lekak-lekuk yang sangat indah. Di bagian sebelah barat yang jaraknya sangat dekat dengan Pura Tanah Lot terdapat bangunan suci pura juga di atas batu karang dengan lubang di tengah-tengahnya tembus dari timur ke barat, sehingga pura itu lebih populer dengan sebutan Pura Enjung Bolong. Perpaduan keduanya, yaitu antara Pura Tanah Lot dan Pura Enjung Bolong seolah menyatu memberikan nuansa keindahan. Sepanjang hari silih berganti deburan ombak tiada berhenti menghampar dinding batu karang disertai desiran angin dari tengah lautan sehingga menimbulkan suara yang melankolik.

Indahnya pemandangan sepanjang kawasan suci Pura Tanah Lot karena berada pada posisi lautan lepas menyebabkan ketika matahari menjelang tenggelam secara total dapat diamati. Keadaan seperti ini juga menjadikan wisata Tanah Lot populer dengan sebutan wisata *sunset* (matahari terbenam). Bagian lain yang menjadi daya tarik wisata Tanah Lot juga disebabkan oleh jarak dengan kawasan pariwisata lain dan bandara udara relaitf dekat.

Sejarah telah menjelaskan bahwa daya tarik keindahan Tanah Lot sudah ada jauh sebelum perkembangan pariwisata seperti sekarang ini. Hal itu dibuktikan dalam buku Soebandi (1983:128) bahwa pada abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi, yaitu sekitar tahun 1478--1560, seorang Maha Rsi bernama Dang Hyang Nirartha melaksanakan perjalanan suci (*dharmayatra*) dari Daha sampai Tambora. Dang Hyang Nirartha juga dikenal dengan beberapa nama, seperti Dang Hyang Dwijendra dan Pedanda Sakti Wawu Rawuh. Dalam pandangan Soebandi, selain dengan Pura Tanah Lot, Dang Hyang Nirartha juga mempunyai hubungan dengan sejumlah pura

lainnya di Bali. Keindahan ini tidak hanya dinikmati secara sesaat, tetapi juga dilakukan secara berulang-ulang sehingga wisatawan ada juga yang menginap, baik pada kawasan maupun di sekitar kawasan tersebut (hotel BNR). Hal itu dilakukan terkait dengan keindahan kawasan Pura Tanah Lot yang berdimensi pada ruang dan waktu.

Sebagaimana penjelasan Adhika (2012:63) bahwa pada dimensi ruang, keindahan bukan semata pada ruang yang ada, melainkan manusia dan hewan yang beraktivitas juga menjadi modal daya tarik para wisatawan. Ruang yang dikunjungi wisatawan menjadi lebih menarik jika ada aktivitas wisatawan dan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan ketika wisata Tanah Lot mulai bangkit dan pada saat jalur menuju Tanah Lot masih ditempuh melalui utara (melewati Desa Kediri). Sekitar tahun 1990-an ketika telah sampai di ujung utara Desa Pakraman Beraban baik menuju maupun pulang dari Tanah Lot, para wisatawan dibuat terhenti oleh ulah seorang kakek (sekarang sudah almarhum) yang sedang menggembalakan seekor kerbau di pinggir jalan bernama Pan Jingga.

Pan Jingga menggembalakan kerbaunya dari pagi sampai sore hari ditemani sebuah seruling yang tak pernah lepas dari dirinya. Di atas kerbau yang sedang memak an rumput, Pan Jingga sambil meniup seruling dengan irama *pupuh maca pat* duduk santai dengan topinya yang khas dari anyaman bambu seolah tak mempunyai beban. Tiba-tiba dihampiri oleh segerombolan wisatawan laki-laki dan perempuan berhasrat ingin duduk di atas kerbaunya. Pan Jingga saat itu tampak sangat prima tenaganya sehingga dengan mudah memapah satu per satu secara bergiliran para tamu naik ke punggung kerbau tanpa batas waktu. Setelah itu setiap wisatawan yang naik memberikan sekadar uang konpensasi jasa yang jumlahnya sukarela dan Pan Jingga berucap suksma. Dia sangat lugu apakah ucapannya dimengerti oleh wisatawan, yang jelas menurut pengakuannya sebagai adat Bali ketika ada orang lain memberikan sesuatu dengan niat baik maka kita wajib mengucapkan terima kasih (*suksma*). Suatu saat ketika tidak ada tamu, tim redaksi majalah *Cakrawala Budaya Pariwisata* mendekat seraya mencoba bertanya tentang pengalaman dirinya dengan kerbau seperti percakapan berikut.

> "*Bapa sira ngelah kebo ne niki*? *Tiyang pak wantah niki dogen geginan tiyange apang payu tiyang ngajeng. Kebo ini satmaka somah tiyang ane setata ngeruwangin tiyang sewai-wai. Aget masih kapah-kapah ade toris nyak menekin kebon tiyange, sud*

keto entungine tiyang pipis keteng daduwe. Selanjutnya tim menyampaikan satu pertanyaan seraya menggoda Pan Jingga, *Bapa yen beli tiyang kebon bapa ne bang bapa? Lalu Pan Jingga menjawab, "beh bapak ne, kebon tiyang niki tuah timpal tiyange sewai-wai* (mengulang kata-katanya kembali), *ketimbang nyuwang kebon tiyange, adanan kurenan tiyange pak juang*" (Tim Majalah *Cakrawala Budaya*, wawancara tahun 1999).

Pernyataan Pan Jingga merupakan salah satu bentuk dimensi ruang yang diekspresikan melalui interaksi jasa Pan Jingga dengan para wisatawan. Selain itu, juga merupakan salah satu bentuk produksi yang tak terprogram untuk konsumsi wisatawan, tetapi terjadi secara kebetulan dan spontanitas.

Keindahan berdimensi waktu, terkait dengan waktu pengamatan apakah pagi, siang, atau sore hari menjelang malam hari memiliki nilai estetis yang berbeda. Pada sore hari merupakan waktu yang paling digemari oleh para wisatawan untuk menyaksikan proses terbenamnya matahari (*sun set*) dan menjadi karakteristik tersendiri dari wisata kawasan suci Pura Tanah Lot dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lainnya di Bali. Visualisasi keindahan pemandangan alam wisata Pura Tanah Lot pada sore dan siang hari disajikan pada gambar 3.3 dan gambar 3.4 berikut.

Foto pemandangan alam Pura Tanah Lot waktu siang hari
(Koleksi Girinata, 2015)

Foto pemandangan alam Pura Tanah Lot waktu sore hari dengan fokus arah barat
(Koleksi Girinata, 2015)

Ombak lautan lepas di kawasan suci Pura Tanah Lot juga merupakan potensi sebagai daya tarik wisatawan untuk melakukan olahraga selancar. Sambil berselancar para wisatawan dapat menikmati indahnya pemandangan Pura Tanah Lot dari tengah laut dipadukan dengan panorama indahnya tebing sepanjang pinggir pantai. Semakin banyaknya para wisatawan datang melakukan selancar menyebabkan kawasan suci Pura Tanah Lot menjadi semakin berkembang dan semakin ramai dikunjungi. Daya tarik ombak adalah produksi alam yang kemudian dimanfaatkan untuk dapat dijual kepada wisatawan. Selanjutnya para wisatawan mengonsumsi atau menikmatinya sesuai dengan kebutuhan dan perilakunya masing-masing.

Kemagisan Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Pemanfaatan religiusitas Pura Tanah Lot tampak mulai dari sejarah keberadaan Pura Tanah Lot. Selanjutnya dieksploitasi dijadikan sebagai modal pelayanan pariwisata. Pura Tanah Lot merupakan salah satu pura umum di Bali yang statusnya sebagai

bagian dari sad kahyangan jagat Pura Batukaru dan juga sebagai pura *dang kahyangan.* Karakteristik Pura Tanah Lot merupakan salah satu pura umum yang dapat dimaknai dari dua sisi yaitu, (1) sebagai Pura Beji Agung dari Pura Luhur Watukaru menurut falsafah *jajar kemiri*, dan (2) sebagai pura *dang kahyangan* yang erat kaitannya dengan perjalanan Dang Hyang Nirartha dari Jawa ke Bali.

Menurut Sugiarta (wawancara 9 September 2016), secara spiritual menurut falsafah *jajar kemiri* Pura Luhur Batukaru merupakan salah satu *sad kahyangan* dengan memiliki dua *pura beji* yaitu Pura Pekiyisan/ Pura Toya Tabah (di Desa Babahan), dan Pura Tanah Lot sebagai Pura Beji Agung (*Pura Tengahing Segara*). Menurut lontar Sang Hyang Aji Swamandala *tengahing segara* sebagai tempat "*anganyutaken laraning jagat paklesa letuhing bhuana"* yang artinya, untuk melenyapkan penderitaan masyarakat dan kekotoran dunia (alam). Juga pada lontar Sundarigama disebutkan "*amet sarining amerta kamandalu ritelenging samudra*" yang artinya, untuk memperoleh air suci kehidupan di tengah-tengah lautan. Selama kurun waktu sepuluh tahun sesuai dengan *pewuus Ida Bhatara* di Pura Luhur Batukaru berkeinginan melakukan upacara *mesucian* ke Pura Toya Tabah (di Desa Babahan), dan sepuluh tahun kemudian *mesucian* ke Pura Tanah Lot (*Pura Tengahing Segara*). Pada upacara *mesucian* simbol *Ida Bhatara* diusung oleh masyarakat umat Hindu Kabupaten Tabanan dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan beliau disambut dengan rasa hormat oleh masyarakat terutama bagi desa yang dilewati dengan berbagai macam sarana persembahan. Hal menarik pada saat itu karena bukan saja disambut oleh warga yang beragama Hindu, tetapi juga suku lain seperti Tionghoa dan muslim terutama yang punya usaha dagang tumpah ruah ke jalan dengan menutup toko atau warung ramai-ramai membawa sarana persembahan. Bagi yang memiliki toko atau warung bertingkat semua pada turun tak ada yang berani tetap berada di lantai atas.

Sugiarta juga menjelaskan bahwa, secara filosofis struktur sosioreligius wilayah Kabupaten Tabanan bagaikan tubuh manusia yang terbagi dalam tiga bagian yaitu, bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki (*utama, madia*, dan *nista*). Bagian kepala adalah puncak Gunung Batukaru sebagai pokoknya Pura Luhur Batukaru didukung dua tangan dengan simbol Pura Muncaksasi dan Pura Petali sampai perbatasan utara (jembatan) Desa Tuakilang. Selanjutnya bagian badan mulai dari jembatan Tuakilang sampai di jembatan Desa

Demung yang juga disebut dengan wilayah kota raja sebagai tempat aktivitas pemerintahan dan perekonomian berpusat pada Pura Pusering Jagat (kota Tabanan). Sedangkan bagian kaki, adalah wilayah dari jembatan Desa Demung ke selatan disimbolkan dengan dua pura yaitu Pura Tanah Lot di Desa Beraban Kecamatan Kediri dan Pura Srijong di Selemadeg Barat sekarang. Terkait dengan *sad kahyangan* di Desa Beraban selain Pura Tanah Lot, juga Pura Pakendungan memiliki hubungan erat dengan Pura Batukaru sebagai tempat beliau setiap tahun melaksanakan *nangluk merana*. Melalui *pewuus*/ petunjuk gaib, beliau menyarankan kepada masyarakat Tabanan melakukan upacara *nangluk merana* ke Pura Pakendungan untuk keselamatan tanaman.

Implementasinya dalam aktivitas sosioreligius menimbulkan filosofis "*sunya, ramya, sunya*". *Sunya* adalah Pura Luhur Batukaru sebagai stana *Ida Bhatara Panembahan Sakti Penataran Bali* atau *Hyang Tumuwuh*, *ramya* adalah pusat pemerintahan yaitu kota Tabanan, dan *sunya* berikutnya adalah Pura Tanah Lot dan Pura Srijong. Ketika jaman pemerintahan kerajaan dahulu umat Hindu Tabanan tidak saja disibukkan melaksanakan tugas pemerintahan dan bekerja mencari kebutuhan sandang, papan, dan pangan, namun juga meluangkan waktu pergi ke *sunya* untuk kegiatan spiritual mengucapkan rasa terima kasih pergi ke tempat suci bersembahyang ke Pura Batukaru, Pura Tanah Lot, da Pura Srijong yang diyakini telah memberikan anugerah keberhasilan. Jaman dahulu karena keterbatasan fasilitas, sehingga hanya kalangan pemimpin pemerintahan yang bisa melaksanakan persembahyangan pergi ke tempat *sunya*. Kegiatan seperti itu sifatnya insidental seperti saat upacara *odalan*. Dari masyarakat biasa khususnya petani yang datang ke tempat *sunya* ketika itu hanyalah perwakilan sambil menghaturkan sarin tahun berupa padi yang jumlahnya telah disepakati oleh anggota subak setelah dipotong untuk honor pengurus.

Sebagai pura *dang kahyangan*, pemanfaatan religiusitas Pura Tanah Lot dimaknai mulai dari sejarah perjalanan/ *tirtha yatra* rohaniwan bernama Maha Rsi Dang Hyang Nirartha dari Jawa ke Bali dengan tujuan memperkuat sendi-sendi dan kebudayaan Hindu (Adhika, 2012: 56). Keberadaan Pura Tanah Lot menurut lontar *Dwijendra Tattwa* (t.t.:19 b) dikaitkan dengan perjalanan Dang Hyang Nirartha dari Rambut Siwi di Kabupaten Jembrana untuk melanjutkan perjalanan menuju arah timur diikuti oleh beberapa orang pengikut.

Perjalanan beliau selalu di tepi pantai sambil menikmati keindahan laut lepas. Sepanjang perjalanan tiba-tiba beliau melihat sebuah pulau kecil yang tampaknya sangat suci berada di tengah samudra sehingga ada keinginan beliau untuk membuat tempat suci di sana. Saat itu dilihat ada seorang nelayan sedang mencari ikan agak di tepi. Orang itu didekati dan diberi tahu supaya masyarakat desa di sana membuat *parhyangan* (tempat suci) di atas bukit kecil yang letaknya di tengah laut.

Soebandi (1983:129) menjelaskan bahwa dari Pura Rambut Siwi Dang Hyang Nirartha melanjutkan perjalanan menuju arah timur menyusuri pantai selatan Pulau Bali diikuti para pengikutnya yang setia. Dalam perjalanannya Dang Hyang Nirartha dapat menyaksikan bagaimana deburan ombak laut menerpa pantai sehingga menambah keindahan alam. Terbayang oleh beliau betapa kebesaran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) telah menciptakan alam semesta beserta isinya yang dapat memberikan kemakmuran bagi kehidupan manusia. Hati beliau membisikkan bahwa menjadi kewajiban bagi setiap makhluk hidup, terutama manusia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa). Karena asyik menikmati keindahan alam tepi pantai, beliau sampai tak merasakan kelelahan.

Dalam perjalanannya, Dang Hyang Nirartha selalu membawa *rontal* dan *pangrupak* (pisau untuk menulis pada daun rontal). Pengalaman yang dianggap penting selama perjalanan, baik yang dapat dilihat maupun dirasakan oleh beliau, disusun, baik dalam bentuk kakawin maupun gubahan lainnya. Saking asyiknya beliau memikirkan apa yang dipandang penting untuk ditulis sambil berjalan dari Pura Rambut Siwi, tahu-tahu sampai pada suatu tempat. Di tempat itu terdapat tanah parangan (tanah keras), dan di sana akhirnya beliau berhenti untuk beristirahat. Tidak begitu lama, akhirnya datang para nelayan membawa persembahan untuk beliau. Setelah sore hari para nelayan menawarkan agar beliau berkenan menginap di pondok mereka masing-masing. Namun, semuanya ditolak. Beliau lebih senang bermalam di pulau kecil itu karena hawanya segar, pemandangannya indah, dan dari sana beliau dapat melepaskan pandangan secara bebas ke segala arah.

Sebelum tidur pada malam hari Dang Hyang Nirartha memberikan ajaran-ajaran tentang agama, susila, dan ajaran tentang kebajikan kepada orang yang datang menghadap beliau. Saat itu

beliau mengajarkan mereka yang datang agar membangun tempat suci (pura) di sana karena menurut getaran batin beliau yang suci dan petunjuk gaib, tempat itu sangat baik untuk memuja *Ida Sang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) sebagai tempat memohon *wara nugraha*-Nya bagi keselamatan dan kesejahteraan dunia. Akhirnya, setelah kepergian beliau orang-orang itu membangun tempat suci (pura) yang diberikan nama pura Tanah Lot. Di sekitar Pura Tanah Lot juga ada beberapa pura, seperti Pura Batu Mejan, Pura Batu Bolong, Pura Jro Kandang, Pura Enjung Galuh, Pura Melanting, dan Pura Hyang Api. Tiap-tiap pura memiliki fungsinya masing-masing.

Pura Tanah Lot merupakan tempat suci tergolong pura umum yang berstatus *dang kahyangan*, Dengan status itu semua umat Hindu bisa dan berhak melaksanakan persembahyangan, kecuali dalam keadaan *cuntaka* atau *sebel* (baik disebabkan oleh kematian maupun sedang datang bulan bagi wanita). Hal inilah yang menjadikan Pura Tanah Lot disucikan oleh warga umat Hindu Desa Pakraman Beraban khususnya dan umat Hindu Bali umumnya. Sebagai tempat suci, masyarakat Desa Pakraman Beraban khususnya senantiasa menjaga kesucian Pura Tanah Lot dengan pembatasan/ pelarangan masyarakat yang *cuntaka* memasuki areal pura. *Cuntaka* dimaksud apabila seseorang atau sekelompok orang memiliki anggota keluarga yang meninggal, perkawinan, ataupun saat sedang haid, setelah bersalin, dan keguguran bagi wanita (Gunadha, 1993:20). Masa waktu tidak diperbolehkan masuk ke pura bagi masyarakat *cuntaka* yang diakibatkan oleh keluarga meninggal telah ditetapkan dalam *awig-awig*, sedangkan *cuntaka* bagi wanita yang datang bulan diperkenankan masuk pura kembali setelah habis siklusnya dan setelah membersihkan diri secara *sekala* dan *niskala* (jiwa dan raga).

Secara struktur nilai kesucian Pura Tanah Lot yang paling suci terletak pada areal *jeroan*, yaitu merupakan tempat yang diberikan nilai paling utama bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Hindu pada umumnya. Tempat kedua yang dianggap suci adalah pada areal *jaba tengah* yang merupakan peralihan antara *jaba sisi* dan *jeroan.* Selanjutnya areal suci yang ketiga adalah *jaba sisi*, yang merupakan areal terluar suatu pura. Semua bagian yang ada di sekeliling pura tetap memiliki nilai kesucian walaupun kadar kesuciannya lebih rendah, tetap berpengaruh pada kesucian pura secara keseluruhan. Karena pengaruh itu, masyarakat senantiasa menjaga dengan baik nilai kesucian sesuai dengan batas-batas yang disepakati dan diyakini

sebagai kawasan suci sehingga kawasan tersebut juga disebut dengan *karang kekeran*. Sejak dahulu masyarakat Desa Pakraman Beraban telah menjaga nilai kesucian *karang kekeran* sesuai dengan batas-batas yang telah disepakati dengan tidak memanfaatkannya, baik untuk perumahan tempat tinggal maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Luasnya arti *karang kekeran* yang ada telah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat setempat yang dibuat berdasarkan tanda-tanda secara alami (tidak permanen), seperti dalam bentuk pematang sawah, jalan, sungai, dan tumbuhan. Ketentuan jarak *karang kekeran* sebagaimana penuturan I Wayan Arwata bahwa berdasarkan keterangan *bhisama* para *panlingsir* Desa Pakraman Beraban yang dituturkan oleh beberapa warga, pada awalnya batas-batas kawasan yang harus dijaga kesuciannya adalah di sebelah utara berbataskan jalan kecil (*munduk*) yang berada pada bagian sebelah utara jalan menuju Pura Pakendungan, batas di sebelah timur adalah Sungai Yeh Sungi, di sebelah barat berbataskan dengan Sungai Kutilan, sedangkan batas di bagian selatan adalah laut dengan jangkauan *apaneleng* (sejauh mata memandang). Jika diukur jarak antara Pura Tanah Lot dan batas-batas yang ditentukan kuang lebih mendekati satu kilometer. Sesuai dengan batas-batas yang ditentukan, warga masyarakat tidak diperkenankan melakukan kegitan yang dapat dipandang menimbulkan *kacuntakaan* atau *kaletehan* (wawancara 31 Mei 2015). Berdasarkan keterangan itu sampai saat sekarang batas-batas itu tetap diyakini, dihormati, dan dijaga nilai kesuciannya oleh masyarakat Desa Pakraman Beraban.

Atas dasar itulah masyarakat setempat telah menstrukturkan ruang di sekitar Pura Tanah Lot sebagai ruang suci yang harus dijaga kesakralannya agar tidak bergeser menjadi zona profan yang dapat menimbulkan desakralisasi. Secara historis tidak ada warga masyarakat setempat yang tahu secara pasti keterkaitan beberapa pura lain yang ada di areal kawasan dengan Pura Tanah Lot. Mengingat *penyungsung*-nya pun tidak hanya berasal dari warga Desa Pakraman Beraban, tetapi banyak berasal dari luar, bahkan dari luar kecamatan Kediri. Keberadaan beberapa pura ini dapat diinterpretasikan bahwa ruang di sekitar Pura Tanah Lot merupakan ruang spiritual. Menurut kearifan lokal telah menunjukkan adanya pola dan konsep-konsep tentang pengamanan kawasan suci. Oleh karena itu, kondisi seperti ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pemanfaatan ruang untuk menjamin keberlanjutan fungsi ruang yang ada.

Pada awalnya sebagian besar ruang spiritual di kawasan suci Pura Tanah Lot (*karang kekeran*) yang disakralkan merupakan milik masyarakat setempat. Ruang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan keyakinan, mata pencaharian, dan sosial budayanya. Ideologi penyelamatan ruang di sekitar Pura Tanah Lot sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu.

Upacara *piodalan* di Pura Tanah Lot dilakukan setiap 210 hari yang jatuhnya bertepatan pada *Budha Wage Langkir*. Pada awalnya *piodalan* dilakukan hanya dalam waktu sehari, tetapi belakangan diperpanjang menjadi tiga hari karena banyaknya *pemedek* (umat yang datang untuk bersembahyang) dari seluruh Bali. Proses ritual upacara *odalan* Pura Tanah Lot didukung oleh banyaknya umat Hindu yang datang bersembahyang disertai dengan pakaian khas budaya Hindu Bali menjadikan para wisatawan semakin tertarik menikmati. Kondisi seperti ini jelas membutuhkan lahan untuk parkir kendaraan para *pemedek* dan lahan parkir untuk para wisatawan.

Mengingat banyaknya *pemedek* yang bersembahyang, sementara lokasi bersembahyang sangat sempit, maka pelaksanaannya dilakukan secara bergilir. Para *pemedek* hanya bisa melaksanakan persembahyangan secara langsung di areal pura apabia air laut surut. Keadaan air laut mengalami surut hanya berlangsung beberapa jam dan sejak kapan air laut mengalami pasang surut dikomunikasikan lewat pengumuman yang terpasang di sekitar pinggir pantai dan dapat diketahui melalui media sosial. Kondisi seperti itulah menyebabkan volume kedatangan para *pemedek* menjadi membludak. Di pihak lain mereka yang datang bertepatan dalam kondisi air laut pasang, maka mereka melakukan persembahyangan melalui media *penyawangan* (sebuah *pelinggih* simbol *stana* untuk sementara dari *Istadewata* yang berada di Pura Tanah Lot), bahkan ada juga yang menunggu sampai air laut surut.

Dalam tatanan kehidupan sosioreligiusitas masyarakat Desa *Pakraman* Beraban mempunyai kepercayaan mendalam terhadap kemagisan dan kesucian Pura Tanah Lot. Sekalipun *pangempon* Pura Tanah Lot tidak seluruhnya warga masyarakat Desa *Pakraman* Beraban (sebagaimana dijelaskan pada Bab IV di atas), seluruh masyarakat merasakan Pura Tanah Lot sebagai bagian dari hidupnya. Artinya, tertanam suatu kepercayaan dan keyakinan bagi setiap warga masyarakat Desa Pakraman Beraban ketika melaksanakan upacara *yadnya* harus terlebih dulu mohon *tirtha* di Pura Tanah Lot. Jika tidak,

masyarakat yang melaksanakan upacara *yadnya* merasakan upacara yang dilaksanakannya tidak sempurna. Kepercayaan seperti itu telah dilakukan sejak dahulu sebagai warisan dari kepercayaan leluhurnya yang sampai saat sekarang tidak ada yang berani melanggar (Suaja, wawancara 17 Mei 2015).

Di tebing sebelah utara Pura Tanah Lot terdapat flora dan fauna di dalam gua berupa ular belang laut yang diidentifikasi sebagai ular *duwe*. Ular itu dijaga oleh beberapa orang dengan berpenampilan pakaian adat lengkap dan para pengunjung yang berminat untuk mengetahui lebih dekat, bahkan ingin menyentuh ular *duwe* harus mematuhi aturan yang telah disyaratkan. Menurut Adhika (2012: 61), kondisi religiusitas Pura Tanah Lot inilah yang dimanfaatkan atau dieksploitasi menjadi daya tarik utama dalam pengembangan kawasan suci Pura Tanah Lot. Keberadaan Pura Tanah Lot dengan sejarah dan religiusitasnya dijadikan sebagai sumber daya yang potensial, sebagai pemicu perkembangan kawasan yang lebih luas (di sekitarnya).

C. Pemerintah Kabupaten Tabanan Membutuhkan Modal Finansial

Pesatnya perkembangan wisatawan datang ke Tanah Lot merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Disampingitu, dipandang potensial dalam meningkatkan anggaran pendapatan daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15, Tahun 1988 tentang Kawasan Suci, Pemerintah Kabupaten Tabanan yang merasa memiliki objek wisata yang unik dan sangat prospektif secara ekonomi, akhirnya menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 31, Tahun 1988 pada 13 Januari 1988. Saat itu merupakan masa kepemimpinan I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si. Isi surat keputusan itu tentang pengembangan kawasan wisata Tanah Lot dengan menetapkan dua desa, yaitu Desa Beraban dan Desa Belalang, tetapi Desa Beraban tetap sebagai pusat pengembangannya.

Sikap utama yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah dengan "mengkomodifikasi" Pura Tanah Lot sebagai destinasi wisata dan saat itu juga di pihak Pemerintah Daerah Bali muncul istilah "Kawasan Pariwisata Tanah Lot". Wilayahnya secara fisik jauh melampaui wilayah yang sebelumnya dianggap kawasan

Tanah Lot hingga sampai ke Desa Belalang. Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai berkonsentrasi pada persiapan secara struktural menempatkan wisata Tanah Lot sebagai bagian dari program pemerintah daerah sehingga proses perkembangannya terikat pada legalitas formal. Atas dasar itu selanjutnya secara otomatis pendapatan dari retribusi kunjungan wisatawan juga menjadi hak Pemerintah Daerah Tabanan.

Harapan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tabanan harus menyediakan pelayanan yang lebih baik terhadap para wisatawan yang berkunjung ke Tanah Lot sehingga terjadilah reproduksi terhadap pura dan kawasan suci Pura Tanah Lot. Dalam hal ini setiap wisatawan yang memasuki kawasan suci Pura Tanah Lot wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan. Wisatawan akan merasa nyaman dan betah menikmati pemandangan wisata Tanah Lot apabila disiapkan kebutuhan yang mungkin diperlukan, seperti tempat makanan, minuman, cendera mata, penginapan, dan sebagainya. Dari usaha-usaha pelayanan wisata itu Pemerintah Kabupaten Tabanan akan bisa membebani melalui pungutan pajak. Penyediaan semua fasilitas itu sudah barang tentu memerlukan lahan sehingga Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mencarikan solusi.

Menurut Atmadja (2009:12), dalam praktik seperti ini pejabat dan investor pun ikut berperan karena mempunyai kepentingan yang tersembunyi. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola kawasan wisata Pura Tanah Lot. Dalam hal ini tampak cara kerja hegemoni, yaitu melalui kepemimpinan secara halus, canggih, dan intelektual lewat semacam proses cuci otak dalam memaknai sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap otak-otak masyarakat. Sebagaimana pendapat Gramsci bahwa hegemoni dalam pembebasan lahan di kawasan suci Pura Tanah Lot berlangsung secara luar biasa lewat wacana-wacana.

Penerapan cara-cara hegemonik ini pun terjadi di kawasan suci Pura Tanah Lot yang dimulai sejak tahun 1990-an ketika berdirinya sebuah hotel berskala besar dan mewah (BNR) yang memerlukan lahan ratusan hektare (Mudana, 2005:195). Keberhasilan praktik hegemoni ketika pembangunan BNR didukung oleh pihak-pihak yang memiliki fungsi pada tatanan struktur formal (pemerintah). Selain itu, juga pada masa itu masih berlaku era orde baru dengan sistem pemerintahan mengacu pada pusat, yaitu semua struktur

pemerintahan dari tingkat paling bawah tunduk pada kebijakan pusat. Kesempatan seperti ini dijadikan peluang oleh investor BNR untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk dapat membebaskan lahan secara aman dan praktis. Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam penerapan praktik hegemoninya dilakukan dengan beberapa wacana.

Pertama, wacana dengan sosialisasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan diikuti aparat Desa Beraban (Perbekel dan *Bendesa Pakraman*) sebagaimana dituturkan oleh I Wayan Sutarya. Pada saat itu pemerintah menginformasikan bahwa Tanah Lot sudah semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dan patut dibanggakan. Objek wisata Tanah Lot merukan aset bagi kita di Tabanan dan Desa Beraban khususnya untuk dapat mendatangkan uang. Oleh karena itu, agar para wisatawan semakin banyak dan betah datang ke sini, perlu disediakan beberapa keperluan, seperti hotel, kios-kios, tempat hiburan, tempat parkir, dan yang lainnya. Berkenaan dengan itu, di kawasan Pura Tanah Lot ini akan dibangun sebuah hotel besar. Dengan berdirinya hotel ini diharapkan para masyarakat petani, terutama pemilik lahan diminta kesadarannya berpartisipasi dan mendukung dengan menyerahkan lahannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Sosialisasi semacam ini dilakukan beberapa kali yang sebelumnya telah dilakukan pertemuan awal dengan para aparat desa dengan wacana bahwa tanah para petani sudah diblokir (wawancara, 7 Mei 2015).

Wacana kedua sebagaimana penjelasan warga masyarakat Desa *Pakraman* Beraban, yaitu I Nyoman Karsa. Pada awalnya pihak pemerintah melakukan penyuluhan bahwa pembangunan BNR dipastikan tidak akan merusak tatanan adat, agama, dan budaya kita. Dengan berdirinya BNR akan ada masukan lebih banyak pendapatan asli daerah dan khusus bagi Desa *Pakraman* Beraban. Hotel yang akan dibangun dalam kapasitas besar dan tergolong berbintang sehingga jelas membutuhkan banyak tenaga kerja yang dipastikan lebih mengutamakan warga masyarakat setempat (wawancara, 9 Juni 2015). Di pihak lain menurut Mudana (2005:199), secara umum janji-janji hegemonik itu menunjukkan adanya konsistensi dan perebutan makna atas ruang (tanah-tanah subur yang menjadi lokasi) dalam pembangunan BNR antara pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi masyarakat Desa *Pakraman* Beraban, tanah-tanahnya itu dimaknai

sebagai basis kehidupan ekonomi karena sangat produktif dan diwarisi secara turun-temurun. Di sisi lain karena tanah-tanah mereka berada di kawasan suci Pura Tanah Lot, tanah-tanah mereka dianggap religius.

Praktik hegemoni lebih nyata terjadi ketika sudah dipandang sepakat terhadap apa yang diwacanakan. Selanjutnya dilakukan dengan realisasi transaksi pembayaran kepada para petani pemilik lahan. Dalam proses ini terjadi praktik hegemoni dan kontra hegemoni sebagaimana pandangan Gramsci (dalam Adhita, 2012: 15) bahwa terjadi reaksi dalam hubungan antara penghegemoni (pemerintah) dan yang dihegemoni (masyarakat petani). Dalam prosesnya tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus karena masyarakat petani (sebagai terhegemoni) tidak seluruhnya bisa menerima kebijakan dari pihak peng-hegemoni (pemerintah). Oleh karena itu, terjadilah kontra hegemoni yang ditunjukkan melalui reaksi penolakan oleh mereka yang tidak sepakat terhadap kebijakan pemerintah karena dianggap merugikan dirinya. Namun, biasanya reaksi penolakan semacam ini sering tidak berhasil karena tidak mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pihak penghegemoni (pemerintah). Akhirnya, dengan keadaan terpaksa menyerah walaupun dalam dirinya tetap tertanam rasa menolak yang diekspresikan dengan sikap lebih baik diam demi selamat.

Praktik ini pun terjadi ketika pihak BNR mulai melakukan transaksi pembayaran atas lahan para petani. Tanpa diawali kompromi dengan para pemilik lahan pemerintah menetapkan taksiran harga tanah. Salah satu sumber menyebutkan bahwa untuk pembangunan BNR telah terjadi pembebasan tanah seluas 121 ha di kawasan Tanah Lot. Saat itu pemerintah hanya menetapkan harga ganti rugi sebesar Rp 2.000.000,00 per are. Harga ini sesuai dengan harga dasar tanah pertanian kelas IV yang berlaku untuk Desa Beraban merujuk pada Keputusan Bupati Tabanan Nomor 234/1989 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Tahun 1989/1990 (*Kompas*, 25 September 1990).

Ada sejumlah masyarakat pemilik lahan bersedia melepas tanahnya dengan harga tersebut dengan alasan karena telah menjadi keputusan pemerintah. Di samping itu, mereka juga berpikir bahwa dengan harga seperti itu bisa dikompensasi untuk membeli tanah di tempat lain dengan harga Rp 1.000.000,00 per are, sebagaimana pernyataan I Ketut Suitra (wawancara, 9 Juni 2015) berikut ini.

> *"Tiyang sareng ngelah tanah drika (*lokasi BNR*) akedik. Yen puponin tiyang merasa nanggung (*tak mencukupi*) anggen*

tiyang nunas ajeng ajak keluarga. Mangkin syukur wenten pemerintah numbas aji duang juta. Pameline raris tumbasan tiyang tanah carik di subak baler ne (di Pandak) hargane aji juta per are. Pameline pah teluan simpen tiyang alih tiyang bungane. Kewala kanggean tiyang ngejohang tiyang megae ke carike.

Di pihak lain juga banyak masyarakat yang tidak setuju karena merasa harga tanah yang ditetapkan pemerintah sangat tidak sesuai dengan harga standar pariwisata seperti daerah lainnya di Bali. Atas dasar itulah menjadikan proses transaksi mengalami beberapa tahap sehingga terjadi harga bervariasi sejak awal pembayaran sebagaimana pernyataan Pan Gejor (wawancara 9 Juni 2015) yang tanahnya diganti dengan harga Rp 2.100.000,00 per are. Masih banyak pemilik tanah lainnya merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang dirasakan memaksa untuk menyerahkan hak miliknya, tetapi tetap mencoba bertahan tanpa pendamping.

Situasi seperti ini terjadi cukup lama hingga tahun 1993-an yang menyebabkan para pemilik tanah menjadi tidak berdaya dan penuh keraguan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Sama sekali tidak ada organisasi yang mendamingi mereka melawan aparat pemerintah saat itu. Tekanan semakin keras dirasakan oleh para pemilik lahan pertanian dengan dilakukan pemutusan saluran air terjadi secara tiba-tiba. Nyoman Sutarya menjelaskan, bahwa *pekaseh* juga tidak bisa berbat banyak pada saat itu karena menurut pengakuannya telah mendapatkan surat perintah dari bupati, tetapi tidak mampu menunjukkan bukti (Sutarya, wawancara 9 Juni 2015).

Merasa tidak maksimal hasil yang dicapai, akhirnya pemerintah melibatkan kekuatan gerakan militer melalui gerakan tekanan mental dengan memanggil setiap warga yang belum menyerahkan hak miliknya datang menghadap ke Kodim Kediri, Tabanan. Pemanggilan itu disertai dengan pernyataan bahwa para warga yang belum mau menerima uang pembelian tanah agar mengambil langsung di kantor Pengadilan Tabanan (I Ketut Suitra, wawancara 15 Juni 2015).

Cara-cara pembebasan lahan untuk pembangunan BNR sebagaimana uraian di atas telah menunjukkan adanya kompleksitas praktik hegemoni atas kekuatan kapitalis (pemodal) dalam melakukan kompromi terhadap pemerintah. Akhirnya karena merasa tidak

mempunyai kekuatan dan berpegang teguh pada janji-janji untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, para pemilik lahan secara pelan-pelan menyerahkan haknya. Akhirnya, setelah itu terjadi reaksi protes pendirian BNR yang sangat keras bersifat umum mengatasnamakan umat Hindu, di bawah gerakan kalangan elite intelektual sebagaimana telah diteliti oleh I Gede Mudana pada tahun 2005.

Tatanan lembaga formal juga sangat responsif terhadap peluang perkembangan pariwisata Pura Tanah Lot. Dari pertimbangan pengalaman yang dimilikinya sebagai pimpinan daerah sarat akan prestasi agar mendapatkan apresiasi dari kalangan publik dan kepentingan pendapatan daerah. Hal itu menyebabkan Bupati Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan pergelaran akbar berupa tarian *Cak* Lima Ribu pada 29 September 2006. Sebagaimana nama yang diberikan (cak lima ribu) karena dalam pementasannya melibatkan personel sebanyak lima ribu orang dari unsur laki laki dan perempuan. Festival ini merupakan atraksi satu-satunya yang pernah terjadi di dunia sehingga mampu meraih prestasi luar biasa di bidang seni budaya. Festival yang diidentifikasi sebagai *Cak* Lima Ribu diprakarsai oleh Bupati Pemerintah Kabupaten Tabanan (Ni Putu Eka Wiryastuti) merupakan imajinasi dari suatu ide yang terpolakan dalam sebuah atraksi untuk menunjukkan prestasi melalui komunikasi pariwisata budaya. Atraksi *Cak* Lima Ribu dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut.

Pergelaran tari *Cak* Lima Ribu pada 29 September 2006. Data dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Tari cak merupakan salah satu ekspresi budaya yang dijadikan sebagai ikon penting dalam perkembangan pariwisata Bali. Hampir setiap biro kepariwisataan, selain menawarkan objek-objek yang ada di Bali, juga dilengkapi dengan hiburan pementasan tari kecak. Daerah tujuan wisata Tanah Lot juga menyediakan atraksi tari kecak yang dipentaskan pada petang hari.

Dalam upaya untuk melestarikan kesenian dan budaya Bali juga daya tarik wisata (DTW) Tanah Lot, pengelola pariwisata Tanah Lot menggelar festival *beleganjur* dengan melibatkan *sekaa teruna-teruni* dari 22 *desa pakraman* di Kecamatan Kediri. Sebagaimana dipaparkan oleh Manajer DTW Tanah Lot, yaitu Ketut Toya Adnyana bahwa festival tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan peluang bagi anak muda untuk menyalurkan bakat seninya sekaligus melestarikan budaya dan kesenian Bali kepada generasi muda. Suasana ajang festival dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini.

Atraksi Lomba *Baleganjur* di kawasan Pura Tanah Lot
(koleksi Girinata, 2015).

Tujuan lain tentu untuk memberikan hiburan kepada wisatawan sekaligus menjadikan festival sebagai daya tarik wisatawan datang ke Tanah Lot. Sebagai langkah awal pihak DTW Tanah Lot mengundang para ketua adat untuk memberikan informasi mengenai pelaksaan festival ini. Waktu diambil pada Juli sesuai dengan waktu libur sekolah sehingga tidak mengganggu waktu anak muda yang sedang bersekolah. Terkait dengan kunjungan di DTW Tanah Lot

menurut Toya cenderung stabil. Selama tiga bulan ada kenaikan sekitar dua persen dibandingkan dengan tiga bulan yang sama pada tahun 2014 lalu. Berdasarkan data, diketahui bahwa hingga pertengahan April kunjungan di DTW Tanah Lot mencapai 824.282 orang (wawancara 9 Juli 2015).

Masyarakat Desa *Pakraman* Beraban dan instansi yang berkompeten memberikan kesempatan yang bebas kepada wisatawan untuk menyaksikan praktik-praktik budaya seperti itu. Konteks hubungan kekuasaan yang melibatkan aktor tersebut, menurut Abdullah (2006:6), merupakan faktor yang mendorong proses pembentukan suatu jaringan makna sebuah simbol dan berbagai praktik kehidupan yang berkembang dinamis untuk menegaskan nilai-nilai dan kepentingan individu atau kelompok yang berbeda. Relasi kekuasaan dalam aktivitas dan kreativitas praktik-praktik budaya masyarakat Desa *Pakraman* Beraban bertujuan untuk memenuhi motivasi budaya para wisatawan dalam wacana pengembangan pariwisata. Dengan demikian, berkembang nilai-nilai dan kepentingan baru, baik di kalangan masyarakat Desa *Pakraman* Beraban, pengusaha pariwisata, maupun wisatawan.

D. Desa Pakraman Beraban Membutuhkan Masukan Finansial

Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan adalah sebuah desa dinas atau administratif. Secara kedinasan Desa Beraban terdiri atas sepuluh dusun, sedangkan sebagai desa adat terdiri atas lima belas *banjar* adat, tetapi dua *banjar* adat (*Banjar* Adat Pasti dan *Banjar* Adat Kebon) berada di wilayah Desa Dinas Pandak dan secara kedinasan merupakan bagian dari Desa Dinas Pandak. Dalam pandangan masyarakat Bali, desa dimengerti sebagai suatu tempat tinggal bersama, memiliki kekayaan *(laba*) desa, wilayah, warga (*krama desa)*, *prajuru*, dan tempat-tempat suci yang disebut *kahyangan desa*. Pandangan ini senada dengan Perda Nomor 6, Tahun 1986 yang menyebutkan seperti berikut.

> "Desa Adat Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun, dalam ikatan *kahyangan tiga*, mempunyai wilayah tertentu, kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangga sendiri"

Sebagaimana di desa-desa lainnya di Bali, desa adat dipimpin oleh *bendesa pakramant* (*bendesa adat*). Bendesa adat di Desa Adat Beraban dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para kepala *banjar* yang disebut dengan kelihan adat. Perkembangan selanjutnya dengan pertimbangan bahwa desa adat tidak sesuai dengan perkembangan zaman, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03, Tahun 2001 tentang *desa pakraman* yang isinya menjelaskan sebagai berikut.

> *Desa Pakraman* adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, hak asal usul yang bersifat istimewa bersumber pada agama Hindu, bersumber kebudayaan Bali, berdasarkan *tri hita karana,* mempunyai *kahyangan tiga/ kahyangan desa*. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai *desa pakraman* adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokratisasi, dan pemberdayaan krama desa.

Perda ini dinyatakan berlaku sejak diundangkan, yaitu pada 21 Maret 2001. Desa adat di Bali telah banyak mengubah nama menjadi *desa pakraman,* termasuk Desa Adat Beraban. Keberadaan Pura Tanah Lot dan kawasannya merupakan bagian dari wilayah Desa Pakraman Beraban. Terkait dengan perkembangan wisata Pura Tanah Lot, peran *bendesa pakraman* menjadi sangat penting. Dalam mengelola objek dan daya tarik wisata Tanah Lot, peranan pemerintahan Desa Pakraman Beraban sebagai penguasa tunggal pada tingkat desa mewakili warga masyarakat dalam berhubungan dengan instansi dari luar desa, baik instansi pemerintah yag secara struktural berada di atasnya seperti pemerintah kecamatan, pemerintah daerah kabupaten tingkat II, dan yingkat I maupun dengan instansi swasta.

Parimartha (2013) menjelaskan bahwa sasaran pelestarian *desa pakraman* adalah mengusahakan tetap terjaga dan terpeliharanya *desa pakraman,* yaitu lembaga yang mempunyai ciri-ciri keagamaan dan kemasyarakatan. Oleh Karena itu, unsur *tri hita karana* (*parhyangan, pawongan*, dan *palemahan*) yang dipandang sebagai kanopi terciptanya keharmonisan perlu terus dijaga dan dipelihara untuk mengajekkan otonominya, dalam pengertian *desa pakraman* dapat mengatur rumah tangganya sendiri meliputi hal-hal berikut.

1. Untuk menentukan aturannya sendiri
2. Melaksanakan keputusan yang disepakati bersama
3. Menyelesaikan secara damai segala persoalan adat dan agama yang terjadi di wilayahnya.
4. Menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman secara swakarsa
5. Mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh *kramanya*.

Pemberdayaan *desa Pakraman* terus diupayakan yang diarahkan oleh pemerintah daerah dengan jalan memberikan bantuan dan bimbingan. Selain itu, menciptakan suasana dan kondisi yang mempermudah *desa pakraman* dalam menyikapi kemajuan dan perkembangan zaman sehingga *desa pakraman* dapat berperan positif dalam pembangunan masyarakat dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat perkembangan dan perubahan sosial.

Terselenggaranya pembangunan dalam unsur *tri hita karana* tidak selamanya bisa diselesaikan dengan bertumpu pada bantuan pemerintah karena ruang lingkupnya sangat luas dan kompleks. Di samping itu tiap-tiap *desa pakraman* memiliki karakteristik yang berbeda dengan *desa pakraman* lainnya sehingga pola, proses, dan daya dukung pembangunannya juga berbeda. Kondisi seperti itu akhirnya memberikan peluang bagi setiap *desa pakraman* dalam mewujudkan pembangunan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya. Salah satu contoh adalah Desa *Pakraman* Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagai salah satu tempat pesatnya perkembangan pariwisata dunia yang belakangan ini dihadapkan pada tatanan perkembangan dan perubahan sosial.

Mantan *Bendesa Pakraman,* I Wayan Arwata, menjelaskan bahwa pencapaian target pembangunan Desa *Pakraman* Beraban tidak mungkin diandalkan dari bantuan pemerintah yang jumlahnya sangat situasional. Di samping itu, melalui suatu proses yang panjang dan dirasakan berbelit-belit, kental dengan nuansa hegemonik politik. Kontribusi bantuan pemerintah juga sangat insidental kalau memberikan bantuan, dan harus diawali dengan proses permohonan. Kalaupun dilakukan permohonan, proses administrasinya yang sangat birokrasi (wawancara,18 Juli 2015).

Seiring dengan berjalanya waktu dan sesuai dengan Perda Nomor 03, Tahun 2001 intinya adalah untuk menyejahterakan seluruh warga masyarakat. Di samping itu, sebagai salah satu *desa pakraman*

yang menjadi tujuan wisata dunia, akhirnya sepakat memberdayakan potensi yang ada untuk ikut terlibat mengelola perkembangan pariwisata Tanah Lot. Akhirnya pada tahun 2000 Desa *Pakraman* Beraban mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan agar Desa *Pakraman* Beraban dilibatkan dalam pengelolaan wisata Tanah Lot. Permohonan itu mendapat persetujuan sehingga sejak tahun 2000–2011 pengelolaan DTW Tanah Lot dilakukan oleh tiga pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan, pihak swasta (CV Ary Jasa Wisata), dan pihak Desa Pakraman Beraban.

E. *Kuren* Membutuhkan Masukan Finansial

Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akselerasi perkembangan wisata Tanah Lot mengalami gerakan jauh ke depan dengan menunjukkan tanda-tanda dinamika kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban mengalami percepatan yang signifikan. Dibandingkan dengan sebelum Tanah Lot berkembang sebagai daerah tujuan wisata mengolah tanah pertanian merupakan sumber kehidupan penduduk Desa Beraban. Pada waktu itu tidak selamanya penduduk dapat memanfaatkan lahan pertaniannya untuk menanam padi karena sulitnya mendapatkan air. Jika mendapatkan air, setelah tanaman padi tumbuh diganggu oleh hama tanaman padi. Salah satu upaya yang cukup berat juga telah dilakukan agar pengolahan lahan pertanian bisa berjalan lancer, yaitu mereka bergotong royong membuat terowongan sepanjang tujuh km, sebagaimana keterangan salah seorang warga yang saat itu sebagai prakarsa membuat terowongan berikut ini.

> *Dugase dumun pak (pernyataannya kepada peneliti), ajak nyama brayan tiyange keweh pesan ken ajengan. Wenten carik sakewala toya ten wenten, diprade ne nyidayang nanem padi disubane masaning-masa serange ajak merane ne. Yadyastun keto tiyang ajak makejang ten je suud-suud nanem padi santukan ajengan pokok tyange tuwah nasi. Lantas ajak tyang para petani makejang gotong-royong ngae terowongan medawa 7 km. Dugase nika ajak makejang megarapan ngandelang lima dogen. Disubane pragat, toyane sube masih mejalan, nanging ten masih nyidayang carike pepek maan yeh. Duwaning mule minab pituduh Widhi, dugase pidan saje keweh pesan ngalih ajengan, nanging mangkin masekat rame tamyu ne melali meriki, jeg nincap pesan kehidupan nyama brayan tityang. Ten je ade nyaman tyange ngoyong driki, sami*

ngelah geginan tur akehan mekarya ring objek wisata teken di hotel BNR. Akeh masih nyaman tyange ane ngelah tongos medagang drika. Jeg demen masyarakat tyange mangkin kasekat rame tamyune melali meriki, sakewala ngancan medikan ane ajak tyang megae di carik. Cerik-cerike ten ade jani bisa megae carik malah lyu ane ngadep carik (Wetra, wawancara, 21 Mei 2015).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata ke Tanah Lot memberikan angin segar dan disambut baik oleh masyarakat Desa Pakraman Beraban. Dikatakan demikian karena telah mampu mengubah tatanan dan pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil pertanian. Selanjutnya muncul praktik-praktik baru masyarakat yang secara kompetitif memanfaatkan peluang untuk keberlanjutan hidup keluarga di tengah pergulatan era globalisasi.

Bourdieu (dalam Harker, 2006:264) menjelaskan bahwa dekonstruksi praktik budaya dikaitkan dengan mata pencaharian, tradisi keagamaan, adat istiadat, atau arsitektur rumah untuk kepentingan pariwisata menunjukkan telah terjadi sintesis tatanan ekonomi dengan kekuasaan simbolik. Desa Adat Beraban dalam pengembangan pariwisata secara simbolik memiliki kekuasaan penuh terhadap modal budayanya. Akan tetapi, dalam praktik modal budaya tersebut tidak bisa lepas dari hubungan-hubungan kuasa hegemoni pariwisata berbasiskan ekonomi kapitalis.

Sebelum perkembangan pariwisata Tanah Lot seperti sekarang ini, terutama pada era sebelum orde baru sumber penghidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban yang merupakan tempat keberadaan wisata Tanah Lot, adalah sebagai petani. Di samping itu, juga banyak mencari pekerjaan tambahan sambil menunggu masa panen sawah. Aktivitas seperti itu dilakukan dengan maksud agar status sosialnya juga mendapat pengakuan di masyarakat. Kekosmopolitan mereka belum berkembang secara optimal karena tingkat pendidikan mereka belum berkembang, sehingga pola berpikir menjadi relatif setara, tingkat mobilitas sosial, dan mobilitas geografis mereka masih sangat rendah.

Pada masa orde baru disertai pesatnya perkembangan pariwisata Pura Tanah Lot sebagai DTW terkenal di mancanegara terjadi peningkatan dalam jumlah dan jenjang pendidikan warga Desa

Pakraman Beraban. Warga masyarakat sudah banyak menaruh perhatian di bidang pendidikan. Hal ini terus bergerak ke arah diferensiasi sosial pada bidang pekerjaan karena warga Desa Pakraman Beraban yang berpendidikan, tidak mau lagi menggarap tanahnya menjadi petani, tetapi banyak yang menekuni bidang nonpertanian. Konsekuensi dari itu menunjukkan mata pencaharian nonpertanian masyarakat Desa Pakraman Beraban menjadi sangat beragam, seperti ada yang menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, buruh, pedagang, dan sebagainya. Mereka yang terjun ke sektor nonpertanian banyak yang berhasil sehingga melahirkan golongan atau kelas baru atas dasar kekuasaan atau kekayaan. Dengan demikian, muncul identitas sosial seperti orang kaya baru (OKB), dan orang kaya lama (OKL), bagi mereka yang berhasil (Magnis-Suseno, 1999; Brewer, 2000).

Atmadja (2010: 48) berpendapat bahwa mereka bisa disebut orang kaya baru (OKB) sebagai lawan dari kelas orang kaya lama (OKL), yaitu orang kaya atas dasar kepemilikan tanah. Akan tetapi, bisa juga OKB berasal dari OKL karena dengan cerdiknya OKL memanfaatkan peluang pendidikan sehingga posisi kelas sosial mereka bertambah kokoh. Akibatnya, OKL sekaligus OKB menjadikan mobilitas geografis mereka sangat tinggi karena adanya revolusi transformasi sehingga semakin banyak orang yang kosmopolitan. Sebagaimana juga terjadi di Desa Pakraman Beraban bahwa kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif untuk status sosial disertai kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Pemarginalan terhadap tradisi yang semula dipandang warisan dengan makna moral harus dipertahankan, bahkan sebagai kanopi untuk mewujudkan keharmonisan, akhirnya terkikis oleh modernitas. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki telah dicoba mengolah lahan pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern, tetapi hasilnya belum mampu untuk menopang segala kebutuhan hidup. Demikian juga pengolahan dilakukan dengan sistem *tandu* (penggarap orang lain dengan bagi hasil) justru memberikan keuntungan pada pihak penggarap, sebagaimana penuturan Pan Gejor berikut.

> *"Masyarakat driki saking dumun ngandelang pikolih saking carik (logat Tabanan) anggen ajengan muah ane lianan. Nanging ngancan suwe ngancan rered hasilne. Tiyang bingung ring keadaane makejang ngewehin. Ane pepesan tenwenten toya cukup, yen wenten toya nyidang nanem padi,*

dong garang ken mrana jero ketut. Semalihne padi mangkin harus ngangge ubad-ubadan makene-maketo, yen ajine mael pesan. Nah digantine nyidang panen rasa ten cocok hasilne, bes liyunan biye. Makane cerik-cerike driki ten ada nyak megae ke carik, jeg ten rungu ken carik. Cara tiyang niki taen masih petanduan tiyang, nanging hasilne lebihan ane nandu polih mapan makejang prabeya mabagi dua (wawancara, 20 Juni 2015)

Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadi komersialisasi pertanian, sebagaimana pendapat Atmadja (2010:13) bahwa lahan tidak lagi dilihat berdasarkan nilai sosioreligius, tetapi lebih pada nilai ekonomis. Rasionalisasi terhadap segala aktivitas orang selalu dikaitkan dengan uang. Uang merupakan modal utama untuk sebuah prestasi dalam status sosial. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para pemodal (kapitalis) yang ingin mengembangkan sayapnya di bidang pariwisata. Selanjutnya peluang itu dikembangkan dengan mencari aktor yang potensial agar tujuannya terwujud, baik aktor indiviual maupun struktural formal. Lewat peran aktor, para pemodal menebarkan berbagai macam isu terkait dengan pembebasan tanah diganti dengan iming-iming harga yang dikatakan tidak merugikan masyarakat pemilik. Kondisi seperti ini menjadikan pengetahuan masyarakat yang semula mutlak bertujuan mempertahankan keberlanjutan pertanian sebagai suatu tradisi bermakna sosioreligius, akhirya muncul interpretasi rasio dengan pertimbangan spekulatif. Artinya menurut mereka lebih baik tanah dijual, kemudian hasil penjualan dibungakan dengan pendapatan per bulan beberapa kali lipat dari hasil pertanian, tanpa mengeluarkan biaya dan tenaga.

Pesatnya perkembangan pariwisata Pura Tanah Lot berakibat pada banyaknya terjadi perubahan paradigma pola kehidupan rumah tangga, yang dilandasai pemikiran praktis, efisien, dan ekonomis. Anggota keluarga yang semula bekerja di luar Desa Pakraman Beraban banyak yang membuka usaha sendiri untuk pelayanan para wisatawan dengan beberapa pertimbangan yaitu tidak menghabiskan biaya transportasi, dapat bermasyarakat, tidak di bawah perintah (karena jadi bos sendiri), dan secara kemanusiaan dapat mempekerjakan orang lain. Hal itu diakui oleh I Nyoman Karsa pedagang minuman di pinggir pantai yang berseberangan dengan Pura Tanah Lot.

"Setelah tamat kuliah tahun 1988 saya sempat bekerja di sebuah perusahaan di Denpasar, dengan *ngelaju* setiap hari. Pendapatan saya dari gaji memang bisa untuk memenuhi keluarga tergantung cara mengaturnya. Tetapi sisa gaji tidak bisa diendapkan untuk kami tabung. Waktu perkembangan wisata Tanah Lot tidak ramai seperti sekarang. Kemudian pada tahun 1995 saya mencoba membuka usaha kecil-kecilan melayani para wisatawan yang lagi menikmati tenggelamnya matahari. Kebetulan saya punya sedikit tempat warisan dari leluhur. Sekarang saya merasa senang karena tidak dikejar waktu berangkat kerja seperti dahulu. Di samping itu, saya dapat menjalankan kewajiban di desa (wawancara, 17 September 2015).

Di sisi lain anggota keluarga masyarakat yang memiliki *skill* formal di bidang kepariwisataan juga banyak ikut bergabung pada beberapa usaha pelayanan pariwisata di kawasan Pura Tanah Lot. Hal itu didasari oleh pertimbangan ekonomis dan praktis sebagaimana pengakuan I Wayan Mandia (wawancara 9 September 2015).

"Dulu saya sebelum hotel BNR beroperasi saya bekerja di sebuah hotel yang ada di Kuta, tetapi sekarang saya lebih memilh lebih baik kerja di rumah. Memang dari pertimbangan gaji waktu kerja di Kuta dapat lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Tetapi setelah saya pertimbangkan dari beberapa faktor saya lebih untung kerja di rumah karena saya tidak perlu sewa rumah, tidak menghabiskan biaya bensin banyak, dan saya dapat menjalankan kewajiban di masyarakat. Kalau dulu saya merasa ada batas dalam berinteraksi dengan masyarakat karena jarang punya waktu, tetapi sekarang saya sudah bisa bergaul seperti biasa.

Atas dasar itulah akhirnya pola kehidupan masyarakat selalu diwarnai dengan ekspresi kompetitif demi sebuah pengakuan dalam status sosial. Pada prosesnya yang semakin menanjak berbagai ragam akselerasi ini menimbulkan tekanan pada diri manusia yang sangat besar dirasakan dan pasti. Keluhan tentang waktu yang telah berlangsung setahun hanya dirasakan sebulan merupakan salah satu bukti akan kenyataan tersebut. Kepanikan, kebingungan, dan

persaingan hidup yang semakin ketat merupakan akibat-akibat lanjutan dari akselerasi.

Penelitian ini hanya menguraikan sederetan kecil dari sekian banyak fenomena yang terjadi menyangkut masalah gejala-gejala perubahan masyarakat, khususnya di Desa Pakraman Beraban sebagai bahan acuan persepsi untuk memantau beberapa penyebab terjadinya komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot. Alvin Toffler dalam (Mas, 1984:32) salah seorang pemikir tentang akselerasi. Dinyatakan ada tiga kekuatan yang dapat mengubah berbagai kemungkinan serta dampak manusiawi yang ditimbulkan dari percepatan kemajuan yang sangat tinggi. Hal itu harus dimengerti karena menyangkut kondisi psikologis manusia. Ketiga kekuatan itu adalah percepatan, pengetahuan, dan keanekaragaman.

Masyarakat Desa *Pakraman* Beraban juga tak terhindarkan dari pengaruh munculnya penemuan-penemuan yang terjadi sangat cepat sehingga waktu untuk menyesuaikan diri menjadi berkurang. Untuk diperlukan usaha yang lebih dinamis untuk beradaptasi dengan segala bentuk akselerasi. Akibatnya, waktu yang merambat dirasakan semakin pendek. Akibat lanjutannya adalah ikatan jasmaniah dan batiniah sesama manusia semakin renggang. Ego menjadi lebih menonjol sehingga banyak peranan sesungguhnya diabdikan untuk hidup yang semakin kering, fungsi sosial sering beralih menjadi persaingan yang individual, religiusitas keberagamaan pun tak luput dari segala pengakselerasian. Pada sendi-sendi kehidupan sosial yang bermula pada manusia dipaksa untuk selalu bergelut dengan kesibukannya demi suatu kebutuhan hidup. Manusia sudah mulai apatis terhadap lingkungan, organisasi tradisional yang semula sejak lama telah menjanjikan kedamaian, terutama dalam beberapa kewajiban kini dipandang sebagai suatu beban.

Di sisi lain segala bentuk kemajuan tidak dapat dicapai dengan cara yang mudah, tetapi harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Namun, kenyataannya ketika wisata kawasan suci Pura Tanah Lot berkembang pesat tidak semua masyarakat Desa Pakraman Beraban bisa terlibat dalam proses itu karena sumber daya manusia yang tidak memadai. Maka bagi mereka yang tidak terlibat, namun dalam psikologis status sosial mereka harus dapat pengakuan. Maka terjadilah praktik-praktik komodifikasi. Praktik komodifikasi yang paling cepat menunjukkan hasil adalah mereka yang meng-alihfungsikan lahan pertanian yang dimilikinya. Hal itu dilakukannya

karena alasan ekonomi. Jika lahannya digarap untuk pertanian, hasilnya jauh tidak seimbang dengan biaya produksi. Namun, setelah dijual dan hasil penjualannya jika dibungakan di bank, akan bisa mendapatkan keuntungan tunai beberapa kali lipat dari hasil pertanian yang menguras banyak waktu, biaya, dan tenaga.

Akselerasi pembangunan dalam tatanan kehidupan yang mengglobal dewasa ini bukan tanpa masalah, baik pada sektor fisik berupa sumber-sumber alam maupun nonfisik tentang kehidupan sosial budaya kemasyarakatan dan keberagamaan yang secara meyakinkan digerogoti sehingga pada akhirnya menimbulkan disarmoni. Atas dasar pertimbangan bahwa manusia adalah bagian integral dari ekosistem kehidupan makro, maka sesungguhnya semua orang terlibat dalam suatu proses pengakselerasian. Dalam kondisi krisis seperti ini mencuat pemikir-pemikir ulung yang tak bosan-bosannya berbicara tentang cara pelestarian lingkungan, belum lagi sejumlah aplikator berdasarkan pertimbangan tradisi atau hanya sekadar keintiman tentang alam, kehidupan sosial dan keberagamaan, selalu di fron untuk memerangi disarmoni.

Pada sektor lain yang cukup kasat mata adalah munculnya trauma pada diri manusia sebagai akibat ketinggalan jauh dalam berpacu dengan berbagai ragam akselerasi. Sebuah produk industri yang paling mutakhir dalam waktu relatif singkat menghilang sebelum sempat dimengerti untuk kemudian muncul produk berikutnya. Demikian seterusnya susul-menyusul sehingga kesempatan untuk berpikir dan mengerti selalu kalah cepat dengan produk-produk berikutnya. Suatu contoh penemuan benda-benda kimiawi terus beruntun, rumus-rumus baru dengan formula yang baru pula ikut memacu, pun riset-riset teknologi semakin berkembang pesat. Dalam bentuknya yang paling sederhana segala inovasi tersebut berubah wujud menjadi suatu komoditas yang mengepung kehidupan kota dan merembes pada masyarakat pinggiran, bahkan ke dusun. Demikian pula dibidang ilmu pengetahuan, penelitian semakin gencar, penemuan baru, berikut diwujudkan dalam bentuk media cetak, sekian eksemplar beredar, susul-menyusul dan para konsumen dibuat kewalahan. Di suatu tempat sebuah buku terbeli dan dibaca, di tempat lain puluhan buku dicetak. Di bidang teknologi pun tak luput dari segala pengakselerasian, sekian sepeda motor, mobil, elektronik, dan produk lainnya muncul belum sempat dinikmati kemudian muncul lagi produk baru, demikian seterusnya susul-menyusul.

Dari semua pengakselerasian itu kini muncul fenomena yang amat kuat menggejala di kalangan masyarakat bahwa pada tatanan kehidupan sosial dan beragama pun tak luput dari gerogotan disarmoni hingga masyarakat menjadi kalang kabut dan kebingungan. Semula kefanatikan terhadap keberagamaan dan dilakukan secara mentradisi sekalipun sepenuhnya tanpa didukung dengan pemahaman tentang makna dan hakikat, tetapi diyakini sebagai sumber harapan pemberi kedamaian, kini semakin pupus dimakan zaman. Munculnya manusia-manusia karier memaksa dirinya untuk meninggalkan tradisi kehidupan sosial dan agama, bahkan tak sedikit beranggapan bahwa tradisi itu menjadi penghambat gerak langkahnya atau semua itu merupakan suatu beban. Sejak perkembangan pariwisata, dengan memberikan peluang masuknya orang-orang barat yang secara otomatis diikuti oleh peradaban dan budayanya sendiri. Mulai pada waktu itu pula terjadi perubahan terhadap tatanan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia dan Bali khususnya yang ditandai dengan ekspresi pencapaian tujuan hidup yang memaksa untuk dapat menggapainya. Tujuan itu adalah kemajuan hidup (kehidupan modern) dalam status sosial.

Kiblat kemajuan yang digapai tidak lagi bersumber pada pola kehidupan orang Jawa Bali, tetapi sangat mengagumi tata cara kehidupan orang barat. Pola pikir orang Indonesia dan Bali khususnya terjebak pada cara pikir pada oposisi biner dengan pertimbangan hitam dan putih. Artinya, orang barat sebagai orang yang modern (putih), maju, rasional, berkembang, dan baik. Sebaliknya, orang timur (hitam) adalah tradisional, terbelakang, irasional, tidak berkembang, dan buruk. Oleh sebab itu, barat selalu diposisikan sebagai pusat, dalam arti pusat orientasi dan pusat teladan. Orang Indonesia khususnya Bali lalu memandang budaya asing lebih baik. Kalau mereka tampil dengan budaya tradisi, tidak percaya diri karena diidentifikasi kuno atau kampungan (Atmadja, 2010:10).

Semakin pesatnya perkembangan pariwisata Tanah Lot menyebabkan masyarakat Desa Pakraman Beraban semakin kompetitif saling berebut mencari peluang agar dapat mengais rezeki di areal kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai DTW wisata. Keberhasilan mereka dalam segala bentuk kompetisi akhirnya menjerat dirinya pada pola hidup konsumerisme. Sebagaimana pendapat Arief Budiman (dalam Mardimin, 1994: 96) bahwa konsumerisme lebih populer diartikan pada cara-cara berkonsumsi

yang sudah melebihi batas. Misalnya, orang-orang yang sudah memiliki barang-barang melebihi dari cukup, masih terus membeli barang-barang baru sekadar memenuhi keinginannya untuk berkonsumsi secara berlebihan. Akibatnya, dijumpai ada orang-orang yang mempunyai mobil empat atau lima, padahal jumlah anggota keluarganya hanya tiga orang. Kepemilikan barang yang semakin banyak merupakan citra kesuksesan seseorang.

F. Reinterpretasi Makna Kesucian Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Pandangan masyarakat terhadap kawasan suci Pura Tanah Lot sebagaimana ungkapan istilah tentang "kawasan" belakangan ini semakin populer di kalangan publik. Istilah itu menjadi populer khususnya di Bali karena kerap kali muncul disertai dengan aroma konflik masyarakat yang berdampak pada pengorbanan material dan spiritual. Beberapa masalah pernah terjadi di Bali sebagai akibat dari perbedaan interpretasi makna kawasan, seperti (1) tahun 1993--1994 muncul kasus Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, (2) tahun 1993--1997 muncul kasus besar tentang pendirian Bali Nirwana Resort (BNR) di kawasan Tanah Lot, di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, (3) reklamasi Pantai Padanggalak di Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terjadi pada tahun 1997—1998, (4) kasus Bali Pecatu Graha di Desa Pecatu, Kecamatan Selatan, Kabupaten Badung pada tahun 1998—1999, (5) kasus tentang kawasan kesucian Pura Uluwatu pada tahun 2008, dan (6) sampai pada pertengahan tahun 2015 masih dalam proses perjuangan muncul kasus tentang reklamasi kawasan Teluk Benoa.

Menurut Chambers dan Giddens (dalam Atmadja, 2010: 31), masyarakat Bali memiliki pengetahuan dan teknologi tradisional yang disebut "pengetahuan rakyat pedesaan" yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk suatu tradisi. Tradisi memiliki karakteristik, di antaranya adalah terkait dengan memori kolektif dan tradisi melibatkan ritual sebagai strategi pemertahanannya. Di pihak lain yang terkait dengan gagasan kebenaran formulatif, yaitu tradisi memiliki penjaga serta muatan normatif atau moral yang merupakan pembentuk karakter pengikat. Oleh karena itu, orang mengikuti tradisi tanpa memerlukan pemikiran alternatif. Tradisi menyediakan kerangka acuan bertindak yang dianggap benar sehingga orang tidak perlu mempertanyakannya.

Menurut Keraf (2002: 289), tradisi memiliki ruang lingkup sangat luas dan kompleks. Salah satu unsurnya adalah kearifan tradisional. Lebih jauh dijelaskan bahwa tradisi adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas sosiologis. Jadi, yang dimaksud dengan kearifan tradisional tidak hanya menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan relasi yang baik di antara manusia, tetapi juga menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis.

Bertolak dari gagasan tersebut, menurut Atmadja (2010:32), tampak bahwa kearifan tradisonal dapat berbentuk kearifan sosial (adat kebiasaan yang memedomani hubungan antarmanusia) dan dapat berbentuk kearifan lingkungan (adat kebiasaan yang memedomani hubungan antara manusia dan lingkungan sekitarnya). Menurut Fakih (2004:29--30), dalam perkembangan selanjutnya tradisi mesti dihadapkan dan dipengaruhi oleh modernisasi dengan kecenderungan pemujaan budaya putih global yang memperkuat pengadopsian budaya Barat. Banyak tradisi masyarakat Bali yang diadaptasikan, dimarginalkan, atau disingkirkan karena tidak sesuai dengan modernitas. Ini terjadi tidak hanya karena pengetahuan dan teknologi Barat yang dominatif dan hegemonik, tetapi juga karena di dalam modernisasi, tradisi dipahami sebagai bagian dari masalah yang harus ditransformasi. Sebagaimana pendapat Giddens (2005: 43) bahwa penerimaan modernitas, berarti manusia mengontraskan dirinya dengan tradisi. Sumber keterbelakangan negara-negara yang sedang berkembang sebenarnya terjadi dari sistem sosial dan kelembagaan tradisional yang dimiliki. Oleh karena itu, apa pun program yang dicanangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam rangka mewujudkan modernisasi, diperlukan reformasi total terhadap sistem sosial dan kelembagaannya. Dengan asumsi ini, timbul detradisionalisasi sehingga pengaruh tradisi terhadap masyarakat menjadi semakin lemah.

Atmadja (2010:33) menyatakan bahwa detradisionalisasi seperti pemarginalan, pelenyapan, dan pergantian yang berkembang dalam masyarakat Bali berkaitan erat dengan refleksivitas sebagai ciri dinamis modernitas. Tujuan modernisasi adalah untuk mengembangkan institusi-institusi dengan cara melakukan

transformasi kultural guna mewujudkan nilai-nilai efesiensi, ekonomis, efektif, tepat waktu, dan rasional (dalam menentukan keputusan) yang terbebas dari tradisi, adat, dan ikatan komunalisme. Atmadja juga mengadopsi pendapat Giddens, yang menyatakan bahwa refleksivitas berarti" praktik sosial terus menerus diuji dan diubah berdasarkan informasi yang baru masuk, dan yang paling praktis". Apa pun bisa direfleksi entah yang modern entah yang tradisional untuk digantikan dengan yang baru agar nilai praktisnya semakin meningkat.

Sejak wisata Pura Tanah Lot mengalami perkembangan telah banyak pengetahuan masyarakat Desa Pakraman Beraban terserang refleksivitas dengan menggantikan sesuatu yang lebih praktis agar terjadi peningkatan hidup secara optimal. Seiring dengan itu, dalam komunitas masyarakat Desa *Pakraman* Beraban telah terjadi kehilangan modal kultural dan modal sosial yang sangat berharga. Refleksivitas terjadi pada beberapa tradisi, baik dalam konotasi kelembagaan maupun individual sebagai penjaga tradisi.

Persekutuan masyarakat tradisional dalam bentuk *desa pakraman* merupakan lembaga yang secara langsung ataupun tidak langsung bisa memainkan peran penting sebagai penjaga tradisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3, Tahun 2001 tentang *desa pakraman.* Geertz (1977) dan Atmadja (1998) menyatakan bahwa dalam tata aturan tersirat fungsi *desa pakraman* adalah sebagai basis bagi pengembangan dan pemertahanan adat dan agama Hindu. Lebih lanjut menurut Atmadja (2010: 47), *desa pakraman* memiliki struktur kepemimpinan kolektif, yakni prajuru *desa pakraman* yang diketuai oleh *bendesa pakraman* dan kelihan *banjar pakraman*. Oleh karena itu, berbicara tentang peran *desa pakraman* sebagai penjaga tradisi, tidak bisa dilepaskan dari peran *bendesa pakraman*. Mereka mengorganisasikan *krama desa pakraman* dalam menjaga, menafsirkan, mempraktikkan, dan mewariskan tradisi sehingga tradisi bisa hidup berkelanjutan secara meruang, mewaktu, dan mengondisi atau dalam konteks *desa, kala, dan patra*.

Terkait dengan kawasan suci Pura Tanah Lot, merupakan suatu wilayah (zona) bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban yang harus dijaga kesuciannya. Secara kelembagaan wilayah ini dimaknai dan diyakini oleh masyarakat Desa Pakraman Beraban dapat memberikan pengaruh terhadap keberadaan kesucian Pura Tanah Lot.

Keyakinan ini telah dilakukan secara mentradisi sejak sebelum Pura Tanah Lot dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Luas wilayah dan tanda-tanda pembatas kawasan suci Pura Tanah Lot yang digunakan sebagai bukti adalah media secara alami dan telah ditetapkan dalam *awig-awig* desa.

Pandangan masyarakat Desa Pakraman Beraban dalam konteks kawasan suci Pura Tanah Lot adalah kawasan *karang kekeran* yang mengandung makna tentang ketentuan batas/ kawasan yang harus disakralkan. Ketentuan kawasan suci Pura Tanah Lot merupakan warisan leluhur yang disakralkan dan diyakini kesuciannya dan keangkerannya. Dengan demikian masyarakat Desa Pakraman Beraban tidak berani melakukan suatu pelanggaran terhadap apa yang ditetapkan. Ketentuan tentang *karang kekeran* juga sudah diperkuat dengan mencantumkan dalam *awig-awig* Desa Pakraman Beraban.

Ada beberapa hal penting berupa larangan isi dari *bhisama* tentang *karang kekeran* Pura Tanah Lot sebagaimana diterangkan mantan Bendesa Pakraman Beraban berikut ini.

> *"ring sajeroning warga Desa Pakraman Beraban ten kedadosan ngelaksanayang upacara kelayusekaran (*upacara kematian*/ ngaben) ring wawengkon utawi wewidangan karang kekeran manut kadi uger-uger wates sane sampun kacumawisan manut awig-awig Desa Pakraman Beraban. Indik pemargi upacara sane tiyosan kedadosang. Tiyosan ring punika indik mekarya wewangunan pekubonan taler kedadosang. Yening wenten sane jagi makarya wangunan keanggen mautsaha taler dados, nanging utsaha punika mejanten ten jagi mawinan rered kesucian kahyangan lan manah warga Desa Pakraman Beraban, inggih punika sekadi mautsaha kolam renang ten dados, mekarya balon terbang sane medaging jadma maplesiran, taler ten dados mekarya penginapan. Indik parilaksana, sang sape sire ugi ten kedadosang matemu semara mekadi alaki rabi, saha ngerawos cuwah cawuh ten kadadosang. Yening prade sami punika kalanggar janten jagi keni salah lan patut makarya upacara pabersihan manut pararem"(Arwata, wawancara tanggal 31 Mei 2015).*

Konsekuensi pernyataan di atas mengandung suatu maksud bahwa di areal *karang kekeran*, dilarang dilaksanakan upacara *yadnya*

kematian (*ngaben*), tetapi upacara *yadnya* lainnya diperbolehkan. Demikian juga diperbolehkan membangun tempat permukiman dan membangun tempat usaha. Khusus tentang bangunan tempat usaha tidak boleh membuat usaha yang dipandang dapat mencemari *kahyangan* Pura Tanah Lot dan mencemari perasaan warga masyarakat, seperti kolam renang dan penginapan. Selain itu, tidak diperkenankan juga melakukan perbuatan yang melanggar norma. Salah satu di antaranya adalah hubungan suami istri. Demikian juga tidak diperkenankan berucap dengan kata-kata kotor. Apabila terjadi pelanggaran, akan dikenai hukuman denda dengan melaksanakan ritual upacara penyucian. Sampai saat sekarang peraturan itu tetap dihormati dan diterapkan, bahkan memberikan sugesti tentang kemantapan keyakinan bagi warga masyarakat Desa Pakraman Beraban.

Konon sebelumnya ketentuan yang dinyatakan dalam *bhisama* hanyalah bersifat lisan. Oleh karena itu, ada saja warga masyarakat yang meragukan keanggkeran/ kekuatannya, seperti penuturan salah seorang warga setempat berikut ini.

> *"....Sane dumun wenten salah satu wargan tiange mekarya umah wau ngarangin di wewidangan karang kekeran adane Pan Kandia. Ipun dados dalang tur sering ngewayang. Kasuwen-suwen ipun padem, nanging minab bes liyu ipun meduwe jinah, mapan wusan ngadol tanah ajine mael. Raris ipun keabenan olih keluargan nyane, nanging upacara kelaksanayang ring genahne ane baru punika. Akeh wargan tiyange nuturin mangde sampunang ngelaksanayang upacara pitra yadnya drika manut kadi kecap bhisama. Nanging ipun jeg memuuk tur kantos praside puput karyan nyane. Raris ten je suwe pisan jeg kurenan ipun malih padem, wusan upacara ten je maselang atahun malih wenten padem, terus kenten kantos telah kayang makejang, mangkin putung ten wenten sentana sane ngelanturang (Sutarya, wawancara 27 Mei 2015).*

Terjemahan:

> Pada waktu dahulu ada salah seorang warga saya, yaitu Pan Kandia membangun rumah baru di areal kawasan suci. Dia adalah seorang dalang yang sering pentas. Lama-kelamaan dia kena musibah meninggal, mungkin karena dia banyak

mempunyai uang karena menjual tanah dengan harga mahal. Lalu dilakukan upacara *ngaben* oleh keluarganya, tetapi upacara dilangsungkan di rumahnya yang baru itu. Pada saat itu banyak warga masyarakat memberikan nasihat agar tidak melakukan upacara di sana sesuai dengan larangan *bhisama*. Akan tetapi, dia tidak menghiraukan, lanjut melaksanakan upacara sampai selesai. Dalam waktu tidak terlalu lama, istrinya mennggal. Setelah itu dalam jarak belum setahun ada lagi yang meninggal. Akhirnya, semua meninggal sekarang tidak ada yang melanjutkan keturunannya.

Dari kejadian itu akhirnya masyarakat yang semula meragukan keangkeran *bhisama* menjadi percaya penuh dan mencantumkan segala aturan *bhisama karang kekeran* dalam *awig-awig desa pakraman*. Dalam *awig-awig* juga dipertegas dengan uraian bahwa jika ada warga yang meninggal di wilayah *karang kekeran,* segala upacara kematian harus dilaksanakan di rumah asal (pokok) di wilayah banjarnya masing-masing. Andai kata yang meninggal di wilayah *karang kekeran* dan tidak mempunyai rumah pokok/ keluarga di wilayah *desa pakraman,* maka proses upacara menjadi tanggung jawab *desa pakraman* melalui *krama banjar* orang yang meninggal. Masyarakat siap mengurus mulai dari membuatkan tempat sementara di *setra* (kuburan), menjaga, bergotong royong sampai upacara selesai. Setelah upacara selesai keluarga yang meninggal dikenai upacara penyucian di wilayah *karang kekeran* tempatnya meninggal. Begitu juga kalau ada warga lain meninggal di wilayah *karang kekeran*. Apabila dari pihak keluarga tidak sanggup mengadakan upacara penyucian *karang kekeran*, upacara dilakukan oleh Desa Pakraman Beraban.

Kawasan suci Pura Tanah Lot yang sejak dahulu dijaga nilai kesuciannya melalui kesepakatan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan agar terbebas dari bangunan saat ini hanya tinggal slogan. Betapa tidak, karena saat sekarang dari semua sisi batas-batas yang ditetapkan sebagai kawasan suci telah berdiri banyak bangunan jasa pariwisata sampai di pinggir pantai dekat Pura Tanah Lot. Kawasan suci yang semula berupa hamparan sawah berubah menjadi komoditi, tidak saja diperuntukkan bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban sebagai pemilik lahan, tetapi juga dijual kepada kaum kapitalis (investor), sehingga pada akhirnya para pemilik lahan terdorong untuk berspekulasi atas tanahnya. Bahkan banyak masyarakat yang

sebelumnya mempunyai tanah di areal kawasan suci, tetapi sekarang justru tidak mempunyai sama sekali tempat untuk membangun sebuah kios.

Keberadaan Pura Tanah Lot yang religius sebagai bagian dari budaya manusia didukung dengan keindahan alam pantai merupakan salah satu cara melaksanakan atau mengorganisasikan dalam bentuk kawasan tempat suci pada akhirnya diproduksi sebagai modal pariwisata. Ada beberapa faktor yang dapat dilihat sebagai penyebab terjadinya komodifkasi kawasan suci Pura Tanah Lot di Desa Pakraman Beraban dapat dijelaskan sebagai berikut .

Faktor **hegemoni**, sangat besar peranannya dalam pengembangan pariwisata tampak ketika Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan penetapan Perda No 3, Tahun 1974 tetang pariwisata budaya. Tindak lanjut dari Perda itu, kemudian dalam upaya memeratakan perekonomian masyarakat Bali dikeluarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No 15/1988, tentang 15 kawasan wisata yang isinya termasuk Tanah Lot. Gagasan penetapan sejumlah kawasan itu dapat dikatakan sebagai cikal bakal terjadinya eksploitasi para pemodal pariwisata. Gagasan Ida Bagus Mantra saat itu yang bertujuan bahwa Bali memang harus dibuka untuk pariwisata. Namun, pihak-pihak pada masa kepemimpinan selanjutnya pancingan yang berupa gagasan itu disalahgunakan, sehingga memunculkan kaum kapitalisme yang saat itu dikendalikan oleh pusat semakin serakah ingin menanam modalnya di Bali. Buktinya ketika pemerintahan era orde baru (Gubernur Ida Bagus Oka) membuat keputusan bahwa dari lima belas kawasan wisata sebelumnya dikembangkan lagi melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 528, Tahun 1993 tentang 21 Kawasan Pariwisata pada 6 Oktober 1993 sehingga ada penambahan lagi enam kawasan wisata. Selanjutnya keputusan itu diperdakan ke dalam Perda Nomor 4, Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Bali pada 2 Juli 1996 di Bali. Belakangan Perda Nomor 4, Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Bali diamandemen oleh Perda Nomor 4 Tahun 1999 (*Kompas*, 23 Desember 2004). Perda ini menetapkan Tanah Lot bukan lagi sebagai kawasan wisata, melainkan objek (dan daya tarik).

Berdasarkan surat itu, selanjutnya menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengelola Tanah Lot sebagai destinasi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan

cara-cara hegemoni melalui wacana kuasa. Sehingga, secara tidak langsung telah membuat konsensus dengan pengusaha pariwisata dan masyarakat untuk menerima ideologi pariwisata. Tampak masyarakat sebagai subordinat menerima gagasan, nilai-nilai, maupun kepemimpinan kelompok dominan karena dalam hegemoni tersebut dirasakan oleh Desa Pakraman Beraban dapat mengekspresikan kepentingan-kepentingannya, terutama kepentingan ekonomi dan budaya.

Faktor **globalisasi,** sebagaimana dijelaskan oleh Supriadi (1994:73) bahwa sebenarnya globalisasi dalam satu segi berarti maraknya proses penyebaran pengaruh budaya sedemikian rupa sehingga tidak sekadar bersifat bilateral/bipolar (melibatkan dua pihak), tetapi bersifat multilateral (melibatkan beberapa pihak). Globalisasi benar-benar bersifat mondial dalam arti melingkupi semua pihak di pelosok bumi. Ardika (1997:2 dan 7) menyatakan bahwa globalisasi membentang luas menembus batas-batas geografi, diwarnai dengan kecanggihan teknologi dan informasi, seakan-akan dunia menjadi sempit. Globalisasi menyebabkan pentingnya pemahaman terhadap budaya lain. Ardika juga meramalkan bahwa pada era globalisasi muncul sejumlah isu; kebudayaan, agama, etnik, gender, dan *life style* (gaya hidup) akan lebih penting dibandingkan dengan konflik ekonomi yang terjadi pada masa industri. Kecenderungan lain adalah adanya semacam penolakan terhadap keseragaman (*counter trend*) yang ditimbulkan oleh kebudayaan global (kebudayaan asing) sehingga muncul hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa sendiri. Dalam hubungan ini Ardika memberikan contoh peninggalan arkeologi, sebagai warisan budaya masa lalu akan tetap menjadi sumber inspirasi. Tinggalan arkeologi yang unik di Bali akan menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke pulau "*dewata*".

Pakar pariwisata Pitana (1994:137) menjelaskan bahwa gejala globalisasi dan modernisasi telah menyusup ke seluruh pelosok dunia sehingga tak ada satu masyarakat pun yang terlepas dari pengaruh modernisasi tersebut. Secara umum modernisasi diartikan sebagai transformasi masyarakat secara menyeluruh pada berbagai bidang kehidupan dan terjadi semakin cepat dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bali sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak terlepas dari fenomena ini. Bahkan, proses itu terjadi sangat cepat terkait dengan kenyataan bahwa Bali merupakan daerah

tujuan wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dengan beranekaragam budayanya. Dengan demikian, mau tidak mau masyarakat dan kebudayaan Bali harus berkomunikasi dengan budaya aneka bangsa yang beraneka ragam. Akibatnya dalam perkembangannya masyarakat Bali mengalami loncatan sangat jauh dari budaya ekonomi agraris menuju masyarakat budaya ekonomi jasa (khususnya kepariwisataan).

Abdullah (2007:3) menyatakan bahwa dalam dunia yang semakin terintegarsi dengan tatanan global, batas-batas antara Amerika, Venezuela, dan Cina tersebut, seperti halnya Indonesia, menjadi mencair akibat arus orang, barang, informasi, ide-ide yang semakin lancar, padat, dan intensif. Arus keluar masuk orang dari dan ke suatu daerah, seperti dari dan ke Pulau Bali telah menyebabkan sifat-sifat Bali mengalami perubahan tidak lagi seperti bentuk aslinya walaupun perubahan itu bisa jadi bermakna. Unsur-unsur budaya Bali pun kemudian tidak hanya mengalami penyesuaian, tetapi juga dengan mudah dapat ditemukan di berbagai tempat, di luar batas-batas geografis Bali. Apa yang ada di Bali mulai tersebar diberbagai tempat akibat interaksi dengan berbagai bangsa melalui berbagai alat transfortasi dan komunikasi. Sebagai bukti bahwa sejak pariwisata Tanah Lot mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terkenal di dunia pariwisata mancanegara menandakan bahwa pariwisata telah menjadi kekuasaan simbolik yang membentuk citra kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai daerah internasional. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi akan dengan cepat tersebar ke seluruh dunia.

Berdasarkan pemikiran Ardika (2007 : 14--15) diketahui bahwa arus kebudayaan global dapat diketahui dengan memperhatikan hubungan antara lima konsep dan kebudayaan global. Kelima konsep tersebut diistilahkan dengan (1) *ethnoscapes,* (2) *technoscapes*, (3) *Triediascapes*, (4) *finanscapes,* dan (5) *ideoscapes*. Tiap-tiap konsep ini dapat dijelaskan berikut ini.

(1) *Ethnoscapes* ditandai dengan perpindahan penduduk atau orang dari suatu negara ke negara lain, seperti wisatawan, imigran, pengungsi, dan tenaga kerja yang menjadi ciri kebudayaan global. Arus aliran wisatawan terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kesadaran global. Hal itu ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan adanya pasar terbuka. Demikian juga proses migrasi yang terjadi di berbagai belahan bumi, adanya tenaga kerja legal dan kemungkinan tenaga kerja ilegal, imigran dan pengungsi

membawa budaya masing-masing. Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia potensial telah nyata menerima arus aliran wisatawan mancanegara. Di samping itu, juga terjadi perkawinan antara masyarakat lokal (Bali) dan asing merupakan implikasi pergaulan dan interaksi yang intensif.

(2) *Technoscapes* atau arus teknologi kini mengalir dengan kecepatan tinggi dan tidak rnengenal batas negara. Berkembangnya komunikasi massa, seperti telepon genggam yang marak digunakan untuk komunikasi cepat tanpa memerlukan tempat khusus dan di mana saja bisa berinteraksi, menerima informasi dan sebaliknya menyampaikan informasi. Artinya, menyaksikan kejadian di seluruh dunia dapat melalui tayangan televisi dengan menggunakan parabola di rumah tanpa harus susah payah untuk mendapatkan dan menyaksikan ke tempat lain.

(3) *Mediascapes* mengacu kepada media yang dapat menyebarkan informasi ke berbagai belahan dunia. Peran media elektronik dan media massa semakin mengglobal. Sebagaimana peristiwa memilukan, yaitu tragedi Bom Bali I pada tahun 2002 dan tregedi Bom Bali II pada tahun 2005 dan berbagai tindakan kejahatan seperti pembunuhan seorang anak kecil (Anggelina) pada bulan Juni tahun 2015 dengan cepat dikonsumsi oleh masyarakat dunia melalui penayangan baik media televisi maupun media massa surat kabar dan majalah-majalah.

(4) *Finanscapes* adalah aspek financial atau uang yang sulit diprediksi dalam era globalisasi atau mengalirnya ditribusi kapital ke berbagai negara. Distribusi ini bisa dari negara maju ke negara berkembang atau sesama negara maju.

(5) *Ideoscapes* adalah komponen yang terkait dengan masalah politik seperti kebebasan, demokrasi, kedaulatan, kesejahteraan, dan hak seseorang. Globalisasi merupakan proses yang dinamis dan sekaligus akan menjadi suatu gejala yang tak dapat dihindarkan. Namun, juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya setiap aspek kehidupan manusia.

Pernyataan Ardika ini telah membuktikan adanya suatu gejala terjadinya pengaruh globalisasi secara cepat terhadap kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Beraban sebagai tempat perkembangan wisata Pura Tanah Lot. Hal itu ditandai dengan adanya beberapa migrasi penduduk dari daerah lain yang ikut berperan dalam perkembangan pariwisata, terutama kaum kapitalis selalu berusaha

agar dapat mengembangkan usahanya di sekitar wisata Tanah Lot. Para pelaku jasa kepariwisataan, terutama biro perjalanan secara kompetitif dalam memajukan usahanya selalu mengomunikasikan wisata Tanah Lot sebagai tujuan yang utama. Masyarakat Desa Pakraman Beraban dalam memperjuangkan diri untuk menuju kehidupan yang sejahtera dan dapat pengakuan dalam status sosial sudah mulai menunjukkan adanya gejala perjuangan dalam tatanan indipidualistis.

Globalisasi telah menembus batas-batas atau ruang yang tak terbatas. Pengaruhnya yang melanda dunia sejak akhir abad XX menyentuh berbagi aspek kehidupan manusia. Bali sebagai salah satu bagian masyarakat dunia tidak dapat dilepaskan dari fenomena globalisasi. Prosesnya sangat cepat mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Tujuan datang ke Bali di samping berwisata juga mempunyai tujuan memantapkan kewiraswastaan yang ditanamkan di Bali meraih keuntungan ganda, yakni meningkatkan perekonomian dengan jalan membuat usaha dalam bentuk perusahan seperti perdagangan (ekonomi) dan berwisata. Berkembangnya pasar bebas, dan penanaman modal asing di daerah ini (Bali) dilakukan dengan gencar. Upaya itu memberikan peluang besar penanam modal asing (kapitalis) dalam bentuk prasarana dan sarana pariwisata. Selain itu juga berdampak terhadap meningkatnya arus kunjungan ke Bali.

Piliang (2006 : 274--275) menyatakan bahwa kapitalisme merupakan wujud dari globalisasi. Masyarakat kapitalisme global dibangun di atas iklim persaingan yang tinggi. Persaingan ketat antarperusahaan mendorong strategi untuk menciptakan persaingan dalam gaya hidup antar kelas, antargolongan, antartetangga, dan antar umur. Hal itu memunculkan sikap mental berorientasi ke atas dalam gaya hidup. Kehidupan sosial dikonstruksi atas dasar budaya perbedaan dengan penampilan, gaya hidup yang selalu dibuat berubah dengan tempo yang semakin tinggi dan mementingkan citra. Dalam segala realitas pencitraan mendomina daripada bobot dan isi kandungannya.

Perubahan yang terjadi akibat globalisasi adalah adanya penguatan perilaku konsumtif dari semua kalangan masyarakat. Artinya, masyarakat global bukan dalam arti sekadar masyarakat dunia. Dalam kaitan ini, Giddens (2003:93) menyatakan sebagai

sebuah dunia "ruang yang tak terbatas". Seperti halnya masyarakat posttradisional merupakan sebuah dunia di mana ikatan sosial harus benar-benar diciptakan, bukan sekadar diwarisi dari masa lalu, pada tingkat personal dan kolektif, ini adalah sebuah usaha yang sulit, tetapi sekaligus menawarkan pahala yang besar. Upaya menjadikan usaha yang disukai, tidak sekadar diproduksi untuk jangka waktu tertentu dan pendek, tetapi panjang tetap dapat dirasakan sebagai konsumsi yang bermakna.

Masuknya pengaruh globalisasi melalui jaringan pariwisata ke Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata telah menembus pelosok-pelosok daerah pedesaan termasuk ke wilayah Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Desa Pakraman Beraban merupakan suatu komunitas tradisional adalah dalam ranah sosial religius. Sejalan dengan kecenderungan pariwisata global dan kepentingan kepariwisataan Bali memengaruhi komunitas tradisional masyarakat Desa Pakraman Beraban tidak hanya bergelut dalam ranah sosial religius, tetapi memasuki ranah baru, yaitu ranah ekonomi (uang). Sekaligus menciptakan, membentuk tradisional baru yang berbeda dengan tradisi-tradisi yang diterima secara turun-temurun. Sejalan dengan hal tersebut, Maunati (2006:233) mengatakan dalam kaitan dengan industri pariwisata bahwa industri pariwisata tidak dapat dipisahkan, baik dari konsumsi di pasar global maupun lokal (industri ini melibatkan agen-agen perjalanan pariwisata lokal dan global). Dalam hal ini komodifikasi kebudayaan kerap terjadi, di mana kebudayaan diubah menjadi sebuah komoditas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi wisatawan.

Globalisasi yang berkembang selama ini tampaknya juga secara tidak langsung telah membawa dampak perubahan pada kebudayaan Bali. Perubahan tampak pada budaya masyarakat dari budaya agraris tradisional ke budaya industri pariwisata yang membuat masyarakatnya kini cenderung menjadi lebih kritis. Ekonomi uang yang didasarkan atas spirit untuk menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya memunculkan komodifikasi di berbagai sektor kehidupan masyarakatnya (Ruastiti, 2010:20). Komodifikasi merupakan proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme, yaitu benda-benda, kualitas, dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas pasar (Barker, 2005 : 17). Artinya, menjadikan segala sesutunya sebagai barang komoditas. Dewasa ini di Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kesucian

Pura Tanah Lot dan tradisi tidak semuanya menghilang, bahkan mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dapat saja diinterpretasikan sebagai sesuatu yang posisitf ataupun negatif, baik dalam tatanan komunal maupun individu. Segala bentuk perubahan pasti bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban tidak memengaruhi rasa kepercayaan dan keyakinannya. Sebaliknya, merasa bangga bisa berbuat yang lebih baik dalam ukuran perkembangan zaman sekarang ini (Suarka, wawancara 15 Juni 2015).

Menurut Atmadja (2010:13), masyarakat Bali tidak bisa menghindarkan diri dari sasaran yang diinginkan oleh negara-negara pendukung globalisasi. Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa, menjadikan kita bergantung kepada sistem ekonomi kapitalis. Mereka tak henti-hentinya memasukkan berbagai bentuk kebudayaan global ke dalam masyarakat Bali melalui pasar. Tradisi bergerak dan berkembang dalam arus globalisasi, seperti diuraikan Giddens (2003 : 82), baik baru maupun lama, di dunia modern, tradisi ada di dalam salah satu dari dua kerangka. Tradisi secara diskursif mungkin diartikulasikan dan dipertahankan dengan kata lain, dijustifikasi, sebagai sesuatu yang memiliki nilai di antara berbagai nilai yang bersaingan. Tradisi mungkin dipertahankan menurut syarat-sayarat sendiri, atau berdasarkan latar belakang dialogis. Oleh karena itu, dorongan dari luar (faktor eksternal), yaitu hadirnya produk-produk teknologi canggih serta menguatnya industri pariwisata berpengaruh besar. Teknologi merupakan tumpuan dan harapan untuk bisa tinggal landas menuju cita-cita industri baru, akhirnya pertaruhan hidup masyarakat Desa Pakraman Beraban tumbuh sedikit demi sedikit untuk dapat meningkatkan kehidupannya.

Faktor **ideologi pasar**, sebagaimana pendapat Takwin (2003: 7) menjelaskan sebagai berikut.

> "... ideologi diartikan sebagai sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi kelompok manusia dalam bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan cara menurunkan gagasan dalam ideologi menjadi sejumlah aksi dan aturan-aturan tindakan, sekelompok manusia bertindak - ideologi menjadi keyakinan (*belief*) bagi kelompok itu..."

Jadi, yang dimaksud dengan ideologi dalam penelitian ini adalah gagasan-gagasan atau ide-ide sebagai panduan ideologis bagi kelompok orang atau masyarakat yang bersangkutan dalam

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, ideologi pasar merujuk pendapat Atmaja (2010: 137--138) dengan menyebut agama pasar mengacu pada gagasan, yang penekanannya pada kenikmatan duniawi (surga di sini) sehingga manusia terjerat pada materialisme, indivisualisme, sekularisme, *instant solution*, dan otonomisme.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ideologi pasar dalam penelitian ini mengacu pada gagasan-gagasan sebagai panduan ideologis bagi tindakan yang sifatnya individualistis, pragmatis, dan materialis. Pengertian ini dijadikan acuan untuk mencermati gagasan-gagasan atau ide-ide di balik sikap dan perilaku sosial religius dalam terjadinya komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot.

Berdasarkan gagasan Marx, diketahui bahwa perluasan ekonomi kapitalis pada masyarakat Bali seeara meluas memengaruhi superstruktur ideologi dari total kehidupan manusia, termasuk di dalamnya dalam sistem berupacara agama. Kawasan kesucian pura, misalnya, sebagai tempat umat Hindu untuk melakukan sujud bakti ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) , tempat untuk memohon keselamatan, serta pengungkapan rasa horrnat dan cinta kasih, menjelma menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Salah satu contoh kawasan suci Pura Tanah Lot yang secara sengaja digagas, diproduksi, dan dikemas untuk ditawarkan kepada wisatawan dipengaruhi oleh ideologi pasar. Di dalam praktik ini tersirat suatu tujuan, yaitu mencari keuntungan uang.

Dalam sistem produksi telah terjalin kerja sama yang baik antara pengelola wisata dalam hal ini Desa Pakraman Beraban dan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan para pemilik modal (kapitalis). Kerja sama ini dapat langgeng dan berketerusan karena tiap-tiap pihak merasa diuntungkan dan mendapat keuntungan uang dari sistem tersebut. Menurut Fashri (2007:147--148), relasi manusia dioperasikan berdasarkan prinsip ekonomi berupa kalkulasi untung rugi, efektif efisien, hingga hitung-hitungan matematis. Hubungan manusia (baik pribadi maupun sosial) dipahami dengan konsep dan tolok ukur ekonomi. Artinya, semua persoalan manusia hanya bisa didekati, dilihat, dan dipahami, atau dimengerti lewat konsep dan solusi ekonomi (sistem pasar). Hal ini dapat dipahami dari ungkapan informan berikut ini.

> "*... sekate akeh torise meriki, akeh nyaman-nyaman tiyange ngadol carikne krane ajine mael pesan. Yen dumun ten kedadosan ngadol tanah driki krane genah driki wewengkon kahyangan. Yen napi kaden ngranang jeg akeh anak ngae kios. Keto masih cara tiyang polih geginan medagang driki ngadep soroh pakean. Tiyang nyewa niki kios dasa tiban santukan ten ngelah genah driki. Nah yen hitung tiyang uli hasil medagang rasa cukup anggen tiyang sadine-dine*..." (I Made Jodog , wawancara tanggal 24 Juni 2015).

Artinya

> "... sejak wisatawan banyak berkunjung ke Tanah Lot, banyak warga saya yang menjual tanahnya karena harganya sangat mahal. Padahal, dulu areal wilayah di sini disucikan, entah kenapa tahu-tahu banyak orang membangun kios. Di samping itu, saya juga ada kesempatan berjualan di sini menjual beberapa pakaian. Saya hanya ngontrak kios di sini selama sepuluh tahun karena saya tidak punya lahan di sini. Kalau saya hitung-hitung dari hasil jualan ya cukup buat untuk makan keluarga setiap hari.

Data di atas menjelaskan bahwa sistem ekonomi pasar telah merasuk dalam ranah beragama (zona kawasan suci pura). Sistem ekonomi pasar dalam hal ini dimaksudkan sebagai sistem ekonomi yang didominasi oleh kekuatan pasar (Nugroho, 2006:6). Artinya, barang, benda, dan atau jasa sengaja diproduksi dijadikan komoditas dan dijual, dicarikan pembeli atau diipasarkan, dan nilai suatu komoditas ditentukan oleh uang.

Sistem ekonomi pasar tidak saja menembus berbagai sendi kehidupan masyarakat, tetapi juga membuat kekuasaan uang semakin meningkat. Kini uang tidak saja sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang, jasa, atau yang lain di pasar, tetapi juga berperan penting dalam ranah kehidupan sosial religius. Sebagaimana dinyatakan oleh Widiastono (2004: xvii) bahwa "uang zaman dahulu hanya merambah pasar, tetapi kini uang telah merambah ke berbagai kehidupan manusia". Akibatnya, kini pasar tidak hanya seperti pasar yang dikenal sebagai pasar konvensional, tetapi telah merambah juga ke berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kehidupan sosial religius.

Dengan demikian, cara berpikir dan cara menangani kehidupan beragama saat ini sudah menyerupai pasar sesungguhnya.

Ketika produksi (kawasan suci Pura Tanah Lot) lebih didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan pasar (baca: mencari keuntungan) dan tidak ditekankan pada pendalaman mental spiritual manusia, maka citra kapitalisme tidak dapat dihindari. Penyebab utama kondisi ini atau lazim disebut komodifikasi adalah globalisasi yang bermuatan neolibelarisme yang berintikan ideologi pasar. Berdasarkan gagasan Bourdieu (Fashri, 2007: 164), diketahui bahwa neoliberalisme memiliki beberapa ciri yang berintikan bahwa segala sesuatu adalah barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini pula yang mendasari Desa Pakraman Beraban dan Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerjasama dengan para kaum kapitalis memproduksi kawasan suci Pura Tanah Lot untuk konsumsi wisatawan.

Pada masyarakat kapitalis setiap objek adalah komoditas dan dalam aktivitas ekonomi uang adalah alat tukar yang semakin mendapat tempat penting. Hal ini dapat dilihat ketika kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai sebuah komoditas, sarat dengan penghitungan dan perhitungan ekonomi. Setiap elemen yang menyertai komoditas tersebut dihargai dan dinilai dengan uang. Komoditas diciptakan tidak semata-mata hanya untuk nilai guna, tetapi juga demi nilai tukar berupa uang. Kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai elemen penting yang disucikan oleh umat Hindu diproduksi dan direproduksi tidak untuk memenuhi nilai guna (*use value*) semata, tetapi juga memenuhi nilai tukar (*exchange value*), yaitu untuk mendapatkan 'nilai lebih' (*profit*) uang. Uang menjadi satu-satunya sarana penilaian komoditas yang bersifat independen. Uang menjadi bahasa baru, membentuk dan memberikan makna realitas.

Dalam tataran ini akhirnya kawasan suci Pura Tanah Lot dapat dipahami sebagai 'bisnis' modern yang berbingkai kapitalisme yang berangkat dari nafsu kebendaan (uang) dan nafsu kekuasaan. Menurut Garet Garret (Murchland, 1992: xi), kapitalisme sebenamya berangkat dari tiga nafsu, yaitu nafsu kebendaan, nafsu kemegahan, dan nafsu kekuasaan. Dengan demikian, bisnis dinyatakan sebagai naluri tamak manusia yang bertindak di luar motif-motif humanistik. Fenomena ini kemudian oleh Theodor Adorno dan Max Hokheimer (Pilliang,1999:33) diistilahkan sebagai proses 'komodifikasi kultural'. Proses komodifikasi ini disebut 'pencerahan' palsu kapitalisme, yakni

memproduksi komoditas untuk kebutuhan 'pemakai', yaitu pemakai yang telah dirasionalisasikan dalam sistem ekonomi.

G. Pemertahanan Kesucian Lewat Tindakan Preventif dan Kuratif

Hakikat dari keinginan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam menempuh alur kehidupan di dunia ini adalah kebaikan, kesucian, ketenangan, dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan semua itu manusia menghindar dari hal-hal yang dipandang tidak baik karena hal tersebut dapat menghambat kepentingan hidup spiritual. Upaya untuk menjaga keseimbangan dan kesucian lahir batin untuk mencapai tujuan hidup beragama, yaitu *Moksartham jagadhita ya ca iti dharmah.* Terkait dengan itu, umat Hindu mengenal istilah *cuntaka* untuk menyebut suatu keadaan yang dipandang tidak seimbang yang dapat menghambat kepentingan rohani. Kategori suatu keadaan dipandang kurang seimbang (*cuntaka*) dilatarbelakangi oleh pandangan agama Hindu yag membedakan situasi dan kondisi menjadi dua, yakni keadaan suci (sakral) dan tidak suci (profan).

Suci adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan ketenangan, keharmonisan sehingga dapat menciptakan suasana spiritual yang mantap dan magis. Untuk menciptakan situasi yang demikian, umat Hindu menyucikan lingkungan, sarana-sarana (alat-alat) upacara, *parhyangan* (tempat suci), dan hal-hal lain dengan upacara keagamaan yang dapat menimbulkan keharmonisan jiwa umat Hindu. Sebaliknya, yang dipandang tidak suci (profan) adalah semua benda dan tempat yang tidak pernah disucikan melalui upacara keagamaan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak suci, seperti kematian, melahirkan, perkawinan, mitra ngalang, menstruasi, dan lain-lain. Keadaan seperti itu dapat berpengaruh terhadap perasaan masyarakat umat Hindu sehingga segera harus disucikan melalui upacara penyucian.

Penerapan istilah suci dan *cuntaka* dalam kehidupan sosioreligiusitas umat Hindu di Bali terikat pada tatanan nilai dalam arti yang mengandung makna relatif dan subjektif. Artinya, sangat dipengaruhi oleh keadaan *desa, kala, dan patra* (tempat, waktu, dan sastra). Agama dalam arti sempit merupakan masalah pribadi seseorang dengan keyakinannya sendiri dalam pertaliannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, rasa suci dan tidak suci dirinya pada dasarnya adalah vonis yang ditetapkannya sendiri atas

dirinya dengan tanggung jawabnya sendiri pula untuk menghadapi "*dewa danda"*.

Gunadha (1993: 8) menjelaskan bahwa sesuatu dan atau seseorang suci atau *cuntaka* merupakan hasil penilaian yang berpangkal tolak dari opini rasa hati. Suci atau *cuntaka* merupakan suatu sifat yang benar-benar gaib dan sulit diukur karena merupakan gerak jiwa yang irasional, tak bisa dianalisis dengan akal. Rasa opini umat Hindu sebagai yang hidup di hati masyarakat merupakan hasil perkembangan kesadaran/ didikan beragama, bukan dari hasil pertimbangan rasional.

Apa pun yang terjadi di dunia ini adalah karena hubungan sebab akibat. Hukum sebab akibat memengaruhi kehidupan umat Hindu di alam ini sehingga pada kenyataannya *cuntaka* menurut pandangan umat Hindu sudah pasti ada penyebabnya. Pengetahuan itu selalu mendasari perasaan umat Hindu sehingga selalu berusaha dalam hidupnya menjaga kesucian sebagai bagian dari aktifitas untuk kepentingan hidup spiritual. Demikian tingginya kesadaran umat Hindu dan selalu menginginkan yang terbaik dan tersuci baginya, tetapi ketidakbaikan dan ketidaksucian juga yang dihadapinya, sehingga *cuntaka* dikonotasikan sebagai keadaan yang tidak dapat dihindari. Jika terjadi *cuntaka,* selalu diupayakan untuk direinterpretasikan agar kembali memberikan kenyamanan apalagi keadaan *cuntaka* terjadi pada tempat suci (pura).

Berdasarkan istilah Bourdieu (dalam Rusdiati, 2003:33--36), diketahui bahwa *habitus* adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. *Habitus* digunakan oleh individu dalam berurusan dengan realitas sosial. *Habitus* merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu beruhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur subjektif yang ada pada ruang sosial, yang terjadi secara halus, tak disadari, dan tampil sebagai hal yang wajar. Dengan demikian, seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan diberikan oleh alam, atau sudah dari sananya. Artinya, *habitus* adalah struktur sosial yang dibatinkan dan diwujudkan.

Berkaitan dengan pengertian dari Bourdieu di atas, pura adalah tempat suci agama Hindu di Bali yang bersangkut paut dengan orang melakukan pemujaan terhadap yang disucikan dan dihormati dengan berbagai atribut serta aturan budaya dan aturan agama yang menyertainya. Di dalam pandangan orang Hindu (Bali), sejak dahulu telah melaksanakan rasa bakti melalui pemujaan kepada Tuhan (*Ida*

Sang Hyang Widhi Wasa) dengan melaksanakan persembahyangan ke tempat-tempat suci (pura), baik pada hari *odalan* maupun pada hari-hari tertentu. Selama hidupnya dan dalam berhubungan dengan individu-individu lain di masyarakat, mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang aturan untuk menjaga nilai kesucian pura. Oleh karena itu, penelitian kawasan suci Pura Tanah Lot dalam hal ini dimaksudkan untuk menyajikan keadaan yang sesungguhnya mengenai eksistensi Pura Tanah Lot dan segala yang bersangkut-paut dengan nilai kesucian pura dalam lingkup kawasan yang disucikan.

Secara umum keberadaan pura di Bali identik dengan umat Hindu, artinya di mana pun umat Hindu berada selalu disertai dengan keberadaan tempat suci sesuai dengan identitasnya masing-masing sehingga di setiap pekarangan dan tempat-tempat tertentu terdapat bangunan suci (pura). Atas dasar itu pula identitas Bali disebut dengan Pulau Seribu Pura, Pulau *Kahyangan*, dan Pulau Surga. Sebagai bukti adalah adanya ribuan pura besar dan kecil tersebar di seluruh walayah pantai, pedalaman, dan pegunungan di Bali. Dari keseluruhan pura-pura tersebut dilihat dari karakteristik/ciri-ciri masyarakat pemujanya (*penyungsung*) dapat dikelompokkan menjadi empat, jenis yaitu seperti berikut.

(1) Pura Umum

Ada tiga jenis pura yang tergolong pura umum dilihat dari ciri-ciri pemujanya. Pertama, *pura kahyangan jagat* adalah pura yang dipuja oleh umat yang berasal dari berbagai jenis ikatan, seperti ikatan sosial, ikatan ekonomis, ikatan geneologis (garis keturunan), dan klan sehingga pura ini sering disebut dengan *pura kahyangan jagat*, seperti *Pura Besakih*, *Pura Batur*, dan *pura sad kahyangan*. Kedua, pura umum yang berfungsi untuk memuja kebesaran atau jasa guru suci (*Dang Guru Suci*) atas jasanya telah memberikan ajaran-ajaran suci, seperti Pura Purancak, Pura Rambut Siwi, Pura Tanah Lot, Pura Pulaki, Pura Ponjok Batu, Pura Silayukti, Pura Kentel Gumi, Pura Petitenget, Pura Luhur Uluwatu, Pura Tanah Lot, dan pura Dang Kahyangan. Ketiga, pura yang dihubungkan dengan tempat pemujaan dari kerajaan yang pernah memerintah di Bali, seperti Pura Taman Ayun (Kerajaan Raja Mengwi), Pura Dasar Gelgel (Kerajaan Gelgel di Klungkung), dan pura lainnya.

Pura kahyangan jagat di Bali didirikan atas dasar konsep filosofis untuk memuliakan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) sebagai sumber terciptanya alam semesta beserta isinya (*uttpati*),

sebagai pemelihara atas segala ciptaan-Nya (*Stithi*), dan selanjutnya sebagai pengembali atas segala yang telah diciptakan menuju asalnya semula (*pralina*). Demikian juga kapasitas *Ida Sang Hyang Widhi* dalam manifestasi-Nya sebagai penjaga setiap arah alam semesta ini (*bhuwana agung*). Berdasarkan hal itu akhirnya para *Dang Guru* dan para rohaniwan membuatkan tempat suci pura dilandasi dengan konsep filosofis sesuai dengan *tattwa* agama Hindu. Adapun konsep yang digunakan adalah sebagai berikut.

Pertama, konsepsi *rwa bhineda,* yaitu dua kekuatan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam dimensi keseimbangan antara kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani, yang diidentifikasi sebagai *purusha* dan *pradhana.* Implmentasi dari dua kekuatan itu diwujudkan dengan *Pura Besakih* sebagai *purusha*, dan *Pura Batur* sebagai *pradhana.* Setiap umat Hindu selalu mendambakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya. Kebahagiaan itu akan tercapai apabila telah terjadi keseimbangan pada dirinya melalui pemenuhan kebutuhan, baik rohani maupun jasmani. Agar kedua kebutuhan itu tercapai, umat Hindu wajib hukumnya mohon anugerah kekuatan kebahagiaan rohani di *Pura Besakih* dan kekuatan kebahagiaan jasmani di *Pura Batur*.

Kedua, konsep *catur loka phala*, yaitu kongkretisasi dari *cadu sakti* (empat kemahakuasaan *Ida Sang Widhi Wasa*). *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* disimbolkan menguasai empat arah mata angin pada *bhuwana* ini. Di keempat penjuru mata angin, manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* masing-masing dibuatkan pura sebagai simbol stana Beliau. *Pura Lempuyang* sebagai simbol penguasa arah timur, *Pura Andakasa* simbol penguasa arah selatan, *Pura Batukaru* sebagai sebagai simbol penguasa arah barat, dan *Pura Puncak Mangu* sebagai simbol penguasa arah utara. Di *Pura Lempuyang* umat Hindu mohon kekuatan kepada manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi* sebagai *Dewa Iswara* agar memberikan tuntunan dalam mengembangkan alam pikiran untuk selalu bisa berbuat kebaikan. Artinya, memohon kekuatan agar, baik api alam semesta maupun api dalam diri manusia (keinginan), dapat memancar sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, umat Hindu wajib melaksanakan pemujaan di *Pura Andakasa* sebagai simbol penguasa arah selatan. *Pura Batukaru* adalah simbol dari *Dewa Maha Dewa* yang menguasai kiblat barat, sebagai tempat umat memohon kekuatan agar tanaman tumbuh subur dan bebas dari hama penyakit. Di pihak lain *Pura Puncak Mangu* sebagai simbol

stana Dewa Wisnu pada arah utara. Pura ini sebagai tempat mohon agar sumber-sumber air yang ada terlindungi dan terpelihara.

Ketiga, konsep *sad winayaka (sad kertih)*, yaitu enam kemahakuasaan *Ida Sang Hyang Widhi* melalui manifestasi Beliau dalam enam kelompok *Dewa* yang bertugas melindungi enam hal. Menurut *Lontar Padma Bhuwana, Lontar Dewa Purana Bangsul, Lontar Widhisastra, Lontar Usana Bali,* dan *Lontar Kusumadewa* diwujudkan dengan enam jenis pura, yakni *Pura Besakih, Pura Lempuyang, Pura Goa Lawah, Pura Uluwatu, Pura Batukaru, dan Pura Pusering Tasik.* Keenam pura ini juga sering disebut dengan *sad kahyangan*. Di enam pura ini umat Hindu melaksanakan ritual untuk memohon perlindungan terhadap enam hal, yani (1) *atma kertih* di Pura Besakih, yaitu mohon untuk melindungi kesucian atma; (2) *samudra kertih* di Pura Lempuyang, yaitu melindungi kelestarian samudra; (3) *danu kertih* di Pura Goa Lawah, yaitu mohon perlindungan akan sumber-sumber air; (4) *wana kertih* di Pura Uluwatu, yaitu mohon dilindungi kelestarian hutan dan gunung; (5) *jagat kertih* di Pura Batukaru, yaitu perlindungan tentang keharmonisan dinamika sosial; dan (6) *jana kertih* di Pura Pusering Tasik, yaitu mohon perlidungan akan hak asasi manusia secara individual (Wiana, 2000: 4).

Keempat, konsep *padmabhuwana*, yaitu sembilan kemahakuasaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) yang menempati sembilan penjuru mata angin termasuk di tengah-tengah juga disebut dengan *Dewata Nawa Sanga*. *Padmabhuwana* merupakan simbol alam (kosmos), yang disangga oleh sembilan Dewa sesuai dengan puranya masing-masing. Kesembilan pura juga disimbolkan dengan bunga padma, yang lebih dikenal dengan *kahyangan jagat*. Di *kahyangan jagat* umat Hindu mohon agar *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* melalui manifestasi sembilan Dewa memberikan keselamatan terhadap alam semesta beserta isinya. Adapun sembilan jenis pura dimaksud sebagaimana diuraikan oleh Namayudha (1980: 98) adalah sebagai berikut.

1. Pura Besakih pada arah timur laut sebagai *stana Sang Hyang Sambhu*
2. Pura Lempuyang pada arah timur *stana Sang Hyang Iswara*
3. Pura Andakasa pada arah tenggara *stana Sang Hyang Maheswara*

4. Pura Gua Lawah pada selatan *stana Sang Hyang Brahma*
5. Pura Ulu Watu pada arah barat daya *stana Sang Hyang Rudra*
6. Pura Batukaru pada arah barat *stana Sang Hyang Maha Dewa*
7. Pura Puncak Mangu pada arah barat laut *stana Sang Hyang Sangkara*
8. Pura Batur pada arah utara *stana Sang Hyang Wisnu Wisnu*
9. Di tengah-tengah adalah Pura Pusering Tasik *stana Sang Hyang Siwa*.

(2) Pura Teritorial

Berdasarkan ciri-ciri umat yang memuja, pura ini mempunyai ciri kesatuan wilayah sebagai tempat pemujaan masyarakat suatu *desa adat (desa pakraman)* dengan tidak membedakan golongan. Ciri khas suatu *desa pakraman* memiliki tiga buah bangunan tempat suci pura yang disebut *kahyangan tiga* yang meliputi *Pura Puseh (Pura Puseh Desa Besakih* disebut dengan *Pura Banua), Pura Desa (Pura Bale Agung),* dan *Pura Dalem*. *Pura kahyangan tiga* merupakan unsur *tri hita karana*, yaitu tiga penyebab terjadinya kesejahteraan yang meliputi *parhyangan* (tempat pemujaan), *pawongan* (manusia), dan *Palemahan* (wilayah/lingkungan). Ketiga unsur itu di *desa pakraman* terimplementasi pada hubungan yang harmonis antara manusia dan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan), hubungan harmonis antara manusia dan manusia lainnya dalam satu *desa pakraman,* dan hubungan yang harmonis antara manusia dan wilayah/ lingkungan.

Pura kahyangan tiga merupakan simbol stana manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi* Wasa sebagai *Dewa Brahma* dalam fungsinya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, *Dewa Wisnu* fungsinya sebagai *pemelihara* alam semesta beserta isinya, dan *Dewa Siwa* dalam wujud sebagai *Durgha* berfungsi melebur atau pemralina alam semesta beserta isinya. *Pura kahyangan tiga* merupakan implementasi dari umat Hindu suatu *desa pakraman* untuk melakukan sembah bakti setiap saat sehubungan dengan segala aktivitas yang dilakukan dalam menjalani kehidupan ini agar diberikan kesuksesan terhadap apa yang akan diciptakan atau diprogramkan, mohon kesuksesan terhadap apa yang telah tercipta atau program yang sedang dijalankan, dan mohon kekuatan terhadap apa yang harus dihilangkan.

(3) Pura Fungsional

Sindhu (1991: 69) menjelaskan bahwa pura fungsional mempunyai karakter karena pemujanya (*penyungsungnya*) terikat oleh ikatan kekaryaan (adanya kesamaan profesi). Misalnya, halnya *pura subak*, masyarakat pemujanya adalah para petani; *pura segara* dipuja oleh masyarakat yang memiliki profesi nelayan; *pura melanting*, adalah pura yang dipuja oleh masyarakat yang memiliki profesi berdagang, dan beberapa pura lainnya.

(4) Pura ***Kawitan***

Penyungsung *pura kawitan* mempunyai karakter berasal dari adanya ikatan *wit* (asal leluhur berdasarkan garis kelahiran (*geneologis*). Suatu keluarga inti (ayah, ibu, dan anak-anak) dalam istilah antropologi disebut keluarga batih yang mempunyai tempat pemujaan disebut *sanggah* atau *pemrajan*. Selanjutnya keluarga inti mengalami perkembangan menjadi lebih banyak , maka tempat pemujaannya disebut dengan *sanggah gede* atau *pamrajan agung*. Berkembang yang lebih besar lagi pada tingkatan klan, tempat pemujaannya disebut *pura dadia*, *pura paibon.* Apabila klan berkembang menjadi lebih banyak mencakup jagat, maka tempat pemujaannya disebut *padharman* seperti di Pura Besakih dari klan *Pasek* mempunyai *Pura Padharman Pasek.*

Pengelompokan pura seperti uraian di atas memiliki nilai dan makna sosial budaya yang luhur, bukan merupakan kepercayaan politeisme. Kepercayaan Hindu tetap monoteisme, tetapi pengelompokan itu hanya untuk meningkatkan penghayatan umat terhadap kepercayaan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wsa*. Kemahakuasaan dan kesucian *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* benar-benar dijabarkan ke dalam kehidupan bersama sehingga langsung menyentuh semua lapisan kehidupan manusia. Adanya berbagai karakter pura di Bali juga bermakna untuk menyatukan umat sesuai dengan pengelompokan sosialnya. *Pura kawitan* dapat merukunkan dan menyatukan umat menurut keluarganya. *Pura padharman* dapat menyatukan satu keluarga besar yang berasal dari satu klan. *Pura kahyangan desa* (*tri kahyangan*) dapat menyatukan umat dalam satu wilayah *desa pakraman*. *Pura swagina* dapat menyatukan umat yang memiliki profesi yang sama, sedangkan pura *kahyangan jagat* bermakna mempersatukan umat secara universal dengan tidak memandang keluarga, asal desa, dan profesinya.

Di dalam pandangan budaya orang Hindu di Bali ketika bersembahyang ke suatu pura atau tempat suci tidak menyembah bentuk fisik pura, namun di balik bentuk fisik diyakini ada kekuatan atas keperyaan kolektif maupun individu yang dirasakan mampu memenuhi keinginannya. Pura bukanlah objek persembahan, melainkan media untuk men-*stana*-kan sementara yang dipuja (manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) sesuai dengan niat orang yang bersembahyang. *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan manifestasi-Nya tidak secara permanen ber-*stana* di pura seperti ayam dalam sebuah sangkar. Beliau akan segera kembali ke asal semula setelah orang selesai melakukan pemujaan. Selain itu, pura juga berfungsi sebagai media konsentrasi untuk menyatukan pikiran terhadap yang dipuja bagi orang yang melaksanakan persembahyangan sehinggga pura dilengkapi dengan simbol-simbol bentuk dan nama dewa. Budaya seperti itu dilaksanakan secara mentradisi sejak dahulu sampai sekarang dan menjadi suatu kebiasaan, baik kolektif maupun individu.

Kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat umat Hindu, baik yang diekspresikan secara individu maupun kolektif, dipandang sebagai sikap rasa tanggung jawab moral dari tradisi sebelumnya. Sikap tentang kelanjutan dari tradisi generasi masa sebelumnya terkait dengan kesucian Pura Tanah Lot dapat dipahami dari penuturan I Wayan Suaba salah seorang warga Desa Pakraman Beraban sebagai berikuit.

> *"... manut ring tutur reraman tiyange, taen tuturine sareng kumpine indik kawentenan Pura Tanah Lot. Dumun kocap wenten anak lingsir pradnyan tur sakti mapesengan Ida Dang Hyang Nirartha, sane akeh ngicen ajah-ajah tur nulungin masyarakat sane keni pekeweh tur ngubadin sane sakit. Nak lingsir nika kocap mresidayang ngicalang mrana sane ngusak-asik tetaneman. Nak lingsir punika sering kocap care anak meyasa di duur batune punika. Sampun jagi pacang ngelanturang pemargi, nunden masyarakat driki mekarya pura ring duur batune genah Pura Tanah Lot mangkin. Mangde drika kocap sareng sami nunas ica ring Ida Bhatara Tengahing Segara mangde polih rahayu* (I Wayan Suaba, wawancara 17 Mei 2015).

Penuturan informan di atas menunjukkan bahwa Pura Tanah Lot merupakan tempat suci sebagai *stana Ida Bhatara Tengahing*

Segara sebagaimana yang disarankan oleh Dang Hyang Nirartha untuk memohon keselamatam warga masyarakat dan tanaman. Sejak saat itu sampai sekarang secara mentradisi praktik-praktik tentang ritual untuk sembahyang memohon keselamatan oleh masyarakat umat Hindu, khususnya masyarakat Desa Pakraman Beraban masih dilaksanakan dengan penuh keyakinan dan nilai kesucian Pura Tanah Lot tetap dijaga.

Praktik masyarakat Hindu khususnya Desa Pakraman Beraban terhadap Pura Tanah Lot merupakan kebiasaan atau kecenderungan yang telah tertanam di dalam diri pelaku, baik yang berhubungan dengan perilaku fisik, persepsi, kepercayaan, maupun logika. Berkenaan dengan itu, kebiasaan melaksanakan persembahyangan ke Pura Tanah Lot disebabkan oleh tersimpan keyakinan dan kepercayaan bahwa Pura Tanah Lot, yaitu (1) mengandung nilai religiusitas dan (2) merupakan tempat pelaksanaan upacara *yadnya.*

Masyarakat Desa Pakraman Beraban mempunyai kepercayaan mendalam terhadap kemagisan dan kesucian dari Pura Tanah Lot. Sekalipun *pangempon* Pura Tanah Lot tidak seluruh warga masyarakat Desa Pakraman Beraban, namun seluruh masyarakat sudah merasakan Pura Tanah Lot sebagai bagian dari hidupnya. Tertanam suatu kepercayaan dan keyakinan bagi setiap warga masyarakat Desa Pakraman Beraban ketika melaksanakan upacara *yadnya* harus terlebih dahulu mohon *tirtha* di Pura Tanah Lot. Jika tidak, masyarakat yang melaksanakan upacara *yadnya* menganggap belum sempurna. Kepercayaan itu sudah dilakukan sejak dahulu sebagai warisan dari leluhur, dan tidak ada yang berani melanggar (Jro Mangku Aris.wawancara 17 Mei 2015).

Kesucian Pura Tanah Lot juga telah tercermin pada struktur bangunan dengan kasat mata, yaitu hanya terdiri atas satu halaman (*jeroan*) yang dikelilingi oleh tembok *penyenggker.* Jika dimaknai dari falsafah agama Hindu, Pura Tanah Lot juga merepresentasikan simbol *tri mandala* yang memiliki tiga halaman, yaitu *nista mandala (jaba), madya mandala (jaba tengah),* dan *uttama mandala (jeroan).* Implementasi dari *tri mandala* dapat dilihat pada saat masyarakat sembahyang pertama berada pada *nista mandala* untuk melakukan penyucian di sebuah sumber air (*beji*). Di sebelah kanannya (bagian barat) terdapat pintu darurat dijaga oleh beberapa petugas dalam

mengatur volume umat melakukan persembahyangan, terutama pada saat upacara besar seperti *odalan*.

Umat yang sudah melakukan penyucian ditaksir jumlahnya untuk menunggu sampai umat yang di *jeroan* selesai sembahyang. Batas halaman *madya mandala* dengan jeroan adalah pintu *peletasan* menghadap ke barat dan di bagian selatan ada pintu masuk berupa candi *bentar*. Kemudian halaman *uttama mandala* adalah tempat umat melaksanakan sembah bakti terfokus pada *pelinggih meru* sebagai simbol tempat *stana istha dewata*. Beberapa jenis bangunan *pelinggih* yang terdapat di *uttama mandala* antara lain (1) *meru tumpang tiga* sebagai tempat pemujaan Dang Hyang Nirartha, (2) *meru tumpang lima* sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Laut, (3) *bale pawedan,* sebagai tempat *pendeta* atau *pinandita* yang memimpin upacara, (4) *piyasan* sebagai tempat *sesaji,* (5) *pelinggih Ratu Mekel*, sebagai penjaga meru tumpang tiga, (6) *pelinggih Ratu Mekel*, sebagai penjaga *meru tumpang* lima (7) *pelinggih Ratu Mekel*, sebagai penjaga *saren alit*, (8) *pelinggih pesimpangan*, (9) *lumbung* sebagai tempat penyimpanan alat-alat perlengkapan upacara, (10) *pewaregan,* sebagai tempat mempersiapkan keperluan upacara, dan (11) *pelinggih Ratu Beji.*

Di sekitar Pura Tanah Lot terdapat beberapa pura, seperti Pura Batu Mejan, Pura Batu Bolong, Pura Jro Kandang, Pura Enjung Galuh, Pura Melanting, dan Pura Hyang Api. Tiap-tiap pura memiliki fungsi masing-masing. Secara struktur seolah menjadi satu kesatuan dengan Pura Tanah Lot karena jaraknya hanya beberapa meter. Keberadaan pura-pura di sekitar Pura Tanah Lot menambah nilai estetika dan religiusitas yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat bagi setiap orang yang datang berwisata.

Kondisi kawasan suci Pura Tanah Lot memiliki beberapa pura menambah nuansa religiusitas dan kemagisan yang sangat tinggi sehingga mampu menebarkan vibrasi kesucian pada radius kawasan yang disucikan. Pura Tanah Lot merupakan salah satu pura yang tergolong *kahyangan jagat* (pura umum), dalam arti bahwa siapa pun dan dari mana pun asalnya semua umat Hindu memiliki hak untuk bersembahyang. Dengan karakteristik seperti itu jika terjadi pencemaran atas kesucian Pura Tanah Lota dan kawasannya, menjadi bagian dari perasaan semua umat Hindu.

Masyarakat Desa Pakraman Beraban sebagai *pangempo*n terdekat memiliki tanggung jawab dan berkewajiban mempertahankan

kesucian Pura Tanah Lot dalam kapasitasnya sebagai pura umum. Apalagi kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai destinasi wisata yang terkenal dan sangat ramai dikunjungi tamu domestik dan mancanegara. Dengan kondisi seperti itu tidak menjamin untuk mendeteksi setiap wisatawan yang berkunjung dapat mengikuti dan tahu segala aturan tentang tata cara beraktivitas yang terkait dengan kesucian kawasan. Di pihak lain umat Hindu memiliki aturan atau etika dalam memasuki areal tempat suci, terutama bagi para kaum perempuan yang secara umum paling dinilai pada dirinya dapat menimbulkan keadaan tidak suci (*cuntaka*) terhadap kawasan suci ketika sedang mengalami menstruasi.

Desa Pakraman Beraban sebagai pihak pengelola telah melakukan upaya-upaya dalam menjaga kesucian kawasan suci Pura Tanah Lot secara preventif dan secara kuratif sebagaimana penjelasan I Ketut Toya Adnyana, sebagai Manager Pengelola DTW Tanah Lot dan mantan Bendesa Pakraman I Wayan Arwata

> "Kami dari badan pengelola wisata Tanah Lot dan juga masyarakat Desa Pakraman Beraban tetap berupaya menjaga kesucian kawasan ini agar tidak sampai terjadi hal-hal yang menyebabkan *keletehan* atau *cemer*. Kami tidak mungkin bisa memantau setiap orang tindakan para wisatawan terutama kaum perempuan kami tidak mungkin mengecek satu per satu apakah dia dalam keadaan menstruasi atau tidak. Atas dasar itu kami memasang beberapa peringatan berupa pengumuman dan tanda-tanda larangan. Dan upaya itu kami lakukan bukan saja terhadap para wisatawan yang non-Hindu. Namun, kepada umat Hindu juga kami terutama dalam hal memasuki areal pura harus mengenakan pakaian sembahyang. Tanda-tanda berupa seperti bendera kami pasang terutama di pinggir pantai dengan maksud agar para wisatawan tidak sampai melewati batas yang telah kami tentukan. Karena jika sampai terjadi pelanggaran selanjutnya menimbulkan musibah bagi yang melanggar (mati), maka kami memaknai menimbulkan *cuntaka, cemer,* atau *keletehan*. Sama halnya dengan masalah pembangunan bahwa kami tidak sembarangan memberikan izin para pengusaha untuk membangun termasuk jenis usaha yang dilaksanakannya. Jika menurut kajian kami sudah layak, maka baru mereka bisa melanjutkan pembangunan. Salah

satu contoh waktu ini ada seorang pengusaha ingin membangun usaha kolam renang di dekat areal parkir masuk kawasan suci, terpaksa kami larang karena usaha itu kami kaji tidak layak untuk di dekat tempat suci (wawancara, 27 Mei 2015).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pakraman Beraban di tengah derasnya perkembangan pariwisata dan bergelimangan dolar masih tetap mempertahankan nilai kesucian kawasan suci Pura Tanah Lot.

H. Kesucian Bisa Dipulihkan dengan Ritual

Agama Hindu memaknai kesucian dan ritual sebagai suatu hal yang tak dapat dipisahkan karena ritual merupakan suatu proses dalam mendapatkan kesucian. Demikian pula ritual bisa berjalan setelah segala perangkat yang diperlukan melalui suatu proses penyucian terlebih dahulu dan ritual dimaknai bermakna apabila didukung atas dasar tujuan, niat, pikiran yang suci dan tulus ikhlas. Kesucian dan ritual menurut agama Hindu merupakan dua hal dimaknai pada tananan nilai. Makna kesucian bagi umat Hindu di Bali melingkupi wilayah, waktu, dan keadaan. Dengan demikian, makna kesucian sangat berpengaruh pada segala aktivitas kehidupan masyarakat umat Hindu Bali.

Nilai kesucian wilayah dihadapkan pada adanya posisi tempat *luwan* dan *teben*. Tempat *luwan* selalu dikonotasikan sebagai tempat yang suci, sedangkan teben adalah tempat yang tidak suci. *Luwan* diposisikan berada pada arah *kaja, kangin, dan kaja kangin.* Sebaliknya, konotasi teben berada pada posisi *kelod,* dan *kauh.* Implementasi *luwan* dan *teben* selalu memengaruhi aktivitas umat Hindu. Jika dilanggar, akan dapat memengaruhi keadaan psikologis seseorang. Salah satu bukti tentang posisi tempat tidur bahwa kepala selau diposisikan berada pada arah *kaja* atau *kangin*. *Luwan* juga disebut dengan *hulu*, di muka, atau di depan. Kata *hulu* pada tubuh manusia dikonotasikan pada bagian kepala sehingga dipandang sebagai bagian yang suci. Dalam interaksi sosial kepala terikat dengan nilai etika dan psikologis. Ketika orang memegang kepala orang lain, terutama kepala orang yang lebih tua dipandang tidak punya etika dan dapat memengaruhi perasaan yang tidak harmonis bagi orang yang kepalanya dipegang. Ketika membangun tempat suci umat Hindu juga

menggunakan pertimbangan kiblat *luwan* sebagai tempat yang suci. Selain posisi, tempat suci juga dimaknai memiliki nilai kesucian pada luas wilayah (kawasan) yang menjadi bagian dari tempat suci itu sendiri sesuai dengan yang telah ditetapkan dan selanjutnya tetap dijaga agar tidak terjadi pencemaran (*leteh*).

Agama bersifat operasional dalam kehidupan sosial masyarakat. Sifat operasional ini memberikan deskripsi-deskripsi fenomena sosial secara empirik di dalam masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa fenomena sosial yang tampak empiris di dalam masyarakat yang bersumber pada agama menghasilkan data-data mengenai kelakuan sosial dan perilaku sosial yang terjalin erat dengan aspek-aspek kehidupan di dalam masyarakat.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali (Hindu) ritual sering menjadi bagian penting dari cara-cara anggota masyarakat mengekspresikan emosinya, memelihara dan memperbaiki dunia kehidupannya, serta cara-cara mereka menolak atau mengatasi berbagai masalah atau bahaya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Keseluruhan cara itu terformulasi ke dalam lima bentuk upacara yang disebut dengan *panca yadnya.* Selanjutnya teraplikasi dalam berbagai tahapan dan tingkatan upacara *yadnya.* Selain itu, diyakini bahwa tiap-tiap tahapan dan tingkatan mengandung nilai yang mampu memperbaiki masalah kehidupan.

Nilai adalah sesuatu yang dianggap paling berharga dalam kehidupan masyarakat pada zamannya. Di samping berupa pandangan mengenai hal yang luhur, nilai juga dapat berwujud cara, pola tindakan, dan struktur sosial. Artinya, nilai acap kali diyakini sebagai representasi komitmen moral bagi para anggota komunitas tertentu yang dijadikan acuan dalam hidup bersama, digunakan sebagai sumber apresiasi, berkreativitas, dan mengungkapkan berbagai kata hati. Sebagai komitmen moral yang amat berharga, maka menjadi kewajiban bagi setiap anggota untuk memelihara, melestarikan, dan memaknainya dengan cara yang paling baik menurut ukuran mereka. Banyaknya cara yang tersedia untuk memaknai nilai itu, telah membuka peluang adanya polarisasi makna sehingga terbuka kemungkinan terjadinya bias dalam perbedaan penafsiran terhadap suatu nilai. Lebih-lebih jika faktor eksternal telah ikut memberikan sinergi terhadap polarisasi cara menafsirkan nilai itu.

Kebudayaan Bali tradisional yang bercirikan kebudayaan ekspresif dengan ciri dominanya nilai-nilai religius, estetika, dan

solidaritas merupakan perpaduan dua tradisi, yakni tradisi besar dan tradisi kecil. Kedua tradisi itu saling mempermulia, bahwa tradisi besar memperlihatkan dominannya pada aspek atau kerakteristik religiusitas dan estetis, sedangkan tradisi kecil dominan menunjukkan karakteristik kolektivisme. Tradisi ini kemudian berkehidupan demikian fleksibelnya yang menjadi tanda hingga kini disebut-sebut sebagai kepribadian kebudayaan lokal.

Dalam falsafah *jajar kemiri,* yaitu urutan tempat suci dimaknai oleh masyarakat Hindu di Kabupaten Tabanan sebagai media rangkaian pelaksanaan upacara yadnya dengan menyucikan, laut, dataran, dan gunung yang disimbolkan dengan tiga tempat suci utama yaitu, Pura Batukaru (gunung), Pura Pusering Jagat terletak di tengah kota Tabanan adalah simbol dataran, dan Pura Tanah Lot (laut) bagi masyarakat di sekitar kota Tabanan khususnya Kecamatan Kediri. Sedangkan bagi masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Selemadeg, menggunakan Pura Batukaru (gunung), Pura Pusering Jagat (dataran), dan Pura Sri Jong (simbol laut).

Pura-pura itu juga digunakan oleh umat di masing-masing wilayah sebagai rangkaian pelaksanaan upacara *yadnya nyegara gunung*. Sedangkan untuk pendakian spiritual dalam upaya meningkatkan kualitas spiritual diri, ketiga pura itu disimbolkan dengan, *sunya, ramya, dan sunya*. *Sunya*, yaitu simbol Pura Batukaru, *ramya*, yaitu simbol Pura Pusering Jagat, dan *Sunya*, yaitu Pura Tanah Lot dan juga Pura Sri Jong. *Ramya*, yaitu tempat sebagai pusat keberadaan masyarakat umat dengan segala aktivitas sosial dalam memperjuangkan harkat dan martabatnya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan rohaniah masyarakat umat Hindu menuju ke *sunya* yaitu ke Pura Batukaru dan Pura Sri Jong. Karena tidak semua masyarakat umat yang berada di tempat *ramya* mempunyai kesempatan datang ke tempat *sunya* terutama pada jaman Bali Kono sampai memasuki Bali pariwisata, sangat sedikit umat yang datang ke Pura Tanah Lot, Pura Sri Jong, dan Pura Batukaru, sehingga suasananya benar-benar sepi. Masyarakat umat Hindu yang datang melaksanakan persembahyangan sangat insidental terutama ketika ada upacara *odalan* dan atas tujuan pribadi.

Kondisi seperti itu akhirnya tampak mengalami pergeseran ketika Bali mengalami kejayaan dalam dunia pariwisata dan sampai sekarang bahwa, simbolisasi tempat *sunya* justru berubah menjadi *ramya* (ramai). Sekarang setiap hari ada saja bahkan ramai orang yang

datang ke Pura Batukaru, Pura Tanah Lot, dan Pura Sri Jong baik untuk sembahyang maupun tujuan konsumtif bagi para wisatawan. Karakteristik orang yang datang tidak saja berpakaian dan sarana sembahyang, tetapi lebih banyak yang berpakaian rekreasi sebagai wisatawan. Masyarakat umat Hindu yang datang ke pura tidak lagi tujuan utama untuk sembahyang, melainkan muncul suatu istilah *melali* ke Tanah Lot sambil sembahyang.

Kawasan suci Pura Tanah Lot semenjak dijadikan sebagai DTW di satu sisi telah memberikan banyak hal positif, terutama finansial terhadap masyarakat Desa Pakraman Beraban dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Namun, di sisi lain tak dimungkiri juga menimbulkan dampak negatif, terutama jaminan tentang pemertahanan nilai kesucian. Hal itu terjadi karena keterlibatan para wisatawan ketika memasuki kawasan tidak dapat dideteksi dan dipantau secara teliti yang pada akhirnya dinilai menimbulkan *keletehan* (*cemer*) walaupun telah dilakukan peringatan melalui tanda-tanda. Sebagai contoh beberapa bulan yang lalu sebagai akibat kelalaian wisatawan tidak memedulikan tanda larangan pinggir pantai akhirnya menyebabkan wisatawan terjatuh ke laut dan meninggal. Akhirnya musibah itu oleh masyarakat dipandang mencemari (*leteh*) kawasan suci Pura Tanah Lot. Kawasan yang ditetapkan tidak terbatas pada kawasan daratan, tetapi juga laut sepanjang jarak yang ditentukan. Kemudian sebagai representasi komitmen moral bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban yang dilandasi polarisasi makna dan nilai kesucian akhirnya melakukan simbol penyucian kawasan dengan melaksanakan ritual (Subawa, wawancara 20 September 2015).

Kawasan tempat suci dipandang memiliki nilai kesucian karena sebelumnya dilakukan inisiasi melalui ritual penyucian selanjutya menjadi sakral. Jika terjadi sesuatu yang dipandang menyebabkan terjadinya *leteh*, maka langkah yang dilakukan oleh umat Hindu kembali melakukan ritual penyucian sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam ajaran agama Hindu. Ritual dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pakraman Beraban untuk mengantisifasi hal-hal yang diyakini menimbulkan *leteh* yang secara kasat mata tidak dapat dilihat terutama dari sikap dan tingkah laku para wisatawan. Penyucian dilakukan secara simbolis pada setiap hari raya Nyepi dengan melaksanakan ritual di kawasan Pura Tanah Lot. Terkait dengan aktivitas pertanian, massyarakat Desa Pakraman Beraban

setiap tahun melaksanakan ritual *nangluka merana ngaben Jro Ketut* berpusat di Pura Pakendungan. Ritual *Jro Ketut* diyakini sebagai salah satu upaya keagamaan untuk memohon agar hama tikus tidak merusak tanaman di sawah.

Bagi masyarakat petani Pura Pakendungan secara teologis dimaknai telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan aktivitas pertanian. Atas dasar itu, *pekaseh* sebagai pemimpin dalam organisasi para petani setiap tahun setelah panen padi mewajibkan setiap warga petani membayar *sarin tahun* berupa padi yang jumlahnya ditentukan menurut perhitungan per-are dikalikan jumlah kg padi sesuai kesepakatan. Dengan demikian, dalam satu *subak* bisa terkumpul sekian ton padi *sarin tahun*. Dari jumlah itu sebagian dihaturkan ke pura Tanah Lot dan sisanya digunakan untuk honor anggota pengurus organisasi subak. Sedangkan Pura Tanah Lot difungsikan untuk melakukan ritual penyucian/ melasti dan upacara *mapekelem.*

Pariwisata Bali mengutamakan budaya dan agama, sedangkan DTW Tanah Lot sebagai salah satu unggulan bagi pemerintah Tabanan. Prosesi penyucian kawasan seperti itu merupakan aset bermakna ganda. Di satu sisi ritual dimaknai mengandung makna dan nilai filosofis yang dipandang dapat mengembalikan suasana religiusitas kawasan dan di sisi lain bermanfaat sebagai media promosi untuk mengundang wisatawan. Bagi kalangan kapitalis yang bergerak di bidang jasa pariwisata, ritual semacam itu berpeluang dijadikan atraksi wisata sebagai bahan komoditas, yaitu dipromosikan dan dijual untuk dinikmati oleh wisatawan.

Sampai saat sekarang Pura Tanah Lot juga masih eksis digunakan oleh umat Hindu khususnya Kabupaten Tabanan sebagai praktik-praktik tradisi keagamaan seperti ritual melasti, upacara *nyegara gunung* sebagai rangkaian upacara *pitra yadnya*.

Atraksi yang disaksikan oleh wisatawan secara kebetulan seperti itu jelas menjadi inspirasi bagi mereka untuk dijadikan sebagai catatan atau program untuk bisa datang pada kesempatan berikutnya serta sebagai bahan informasi terhadap kerabat dan saudaranya. Salah satu bentuk praktik budaya tradisi keagamaan seperti tampak pada foto 3.7 berikut.

Gambar 3.7: Umat Hindu melaksanakan upacara *melasti* di kawasan Pura TanahLot (Koleksi, Girinata, 2015)

Manfaat ritual yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakraman Beraban dipandang sejalan dengan pendapat August Comte (dalam Ida Bagus Dharmika, 2006:83--86), "Dari Agama Komunal hingga Agama Kapitalis". Dikatakan bahwa, manusia sebagai bagian dari alam pasti tidak dapat melepaskan keterkaitan hidupnya dengan alam. Selain itu, perkembangan suatu masyarakat ditentukan oleh tiga tahap, yakni tahap teologis, metafisis, dan rasional.

BAB IV
PROSES KOMODIFIKASI
KAWASAN SUCI PURA TANAH LOT

Pada awalnya DTW Tanah Lot sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Saat itu infrastruktur penunjang masih sangat minim dan hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal pada hari-hari libur sekolah, hari raya Galungan dan Kuningan, atau pada saat upacara di Pura Tanah Lot, tetapi belum dikenal sebagai istilah pariwisata. Semula siapa pun berkunjung ke Pura Tanah Lot terlebih umat Hindu yang bersembahyang tidak dikenai sumbangan (gratis). Karakteristik pemanfaatan kawasan Pura Tanah Lot saat itu lebih menunjukkan pada aktivitas keberagamaan umat Hindu sehingga puncak keramaian datangnya umat pada hari suci keagamaan terutama menjelang hari suci Nyepi melaksanakan upacara *melasti*. Perkembangan dari tahun ke tahun selain dalam kaitannya dengan aktivitas keberagamaan, semakin banyak wisatawan berkunjung dengan tujuan mengomsumsi keindahan alam kawasan suci Pura Tanah Lot tanpa pungutan biaya.

A. Kunjungan Gratis Berubah Menjadi Donasi

Pesatnya perkembangan pariwisata kawasan suci Pura Tanah Lot seperti sekarang ini, tetapi sebagian besar masyarakat tidak mengetahui siapa tokoh perintis pertama kali yang mempromosikannya. Wisata Pura Tanah Lot sebagai daerah tujuan wisata terkenal di mancanegara. Terkait dengan itu, sangat penting untuk diketahui tokoh yang sejak awal sebagai perintis. Atas dasar perjuangannya perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan. Salah satu di antaranya seperti menggunakan namanya sebagai sebuah identitas dalam prodak perkembangan pariwisata. Dengan demikian, dalam perkembagan selanjutnya akan dikenang oleh generasi penerus sekaligus juga dapat berfungsi sebagai modal budaya untuk mendukung perkembangan pariwisata selanjtnya. DTW Tanah Lot bisa populer seperti sekarang ini tidak mungkin berkembang dengan sendirinya tanpa adanya suatu proses.

Menurut Arwata (wawancara, 20 September 2015) salah seorang *pangempon* Pura Tanah Lot, sebelum ditetapkan sebagai DTW, Tanah Lot hanya dikenang oleh masyarakat sebagai suatu tempat keberadaan tempat suci *dang kahyangan* (Pura Tanah Lot). Di

sekitar areal pura yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan suci, sebelumnya sama sekali tidak ada bangunan permanen. Kedatangan umat ke Pura Tanah Lot sifatnya insidental bagi umat selaku *pangempon* pura untuk bersembahyang, terutama ketika hari *odalan* setiap enam bulan sekali. Selain itu ada juga yang bersembahyang selain hari *odalan* sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jika umat bersembahyang selain hari *odalan*, harus memberitahukan terlebih dahulu kepada *pemangku* (*pinandita*) pura yang telah dikukuhkan oleh anggota. Berbeda dengan sekarang, hampir setiap hari dan sepanjang waktu selalu ada *pemangku* (*pinandita*) yang bertugas secara bergiliran. Begitu pula pada waktu-waktu tertentu terkait dengan aktivitas pertanian, anggota subak melalui perwakilan pengurus selalu memohon *tirtha* untuk keselamatan tanaman padi. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa ciri khas pakaian umat yang datang ke Pura Tanah Lot saat dahulu adalah pakaian sembahyang dan tidak terikat pada retribusi.

Ketika memasuki tahun 1971-an, bersamaan dengan semakin ramainya wisatawan mengunjungi beberapa objek wisata di Bali, termasuk Pura Tanah Lot, mulai ada pihak yang menata kawasan Tanah Lot agar menjadi lebih menarik. Saat itu Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melihat adanya tanda-tanda terhadap potensi Pura Tanah Lot sebagai modal yang diandalkan untuk pendapatan daerah, akhirnya memercayakan penataan dilakukan oleh Ratu Nyoman Odya, Gusti Ariyadi, dan Bapak Taher. Sebagai konpensasi dari biaya penataan yang didapat dari berbagai upaya, saat itu wisatawan yang berkunjung hanya dikenakan *donation*. Namun sayangnya uang *donation* tidak diketahui siapa yang mengelola dan untuk apa saja uang itu.

Berdasarkan semakin banyaknya orang yang berkunjung ke kawasan Pura Tanah Lot pada tahun 1974-an akhirnya mulai ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot dengan segala potensi yang dimiliki merupakan salah satu aset pariwisata agama dan budaya dijadikan komoditas untuk dijual kepada wisatawan. Agar para wisatawan semakin nyaman datang ke kawasan Pura Tanah Lot perlu dilakukan penataan. Aktivitas awal yang dilakukan oleh Bupati Tabanan pada saat itu dalam mengembangkan DTW Tanah Lot adalah memperbaiki infrastruktur, yaitu pengaspalan jalan.

Setelah perkembangan pariwisata Tanah Lot semakin baik, DPRD Kabupaten Tabanan mengusulkan untuk membuat Perda tentang kepariwisataan. Perda tersebut akhirya mendapat persetujuan yang isinya bahwa DTW yang ada di Kabupaten Tabanan diharapkan dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).

B. Dari Donasi Menjadi Karcis

Perluasan ekonomi kapitalis pada masyarakat Bali berkembang secara meluas, memengaruhi superstruktur ideologi dari total kehidupan manusia, termasuk di dalamnya dalam sisitem berupacara agama. Pura sebagai tempat umat Hindu untuk melakukan sujud bakti ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) , tempat untuk memohon keselamatan, serta pengungkapan rasa hormat dan cinta kasih, dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Salah satu contoh Pura Tanah Lot yang secara sengaja digagas, diproduksi, dan dikemas untuk ditawarkan kepada wisatawan dipengaruhi oleh ideologi pasar. Di dalam praktik ini tersirat suatu tujuan, yaitu mencari keuntungan.

Pada masyarakat kapitalis setiap objek adalah komoditas dan dalam aktivitas ekonomi uang sebagai alat tukar yang semakin mendapat tempat penting. Hal ini dapat dilihat ketika kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai sebuah komoditas sarat dengan penghitungan dan perhitungan ekonomi. Setiap elemen yang menyertai komoditas tersebut dihargai dan dinilai dengan uang. Komoditas diciptakan tidak semata-mata hanya untuk nilai gunanya, tetapi juga demi nilai tukar berupa uang. Kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai elemen penting yang disucikan oleh umat Hindu diproduksi dan direproduksi tidak untuk memenuhi nilai gunanya (*use value*) semata, tetapi juga demi nilai tukar (*exchange value*) yaitu untuk mendapatkan 'nilai lebih' (*profit*), yaitu uang. Uang menjadi satu-satunya sarana penilaian komoditas yang bersifat independen. Uang menjadi bahasa baru, membentuk dan memberikan makna realitas.

Dalam tataran ini akhirnya kawasan suci Pura Tanah Lot dapat dipahami sebagai 'bisnis' modern yang berbingkai kapitalisme yang berangkat dari nafsu kebendaan (uang) dan nafsu kekuasaan. Menurut Garet Garret (Murchland, 1992: xi), kapitalisme sebenamya berangkat dari tiga nafsu, yaitu nafsu kebendaan, nafsu kemegahan, dan nafsu kekuasaan. Dengan demikian, bisnis dinyatakan sebagai naluri tamak manusia yang bertindak di luar motif-motif humanistik. Fenomena ini kemudian oleh Theodor Adorno dan Max Hokheimer (Pilliang,

1999:33) diistilahkan sebagai proses 'komodifikasi kultural'. Proses komodifikasi ini disebut 'pencerahan' palsu kapitalisme, yakni memproduksi komoditas untuk kebutuhan 'pemakai', yaitu pemakai yang telah dirasionalisasikan dalam sistem ekonomi.

Dalam komodifikasi Pura Tanah Lot, CV Ari Jasa Wisata sebagai pihak kapitalis berhasil menunjukkan kegesitannya melakukan pendekatan kepada kalangan elite terutama pada tataran struktural. Usaha CV Ari Jasa Wisata tampaknya tidak sia-sia. Akhirnya, pada tahun 1980 Pemerintah Kabupaten Tabanan memercayakan pengelolaan DTW Tanah Lot dengan sistem kontrak.

Pengelolan dimulai pada tanggal 1 Juni 1980 dengan CV Ari Jasa Wisata melalui sistem kontrak dengan target pemasukan ke Pemerintah Daerah Rp 3.000.000,00 per tahun. Pihak pengelola mulai memainkan peran ekonominya dengan cara setiap pengunjung wajib membayar retribusi harga tiket saat itu cuma Rp 100,00 per orang. Kemudian seiring dengan peningkatan angka kunjungan dan peningkatan harga tiket, maka terjadi pula peningkatan pemasukan yang disetorkan pihak pengelola ke Pemerintah Daerah yang sangat fantastis mencapai Rp 380 juta per tahun melampaui target yang diharapkan. Promosi dari pengelola terus ditingkatkan sehingga kedatangan wisatawan diperkirakan terus meningkat mencapai level kisaran 100 sampai 300 orang per tahun. Pada tahun 1984 jumlah kunjungan wisatawan ke DTW Tanah Lot semakin meningkat dan sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat Gubernur Bali yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Beliau akhirnya secara langsung melakukan peninjauan kondisi DTW Tanah Lot yang baru saja dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai atraksi wisata.

Pada tahun 1985 target pemasukan dari DTW Tanah Lot bisa mencapai 8.000.000,00. Selanjutnya tahun 1988 meningkat menjadi 12,5 juta rupiah. Akselerasi perkembangan DTW Tanah Lot selalu meningkat akhirnya diikuti pula dengan peningkatan harga tiket pada tahun 1994 menjadi Rp 1000,00 per orang. Dari hasil pemasukan akhirnya dicapai jumlah 18 juta rupiah. Sistem kontrak masih terus berlanjut disertai dengan peningkatan angka kunjungan dan peningkatan harga tiket masuk. Situasi ini berlangsung sampai pada tahun 2000 diketahui bahwa kewajiban pihak swasta atau nilai kontrak kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan menjadi 300 juta

rupiah per tahun. Pada saat itu harga tiket Rp 3.300,00/orang dewasa dan Rp1.800,00/orang untuk anak-anak (Laksmi, 2015).

Aryadi selalu melakukan inovasi berusaha memberikan pelayanan terbaik terhadap wisatawan. Fasilitas yang dibangun pada awal pengelolaan DTW Tanah Lot adalah membuat jalan setapak yang terbuat dari batu-batu pecah menuju Pura Tanah Lot dan membuat jalan keliling dari arah Pura Pakendungan ke Pura Tanah Lot. Fasilitas yang dibangun oleh pihak pengelola hanya dua toilet yang letaknya satu di areal parkir dan satu lagi di dekat pantai. Aksesibilitas menuju DTW Tanah Lot belum terlalu memadai dan harus ditempuh melewati Kediri karena pada saat itu jalan bypass Tanah Lot belum dibangun.

Program lain yang juga dibangun pihak swasta sebagai pengelola adalah penataan pedagang acung yang berkeliaran di DTW Tanah Lot yang sebagian besar berasal dari Desa Pakraman Beraban. Pihak pengelola menyediakan lapak-lapak bagi para pedagang acung di pinggir jalan sepanjang dari tempat parkir lama menuju Pura Tanah Lot. Parkir lama sekarang telah menjadi pasar seni. Gebrakan itu tampaknya mendapat respons positif dari para pedagang dan masyarakat yang ingin berjualan, sehingga pihak pengelola memindahkan pedagang ke areal parkir lama. Di pihak lain untuk pelayanan parkir pengelola menyediakan tempat parkir baru yang ada sekarang. Untuk lahan tempat parkir pihak pengelola mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah dan melalui Kementerian Pariwisata dan Pekerjaan Umum disetujui hanya sebatas pengaspalan di areal parkir baru, sedangkan untuk pembelian lahan parkir baru karena merupakan jalur hijau tidak disetujui.

Pengelola akhirnya berdiskusi dengan pemerintah daerah, akhirnya disepakati untuk membeli lahan yang akan dijadikan areal parkir baru dengan meminjam uang dari beberapa bank. Pengembalian pinjaman dibayar dari hasil pengelolaan DTW Tanah Lot dengan cara mencicil setiap bulan sampai lunas.

C. Pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Ketika wisata Tanah Lot ramai dikunjungi wisatawan, masyarakat Desa Pakraman Beraban memaknai sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan khususnya pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah. Dengan demikian, memunculkan suatu lembaga secara struktural untuk mengatur dan

mengurus sirkulasi keluar masuknya para wisatawan yang datang ke daerah tujuan wisata Tanah Lot serta dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada para wisatawan.

Pada saat DTW Tanah Lot dikelola oleh pihak swasta tidak melibatkan Desa Pakraman Beraban. Pihak swasta hanya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Seiring dengan berjalannya waktu disertai munculnya isu otonomi daerah akhirnya masyarakat Desa Pakraman Beraban berusaha berjuang untuk dapat ikut terlibat dalam mengelola DTW Tanah Lot sesuai dengan kutipan berikut.

"Pada tahun 1999 dengan bergulirnya wacana otonomi daerah, masyarakat Beraban mencoba berjuang untuk bisa mengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot. Meski sebenarnya keinginan masyarakat ini bukan hal yang baru,tetapi memang karena situasi kepemerintahan dan rezim pada saat itu merupakan halangan terbesar bagi masyarakat Desa Beraban untuk mengambil alih pengelolaan sehingga dengan memanfaatkan momen otonomi daerah dan perubahan situasi politik pada saat itu masyarakat Beraban mencoba maju dan menawarkan sebuah konsep pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot yang baru. Situasi pada saat masa perjuangan masyarakat Desa Beraban ini, memang menciptakan situasi yang cukup panas di lapangan, apalagi saat itu masyarakat baru tahu bahwa perpanjangan kontrak pemerintah dengan pihak swasta baru saja diperpanjang sampai tahun 2011 tanpa sepengetahuan pihak Desa Adat Beraban. Situasi ini membuat situasi di masyarakat cukup panas dan akhirnya dengan menggunakan jalur kekuatan politik dan masyarakat, akhirnya di legislatif dibentuklah PANSUS Pengkajian Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot antara pemerintah dengan pihak swasta.

Dari perjuangan masyarakat ini akhirnya terjadi kesepakatan *win-win solution*, yaitu bahwa daya tarik wisata Tanah Lot dikelola oleh ketiga unsur, yaitu unsur Desa Adat Beraban, unsur swasta (CV Ary Jasa Wisata), dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini meski tidak mampu memenuhi harapan masyarakat adat Beraban; yaitu mengelola sendiri, tetapi akhirnya ada pemahaman dan kesadaran di masyarakat bahwa masa kontrak antara pihak swasta dan Pemerintah Kabupaten Tabanan bisa berakibat pada aspek hukum (PTUN), dan di satu sisi dengan jelas dan tegas pemerintah Kabupaten Tabanan mengambil strategi bahwa tidak mau dituntut oleh swasta di PTUN, tetapi keinginan masyarakat adat Beraban harus diakomodasi. Setelah

melalui perdebatan yang cukup panjang dan cukup panas maka disepakati bahwa dari 1 Juli 2000 sampai 19 April 2011, daya tarik wisata Tanah Lot dikelola oleh tiga komponen, yaitu Desa Adat Beraban, pihak swasta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan pola *sharing profit*.

Kesepakatan ini akhirnya tertuang pada Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot No: 01/HK/2000 bertanggal 30 Juni 2000 dan terbitnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 644 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Pengelola Objek Wisata Tanah Lot. Sampai saat ini surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot telah mengalami revisi satu kali, yaitu pada tahun 2002 menjadi Surat Perjanjian Kerja sama Pergelolaan Objek Wisata Tanah Lot Nomor: 01/HK/2002. Secara substansi pada surat perjanjian ini terjadi perubahan pada penentuan biaya operasional. Biaya operasional akhirnya ditentukan berdasarkan pengajuan dari Manajer Operasional untuk disepakati di Badan Pengelola Objek Wisata Tanah Lot, yang dalam perjanjian sebelumnya (Nomor: 01/HK/2000) ditetapkan 20% dari pendapatan kotor. Di dalam Surat Keputusan Bupati ini diatur hak dari ketiga pihak (*shareholder*) dalam Badan Pengelola Objek Wisata Tanah Lot. Secara spesifik pengaturan hak ini diatur dalam pasal 6 tentang besarnya pembagian hasil retribusi ditentukan sebagai berikut.

- Biaya operasional pengelola objek ditetapkan setiap tahun atas dasar rapat Badan Pengelola.
- Peninjauan atau perubahan atas besarnya biaya operasional dapat dilakukan sekurang–kurangnya enam bulan sekali atas dasar rapat Badan Pengelola.
- Pihak pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan memperoleh hasil sebesar 55% dari hasil kotor setelah dikurangi biaya operasional.
- Pihak CV ARY JASA WISATA memperoleh hasil sebesar 15% dari hasil kotor setelah dikurangi biaya operasional.
- Pihak Bendesa Adat Beraban memperoleh hasil sebesar 30% dari hasil kotor setelah dikurangi biaya operasional *(http://elokayukhumaerok. Blogspot.co.id/p/sejarah pengelolaan daya tarik wisata,* Minggu,06 April 2014*).*

Perjuangan masyarakat Desa Pakraman Beraban terus berlanjut hingga akhirnya tidak lagi melibatkan kerja sama dengan pihak swasta (CV Ary Jasa Wisata) dalam pengelolaan hingga

selanjutnya pada 17 November 2011 keluarlah surat Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri Nomor: 12 Tahun 2001. Nomor: 358/DPBRB/XI/2011 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot dan Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Nomor: 170/1976/DPRD, 23 September 2011. Surat ini menerangkan bahwa pengelolaan objek wisata Tanah Lot dilakukan oleh dua belah pihak, yakni, PIHAK PERTANA, Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos., Bupati Tabanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan sedangkan dr. I Wayan Arwata, M.M., Bendesa Pakraman Beraban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Pakraman Beraban selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Antara pihak pertama dan pihak kedua termasuk sebagai subjek perjanjian. Pihak-pihak yang membuat perjanjian kerja sama kemudian sepakat membentuk Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola. Hal itu ditindaklanjuti dengan membentuk Manajemen Operasional Badan Pengelola. Organisasi keanggotaan dan uraian tugas pengurus Badan Pengelola ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sedangkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan pengurus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

JOB DESCRIPTION AND SPECIFICATION OF MANAJEMEN OPERASIONAL DAYA TARIK WISATA TANAH LOT

Penyesuaian Struktur Organisasi di Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot (*dengan model struktur organisasi garis dan pegawai*) dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan dan pengembangan manajemen secara makro. Adapun penyesuaian tugas, tanggungjawab dan prosedur kerja adalah sebagai berikut.

Manajer Operasional

- Menyusun kebijakan teknis operasional manajemen.
- Merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen.
- Menyusun program kerja operasional manajemen.
- Menyusun anggaran operasional manajemen.
- Melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi program kerja operasional manajemen.

- Menjalankan kebijakan-kebijakan dan tugas-tugas yang dibebankan oleh Badan Pengelola.
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Manajeme
- Operasional berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang sehat.
- Merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebutuhan karyawan/karyawati operasional manajemen.
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dan kinerja manajemen operasional setiap akhir tahun kepada Badan Pengelola.

Asisten Manager

- Membantu penyusunan kebijakan teknis operasional manajemen.
- Membantu merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen.
- Membantu penyusunan program kerja operasional manajemen.
- Membantu penyusunan anggaran operasional manajemen.
- Mengoordinasikan pelaksanaan program kerja operasional manajemen.
- Membina dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja operasional manajemen.
- Bertanggungjawab kepada Manager.

Sekretariat/ Sekretaris

- Merumuskan kebijakan urusan administrasi operasional manajemen.
- Melaksanakan urusan administrasi operasional manajemen.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi umum/kepegawaian dan divisi keuangan operasional manajemen.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional manajemen.
- Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh manajer & asisten manajer.
- Mengatur agenda manajer.
- Sebagai operator telepon masuk dan keluar.
- Mengagendakan surat masuk dan keluar.
- Menangani koresponden perusahaan.
- *Reporting* kegiatan perusahaan.

- Menangani agenda umum perusahaan.
- Bertanggung jawab kepada manager dan asisten manajer.

Pegawai Kesekretariatan
- Membantu mengagendakan surat masuk dan keluar.
- Membantu sebagai operator telepon masuk dan keluar.
- Membantu menangani agenda umum perusahaan.
- Membantu dan melaksanakan segala tugas yang didelegasikan oleh sekretaris.
- Bertanggung jawab kepada sekretaris.

***Office Boy* & Sopir**
- Menangani inventarisasi perusahaan.
- Menangani dan mengatur penempatan barang di gudang.
- Membantu operasional pada administrasi.
- Menyiapkan segala kebutuhan administrasi.
- Bertanggung jawab terhadap pegawai administrasi.
- Menyiapkan konsumsi bagi tamu perusahaan/manajemen.
- Bertanggung jawab sebagai sopir manajemen operasional.

Divisi Perencanaan dan Keuangan
- Membuat perencanaan organisasi manajemen operasional.
- Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggungja wabnya.
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara periodik seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggung jawabnya.
- Menyusun laporan keuangan operasional manajemen untuk dipertanggungjawabkan kepada Badan Pengelola.

Pegawai Administrasi
- Mencatat transaksi akuntansi perhari, perealisasian *budget* perusahaan.
- Menyiapkan formulir penjualan tiket retribusi.
- Mencatat inventori tiket retribusi.
- Membuat laporan penjualan harian, bulanan, tahunan.
- Membantu dalam pembuatan laporan keuangan, jurnal, laba rugi, neraca, laporan realisasi *budget,* dan jurnal pembalik.

- Membantu menyusun daftar belanja operasional berdasarkan pengajuan tiap-tiap departemen.
- Melaksanakan order atau pemesanan barang.

Kasir
- Mencatat transaksi kas dan melaporkan perhari ke bagian administrasi.
- Mencatat, membukukan, dan mengawasi arus kas.
- Mencatat dan menerima uang kas berupa pendapatan operasional.
- Mencatat dan mengeluarkan uang kas untuk keperluan operasional.
- Melaksanakan proses penyetoran uang ke bank setiap hari.
- *Print out* daftar gaji dan slip gaji serta merealisasikan pada karyawan.
- Membuat laporan rekonsiliasi bulanan serta tahunan.

Divisi Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan administrasi umum operasional manajemen dan administrasi kepegawaian.
- Menyelenggarakan penatausahaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- Melaksanakan perencanaan terhadap sumber daya manusia (SDM) perusahaan.
- Pemberian edukasi/ pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan.
- Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang tidak disiplin.
- Penanganan terhadap SDM yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pensiun, habis masa kontrak, PHK, dan meninggal dunia.

Divisi Pasar
- Melakukan pengawasan dan penertiban secara khusus terhadap mobilisasi pedagang.
- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembukuan petugas pemungut retribusi pasar.
- Melaksanakan administrasi penggunaan dan/atau pengalihan warung/kios di areal tanah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- Melakukan pembinaan kepada para pedagang yang berjualan di areal daya tarik wisata Tanah Lot.

- Melaksanakan pekerjaan rutin divisi pasar, antara lain seperti berikut.

Pekerjaan Rutin

- Memungut retribusi harian.
- Memungut sewa tanah.
- Memungut retribusi pedagang distributor.
- Mencatat dan mendata subjek pajak yang dipungut.
- Mencatat inventori tiket pasar dan pemesanan tiket pasar.
- Melaporkan hasil pungutan dan data subjek pajak kepada kasir & administrasi.
- Mengawasi pedagang baru.
- Mengawasi pedagang yang melanggar peraturan.
- Memberikan peringatan kepada pedagang yang melakukan pelanggaran, menjalankan pelaksanaan peraturan pedagang.
- Melayani perpanjangan izin berjualan (HGB) kepada setiap pedagang.
- Melayani jual beli bangunan pasar.
- Menangani piutang sewa tanah dan retribusi.
- Mengontrol pelaksanaan tatib pedagang.

Divisi Parkir

- Melakukan pengawasan akomodasi kendaraan bermotor yang diparkir di tempat parkir daya tarik wisata.
- Mengatur sistem keluar masuknya kendaraan bermotor di kawasan daya tarik wisata untuk memberikan rasa nyaman dalam penempatan parkir.
- Melakukan pengawasaan terhadap rambu-rambu parkir.
- Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan areal tempat parkir.

Divisi Tiket

- Menghitung fisik tiket, mengeluarkan, mencatat dan/atau membukukan ke buku persediaan tiket.
- Menerima dan bertanggung jawab terhadap laporan penjualan tiket.
- Melakukan pengawasaan secara khusus terhadap sistem pemungutan tiket.
- Melakukan pengawasan tata pelayanan kepada tamu/ wisatawan.

Pekerjaan Rutin

- Mencatat dan membukukan tiket yang akan dijual.
- Mencatat dan menghitung persediaan uang kecil.
- Melaksanakan dan melayani wisatawan dalam penjualan tiket.
- Penanganan diskon penjualan tiket dengan kebijakan manajemen.
- Menghitung dan melaporkan hasil penjualan kepada administrasi dan kasir.
- Bertanggung jawab atas selisih penjualan.

Divisi Pengembangan dan Promosi

- Melaksanakan tugas-tugas pengembangan dan promosi daya tarik wisata Tanah Lot.
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengembangan dan promosi daya tarik wisata Tanah Lot.

Pekerjaan Rutin

- Menjaga dan melaksanakan HIP, secara intern dan ekstern.
- Ikut menjaga lingkungan di kawasan daya tarik wisata Tanah Lot dalam hubungannya dengan kesucian kawasan daya tarik Wisata Tanah Lot.
- Menangani *event-event* pengembangan dan promosi yang dilaksanakan di daya tarik wisata.
- Menangani sarana dan prasarana pengembangan dan promosi DTW.
- Melakukan koresponden melalui *e-mail.*
- Mengecek setiap masukan, *complain* ataupun informasi bagi manajemen melalui situs Web.
- Bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana situs Web.

Divisi Humas

- Menjaga dan melaksanakan HIP secara intern dan ekstern
- Ikut menjaga lingkungan di kawasan daya tarik wisata dalam hubungannya dengan kesucian kawasan daya tarik wisata.
- Menangani *event* daya tarik wisata.
- Melakukan pengawasan terhadap petunjuk-petunjuk arah.
- Melakukan koresponden dengan *network stake holder.*

Divisi Kebersihan dan Pertamanan

Pekerjaan Rutin

- Membersihkan sampah-sampah lapangan.
- Membersihkan kantor dan bangunan-bangunan.
- Menyiapkan dan membersihkan kendaran.
- Melakukan penyiraman tanaman.
- Melakukan pemotongan dan perawatan/ pemeliharaan tanaman/ pohon.
- Membersihkan saluran-saluran air dan antisipasi musim hujan.
- Melaksanakan perawatan alat/ mesin kerja.

Divisi Keamanan

Pekerjaan Rutin

- Pengawasan penjualan tiket.
- Mewujudkan keamanan objek pada siang dan malam hari kepada wisatawan.
- Mewujudkan keamanan dalam lingkungan pedagang.
- Menjaga prasarana dan fasilitas perusahaan pada siang dan malam hari.
- Melaksanakan perawatan terhadap aset perusahaan, bangunan, kendaraan, fasilitas lapangan, rambu dan petunjuk-petunjuk serta papan informasi.
- Penanganan kecelakaan wisatawan.

Pengawas

- Perencanaan schedule kerja, izin atau dispensasi terhadap anggota dan diajukan melalui kepala divisi.
- Pengawasan terhadap *schedule* kerja.
- Mendelegasikan tugas dari kepala divisi kepada anggota.
- Pengambilan keputusan dari SOP (*standard operation procedure*) yang ada.
- Penanganan complain terhadap SOP (*standard operation procedure*) yang ada.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala divisi.

Spesifikasi Kerja Pegawai Badan Operasional

Pegawai Tiket

- Datang ke kantor minimal 30 menit sebelum melakukan tugas.

- Melakukan pengecekan tiket bersama pengawas supaya antara form dengan fisik tiket yang dibawa sama.
- Melakukan penghitungan jumlah kas bon yang dibawa supaya sesuai dengan catatan yang ada.
- Supaya lebih cepat proses pergantian *shift,* tiket sebaiknya di-*setting* terlebih dahulu di kantor.
- Di tempat kerja, yaitu di *tallgate*
    1. Posisi petugas tiket di masing-masing *tallgate* dapat diatur sebagai berikut
        - Di sebelah kiri dan kanan ditiap-tiap *tallgate* selalu ada seorang petugas tiket dengan satu tempat duduk.
        - Di dalam *tallgate,* baik barat maupun timur, ada dua orang sebagai kasir.
    2. Petugas tiket yang bertugas menjual tiket (*seller* tiket) harus melakukan beberapa hal sebagai berikut.
        - Ucapkan salam.
        - Disiplin, ramah, sopan, luwes, dan berpenampilan menarik.
        - Memberikan keterangan tentang tiket masuk dan parkir bila diperlukan.
        - Melakukan pembersihan tempat kerja maksimal dua kali.
- Setelah selesai melakukan penjualan tiket, baik *shift* pagi maupun sore, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu seperti.
    - Sebelum meninggalkan *tallgate*, periksa semua perlengkapan yang dibawa.
    - Lakukan penghitungan penjualan tiket bersama administrasi.
    - Catat secara teratur apabila terjadi kelebihan atau kekurangan penjualan tiket.
    - Tiap-tiap pengawas harus menandatangani catatan penjualan harian.
- Melaksanakan tugas-tugas kepala divisi melalui pengawas.

Pegawai HUMAS

- Delapan jam kerja terdiri atas dua *shift*, yaitu
- *shift* pagi : 07.00 s.d 15.00 WITA
- *shift* sore : 11.00 s.d 19.00 WITA
- Memberikan informasi, baik eksternal maupun internal.

- Mencari informasi untuk mendukung perkembangan daya tarik wisata.
- Menangani *complain*.
- Menangani kecelakaan.
- Mencatat kejadian setiap waktu.
- Melaksanakan tugas-tugas kepala divisi.

Pegawai *Checking Ticket*

- Selalu bersikap ramah dalam menjalankan tugas.
- Melakukan pengecekan tiket masuk dan mencocokkan agar sesuai dengan jumlah orang yang masuk.
- Melakukan pengecekan nomor seri tiket agar sesuai dengan nomor seri tiket yang dijual yang ada dalam daftar tiket.
- Melakukan komunikasi (mengecek ulang) dengan petugas tiket bilamana terjadi kejanggalan.
- Melakukan pencatatan terhadap jumlah wisatawan yang memasuki daya tarik wisata Tanah Lot.
- Melaksanakan tugas-tugas kepala divisi melalui pengawas.

Pegawai *Security*

- Menjaga keamanan kawasan daya tarik wisata Tanah Lot dari ancaman dan gangguan keamanan, baik fisik maupun nonfisik juga pada malam hari (menjaga stabilitas keamanan).
- Melaksanakan tugas-tugas kepala divisi melalui pengawas.

Pegawai *Pecalang*

- Ikut serta mengatur/mengarahkan pengunjung yang masuk di daya tarik wisata Tanah Lot.
- Menjaga ketertiban/keamanan daya tarik wisata Tanah Lot, baik secara fisik maupun nonfisik.
- Mengawasi/memantau ketertiban pedagang yang ada di kawasan daya tarik wisata Tanah Lot.
- Melaksanakan tugas-tugas dari kepala divisi keamanan melalui kepala *pecalang*.

Pegawai Pasar

- Melakukan pemungutan retribusi pasar bagi para distributor dan pedagang dadakan.

- Melakukan pemungutan retribusi pasar bagi para pedagang di tiap-tiap blok.
- Mengawasi / memantau pedagang dan distributor yang masuk ke daya tarik wisata Tanah Lot.
- Melaksanakan tugas-tugas kepala divisi.

Pegawai Parkir

- Melakukan pengaturan kendaraan yang masuk ke areal parkir daya tarik wisata Tanah Lot.
- Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap semua kendaraan yang ada di areal parkir daya tarik wisata Tanah Lot.
- Menjaga dan memelihara rambu-rambu parkir yang ada di areal parkir daya tarik wisata Tanah Lot.
- Melaksanakan tugas-tugas kepala divisi melalui pengawas.

Pegawai Kebersihan (Sapu)

- Melakukan pembersihan di kawasan pantai, *pelaba* Pura Tanah Lot, *pelaba* Pura Penataran, Pura Enjung Galuh, *pelaba* Pura batu Bolong, Monumen Tri Antaka, seluruh jalan setapak, jalan utama dari gapura utama Pura Tanah Lot sampai batas akhir trotoar, kawasan parkir daya tarik wisata Tanah Lot dan kawasan Pura Pekendungan.
- Melaksanakan tugas-tugas kepala divisi melalui pengawas.

Pegawai *Cleaning Service*

- Membersihkan secara menyeluruh semua kawasan daya tarik bangunan suci, kantor, *tallgate, checking* tiket, wantilan serta seluruh *saka* empat yang ada di kawasan daya tarik wisata Tanah Lot.
- Membersihkan, memelihara dan menjaga fasilitas WC/Toilet yang dimiliki oleh Manajemen Badan Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot.
- Pengawasan terhadap keamanan dan kenyamanan pengunjung dalam penggunaan fasilitas WC/toilet.
- Menjaga dan bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana kebersihan dan fasilitas WC/toilet.
- Melaksanakan tugas-tugas dari kepala divisi melalui pengawas.

Pegawai Pertamanan

- Menjaga keindahan dengan menata taman, melakukan pemotongan rumput, dan penanaman tanaman hias lainnya, yang meliputi kawasan berikut.
  1. *Pelaba* pura yang ada di seputaran daya tarik wisata Tanah Lot
  2. Jalan utama menuju daya tarik wisata Tanah Lot.
  3. Ke pura-pura tri kahyangan yang ada di Desa Pakraman Beraban
  4. Pura Panti dan Pura Dangin Bingin
  5. Areal parkir daya tarik wisata Tanah Lot.
- Melaksanakan tugas-tugas dari kepala divisi melalui pengawas.

Pegawai *Engineering*

- Membersihkan, memelihara, dan menjaga fasilitas *engine*/mesin, sarana prasarana elektronik dan komputer yang dimiliki oleh manajemen operasional daya tarik Wisata Tanah Lot.
- Pengawasan terhadap kinerja sarana dan prasarana elektronik, mesin, dan komputer yang ada.
- Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan semua sarana dan prasarana elektronik, mesin, dan komputer yang ada.

Pegawai *Life Guard*

- Mengawasi semua tamu yang sedang berada di kawasan pantai
- Memberikan informasi bilamana tamu berada di daerah terlarang.
- Melarang tamu supaya tidak terlalu bermain-main dengan ombak.
- Memberikan pertolongan bilamana ada kecelakaan.
- Bertanggung jawab terhadap keamanan kawasan pantai daya tarik wisata Tanah Lot.
- Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana *life guard.*
- Memasang rambu-rambu pantai.
- Bekerja sama dengan humas untuk menginformasikan keadaan laut terhadap para pengunjung maupun departemen lainnya.
- Melaksanakan tugas-tugas kepala divisi melalui pengawas (Badan Pengelola Wisata Tanah Lot Tahun 2012).

Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Suci Pura Tanah Lot mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 189 orang, yang keseluruhannya berasal dari masyarakat Desa Pakraman Beraban.

Mekanisme itu diterapkan dengan tidak mengabaikan proses administrasi dan melalui uji kelayakan profesi secara terbuka dan demokrasi. Adapun susunan tenaga kerja yang dipekerjakan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

TABEL 4.1
MANAJEMEN OPERASIONAL
DAYA TARIK WISATA TANAH LOT
DAFTAR JUMLAH TENAGA KERJA TAHUN 2015

O	DEPARTEMEN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL	
		P	L		
	MANAJEMEN				
	Manager & Assistant		2	2	
	Kadiv	3	7	10	
	Kasir	1		1	
	Pegawai Admin & Sekretariat	2		2	
	Peg. Promosi & Pengemb.		1	1	
				jumlah :	6
	TIKET	8	10	18	
	HUMAS	4	1	5	
	PARKIR		7	7	
	PASAR		4	4	
	KEAMANAN :				
	a. CHECKING TICKET		18	18	
	c. LIFE GUARD		6	6	
	d. SECURITY		24	24	
				jumlah :	8

	PECALANG		45	45	
	KEBERSIHAN :				
	a. TAMAN		12	12	
	b. CLEANING SERVICE		8	8	
	c. TUKANG SAPU	19	5	24	
				jumlah :	4
	OFFICE BOY		-		
0	ENGINEERING		2	2	
		37	152		
	TOTAL TENAGA KERJA			189	

Sumber: Badan Pengelola Wisata Tanah Lot Tahun 2012

4.4 Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Tabanan Mengelola Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Pada periode tahun 1984--1998 agar pengelolaan objek dan daya tarik wisata Tanah Lot lebih profesional, Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan perjanjian kontrak dengan pihak swasta. Sebelumnya belum terjadi perjanjian kontrak dengan pihak pengusaha. Saat itu keterlibatan I Gusti Gede Aryadi hanya sekadar ikut mengadu untung di bisnis kepariwisataan karena melihat Tanah Lot ke depannya sangat potensial dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan juga memandang dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang sehingga Tanah Lot dinilai merupakan lahan basah bagi peningkatan pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Tabanan.

Atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 15, Tahun 1988 tentang Lima Belas Kawasan Wisata di Bali, termasuk di dalamnya adalah Tanah Lot, dikembangkan lagi melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 528, Tahun 1993 tentang dua puluh satu Kawasan Pariwisata pada 6 Oktober 1993. Itu

berarti bahwa ada penambahan lagi enam kawasan wisata. Selanjutnya keputusan itu diperdakan ke dalam Perda Nomor 4, Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Bali pada 2 Juli 1996 di Bali.

Perda Nomor 4, Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Bali diamandemen oleh Perda Nomor 4 Tahun 1999 (*Kompas*, 23 Desember 2004). Perda ini menetapkan Tanah Lot tidak lagi sebagai kawasan wisata, tetapi menjadi objek (dan daya tarik) wisata seperti halnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 470, Tahun 1998 pada 14 Juli 1988 dengan menetapkan Tanah Lot dan 23 tempat wisata lainnya di Kabupaten Tabanan sebagai objek dan daya tarik wisata (Tanah Lot tidak lagi menjadi kawasan wisata).

Berdasarkan surat keputusan itu, kepariwisataan Tanah Lot secara struktural formal tidak bisa lepas dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam perkembangannya wisata Tanah Lot tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan elemen-elemen yang lainnya seperti sarana pendukung dan yang terpenting adalah izin operasional usaha. Objek wisata Tanah Lot baru akan bisa beroperasi apabila izin sebagai syarat utama telah dimiliki, termasuk usaha-usaha lainnya yang ada di objek wisata Tanah Lot. Atas dasar kekuatan itu segala usaha yang ada di objek wisata Tanah Lot secara otomatis tunduk kepada pemerintah daerah. Di sisi lain pemerintah daerah juga merasa mempunyai kuasa atas operasional objek wisata Tanah Lot. Selanjutnya pengoperasian wisata Tanah Lot menunjukkan adanya praktik-praktik hegemoni yang cenderung berasal dari elite struktural sebagai penguasa.

Penterapan cara-cara hegemonik inipun sangat kental terjadi di kawasan suci Pura Tanah Lot dimulai sejak tahun 1990-an ketika mulai berdirinya sebuah hotel berskala besar dan mewah (BNR) yang memerlukan lahan ratusan hektar (Mudana, 2005: 195). Keberhasilan praktik hegemoni ketika pembangunan BNR adalah karena pihak-pihak yang memiliki fungsi pada tatanan struktur formal (pemerintah). Selain itu, pada masa itu masih berlaku era orde baru dengan sistem pemerintahan mengacu pada pusat. Semua struktur pemerintahan dari tingkat paling bawah tunduk pada kebijakan pusat. Kesempatan seperti ini dijadikan peluang oleh investor BNR untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk dapat membebaskan lahan secara aman dan

praktis. Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam penerapan praktik hegemoninya dilakukan dengan beberapa wacana.

Pertama, wacana dengan sosialisasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan diikuti aparat Desa Beraban (perbekel dan *bendesa pakraman*) sebagaimana dituturkan oleh I Wayan Sutarya. Pada saat itu pemerintah menginformasikan bahwa Tanah Lot sekarang sudah semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dan patut dibanggakan. Objek wisata Tanah Lot merukan aset bagi kita di Tabanan dan Desa Beraban khususnya untuk dapat mendatangkan uang. Oleh karena itu, agar semakin banyak dan betah para wisatawan datang ke sini, perlu disediakan beberapa keperluan para wisatawan, seperti hotel, kios-kios, tempat hiburan, tempat parkir, dan yang lainnya. Berkenaan dengan itu, di kawasan Pura Tanah Lot ini akan dibangun sebuah hotel besar. Dengan berdirinya hotel ini diharapkan para masyarakat petani, terutama pemilik lahan diminta kesadarannya berpartisipasi dan mendukung dengan menyerahkan lahannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Sosialisasi semacam ini dilakukan beberapa kali yang sebelumnya telah dilakukan pertemuan awal dengan para aparat desa dengan wacana bahwa tanah para petani sudah diblokir (wawancara, 7 Mei 2015).

Wacana kedua sebagaimana penjelasan warga masyarakat Desa Pakraman Beraban, I Nyoman Karsa bahwa pihak pemerintah melakukan penyuluhan, yaitu dengan dibangunnya BNR dipastikan tidak akan merusak tatanan adat, agama, dan budaya Bali. Dengan berdirinya BNR akan ada masukan lebih banyak pendapatan asli daerah dan khusus bagi Desa Pakraman Beraban. Karena hotel yang akan dibangun dalam kapasitas besar dan tergolong berbintang, jelas membutuhkan banyak tenaga kerja yang dipastikan lebih mengutamakan warga masyarakat setempat (wawancara, 9 Juni 2015). Di pihak lain, menurut Mudana (2005:199), secara umum janji-janji hegemonik itu menunjukkan adanya konsistensi dan perebutan makna atas ruang (tanah-tanah subur yang menjadi lokasi) dalam pembangunan BNR antara pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban, tanah-tanah itu dimaknai sebagai basis kehidupan ekonomi karena sangat produktif dan diwarisi secara turun-temurun. Di sisi lain karena tanah-tanah mereka berada di kawasan suci Pura Tanah Lot, maka tanah-tanah mereka dianggap religius.

Praktik hegemoni lebih nyata terjadi ketika sudah dipandang sepakat terhadap apa yang diwacanakan. Selanjutnya dilakukan dengan realisasi transaksi pembayaran kepada para petani pemilik lahan. Dalam proses ini terjadi praktik hegemoni dan kontra hegemoni sebagaimana pandangan Gramsci (dalam Adhita, 2012:15) bahwa terjadi reaksi dalam hubungan antara penghegemoni (pemerintah) dan yang dihegemoni (masyarakat petani). Dalam prosesnya tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus karena masyarakat petani (sebagai terhegemoni) tidak seluruhnya bisa menerima kebijakan pihak penghegemoni (pemerintah). Dengan demikian, terjadilah kontra hegemoni yang ditunjukkan melalui reaksi penolakan oleh mereka yang tidak sepakat terhadap kebijakan pemerintah karena dianggap merugikan dirinya. Namun, biasanya reaksi penolakan semacam ini sering tidak berhasil karena tidak mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pihak penghegemoni (pemerintah). Akhirnya, dengan keadaan terpaksa menyerah walaupun dalam dirinya tetap tertanam rasa menolak yang diekspresikan dengan sikap lebih baik diam demi selamat.

Praktik ini pun terjadi ketika pihak BNR mulai melakukan transaksi pembayaran atas lahan para petani. Pemerintah tanpa diawali kompromi dengan para pemilik lahan dalam menetapkan taksiran harga tanah. Salah satu sumber menyebutkan bahwa untuk pembangunan BNR telah terjadi pembebasan tanah seluas 121 ha di kawasan Tanah Lot. Saat itu pemerintah hanya menetapkan harga ganti rugi sebesar Rp 2.000.000,00 per are. Harga ini sesuai dengan harga dasar tanah pertanian kelas IV yang berlaku untuk Desa Beraban merujuk pada Keputusan Bupati Tabanan Nomor 234/1989 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Tahun 1989/1990 (*Kompas*, 25 September 1990).

Ada sejumlah masyarakat pemilik lahan bersedia melepas tanahnya dengan harga tersebut dengan alasan karena telah menjadi keputusan pemerintah. Di samping itu, mereka juga berpikir bahwa dengan harga seperti itu bisa dikompensasi untuk membeli tanah di tempat lain dengan harga Rp 1.000.000,00 per are, sebagaimana pernyataan I Ketut Suitra (wawancara 9 Juni 2015).

> *"tiyang sareng ngelah tanah drika (*lokasi BNR*) akedik. Yen puponin tiyang merasa nanggung (*tak mencukupi*) anggen tiyang nunas ajeng ajak keluarga. Mangkin syukur wenten pemerintah numbas aji duang juta. Pameline raris tumbasan*

tiyang tanah carik di subak baler ne (di Pandak) hargane aji juta per are. Pameline pah teluan simpen tiyang alih tiyang bungane. Kewala kanggean tiyang ngejohang tiyang megae ke carike.

Di pihak lain juga banyak masyarakat yang tidak setuju karena merasa harga tanah yang ditetapkan pemerintah sangat tidak sesuai dengan harga standar pariwisata seperti daerah lainnya di Bali. Atas dasar itulah menjadikan proses transaksi mengalami beberapa tahap sehingga terjadi harga bervariasi sejak awal mulainya pembayaran sebagaimana pernyataan Pan Gejor (wawancara 9 Juni 2015) yang tanahnya diganti dengan harga Rp 2.100.000,00 per are. Masih banyak pemilik tanah lainnya merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang dirasakan memaksa untuk menyerahkan hak miliknya, namun tetap mencoba bertahan dengan tiada yang mendampingi.

Situasi seperti ini cukup lama hingga tahun 1993-an yang menyebabkan para pemilik tanah menjadi tidak berdaya dan penuh keraguan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak ada organisasi yang mendamingi dalam berhadapan melawan aparat pemerintah saat itu. Tekanan semakin keras dirasakan oleh para pemilik lahan pertanian dengan dilakukan pemutusan saluran air secara tiba-tiba. Sebagaimana penjelasan Nyoman Sutarya, bahwa *pekaseh* juga tidak bisa berbat banyak pada saat itu karena menurut pengakuannya telah mendapatkan surat perintah dari bupati tetapi tidak mampu menunjukkan buktinya (Sutarya, wawancara 9 Juni 2015).

Merasa tidak maksimal hasil yang dicapai, akhirnya pemerintah melibatkan kekuatan gerakan militer melalui gerakan tekanan mental dengan memanggil setiap warga yang belum menyerahkan hak miliknya datang menghadap ke Kodim Kediri, Tabanan. Pemanggilan itu disertai dengan pernyataan bahwa para warga yang belum mau menerima uang pembelian tanah agar nanti mengambil langsung di kantor Pengadilan Tabanan (I Ketut Suitra, wawancara 15 Juni 2015).

Cara-cara pembebasan lahan untuk pembangunan BNR sebagaimana uraian di atas telah menunjukkan adanya kompleksitas praktik hegemoni atas kekuatan kapitalis (pemodal) dalam melakukan kompromi terhadap pemerintah. Akhirnya karena merasa tidak mempunyai kekuatan dan dengan berpegang teguh pada janji-janji

untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, maka para pemilik lahan secara pelan-pelan menyerahkan haknya. Baru akhirnya setelah itu terjadi reaksi protes pendirian BNR yang sangat keras bersifat umum mengatasnamakan umat Hindu di bawah gerakan kalangan elite intelektual sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh I Gede Mudana pada tahun 2005.

Wisatawan yang datang ke Tanah Lot semakin banyak, pihak pengelola juga mesti harus menyediakan pelayanan tempat parkir yang lebih luas sehingga terjadi pula pengalihan atas hak milik lahan oleh pihak pemerintah. Demikian pula pengalihan hak pengelolaan juga terjadi pada pembangunan kios-kios. Lahan pada akses dari tempat parkir menuju pantai di Pura Tanah Lot merupakan tempat yang strategis dibangun kios-kios untuk pelayanan para wisatawan. Lahan hak milik pada akses tersebut merupakan milik perorangan kemudian dibeli oleh pemerintah. Pada proses ini tidak terjadi reaksi dari warga masyarakat karena proses komunikasinya sangat berbeda dibandingkan dengan saat pembebasan untuk pendirian BNR. Pada proses pengalihan ini terjadi komunikasi yang baik dengan harga tanah yang sesuai dengan situasi pada saat ini. Di pihak lain pengalihan hak perorangan untuk pembangunan kios-kios, ada yang dijual berhubungan secara langsung kepada para pengusaha dan ada juga dengan cara disewakan (Suaja, wawancara 9 Juni 2015).

D. Hubungan Segi Tiga dalam Pengelolaan Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Perjuangan masyarakat lokal untuk ikut mengelola DTW Tanah Lot membuahkan hasil sehingga mengubah pula sistem pengelolaan menjadi tiga pihak. Pihak pertama adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan, pihak kedua adalah swasta (CV Ari Jasa Wisata), dan pihak ketiga adalah Desa Pakraman Beraban dengan sistem *sharing profit.*

Kesepakatan pengelolaan tiga pihak tertuang pada Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan DTW Tanah Lot Nomor 01/HK/2000tertanggal 30 Juni 2000 dan terbitnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 644, Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Pengelola DTW Tanah Lot. Sampai berakhirnya surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan DTW Tanah Lot tahun 2011 telah mengalami revisi satu kali, yaitu pada tahun 2002 menjadi Surat Perjanjian Kerja sama Pengelolaan DTW Tanah Lot Nomor

01/HK/2002. Substansi isi dari perubahan surat perjanjian itu, yaitu terjadi perubahan pada penentuan biaya operasional. Biaya operasional ditentukan berdasarkan pangajuan dari manager operasional untuk selanjutnya disepakati di Badan Pengelola DTW Tanah Lot, yang dalam perjanjian sebelumnya sebagaimana termuat pada Surat Perjanjian Nomor 01/HK/2000 ditetapkan 20 % dari pendapatan kotor. Di dalam Surat Keputusan Bupati itu juga diatur hak dari ketiga pihak dalam Badan Pengelola DTW Tanah Lot.

Kegiatan operasional sehari-hari DTW Tanah Lot dikelola oleh manajemen operasional yang bertanggung jawab kepada Badan Pengelola. Ketika DTW Tanah Lot dikelola oleh pihak swasta, garis koordinasi hanya terjadi antara pihak swasta dan pihak pemerintah daerah, sedangkan ketika DTW Tanah Lot dikelola oleh tiga pihak, fungsi manajemen mulai dijalankan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan selalu melibatkan ketiga pihak. Setelah pengelolaan bersama tiga pihak, penataan terhadap DTW Tanah Lot terus dilakukan. Selama sebelas tahun kerja sama tiga pihak, kawasan DTW Tanah Lot direproduksi menjadi semakin baik dan menampilkan wajah baru misalnya telah dibangun toilet, *rest area*, dan *information centre*.

Sebagaimana teori Butler, yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2006, DTW Tanah Lot dikelola oleh tiga pihak berada pada tahap *involvement* atau tahap masyarakat selaku bagian dari pengelola mulai membangun fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata. Mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 DTW Tanah Lot memasuki tahap *development*, yaitu pembangunan DTW Tanah Lot telah direncanakan untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kunjungan yang datang hingga mencapai 3.500 orang per hari. Pada tahun ini perencanaan dilakukan tentang perluasan areal parkir dan pengaturan tempat berdagang bagi masyarakat juga keamanan wisatawan (Widana, 2015:70).

Menjelang berakhirnya Surat Perjanjian Pengelolaan DTW Tanah Lot pada 21 April 2011, kembali terjadi pergolakan. Masyarakat Desa Pakraman Beraban menuntut agar pengelolaan DTW Tanah Lot tanpa melibatkan pihak swasta. Pergulatan terjadi cukup lama dan beberapa media melakukan peliputan. Saat itu terjadi pergantian bupati, dengan dihadapkan pada permasalahan tuntutan dari masyarakat Desa Pakraman Beraban, akhirnya bupati yang baru melakukan peninjauan ulang terhadap isi perjanjian tiga pihak serta

melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Musyawarah akhirnya membuahkan keputusan bahwa pengelolaan DTW Tanah Lot hanya antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban. Keputusan itu didasari Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan DTW Tanah Lot Nomor 12, Tahun 2011, yang diberakukan mulai 17 November 2011 dan berakhir pada 17 November 2016 (kurun waktu lima belas tahun).

Setelah terjadi perubahan pengelolaan menjadi dua pihak, pengelolaan DTW Tanah Lot tetap dalam bentuk badan pengelola. Pengelolaan tetap dilakukan oleh manajemen operasional di bawah naungan badan pengelola DTW Tanah Lot, hanya tanpa melibatkan pihak swasta. Perkembangan DTW Tanah Lot belakangan ini, yaitu tahun 2015 masih berada pada tahap *development* atau tahap pengembangan. Perencanaan dilakukan untuk mengantisipasi kunjungan yang semakin meningkat hingga mencapai tiga juta dari data tahun 2014. Pihak pengelola terus melakukan peningkatan pelayanan dengan menata kawasan melalui penambahan lahan parkir, perbaikan trotoar, penambahan pintu masuk, pemantauan pengamanan dengan memasang CCTV di tempat yang dianggap rawan, dan lain-lain.

Demi semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, badan pengelola melakukan kerja sama dengan pengusaha pelaku pariwisata lainnya, seperti biro perjalanan wisata, pramuwisata, sekolah-sekolah, dan promosi melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik. Selain itu, juga disediakan tempat ruang tunggu bagi para biro perjalanan dan para pramuwisata yang dilengkapi dengan makanan dan minuman gratis. Badan pengelola DTW Tanah Lot juga mengadakan acara ramah-tamah setiap tahun sekali dengan mengundang para biro perjalanan dan pramuwisata yang mengantar wisatawan ke DTW Tanah Lot.

E. Keterlibatan Pengusaha Lokal dalam Mengelola Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai objek wisata yang dikonsumsi para wisatawan dapat memengaruhi proses produksi. Proses produksi tidak semata-mata untuk menghasilkan nilai guna, tetapi untuk konsumsi. Artinya, konsumsi menjadi tujuan akhir dari produksi. Setelah barang diubah menjadi komoditas, yaitu agar mempunyai nilai tukar dan bisa dijual, komoditas tersebut segera

harus diperkenalkan, diiklankan, dan dipromosikan agar menjadi impian setiap orang (bukan orang tahu hanya barang itu berguna) (Kebayantini, 2010 : 181--182). Pembauran pemasaran adalah *place*/*distribution*, yang fungsinya dalam pemasaran adalah menyebarluaskan tempat-tempat penjualan produk dan tempat-tempat lainnya sehingga konsumen mudah mendapatkannya. Tujuan akhirnya supaya konsumen mudah melakukan pembelian tanpa bersusah payah mencarinya (Yoeti, 2005:160). Berkenaan dengan itu, ada sejumlah cara yang ditempuh, baik oleh jasa Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot, maupun lembaga pemerintah dalam mendistribusikan daya tarik wisata Tanah Lot agar semakin dikenal dan diminati oleh para wisatawan.

Majunya perkembangan daya tarik wisata Pura Tanah Lot tak bisa dilepaskan dari kontribusi kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Salah satu di antaranya adalah biro perjalanan wisata. Hubungan dengan agen perjalanan menciptakan satu mata rantai saluran distribusi produk/jasa. Hubungan kait-mengait yang dikembangkan oleh industri pariwisata dan perjalanan terdiri atas tiga komponen, yaitu (1) industri perjalanan, (2) industri pariwisata, dan (3) industri transportasi (Vellas dan Becherel, 2008 343). Biro perjalanan mempunyai peran penting sebagai agen komunikasi, informasi, penyebarluasan produk di daerah tujuan wisata di samping tujuan utamanya menjual jasa seperti dalam bentuk paket wisata. Biro perjalanan, agen perjalanan, dan tur operator menurut Yoeti (2005:159) merupakan perantara yang berfungsi menjualkan produk perusahaan-perusahaan yang termasuk kelompok industri pariwisata. Peranan perantara dalam industri pariwisata sangat menentukan sebab tanpa perantara sukar bagi konsumen menjangkau daerah tujuan dan perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata.

Terkait dengan sistem distribusi ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Mill dan Morrison (1885) dalam Yoeti (2005:160), diketahui bahwa industri pariwisata memiliki kelebihan dibandingkan dengan industri lain. Perantara penjual (*sales intermediaries*) berfungsi menjembatani antara produsen dan konsumen, baik untuk konsumen secara pribadi maupun rombongan. Tugas utama perantara dari biro perjalanan wisata adalah menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan daerah tujuan wisata dan perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata. Selanjutnya, mengemas paket wisata dengan menggunakan

single product yang nantinya akan membentuk bermacam-mcam paket wisata sesuai dengan target pasar yang dituju.

Demikian juga dengan daerah tujuan wisata Tanah Lot bisa menjadi populer seperti sekarang ini sangat bergantung pada mekanisme proses pendistribusiannya ke daerah dan negara-negara lain. Pemerintah Kabupaten Tabanan dan pihak pengelola pariwisata juga menjalin dan mempererat hubungan kerja sama agar saling menguntungkan dengan pihak biro perjalanan, baik luar maupun dalam negeri. Agar hubungan tetap terjalin dengan baik dan tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari, dipandang penting adanya komitmen antara pengelola objek wisata Tanah Lot dan pihak biro perjalanan wisata. Komitmen terhadap kerja sama dalam bentuk kontrak harga yang ditetapkan merupakan kesepakatan dari ASITA (*Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies*) yang merupakan himpunan *travel agents tour operator* di Indonesia.

Suatu industri pariwisata mempunyai kekuasaan kapital yang dimiliki oleh kaum kapitalis (Robins, 1991:25). Beberapa biro perjalanan wisata yang melakukan kontrak dan menjadi relasi tetap bagi wisata Tanah Lot adalah, Pacto, Golden Kris Tur, Universal Tur, Kuta Bali Tur, Suar Tur, Vaya Tur, Smailing Tur, Api Tur, Bali Duta Ekpres, Surya Jaya, Naga Sari, Vista Express, Sari Tur, Nusa Dua Bali, Satriavi, Asiantrail, Nuansa Bali, Babato, dan lain-lainnya. Biro perjalanan inilah yang menjual produk wisata dalam bentuk paket tur kepada wisatawan sesuai dengan keinginan wisatawan. Apabila dilihat dari sudut pandang daerah tujuan wisata, diperlukan pengaturan dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk kekuatan dan pengawasan yang dapat memengaruhi saluran distribusi kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata. Hal itu penting karena memberikan implikasi terhadap strategi pemasaran yang dilakukan (Yoeti, 2005 : 164).

Sistem bayaran dari pihak biro perjalanan wisata yang berkunjung ke wisata Tanah Lot adalah dengan membayar secara langsung tunai pada bagian tiket masuk oleh pemandu wisata (pramuwisata). Di samping itu, kedua belah pihak melakukan tanda tangan sebagai bukti administrasi untuk perusahaan dan nilai pembayaran sesuai dengan jumlah wisatawan yang datang.

Selain kerja sama dengan jasa biro perjalanan, promosi juga dilakukan dengan komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau verbal sering juga disebut dengan komunikasi bahasa. Disebut komunikasi bahasa karena bahasa dapat membantu memiliki kemampuan untuk

memahami dan menggunakan simbol, khususnya simbol verbal dalam menyusun kerangka pemikiran yang kemudian dikomunikasikan (Liliweri, 2009:154). Komunikasi lisan merupakan cara yang efektif untuk menerangkan sesuatu yang hendak disampikan kepada yang diajak berbicara. Komunikasi lisan dapat dilakukan karena memang ada ruang dan waktu untuk itu, tidak terikat, di mana saja dapat dikomunikasikan sebagai suatu proses sosial. Alvin Gouldrier (dalam Lawang, 1985:52) mengemukakan bahwa organisasi pada umumnya merupakan suatu sistem yang terbuka. Komunikasi lisan dapat terjadi secara langsung bertatap muka antara pihak pengelola yag ditugaskan, sopir angkutan wisata, *guide* (pemandu wisata), dan para wisatawan. Cara ini sangat efektif digunakan asalkan pihak-pihak yang memberikan informasi bisa memberikan keterangan yang benar tentang keberadaan objek. Hal tersebut penting karena ketika para wisatawan kembali ke daerahnya akan memberikan keterangan yang benar juga kepada teman dan masyarakatnya.

Komunikasi lewat telepon juga dapat dilakukan untuk mengintensifkan hubungan agar yang ditelepon selalu ingat dan sekaligus bermakna mengingatkan. Hubungan selalu dilakukan agar hubungan sosial ekonomi yang terjalin tidak putus atau jatuh ke pihak lain. Di samping komunikasi mengingatkan dan mengintensifkan, juga memberikan informasi baru atau perkembangan-perkembangan yang terjadi di seputar objek wisata. Dengan adanya informasi secara langsung, akan didapatkan respons, terjadi interaksi, dan diperoleh pengetahuan tentang keberadaan pariwisata.

Demikian juga pendistribusian pariwisata Pura Tanah Lot, para jasa pariwisata, seperti sopir, pemandu wisata, petugas piket di objek, dan masyarakat selalu melakukan komunikasi yang benar tentang keberadaan Pura Tanah Lot. Di samping itu, para egen pariwisata yang sudah mempunyai hubungan langsung dengan agen wisata di beberapa negara selalu memberikan informasi terbaru sesuai dengan perkembangan pariwisata Tanah Lot.

Distribusi potensi fisik kawasan suci Pura Tanah Lot dilakukan oleh Badan Pengelola, pemerhati potensi kawasan, ataupun para penjual jasa dengan menerbitkan brosur ataupun majalah dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam skala besar. Sebagaimana pendapat George Garbner dengan penuh keyakinan berkomentar bahwa media massa benar-benar menjadi media masyarakat industri. Media massa dianggap turut memberikan andil dalam kenyataan

sosial. Menurut Mar Shall McLuhan, media telah ikut memengaruhi pertambahan bentuk masyarakat. Media tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia akan informasi atau hiburan, tetapi juga ilusi dan fantasi yang mungkin belum pemah terpenuhi lewat saluran-saluran komunikasi tradisional lainnya (Ibrahim, 2011:85). Apa pun motif penggunaannya, media masa sungguh merupakan keniscayaan masyarakat masa kini. Sebagai keniscayaan, memang ada pelbagai kebutuhan yang terasa berhasil dijual oleh media massa.

Penggunaan media massa cetak sangat penting bagi pengelola usaha, seperti halnya tentang daerah tujuan wisata Tanah Lot agar diketahui dan dimengerti oleh yang mengonsumsi. Media massa berhubungan dengan karakter sosial historis resepsi. Penerimaan dan pengambilan produk media massa harus dilihat sebagai praktik berkonteks (*situated practices*), yaitu sebagai praktik yang berada dalam konteks sosial historis tertentu, dalam ruang dan waktu tertentu, dipisah atau disertai yang lain, dan begitu seterusnya (Thompson, 2006: 468). Media massa cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri atas lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan atau halaman putih (Kasiyam, 2008:159). Bentuk media massa wisata Pura Tanah Lot yang digunakan sebagai promosi, menyampaikan atau jasa agar produk segera dapat diketahui wisatawan adalah berupa brosur, gantungan kunci, baju kaos, kartu nama, dan bentuk lainnya yang berisi gambar Pura Tanah Lot.

Brosur merupakan alat atau media penyampaian informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang tertulis, artinya di dalamnya dicetak produk yang dihasilkan. Bentuk brosur yang dibuat berupa kertas warna sesuai dengan warna alami. Pada bagian muka terpampang gambar Pura Tanah Lot yang sangat indah dan spiritual. Jenis brosur menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Di dalam proses wisata komoditas itu penggunaan brosur sebagai media penyampaian pesan dapat dilakukan dengan mudah, komunikatif, dan efektif, oleh pengelola kepada wisatawan yang datang mengonsumsi. Brosur-brosur yang diperolehnya dapat dibawa pergi ke tempat (pulang ke rumah) wisatawan masing-masing. Tanpa disadari dan secara tidak sengaja brosur itu merupakan bahan informasi tentang objek wisata Tanah Lot bagi keluarga, kerabat, atau teman-ternanya di mana para wisatawan bersakutan tinggal, berada dan bergaul (Subrata, 2012: 177).

F. Tanah sebagai Komoditas

Pesatnya perkembangan pariwisata kawasan suci Pura Tanah Lot pada sisi positif dapat meningkatkan, baik taraf perekonomian masyarakat maupun pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Namun, dari sisi negatif juga menimbulkan keterancaman terhadap makin menyempitnya lahan pertanian produktif. Hal itu terjadi karena dengan pesatnya perkembangan pariwisata di kawasan suci Pura Tanah Lot, tentu dibutuhkan tempat yang lebih luas untuk fasilitas pelayanan para wisatawan. Demikian pula para pemilik modal (kaum kapitalis) akan selalu gelisah berusaha mencari lahan agar dapat membuka usaha untuk pelayanan para wisatawan. Akibatnya terjadilah praktik komodifikasi dengan menjadikan tanah sebagai modal komoditas untuk dijual demi mendapatkan uang.

Sejak tahun 1990-an di Bali sudah dikenal sebagai masa mulai maraknya proses alih fungsi lahan pertanian. Pada saat ini berbagai informasi umum menunjukkan bahwa di Bali terjadi proses alih fungsi lahan pertanian bangunan-bangunan fisik, seperti perumahan dan pariwisata, yang mencapai kurang lebih 1.000 ha per tahun. Ini berarti bahwa dalam setiap tahun, Bali kehilangan 1.000 ha lahan pertaniannya (Mudana, 2005: 215).

Sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Tabanan terlihat berkurangnya lahan pertanian setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 1993 yang mencapai 6.640,01 (Kantor Statistik Kabupaten Tabanan, 2013), sedangkan di kawasan wisata Tanah Lot sendiri seluas 2.163 ha (Surat Keputusan Gubernur Nomor 15, Tahun 1998 tentang Lima Belas Kawasan Wisata). Tanah-tanah yang sudah dikapling oleh sebelas investor mencapai 508 ha (Astawa, 1994).

Alih fungsi lahan yang berasal dari tanah pertanian menuai banyak masalah dan bersegi banyak ketika ternyata alih fungsi tersebut mengandung ketidakadilan dalam proses pembebasannya. Penelitian ini berusaha menelusuri beberapa aspek yang bersangkut-paut dengan terjadinya proses kepemilikan yang semula sebagai lahan pertanian. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan adalah pengalihan kepemilikan sebagai proses distribusi di kawasan suci Pura Tanah Lot dari pemilik kepada pemakai jasa-jasa yang memanfaatkan kawasan sebagai komoditas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih

fungsi lahan (pengalihan kepemilikan), bentuk-bentuk pengalihan kepemilikan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses kepemilikan tersebut.

Proses terjadinya alih fungsi lahan (pengalihan kepemilikan) di kawasan suci Pura Tanah Lot dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, juga dilakukan oleh orang lain yang berperan sebagai penawar jasa (formal dan nonformal). Berdasarkan pelakunya, pengalihan kepemilikan dilakukan, baik oleh masyarakat lokal maupun dari luar daerah, yang berperan sebagai perantara dan bekerja sama dengan masyarakat lokal.

Akibat selanjutnya mulai terjadi gejala dinamika kehidupan sosial masyarakat, yang berimplikasi pada tatanan ideologi *tri hita karana*. Zona di sekitar Pura Tanah Lot berupa lahan pertanian sesuai dengan *bhisama panglingsir* Desa *Pakraman* Beraban bahwa sejauh batas-batas yang ditetapkan adalah kawasan yang harus disucikan sebagaimana telah dijelaskan pada bab IV di atas. Di samping itu, juga terbebas dari bentuk-bentuk bangunan komersial, kecuali tempat tinggal bagi penduduk setempat jika sudah tidak memungkinkan memiliki tempat di luar kawasan yang ditetapkan. Namun, akhirnya mengalami perubahan dan dijadikan sebagai tempat beberapa usaha pariwisata. Sebagaimana pernyataan Pitana (dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, 1994:3) bahwa perubahan dan dinamika merupakan suatu ciri yang sangat hakiki dalam masyarakat dan kebudayaan. Perubahan merupakan suatu fenomena yang selalu mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan kebudayaannya. Lebih jauh Pitana menjelaskan bahwa tidak ada suatu masyarakat yang statis dalam arti yang absolut. Artinya, setiap masayarakat selalu mengalami transformasi dalam fungsi waktu sehingga selalu mengalami perubahan.

Menurut Atmadja (2010:7), inovasi, difusi kebudayaan, dan pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan sosial, bahkan sering tumpang tindih satu sama lain, sehingga secara faktual sulit dibedakan. Warga masyarakat sering kali hanya bisa merasakan bahwa sistem sosiokultural telah berubah. Mereka tidak tahu secara pasti apakah perubahan itu karena inovasi, difusi, ataupun pembangunan. Gejala ini berlangsung sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian integral dari kehidupan suatu masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat selalu menyediakan pintu bagi suatu perubahan sosial yang berfungsi

sebagai ruang bagi masuknya faktor terjadinya perubahan. Di samping itu, juga membuang unsur-unsur kebudayaan yang dianggap disfungsional bagi keberlangsungan hidup sistem sosiokultural mereka.

Demikian pula halnya dengan masyarakat Desa Pakraman Beraban. Artinya, sejak perkembangan pariwisata Tanah Lot hingga sekarang tak terhindarkan dari perubahan tatanan pola kehidupannya. Mereka sudah mulai sangat terbuka dan menyediakan pintu terhadap adanya perubahan karena mereka berkeinginan untuk mendapat pengakuan dalam status sosial. Satu fenomena perubahan yang paling kuat mencuat bahkan sedang menjadi isu nasional khususnya (daerah Bali) adalah tentang pengalihan kepemilikan (jual beli) lahan pertanian untuk kepentingan pariwisata. Proses jual beli lahan saat itu menunjukkan adanya peningkatan yang sangat fantastis dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat Desa *Pakraman* Beraban, terutama pada tatanan individu.

Masyarakat mulai mengabaikan profesi sebagai petani dengan pertimbangan spekulatif bahwa biaya produksi dengan hasil produksi terjadi selisih lagi sedikit. Dengan demikian, banyak petani menjual lahan pertaniannya dengan pertimbangan bahwa hasil dari penjualan setelah dibungakan di bank mendapat keuntungan sekian kali lipat lebih besar daripada hasil dari mengolah tanah dengan bertani.

Sebelum perkembangan pariwisata seperti sekarang, secara geografis kondisi wilayah Desa *Pakraman* Beraban sangat potensial untuk pertanian sehingga kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban ditopang oleh hasil pertanian. Masyarakat masih menggantungkan segala kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian dan melakukan kegiatan tambahan menjadi buruh serabutan di samping ada pula yang melaut mencari ikan. Seiring dengan berjalannya waktu yang mutlak ditentukan oleh alam disertai pesatnya arus globalisasi dengan kecenderungan manusia dihadapkan pada era konsumtif, maka dibutuhkan modal dukungan yang memadai. Akhirnya, hasil pertanian tidak lagi dapat diandalkan untuk menopang segala kebutuhan yang diperlukan, lebih-lebih aliran air irigasi semakin menyempit karena dibatasi oleh bangunan-bangunan. Di samping itu, juga disebabkan oleh biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi dan mengalami berbagai macam serangan hama. Untuk mengatasi masalah kekuarangan air, masyarakat juga sudah berusaha mengantisipasi dengan membuat sebuah terowongan secara bergotong royong, tetapi hasilnya tidak

sesuai dengan harapan mereka. Kendatipun demikian, mereka tampaknya tidak surut (*ngambul*) untuk menggarap lahan mereka karena pertanian merupakan satu-satunya sumber pokok kehidupannya. Artinya, merupakan sesuatu yang wajar dengan kondisi kehidupan yang demikian perkembangan kondisi intelektual masyarakatnya mengalami perkembangan yang lambat apalagi biaya pendidikan cukup tinggi.

Seiring dengan perkembangan zaman, ketika memasuki era tahun 1990-an bersamaan dengan program Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperluas wilayah pariwisata, maka kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban mulai bangkit. Hal itu disebabkan oleh isi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 31, Tahun 1988 pada 13 Januari 1988, yang menetapkan pengembangan kawasan wisata Tanah Lot melingkupi Desa Beraban dan Desa Belalang, tetapi Desa Beraban tetap sebagai pusat pengembangannya. Sejak saat itu lama-kelamaan Tanah Lot semakin ramai dikunjungi para wisatawan. Keterlibatan masyarakat Desa *Pakraman* Beraban dalam bidang kepariwisataan juga semakin meningkat. Aktivitas pertanian hanya masih dilakukan oleh kalangan orang-orang tua dengan alasan cuma profesi bertani yang bisa dilakukan dan sawah merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan. Besok-besok kalau saya sudah tidak bisa bekerja, barangkali sawah ini hanya ditumbuhi rumput saja sebagaimana penjelasan Wayan Suaba berikut ini.

> *"Pak tiyang niki suba umur penyalah, budi melajah megae cara jani ne pepineh sube paling, bayu kari abedik, tuwah megae di carik ane bisanin tiyang. Buine carike niki duwen anak lingsir, patut tetep puponin tiyang. Mertan tiyang dini di carike. Cerik-cerike jani ten ade pesan nyak megae ke carik, apo ye mani puan lakar ajenge. Mani puang tiyang sing nyidang megae pragat lakar entikin padang carik tiyange* (Wawancara, 10 Mei 2015).

Orang-orang di luar warga masyarakat Desa Pakraman Beraban, terutama yang memiliki profesi di bidang kepariwisataan dan memiliki modal (kaum kapitalis) justru sangat jeli melihat kawasan Tanah Lot yang berpeluang dan sangat potensial sebagai modal untuk dijual kepada para wisatawan. Di pihak lain secara struktural formal Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat

keputusannya yang dikeluarkan juga telah memprogram dan merancang strategi agar mendapatkan suntikan pendapatan daerah dari wisata Tanah Lot. Oleh karena itu, mulai terjadi kompetisi di antara mereka agar mendapatkan peluang untuk menanamkan modal demi jasa pelayanan para wisatawan. Mereka melakukan berbagai macam terobosan untuk mendapatkan lahan demi usaha dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat lewat perantara individu warga masyarakat. Akhirnya, banyak memunculkan profesi baru di bidang percaloan jual beli tanah dengan jurus-jurus pamungkasnya mendekati warga masyarakat petani. Di sisi lain pemodal besar yang dikenal dengan istilah investor berusaha melakukan pendekatan kerja sama dengan pemerintah.

Suasana seperti itu menjadikan warga masyarakat Desa Pakraman Beraban gelisah atas informasi janji-janji para investor akan memberikan kompensasi harga tinggi terhadap masyarakat yang bersedia menjual lahannya. Situasi semacam ini akhirnya menjadikan bahan pertimbangan secara ekonomi kalangan para pemilik lahan tentang proses pengolahan lahan yang dimiliki. Atas pertimbangan itu akhirnya tidak sedikit lahan pertanian termasuk yang berada pada zona kawasan suci Pura Tanah Lot juga ada yang dijual (alih fungsi). Hingga saat sekarang ini proses jual beli masih tetap ada kesempatan. Namun, prosesnya berbeda jika dibandingkan dengan waktu memasuki tahun 1990-an, terutama saat berdirinya hotel berstandar besar (BNR) yang tak bisa lepas dari trik para kompetitor dan penjelasannya diuraikan pada sub selanjutnya.

Pemicu kepemilikan melalui proses jual beli terjadi disebabkan oleh beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan oleh I Made Suwardana warga Desa Pakraman Beraban berikut ini.

> *"Kawentenan subak driki pikoloihne ten becik malih, sane mawinan ten wenten toya sane cukup anggen tityang. Sujatine palemah subak driki joh tegehang sareng toya sane wenten. Dumun yen ten wenten hujan jeg ten sampun nyidang ngarap carik driki. Sampun masih tyang sareng sami mekarya aungan (terowongan) kerja bakti nanging ten masih nyidang polih toya. Tyang mare keweh hidup tyang driki ngandelang hasil uli carik dogen nanging untutane akeh pesan* (wawancara, tanggal 9 Mei 2015).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kondisi lahannya tidak lagi produktif sebagai pertanian. Hal itu disebabkan oleh lahan pertanian di Desa Beraban sulit mendapatkan air sekalipun sudah diantisipasi secara swadaya dengan membuat terowongan saluran air, tetapi tidak bisa mencukupi untuk mengairi sejumlah sawah yang ada. Di sisi lain ketika ada kesempatan menanam padi, masyarakat dihadapkan pada datangnya hama tanaman yang merugikan produksi pertanian. Demikian juga dalam mengolah pertanian sekarang dibutuhkan biaya yang cukup banyak karena dihadapkan pada program industrialisasi dan modernisasi yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan dengan mengharuskan menggunakan bahan-bahan kimiawi.

Pemicu lain juga sebagai penyebab terjadinya alih fungsi lahan adalah karena tidak ada regenerasi untuk menggarap lahan pertanian. Kecenderungan dari penggarap lahan pertanian sekarang ini adalah para kaum lanjut usia saja dengan kondisi fisik tidak mendukung. Generasi muda lebih cenderung mencari nafkah dengan menggeluti pekerjaan lain. Suatu potret dari Atmadja (2010) tentang proses pola pertanian di Kabupaten Tabanan pada abad modernisasi sekarang ini. Karena para generasi tua dengan alasan tenaga tidak sanggup lagi menggarap lahan, maka lahannya diberikan kepada orang lain untuk digarap dengan sistem *nandu* (bagi hasil sesuai dengan kesepakatan). Pola ini pun dipandang tidak efektif karena para pemilik lahan tetap merasa dirugikan, sedangkan di pihak *penandu* selalu untung sebab selama dalam proses sebagian biaya juga dibebankan kepada pihak pemilik.

Kalau dicermati, proses itu merupakan suatu upaya dari masyarakat pemilik lahan pertanian bahwa lahan yang dimiliki agar tetap dapat menjamin kehidupannya. Dari sudut pandang makro untuk Kabupaten Tabanan, pola yang diterapkan dapat dicermati sebagai suatu upaya dalam mempertahankan identitas sebagai lumbung beras. Kondisi seperti ini mengakibatkan detradisionalisasi yang luas dan kompleks pada para pemilik lahan dan memicu untuk mengubah pola hidupnya agar dalam status sosialnya tetap bisa berkembang. Selain itu, juga adanya tawaran lain, yaitu jika mau menjual lahan kemudian setelah ditaksir melebihi hasil pengolahan lahan seperti biasanya. Hal itu menyebabkan masyarakat tertarik untuk mengalihkan lahannya kepada pihak lain. Sebagaimana penuturan I Wayan Suaba, salah

seorang warga pemilik lahan pertanian di kawasan suci Pura Tanah Lot di bawah ini.

> *"Tiyang ngelah pianak muani-muani dadua mangkin sampun pada teruna ten pesan nyak megae kecarik. Panak tiyang tuah tamat* SMA *gen, mangkin sami meburuh di Badung. Tiyang ngelah duwen nak lingsir akecoran, ne jani tiyang sampun tuwa ten nyidang megae ke carik, dugas niki petanduan tiyang mebagi hasil. Nanging rugi rasane tiyang, hasilne bedik biyo ne gede, buine makejang biyo uli nyumunin mebagi dua nganti ke hasilne. Kebenengan ade anak nagih meli tanah tiyange, disubane itung-itung hasil teken pamelinne ajak panak-panak tiyange, jeg adep lantas. Mangkin pameline jang tiyang di* Bank *alih tiyang anak-anak ne ngabulan. Aluh saja tiyang merasa, nanging sebet tiyang ngadep gelah anak lingsir, buin pidan meli lakar sing nyidang* (wawancara, tanggal 19 Juni 2015).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pertanian sudah tidak efektif lagi untuk mendukung kebutuhan hidup. Jika dipaksakan, akan memerlukan biaya produksi tidak seimbang dengan hasil produksi. Dengan perhitungan ekonomi jika dijual kemudian uangnya dibungakan di bank akan mendapatkan hasil jauh lebih besar daripada hasil pertanian. Namun, di balik fenomena jual beli lahan masih tertanam rasa kekhawatiran secara moral untuk tetap menjaga warisan leluhur.

Pengalihan lahan juga disebabkan oleh desakan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap terjadinya pengalihan kepemilikan. Adhika (2012: 92) menjelaskan bahwa banyak pihak yang berkepentingan terkait dengan pengalihan, seperti perantara, pihak yang terlibat dalam administrasi pengurusan pengalihan hak, ataupun lembaga yang menangani pengalihan hak. Pihak-pihak yang terlibat itu pada dasarnya mempunyai kepentingan yang berujung pada uang dan untuk status dalam operasional. Demi tercapainya tujuan, mereka saling berkompetisi melakukan pendekatan dengan cara dan gaya masing-masing. Dengan demikian, dalam proses seperti ini secara langsung terjadi praktik-praktik hegemoni dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan cara-cara hegemoni bergantung pada seberapa besar kualitas dan pengaruh yang dimiliki oleh setiap pihak.

Sebagaimana pendapat Atmadja (2009: 12) bahwa dalam praktik seperti ini pejabat dan investorn pun ikut berperan karena mempunyai kepentingan yang tersembunyi dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini tampak bahwa cara kerja hegemoni, yaitu melalui kepemimpinan secara halus, canggih, dan intelektual lewat semacam proses cuci otak dalam memaknai sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap otak-otak masyarakat. Hal itu sebagaimana pendapat Gramsci bahwa hegemoni dalam pembebasan lahan di kawasan suci Pura Tanah Lot berlangsung secara luar biasa lewat wacana-wacana.

Penerapan cara-cara hegemonik ini pun terjadi di kawasan suci Pura Tanah Lot yang dimulai sejak tahun 1990-an ketika mulai berdirinya sebuah hotel berskala besar dan mewah (BNR) yang memerlukan lahan ratusan hektare (Mudana, 2005:195). Keberhasilan praktik hegemoni ketika pembangunan BNR adalah pihak-pihak yang memiliki fungsi pada tatanan struktur formal (pemerintah). Praktik hegemoni terjadi karena pada masa itu masih berlaku era orde baru dengan sistem pemerintahan mengacu pada pusat. Semua struktur pemerintahan dari tingkat paling bawah tunduk pada kebijakan pusat. Kesempatan seperti ini dijadikan peluang oleh investor BNR untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk dapat membebaskan lahan secara aman dan praktis. Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam penerapan praktik hegemoni dilakukan dengan beberapa wacana.

Pertama, wacana dengan sosialisasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan diikuti aparat Desa Beraban (Perbekel dan *Bendesa Pakraman*) sebagaimana dituturkan oleh I Wayan Sutarya. Pada saat itu pemerintah menginformasikan bahwa Tanah Lot sekarang sudah semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dan patut dibanggakan. Objek wisata Tanah Lot merupakan aset bagi kita di Tabanan dan Desa Beraban khususnya untuk dapat mendatangkan uang. dengan demikian, agar semakin banyak dan betah para wisatawan datang ke sini, perlu disediakan beberapa keperluan para wisatawan, seperti hotel, kios-kios, tempat hiburan, tempat parkir, dan yang lainnya. Berkenaan dengan itu, di kawasan Pura Tanah Lot ini akan dibangun sebuah hotel besar. Dengan berdirinya hotel ini diharapkan para masyarakat petani terutama pemilik lahan diminta kesadarannya berpartisipasi dan mendukung dengan menyerahkan

lahannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Sosialisasi semacam ini dilakukan beberapa kali yang sebelumnya telah dilakukan pertemuan awal dengan para aparat desa dengan wacana bahwa tanah para petani sudah diblokir (wawancara, tanggal 7 Mei 2015).

Wacana ke dua sebagaimana penjelasan warga masyarakat Desa Pakraman Beraban I Nyoman Karsa, bahwa pihak pemerintah melakukan penyuluhan bahwa dengan dibangunnya BNR dipastikan tidak akan merusak tatanan adat, agama, dan budaya kita. Dengan berdirinya BNR akan ada pemasukan lebih banyak pendapatan asli daerah dan juga khusus bagi Desa Pakraman Beraban. Karena hotel yang akan dibangun dalam kapasitas besar dan tergolong berbintang, jelas banyak membutuhkan tenaga kerja yang dipastikan lebih mengutamakan warga masyarakat setempat (wawancara, tanggal 9 Juni 2015). Sedangkan menurut Mudana (2005: 199) menjelaskan, secara umum janji-janji hegemonik itu menunjukkan adanya konsistensi dan perebutan makna atas ruang (tanah-tanah subur yang menjadi lokasi) dalam pembangunan BNR antara pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban, tanah-tanahnya itu dimaknai sebagai basis kehidupan ekonomi karena sangat produktif dan diwarisi secara turun-temurun. Di sisi lain karena tanah-tanah mereka berada di kawasan suci Pura Tanah Lot, maka tanah-tanah mereka dianggap religius.

Kemudian dengan semakin banyak wisata yang datang ke Tanah Lot, pihak pengelola juga mesti harus menyediakan pelayanan tempat parkir yang lebih luas. Maka terjadi pula pengalihan atas hak milik lahan oleh pihak Pemerintah. Demikian pula pengalihan hak pengelolaan juga terjadi pada pembangunan kios-kios. Lahan pada akses dari tempat parkir menuju pantai di tempat Pura Tanah Lot merupakan tempat yang strategis dibangun kios-kios untuk pelayanan para wisatawan. Lahan hak milik pada akses tersebut merupakan milik perorangan, kemudian dibeli oleh pemerintah. Pada proses ini tidak terjadi reaksi dari warga masyarakat, karena proses komunikasinya sangat berbeda ketika pembebasan untuk pendirian BNR. Proses pengalihan ini terjadi komunikasi yang baik dengan harga tanah yang sesuai dengan situasi pada saat ini. Sedangkan pengalihan hak perorangan untuk pembangunan kios-kios, ada yang dijual berhubungan secara langsung kepada para pengusaha, dan ada juga dengan cara disewakan (Suaja, wawancara tanggal 9 Juni 2015).

G. Keterlibatan Masyarakat Sipil

Fenomena konflik yang terjadi beberapa tahun yang lalu tentang kawasan suci Pura Tanah Lot yang dijadikan sebagai bahan komoditas untuk konsumsi wisatawan melibatkan pertarungan dua kekuatan, yaitu kelompok elite integratif yang terdiri atas para pimpinan politik dan organisasi struktural pemerintah melawan elite sublimatif yang terdiri atas para pemimpin moral keagamaan, seni, dan intelektual. Menurut Keller (1984:17), fungsi pokok tipe elite integratif adalah mengintegrasikan sejumlah besar kehendak-kehendak perseorangan sedangkan fungsi pokok tipe kalangan elite sublimatif adalah mengembangkan jalan keluar yang produktif secara sosial. Kelompok ini bisa juga dikonotasikan sebagai masyarakat sipil karena dalam melaksanakan aktivitasnya tanpa disertai dengan kekuatan persenjataan, seperti ABRI, tetapi hanya berangkat dari keunggulan intelektual.

Perlawanan masyarakat petani Desa Pakraman Beraban yang didukung oleh para elite msyarakat Bali adalah melawan hegemoni pemerintah melalui kontra hegemoni tentang pembangunan BNR yang dirasakan merugikan masyarakat petani. Kalangan elite sublimatif terdiri atas berbagai unsur, seperti akademisi, kelompok seni, budayawan, media masa, dan lain-lain melakukan perlawanan melalui kajian interpretatif status pura Tanah Lot sebagai pura umum sehingga semua umat Hindu berkewajiban memelihara kesuciannya. Atas dasar itu pembangunan BNR dipandang telah melakukan pelecehan terhadap kesucian Pura Tanah Lot karena dibangun berada pada kawasan yang patut disucikan. Setelah itu dilanjutkan dengan protes masyarakat petani yang tanahnya dibebaskan secara paksa tanpa ada persetujuan pihak pemilik.

Mudana (2005) mengatakan bahwa gagasan pembangunan BNR segaris dengan kebijakan pemerintah (negara) sehingga pemerintah dengan sangat mudah memberikan izin pendiriannya. Aliansi antara investor dan pemerintah yang kental menggejala pada masa era orde baru, baik di mata pemerintah maupun investor sangat optimis bahwa proyek itu tidak akan terkendala. Sekalipun pada akhirnya mendapatkan respons penolakan dari kalangan masyarakat sipil walaupun agak terlambat. Beberapa tokoh sipil dengan sangat getol berjuangan, seperti Prof. Dr. I G. Ng. Bagus, Kesume Kelakan,

Manuaba, Ir. Gelebet, dan lain-lainnya berusaha memperjuangkan hak para petani yang termarginalkan.

Kelakan (dalam Mudana, 2005:364) menjelaskan bahwa pada waktu proses perjuangan melawan pemerintah yang mendukung pendirian BNR, dalam proses awal pendirian BNR ditemukan beberapa hal penting. *Pertama*, aparat negara, terutama yang bergerak di bidang keamanan ikut ambil bagian dalam pembebasan tanah karena mendapatkan imbalan finansial. *Kedua*, ketentuan surat izin penderian BNR bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur mengenai kawasan suci wisata 13 Januari 1988, yang hanya memperbolehkan pembangunan sarana pariwisata dalam jarak lebih dari 2,5 km dari tempat-tempat suci umat Hindu (sad kahyangan). Namun, pendirian BNR hanya berjarak satu km dari Pura Tanah Lot. *Ketiga*, pemberian izin kepada PT Bakrie menunjukkan Bupati Tabanan tidak konsisten dengan Peraturan Daerah Nomor 6, Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Bali yang mengacu pada falsafah *tri hita karana.*

Bupati Tabanan berdalih bahwa tanah petani yang dibebaskan menjadi sarana pariwisata karena tidak produktif, ada yang ditumbuhi alang-alang sehingga benar-benar tidak memberikan keuntungan maksimal bagi pemiliknya (*Bali Post*, Rabu, 12 Januari 1994). Waktu itu Bupati Tabanan kebetulan dijabat oleh seorang angkatan (TNI) pasang badan dalam pembangunan BNR dengan ucapan yang sangat menyengat "jangankan tanah, nyawa pun bisa saya beli" (Mudana, 2005:366). Gubernur Bali saat itu juga telah mengklaim bahwa pembangunan BNR tidak ada masalah lagi karena semua persyaratan administrasi terpenuhi.

Upaya perjuangan dan perlawanan masyarakat sipil hampir delapan tahun, yaitu sejak tahun 1990 sampai tahun 1997 belum berhasil dituntaskan. Salah satu bukti pemberitaan surat pembaca di harian *Bali Post* (Selasa, 29 Juli 1997) memberitakan bahwa Nang Ciri alias I Nengah Suger mengadukan sejumlah 41 are tanah sawahnya sudah tidak berbentuk sawah lagi karena dibuldoser pada proyek pembangunan BNR, padahal dia sendiri tidak pernah merasa menjualnya. Ia meminta supaya tanahnya dikembalikan lagi seperti semula kalaupun diganti rugi ia akan menerima asalkan dikonvensasi dengan harga yang sesuai dengan harga pasar daerah wisata.

Menurut keterangan Pan Arsa (wawancara 20 September 2015), Nang Ciri merupakan salah seorang warga yang paling berani

saat itu melawan para pejabat. Keberaniannya melawan karena status tanahnya yang tidak jelas dan berada pada posisi yang paling strategis (tempat *lobby* BNR) sekarang. Atas dasar itu ia menuntut agar tanahnya dibayar seharga 400 juta rupiah per are. Ada hal yang paling mendasar yang mendorong keberanian Nang Ciri melakukan protes adalah harga diri. Secara moral dia merasakan harga dirinya diinjak karena tanpa persetujuan tanahnya dibuldoser. Di sisi lain secara moral juga ia merasa tidak bisa menjaga amanah leluhur sehingga pada dirinya terasa semakin jengah. Sikap Nang Ciri dalam penelitian ini merupakan salah seorang korban hegemoni kalangan elite integratif yang berusaha keras memperjuangkan haknya karena diperlakukan secara tidak adil. Cerita lainnya masih ada beberapa petani yang mengalami nasib yang sama. Karena merasa tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk melakukan perlawanan akhirnya menerima dengan pasrah nilai ganti rugi yang diberikan, dan ada juga yang tanahnya ditukar dengan tanah di tempat lain. Hati nurani mereka tetap tidak bisa menerima walaupun selain uang diberikan sebagai penjualan atas tanahnya. Mereka juga tidak merasa gembira walaupun anak-anaknya diberikan bergabung sebagai karyawan BNR karena dalam pikirannya dengan tidak ada dasar pengalaman dan pendidikan yang memadai dapat dipastikan bahwa posisi anaknya akan menjadi karyawan pada level yang paling rendah.

Bentuk-bentuk perlawanan yang telah dilakukan masyarakat Desa Pakraman Beraban yang terhegemoni dimotori oleh kalangan elite sublimatif tentu memiliki konsekuensi akhir, yaitu berhasil atau tidak berhasil. Menurut istilah Keller (1984:16), perjuangan kalangan elite sublimatif berangkat dari perjuangan moral untuk menjaga nilai kesucian kawasan suci Pura Tanah Lot. Hal terpenting dalam perjuangan itu adalah adanya sikap moral yang tulus dalam mempertahankan hak yang patut diperjuangkan sehingga bagi kalangan yang membantu masyarakat terhegemoni tidak untuk mendapatkan keuntungan materi. Perjuangan kalangan sublimatif merupakan hakikat dari kerja yang sudah mengakar pada hati sanubari umat Hindu sebagaimana dijelaskan pada kitab suci *Bhagawadgita* Bab III, sloka 19 berikut ini.

"Tasmad asaktah satatam Karyam karma samachara
Asakto hy acharan karma Param apnoti purushah"

Dari itu laksanakanlah segala kerja Sebagai kewajiban tanpa harap keuntungan Sebab kerja tanpa keuntungan pribadi Membawa orang ke kebahagiaan tertinggi (Pendit, 1986: 74).

Kutipan di atas merupakan suatu cermin dalam menginterpretasi perjuangan kalangan elite sublimatif yang harus dan wajib hukumnya dilakukan. Pada akhirnya sampai pada konsekuensi keberhasilan dari apa yang telah dikerjakan.

Selama kurang lebih delapan tahun (1990--1997) perjuangan yang dilakukan merupakan suatu perlawanan yang membawa hasil cukup bagus bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban, yaitu munculnya *bhisama* tentang kesucian kawasan suci Pura Tanah Lot dari PHDI Pusat. Selain itu, juga surat keputusan mengenai pembatalan sementara pembangunan BNR dari Gubernur Bali yang berarti terjadi pula penghentian hegemoni untuk sementara. Walaupun pada akhirnya hingga kini masyarakat tidak mampu melawan kekuatan hegemoni struktural pemerintah sehingga pembangunan BNR terus berlanjut. Masyarakat yang tak kuasa melawan kekuatan hegemoni pemerintah akhirnya terpaksa menerima kenyataan sekalipun dalam dirinya tetap menolak sehingga mereka lebih baik diam (*koh ngomong*).

Isi *Bhisama PHDI* Pusat mengandung ketentuan tentang segala bentuk pengembangan pembangunan pelayanan pariwisata tempat suci/pura harus mengikuti aturan zona kesucian kawasan yang telah ditetapkan, yaitu untuk pura *sad kahyangan* sepanjang 2,5 km dari pura tidak dibolehkan untuk membangun, sedangkan untuk pura *dang kahyangan* sepanjang 2 km tidak boleh membangun. Terkait dengan kawasan tempat suci Pura Tanah Lot sebagai salah satu *dang kahyangan* yang dijadikan DTW, penterapan zona sepanjang 2 km tidak bisa diterapkan karena keberadaan bangunan BNR berada pada zona kesucian 2 km.

Selain BNR sampai saat sekarang telah banyak terdapat bangunan di kawasan suci Pura Tanah Lot, yang banyak dibangun oleh lembaga pengelola bersama pemerintah daerah dan milik pribadi masyarakat. Sepanjang kawasan suci direproduksi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wisatawan, pada akhirnya disertai dengan peningkatan terhadap pendapatan retribusi. Adanya reproduksi terhadap kawasan suci Pura Tanah Lot tidak menimbulkan sikap protes, malah disambut baik karena sebagian besar pedagang sebagai warga masyarakat Desa Pakraman Beraban.

Ideologi masyarakat Desa Pakraman Beraban terhadap pemertahanan kawasan suci Pura Tanah Lot masih tetap eksis. Namun, secara teknis telah mengalami pergeseran yang lebih menekankan pada aspek etika. Artinya, tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang tidak terpuji/ tidak senonoh di areal kawasan tempat suci Pura Tanah Lot.

Beberapa usaha kepariwisataan tidak dipernankan di kawasan suci Pura Tanah Lot jika menurut kajian usaha itu dinilai melenceng dari nilai moral seperti usaha kolam renang sama sekali tidak dibolehkan. Masyarakat Desa Pakraman Beraban khususnya diperkenankan membangun tempat tinggal di kawasan suci Pura Tanah Lot, tetapi tidak diperkenankan melaksanakan upacara *pitra yadnya.* Menurut Arwata, jika ada warga masyarakat Desa Pakraman Beraban yang bertempat tinggal di kawasan suci Pura Tanah Lot lalu meninggal, dia harus melaksanakan upacara di rumah asalnya (di desa di luar kawasan suci). Jika sama sekali tidak memiliki keluarga atau rumah di desa, secara melembaga masyarakat Desa Pakraman Beraban membantu menyelenggarakan dari awal sampai akhir yang pelaksanaannya dilakukan di *setra*.

BAB V

IMPLIKASI KOMODIFIKASI KAWASAN SUCI PURA TANAH LOT

Makna kata implikasi akan menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk mengetahui konsekuensi akhir dampak atau akibat dari komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot, yang berdampak pada masyarakat Desa Pakraman Beraban, baik dalam status individu maupun kolektif. Penelitian ini terfokus pada terjadinya implikasi dari komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot terhadap aspek religius magis, ekologis, sosial ekonomi, sosial budaya, dan ideologis masyarakat Desa Pakraman Beraban sebagai berikut.

A. Implikasi Religius Magis

Sejak pengembangan pariwisata kawasan suci Pura Tanah Lot tampaknya juga mengikuti bergeraknya kompleksitas arus perubahan sosial masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Menurut Sztompka (2007: v), perubahan fundamental di dunia ini ditandai oleh munculnya tatanan masyarkat urban, industrial, dan kapitalis. Dari pendapat itu pula menunjukkan bahwa industri pariwisata telah mengubah dinamika Desa Pakraman Beraban menjadi kawasan industri wisata yang kapitalistik dan datangnya kaum urban. Pariwisata telah memengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban, baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Bali Nomor 3, Tahun 1974 tentang pengembangan pariwisata budaya. Menurut Mudana (2000:199), secara substansial Perda ini dilandasi oleh proposisi bahwa kebudayaan berfungsi bagi pariwisata menurut pola hubungan yang bersifat *linear* dan satu arah yang dikaitkan dengan isu pembangunan nasional yang memberikan prioritas tinggi kepada bidang ekonomi. Akibat dari prioritas tinggi pada bidang ekonomi, selanjutnya mendorong pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Beraban mengarah ke *mass tourism insudtry* yang diawali dengan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin ramai dan pembangunan sarana akomodasi pariwisata yang sangat padat. Karakteristik pengembangan pariwisata budaya saat ini adalah pariwisata

kapitalistik birokratis. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya dikhawatirkan bisa menghancurkan masyarakat dan kebudayaan lokal.

Mass torism industri yang berkembang di Desa Pakraman Beraban telah dirasakan oleh *krama* Desa Pakraman Beraban sebagai industri yang menjanjikan kesejahteraan hidup. Namun di sisi lain juga mendorong tumbuhnya kesadaran kritis *krama desa pakraman* terhadap dinamika pariwisata budaya. Hal itu sejalan dengan pendapat Pitana (2008) bahwa pariwisata budaya merupakan salah satu bentuk industri budaya. Dikatakan demikian karena telah memanfaatkan berbagai aspek kebudayaan secara massal dalam suatu sistem produksi yang mencakup aspek produksi, reproduksi, konsumsi, dan promosi. Dengan demikian, masyarakat terdorong utuk melakukan perubahan sistem kehidupan yang lebih menekankan pada inovasi agar bisa memberikan pelayanan wisata sesuai dengan motivasi dan kebutuhan wisatawan yang semakin ramai berkunjung ke kawasan suci Pura Tanah Lot. Perubahan tersebut juga sekaligus sebagai antisipasi terhadap dampak *mass tourism industri* yang tidak terlepas dari tatanan masyarakat urban, industrial, dan kapitalis.

Inovasi perubahan sistem kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban sejalan dengan pendapat Sztompka (2007:333) dan Trijana (2006:148--156), yaitu memiliki orientasi dan harapan ke masa depan sesuai dengan konteks lokal dan global yang melingkupinya pada hubungan yang dialektif reflektif. Perubahan di lakukan untuk mengatasi kelemahan menjadi kekuatan sehingga merupakan proses mengatasi masalah, mengubah kelemahan menjadi kapasitas, mengubah bentuk tanpa harus mengganti isinya. Dengan demikian, makna inovasi perubahan mengarahkan sistem kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban menjadi lebih efektif dan sebagai kekuatan dalam pengembangan destinasi pariwisata.

Bendesa Pakraman Beraban, I Made Subawa dan mantan Bendesa Pakraman Beraban, I Wayan Arwata, menjelaskan bahwa destinasi wisata kawasan suci Pura Tanah Lot bermakna sangat penting pada inovasi dari sistem kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban. Dikatakan demikian karena di satu sisi pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sedangkan di sisi lain bisa melestarikan, mengembangkan dan membangkitkan kembali kebudayaan yang sempat mengalami kevakuman. Lebih jauh I Wayan Arwata menjelaskan sebagai berikut.

> "Adaptasi budaya dengan lingkungan kami yang menjadi daerah pariwisata dan perubahan bentuk kegiatan budaya yang kami lakukan berkaitan dengan waktu serta ruang yang terdesak sarana pariwisata, tidak menyimpang dari apa yang kami warisi sejak zaman dulu. Kebudayaan sebagai modal *desa pakraman* kami dalam pengembangan pariwisata harus bisa menjadi kekuatan yang berguna bagi *krama desa pakraman* dan juga bagi berkembangnya pariwisata. Sejujurnya kami mengakui, *krama* Desa Pakraman Beraban saat ini sangat tergantung pada pariwisata sehingga budaya yang kami lakukan dan kami tampilkan sebagai daya tarik wisatawan juga tidak bisa lepas dari kepentingn pariwisata agar wisatawan tetap ramai berkunjung ke Beraban" (wawancara,11 Juni 2015).

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai dasar pengembangan pariwisata tidak mengabaikan kepentingan sumber daya kultural Desa Pakraman Beraban. Hal itu sejalan dengan model sirkuit kebudayaan yang dikemukakan oleh Du Gay (dalam Barker,2002:72), yaitu pada level produksi perubahan modal budaya mencerminkan aktivitas inovatif *krama* desa dalam melayani wisatawan tidak bisa lepas dari unsur komoditas. Hal itu terjadi karena kreativitas mereka mendapat penghargaan berupa uang dari wisatawan dan terjadi pertukaran nilai komoditas budaya.

Menurut McKean (dalam Picard, 2006 :174) dalam penelitiannya di Bali tahun 1970--1971 juga melihat bahwa masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri pariwisata melakukan inovasi dalam pengembangan pariwisata dengan mempromosikan berbagai kebudayaan untuk menarik kunjungan wisatawan. Kedatangan wisatwan menyaksikan praktik-praktik budaya di daerah tujuan wisata menimbulkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Interaksi tersebut digambarkan oleh McKean sebagai hubungan antara "dalam" (*the inside*) dan "luar" (*the outside*). Tradisi, kesenian, dan religius orang Bali ("dalam") dianggap menarik oleh wisatawan ("luar") sehingga kegemaran wisatawan terhadap tradisi Bali melalui proses adaptasi dari pihak "dalam" kepada permintaan dan harapan-harapan pihak "luar" yang dipicunya justru memperkuat rasa percaya diri dan jati diri orang Bali, sambil

merangsang bakat seni mereka. Penilaian pihak "luar" memberikan kekuatan kepada pihak "dalam", baik ekonomis maupun estetis.

Apa yang digambarkan oleh McKean tersebut juga diakui oleh *Bendesa Pakraman* Beraban dan Mantan *Bendesa Pakraman* Beraban, yaitu pariwisata telah memberikan kekuatan ekonomis yang merangsang bakat estetis *krama* desa *pakraman*. Selain kawasan suci Pura Tanah Lot, modal berupa praktik-praktik budaya di tempat terbuka, seperti prosesi *ritual melasti, tawur kesanga, pengerupukan,* atau *nangluk merana* ditata secara estetis sehingga sekaligus menjadi tontonan wisata yang menarik. Areal upacara ditata sedemikian rupa sehingga memberikan ruang kepada wisatawan untuk bisa menonton prosesi upacara tersebut. Demikian pula praktik budaya yang berkaitan dengan mata pencaharian dan interaksi sosial sehari-hari sangat memperhitungkan nilai ekonomis pariwisata. Warga masyarakat mulai melakukan langkah-langkah inovatif terhadap modal budaya yang berkaitan dengan mata pencaharian dan kesenian intuk merebut peluang ekonomi di sektor pariwisata. Waktu luang mereka untuk bercengkerama bersama sesama warga *desa pakraman* mulai berkurang. Kaum perempuan juga memiliki kesibukan baru menjajakan minuman buah kelapa muda, suvenir, membuka kios, menawarkan fasilitas transportasi, dan sebagainya kepada wisatwan. Dalam bidang kesenian, inovasi estetis juga tampak dari tumbuhnya *sekaa* (kelompok) kesenian yang melaksanakan pementasan tari *cak* pada waktu-waktu tertentu menghibur wisatawan untuk mendapatkan uang. Inovasi juga dilakukan dalam prosesi ritual *melasti* di pantai dan *tawur kesanga* di perempatan sehingga iring-iringan prosesi ritual ini sekaligus bisa disaksikan oleh wisatawan. Demikian pula tempat prosesi ritual *melasti* ditata sedemikian rupa seperti sebuah arena pertunjukan yang memungkinkan wisatawan bisa menonton dengan baik.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan, *ovent* pementasan tari Cak 5000 tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Beraban dimaksudkan sebagai langkah inovatif prestasi struktural. Di samping itu, juga merupakan proses regenerasi pelestarian budaya, memberikan kesempatan kepada generasi muda dalam pengembangan pariwisata budaya dan membangun kebersamaan antara masyarakat, pengusaha pariwisata, dan pemerintah. Tindakan inovatif ini juga

disebut sebagai aktualisasi konsep *yadnya* (pengorbanan suci) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata budaya (Ratnawati, wawancara 18 Mei 2015).

Aspek estetika yang menjadi daya tarik dalam praktik-praktik budaya tersebut dilihat dari perspektif estetika postmodern menunjukkan bahwa makna inovatif dalam perubahan modal budaya sesuai dengan teori dekonstruksi dari Derrida. Hal itu menunjukkan bahwa perubahan telah mengubah cara makna dibangun dan ditafsirkan sesuai dengan perkembangan pariwisata. Penafsiran makna estetika untuk kepentingan pariwisata Desa Pakraman Beraban sesuai dengan kerangka analisis Foucalt tentang kekuasaan dalam konteks masyarakat consumer. Artinya, mengindikasikan praktik-praktik budaya sebagai model produksi konsumsi komoditas, dan hubungan subjektivitas, mencerminkan hubungan kekuasaan yang saling berkaitan antara Desa Pakraman Beraban, pemerintah, dan pengusaha pariwisata dalam menjaga keberlanjutan pariwisata.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Piliang (2003:164) bahwa praktik budaya sebagai petanda dalam apresiasi estetik pada zaman dahulu yang bersiat determinan dan objektif berdasarkan fungsi sesuai dengan keyakinan *krama* Desa Pakraman Beraban yang beragama Hindu. Akan tetapi, dalam pengembangan pariwisata berubah sebagai petanda estetika yang ironis dari fungsi karena relasi petanda bersifat mendua, antara kepentingan pariwisata dan kepentingan keyakinan *krama* Desa Pakraman Beraban. Pada zaman dahulu praktik budaya itu mengandung prinsip *form follows meaning* dan *form follows function*, sedangkan sekarang di tengah pengembangan pariwisata mengandung prinsip *form follows fun*, yaitu praktik budaya sebagai daya tarik wisata, memenuhi motivasi bersenang-senang wisatawan. Lebih jauh Pilliang menjelaskan *form follows fun* ini sebagai berikut.

> "Pada zaman postmodern, relasi pertandaan estetika bersiat ironis, selain menolak mengacu penanda pada makna ideologis yang konvensional juga menolak menjadikan fungsi sebagai referensi dominan dalam penandaan. Posmodernisme menciptakan satu rantai pertandaan yang baru dengan menanggalkan makna-makna konvensional, lalu memunculkan ajang permainan bebas penanda-penanda seperti teori dekonstruksinya Derrida. Prinsip posmodernisme adalah *form follows fun*, bukan makna-makna ideologis yang ingin dicari,

melainkan kegairahan dalam bermain dengan penanda" (Pilliang, 2003: 166).

Pitana (dalam Sumadi, 2009: 252) menyebut fenomena komersialisasi budaya tersebut sebagai sebuah proses industri budaya. Kebudayaan telah memasuki ranah ekonomi dan dinilai dengan nilai uang. Dengan demikian, pengembangan pariwisata budaya telah berjalan seiring dengan proses industri budaya dengan berbagai implikasinya. Lebih jauh Pitana menjelaskan industri budaya sebagai berikut.

> "Industri budaya dapat diartikan sebagai "I" yang berbasiskan budaya dan produknya adalah budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi suatu komoditas. Yang umumnya dimasukkan sebagai industri budaya selama ini, anatara lain film, televisi, dan fotografi yang semuanya menggunakan teknologi modern karena industri pada awalnya berasosiasi dengan teknologi modern atau *manufacturing*. Namun, sesungguhnya, industri budaya terkait dengan seluruh perlakuan pengindustrian terhadap kebudayaan, baik budaya *tangible* maupun *intangible*, seperti cendera mata dengan bentuk dan desain tradisional, seni pertunjukan, sesaji, dan upacara adat yang direproduksi atau dikemas untuk memasuki ranah ekonomi komersial. Pariwisata budaya sesungguhnya merupakan salah satu bentuk industri budaya karena telah "memanfaatkan" berbagai aspek kebudayaan secara massal dalam suatu sistem produksi yang mencakup aspek produksi dan reproduksi, distribusi dan promosi, serta konsumsi prosuk tersebut".

Dari pendapat Pitana di atas, semakin jelas diketahui bahwa inovasi praktik budaya yang menjadi konsumsi wisatawan dalam pengembangan pariwisata menunjukkan relasi antara *society*, *state*, dan *market* yang memanifestasikan dirinya melalui komoditas budaya dan simbolis. Dalam industri budaya terjadi perubahan pemaknaan kebudayaan atau bagaimana kebudayaan di pandang dan diperlakukan oleh pendukungnya. Kebudayaan yang semula merupakan penanda jadi diri masyarakat, diposisikan sebagai modal atau sumber daya dalam pengembangan pariwisata. Modal budaya ini sesuai dengan pendapat Bourdie (dalam Fashri, 2007:99), dapat dipertukarkan, dapat

diwariskan, dan bisa memberikan keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya dalam pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Beraban.

Perda Bali No. 3, Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya menjelaskan bahwa pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya. Dalam perda dengan jelas disebutkan, bahwa pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai agama Hindu sebagai bagian dari kebudayaan nasional merupakan potensi dasar yang dominan. Di dalamnya tersirat suatu cita-cita tentang adanya hubungan timbale balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang.

Berdasarkan Perda Pariwisata Budaya tersebut, maka perubahan kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai modal budaya yang menjadi daya tarik wisata dalam pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Beraban mengandung makna religius. Secara konsepsional makna religius ini mencerminkan perubahan modal budaya diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ajaran agama yang diyakini oleh *krama* Desa Pakraman Beraban. Budaya pariwisata di harapkan tidak merusak budaya Desa Pakraman Beraban yang dijiwai agama Hindu. Oleh karena itu, terjaganya eksistensi agama Hindu berarti pula terjaganya keberlanjutan pariwisata di Desa Pakraman Beraban.

Bendesa Pakraman Beraban, I Made Subawa dan mantan Bendesa Pakraman Beraban, I Wayan Arwata, secara tegas mengakui bahwa dengan meyakini makna religius itu, maka perubahan budaya yang dilakukan selama ini tidak menyimpang dari norma dan tata nilai ajaran agama Hindu. Walaupun budaya pariwisata tampak sangat menonjol memenuhi ruang di Desa Pakraman Beraban religiusitas tetap kuat mengakar dalam kehidupan *desa pakraman* yang berlandaskan *tri hita karana*. Hal itu sejalan dengan pendapat Mangunwijaya (1982: 15) bahwa spirit religiusitas merupakan tuntunan bagi *krama* Desa Pakraman Beraban menuju ke arah segala makna yang lebih baik dalam melakukan perubahan budaya di tengah pengembangan pariwisata.

Lubis (2006: 24) juga mengakui bahwa agama atau praktik budaya yang bersifat religius pada intinya merupakan wujud

keinginan untuk mengubah, baik mengubah manusia para pengikutnya dari manusia yang sesat menjadi insan yang benar maupun mengembalikan yang tersesat menjadi insan yang benar dan mengajak umat mencapai keselamatan. Fenomena ini disebut dengan istilah *adaptive culture*, artinya porsi dari budaya nonmaterial (norma, nilai, dan kepercayaan) dapat mendorong terjadinya perubahan dan menyesuaikan pada inovasi material dengan cara yang cerdas dan konstruktif.

Perubahan modal budaya di Desa Pakraman Beraban bisa berlangsung dalam pengembangan pariwisata, seperti diakui oleh I Nyoman Suteriya. Dikatakan demikian karena masyarakat Desa Pakraman Beraban tetap dapat menjaga makna religius dalam perubahan itu. Bentuk praktik budaya yang menyesuaikan dengan kepentingan pariwisata dirasakan dapat memperkuat kepercayaan *krama desa pakraman* terhadap makna religius dari tradisi keagamaan yang terpelihara sampai saat ini. Antara aktivitas religius dan dinamika pariwisata dianalogikan dengan gambaran sebuah cakra atau roda yang terus menggelinding menuju puncak kehidupan yang baik. Pariwisata dianggap sebuah cakra yang terus berputar, sedangkan yang menggerakkan cakra tersebut adalah kekuatan aktivitas religius. *Krama* Desa Pakraman Beraban meyakini bahwa aktivitas religius merupakan suatu *yadnya* (pengorbanan suci untuk mencapai kesejahteraan hidup) sehingga aktivitas religius dan dinamika pariwisata ini disebut dengan istilah "cakra *yadnya*". Dengan konsep cakra *yadnya* ini diyakini perubahan budaya di Desa Pakraman Beraban dalam pengembangan pariwisata merupakan wujud pengorbanan suci untuk mencapai kesejahteraan hidup. Lebih jauh I Nyoman Suteriya menjelaskan makna religius sebagai berikut.

> "Lingkungan kami berkembang menjadi daerah pariwisata global. Namun, kami tetap menjaga karakter sebagai *krama desa* yang religius sesuai dengan landasan *tri hita karana*. Kami selalu bengedepankan falsafah *wiweka* atau kemampuan memilah hal yang baik dan hal yang buruk dalam melakukan suatu perubahan terhadap kebudayaan desa adat yang diatur melalui *awig-awig desa pakraman*. Ketergantungan kami sebagai warga Desa Pakraman Beraban khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tabanan sekarang ini di bidang pariwisata merupakan hal utama sehingga pada sektor pariwisata dan budaya pariwisata yang telah memasuki

> kehidupan desa adat perlu melakukan adaptasi dengan perkembangan pariwisata. Maka dari itu adaptasi yang kami lakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat religius sehingga antara kegiatan religius dengan pariwisata dapat berjalan harmonis yang kami sebut dengan istlah "cakra *yadnya*", artinya perubahan budaya terjadi dalam pengembangan pariwisata akan terus terjadi yang bertujuan suci dan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup *krama* desa kami" (Wawancara, 16 Juni 2015).

Pemahaman tentang istilah "cakra *yadnya*" tersebut tampaknya sejalan dengan konsep *karma yoga* dalam ajaran agama Hindu yang dianut oleh *Krama* Desa Pakraman Beraban. *Karma yoga* seperti diuraikan dalam kitab *Bhagavadgita* (Pendit, 1978: 63) merupakan ajaran yang menuntun umat Hindu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup semua makhluk melalui kerja yang dilandasi hati suci dan tulus ikhlas. Oleh karena itu, aktivitas kepariwisataan sebagai wujud kerja yang dilandasi hati suci dan tulus ikhlas akan melahirkan kesejahteraan dan terjaganya keharmonisan hidup.

Sesuai dengan konsep *tri hitta karana* yang melandasi kehidupan Desa Pakraman Beraban, maka penghasilan yang diterima dari pariwisata juga dimanfaatkan untuk kepentingan *parahyangan* melalui pelaksanaan ritual dan pemugaran tempat suci sehingga makna religius tetap terjaga. Tempat-tempat suci di Desa Pakraman Beraban, seperti *Pura Kahyangan Tiga*, Pura penyarikan, Pura Segara, Pura Penataran, atau Pura Pesanggaran saat ini tampak terawat dan terpelihara dengan baik. *Pelinggih* (bangunan suci di sebuah kompleks *pura*) sangat bagus dengan hiasan *prada* dan beratap ijuk.

Menurut *Bendesa Pakraman* Beraban, I Made Subawa, krama Desa Pakraman Beraban tidak lagi dibebani *urunan* (biaya) untuk keperluan pelaksanaan upacara di Pura, termasuk pula di *pura* lain yang beada di bawah tanggung jawab Desa Pakraman Beraban. Di samping itu, pada hari-hari suci tertentu, seperti upacara *melasti*, *tawur kesanga* dalam rangka Nyepi, dan upacara *nangluk merana*, *krama* desa tidak dikenai urunan (beban iuran). *Krama* desa melalui banjar masing-masing hanya dibebani tugas membuat perangkat *banten* sesuai dengan pembagian dan sebagai pelaksana dalam prosesi ritual secara bergiliran di bawah koordinasi *bendesa pakraman*, sebagaimana tertera pada gambar 5.1 berikut.

Umat sedang *ngayah* menyongsong upacara *odalan* di
Pura Tanah Lot (Koleksi, Girinata, 2015)

Berkat berkembangnya pariwisata, aktivitas religius di Desa Pakraman Beraban tampak semakin meriah dan *krama* desa juga semakin sadar serta bergairah mengikuti setiap prosesi upacara. Hal ini selain bisa dilihat dari kesuntukan mengikuti prosesi upacara, juga dapat dilihat dari busana yang dikenakan sangat bagus dan spiritual, didukung dengan sikap kebersamaan yang penuh kegembiraan. Selama bekerja warga masyarakat benar-benar merasakan suatu suasana kekeluargaan tanpa membedakan status. Dalam interaksi dengan sesama warga komunikasi terlihat masih menerapkan etika sosial menggunakan *sor-singgih basa,* terutama komunikasi dengan orang yang dituakan atau terhadap derajat yang lebih tinggi. Sikap kebersamaan dan penuh kegembiraan inilah menurut Mangunwijaya (1982:72) merupakan sikap dewasa kaum beragama dalam iman dan amalnya, yang akhirnya berkembang menjadi masyarakat religius, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.2 berikut.

Prosesi Upacara *Odalan* di Pura Tanah Lot (Koleksi, Girinata, 2015)

Menurut Jero Mangku Suardana dan Jero Mangku Aris, kemeriahan dan kegairahan tersebut memang bukan merupakan hal yang bersifat hura-hura, melainkan sebagai wujud rasa *bhakti* (sujud dengan hati suci) *krama* desa kepada *Sang Hyang Widhi*. Mereka berkeyakinan bahwa jika masyarakat *bhakti* melaksanakan *yadnya*, maka *Sang Hyang Widhi* juga *sweca* (berkenan) melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang dalam perkembangan sekarang melalui industri pariwisata kawasan suci Pura Tanah Lot. Dari persepsi *bhakti* dan *sweca* inilah tumbuh kesadaran *krama desa pakraman* dan pelaku insudtri pariwisata di Desa Pakraman Beraban untuk menjaga hubungan harmonis antara kegiatan religius dan pariwisata yang secara langsung atau tidak langsung saling memberikan kontribusi. Sikap religius ini juga terlihat dari perlakuan *krama desa pakraman* yang sangat ramah dengan para wisatawan, terutama wisatawan asing yang sedang berwisata ke Pura Tanah Lot. Wisatawan diberikan kebebasan untuk berinteraksi dan menyaksikan praktik-praktik budaya yang dilaksanakan oleh Desa Pakraman Beraban. *Krama* Desa Pakraman tampak bersikap sangat familiar dengan wisatawan, sebagai implementasi ajaran *tat twam asi* (toleransi dan saling menghormati) antara sesama yang melandasi kehidupan bidang *pawongan* (kemanusiaan).

Sejalan dengan pendapat Rumadi (2006:238) bahwa *krama desa Pakraman* tampaknya telah menyadari bahwa agama atau religusitas tidak hanya untuk mengagung-agungkan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan), tetapi juga untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat manusia. Visi kemanusiaan yang kuat, tidak saja terlihat dalam ajran-ajaran normatif semua agama, tetapi juga pada teladan yang diberikan oleh umatnya. Agama Hindu mendorong umatnya menebar kasih sayang, saling menolong, dan saling menghargai setiap saat di mana pun berada, termasuk pada saat orang berwisata.

Spirit universal ajaran *tat twam asi* yang tercermin dari transformasi budaya dalam pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Beraban lebih lanjut dijelaskan oleh Bendesa Pakraman, I Made Subawa dan Jero Mangku Suardana sebagai berikut.

> "Mulai sejak berkembangnya pariwisata, kami *krama* Desa Pakraman Beraban bisa melaksanakan upacara dengan baik, yang pada zaman dulu sangat susah kami laksanakan karena kesulitan biaya. Dengan pelaksanaan upacara ini diharapkan terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, dan sejahtera sesuai ajaran *tat twam asi*. Jika ajaran *tat twam asi* ini teah tercermin dalam kehidupan sehari-hari, maka pariwisata akan terus berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan kepada Desa Pakraman Beraban. Sikap kami sangat terbuka dan ramah, memberikan kebebasan kepada wisatawan berinteraksi dengan *krama* desa adat. Barangkali sikap keterbukaan dan ajaran *tat twam asi* inilah yang disenangi oleh wisatawan sehingga mereka tidak takut berkunjung ke Desa Pakraman Beraban. Keadaan yang aman dan tenteram ini akan terus kami jaga, baik secara *niskala* (gaib) melalui upacara maupun secara *sekala* (nyata) melalui penjagaan oleh *pecalang* (aparat keamanan *desa pakraman*) bekerja sama dengan aparat keamanan pariwisata dan kepolisian" (Wawancara 15 Juni 2015)

Pernyataan di atas menunjukkan adanya kesungguhan *krama* desa menjaga makna religiusitas dalam pengembangan pariwisata, sebagaimana juga di ungkapkan oleh Pitana (1998:15--16; 1999:83) bahwa intensitas pelaksanaan ritual di Bali kekinian tidak mengalami penurunan, baik dilihat dari aspek frekuensi maupun kemegahannya. Di daerah-daerah pariwisata kegiatan ritual justru berjalan lebih

semarak dan khidmat. Pada saat ada kegiatan ritual yang melibatkan seluruh *krama* desa adat, kegiatan bisnis bisa ditutup sementara. Desa Pakraman Beraban sebagai daerah pariwisata yang terkenal secara sepintas seperti kehilangan "kebaliannya", tetapi sesungguhnya di tingkat *deep structure* kebudayaan Bali masih utuh. *Krama* Desa Pakraman Beraban tetap bertahan dengan jati dirinya yang religius dan tetap berusaha melestarikan kebudayaan yang dijiwai agama Hindu. Religiusitas *krama* desa ini bisa terlihat dari intensitas pelaksanaan ritual yang tampak meningkat, baik dari aspek frekuensi maupun kemegahannya. Keyakinan mereka terhadap kekuatan *niskala* yang brpengaruh terhadap kehidupan alam *sekala* sangat tinggi, yang bisa dilihat dari kekhusyukan mereka melaksanakan ritual.

Pernyataan Pitana sejalan dengan pernyataan Bendesa Pakraman Beraban bahwa pengurus *desa pakraman* sangat mudah mengoordinasikan *krama* Desa Pakraman Beraban dalam pelaksanaan ritual. Bahkan, dalam cuaca yang tidak baik, seperti hujan lebat yang mengguyur wilayah Desa Pakraman Beraban, *krama* desa tetap bersemangat melaksanakan ritual. Ternyata iring-iringan prosesi ritual di jalan di bawah guyuran hujan lebat itu menjadi kebanggaan untuk menunjukkan jati dirinya yang religius kepada dunia internasional.

Terkait dengan keyakinan, sebagaimana diungkapkan oleh Bendesa Pakraman Beraban I Made Subawa, *krama* Desa Pakraman Beraban telah memiliki konsep dasar ajaran *wiweka*, yakni kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, yang sakral dan yang profan. Oleh karena itu, *krama* Desa Pakraman Beraban yakin tradisi keagamaan yang religius akan tetap berkelanjutan. Kemampuan *krama* Desa Pakraman Beraban membedakan yang sakral dengan yang profan dalam pengembangan pariwisata tampaknya sejalan dengan penjelasan Durkheim dan Eliade (dalam Pals, 2001 : 275 – 284) tentang yang sakral dan yang profan. Bidang sakral adalah wilayah supernatural, hal-hal yang luar biasa, mengesankan, dan penting. Sebaliknya, yang profan adalah wilayah urusan sehari-hari, menyangkut hal-hal yang biasa karena hanya urusan manusia yang dapat berubah.

Menurut Durkheim (dalam Sumadi, 2009: 269), yang sakral dan profan memiliki arti penting bagi masyarakat dan kebutuhannya. Simbol, mitos, atau ritual yang sakral menjadikan orang menyadari tentang yang profan, tugas sosial, dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Di pihak lain menurut Eliade, dalam sebuah simbol itu

ada sesuatu yang dapat menjadi satu. Hal-hal yang di anggap biasa dalam kehidupan sehari-hari adalah profan, tetapi pada saat yang tepat hal-hal yang biasa atau natural itu bisa diubah menjadi sakral atau supernatural. Lebih jauh Eliade (dalam Pals, 2001:287) menjelaskan sebagai berikut.

> "Simbol dan mitos memberikan daya tarik pada imajinasi yang sering hidup di atas ide kontradiksi. Keduanya memikat orang sepenuhnya, emosi, kehendak, dan bahkan aspek kepribadian yang bersifat bawah sadar. Sebagaimana dalam kepribadiannya, semua jenis dorongan yang bertubrukan menyatu, sebagaimana dalam mimpi dan fantasi semua jenis hal-hal yang ilogik dapat terjadi, maka dalam pengalaman keagamaan, hal-hal yang berlawanan seperti yang sakral dan yang profan dapat bertemu. Dalam segala keindahan dan kegarangannya, kompleksitas, misteri, dan variasinya, dunia natural terus-menerus membuka jendela untuk menyingkap berbagai aspek yang supernatural. Hal inilah yang membuat kebudayaan tradisional begitu hidup dengan legenda. Semua itu adalah cerita-cerita tentang yang sakral, kisah-kisah yang membawa dunia kehidupan Ilahi yang supernatural lebih dekat kepada dunia manusia yang natural".

Apa yang dijelaskan Eliade di atas memang sejalan dengan keyakinan orang Bali, termasuk *krama* Desa Pakraman Beraban bahwa kehidupan ini terjadi karena bertemunya unsur *niskala* (sakral) dan unsur *sekala* (profan). Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan dan selalu melengkapi, yang dikenal dengan istilah *rwabhineda*. Dalam Lontar *Wrhaspatitattwa* dijelaskan bahwa kenyataan tertinggi itu ada dua yang disebut *cetana* dan *acetana*. *Cetana* adalah unsur kesadaran dan *acetana* adalah unsur ketidaksadaran. Kedua unsur ini bersifat halus dan menjadi sumber segala yang ada (Tim Penyusun, 2004: 7). Oleh karena itu, menurut Segara (2000:49), manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan kepada masalah-masalah yang bersifat *rwa bhineda*. Namun, *rwa bhineda* tidak diartikan dua unsur berbeda secara ekstrem atau satu sama lain berdiri sendiri, melainkan perbedaan yang saling melengkapi, saling mengisi, dan menjadi sebab sekaligus akibat adanya perbedaan tersebut. Manusia pun diciptakan ke dunia melalui proses dua unsur yang berbeda, yaitu bertemunya unsur *purusa* (laki-laki) dengan unsur *pradhana* (perempuan).

Menurut Eiseman (1989:2--3), keyakinan orang Bali tentang *sekala* dan *niskala* ini dengan istilah "*spatial and spiritual orientation*", artinya perbedaan itu tidak dimaknai sebagai sebuah perbedaan yang eksklusif, terpisah satu sama lain, tetapi perbedaan yang memiliki orientasi spiritual yang utuh untuk menciptakan kehidupan yang seimbang. Seperti semua arah mata angin di Bali, *kangin* (timur) – *kauh* (barat), *kaja* (utara) – *kelod* (selatan), masing-masing memiliki orientasi spiritual untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Saat semua unsur arah mata angin yang berbeda dan berlawanan ini menjadi satu kesatuan di tengah-tengah, maka lahirlah kehidupan yang harmonis, seimbang, dan tenteram penuh spiritualitas.

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh *krama Desa Pakraman* untuk menghayati dan mengamalkan makna *rwa bhineda* dalam kehidupan sehari-hari, maka aktivitas ritual yang sakral dan aktivitas pariwisata yang profan di Desa Pakraman Beraban tetap berjalan harmonis sampai sekarang. Hal tersebut seperti ditegaskan oleh Jero Mangku Aris (Wawancara, 15 Juli 2015) bahwa *rwa bhineda tan wenang pasahang, nanging patut kapiara lan kaanggen suluh ngewangun kasukertan gumi* (yang berbeda itu tidak boleh dipisahkan atau dihilangkan, tetapi patut dipelihara dan dijadikan pedoman. Luc Maurer (dalam Picard, 2006: 179) menyatakan bahwa berdasarkan kadar kefungsionalan budaya (*degree of cultural functionality*), masyarakat Bali dpat membedakan dua ruang lingkup produksi budaya yang berbeda meskipun saling berdampingan. Yang pertama diarahkan kepada konsumsi "dalam" dan yang kedua diarahkan kepada konsumsi "luar". Orang Bali mengetahui dengan jelas batas antara yang sakral dan yang profan, antara yang dapat dijual dan apa yang harus dilindungi sekuat tenaga.

Pendapat McKean, Noronha, dan Maurer tersebut tampaknya sampai sekarang masih terjadi di Bali, terlebih di Desa Pakraman Beraban khususnya. Makna religius modal budaya sebagai dasar pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Beraban menunjukkan bahwa pariwisata dapat memperkuat keyakinan dan identitas religius *krama* desa adat walaupun beberapa bentuk aktivitas religius itu telah didekonstruksi seirama dinamika pariwisata. Dari makna religius ini juga dapat diidentifikasi satu fenomena baru, yakni adanya persamaan persepsi *krama* Desa Pakraman Beraban bahwa kegiatan pariwisata dan aktivitas religius sama-sama memiliki tujuan mulia, yakni untuk

membangun kesejahteraan masyarakat lahir batin, yang disebut dengan istilah berputarnya cakra *yadnya*.

Desa Pakraman Beraban memiliki tradisi upacara *ngaben beya tanem*, yaitu ketika salah satu warga diaben tidak secara langsung dibakar sampai menjadi abu. Akan tetapi, hanya dibakar secara simbolis di atas lubang kuburan dengan sarana *banten* yang sama dengan *ngaben* membakar mayat. Setelah itu mayat langsung dikubur dan dilanjutkan dengan proses upacara sesuai dengan rangkaiannya. Tradisi ini dilakukan karena menjaga kesucian Pura Tanah Lot yang berada di wilayah Desa Pakraman Beraban agar tidak tercemari oleh asap pembakaran mayat. Pelaksanaan upacara *ngaben* di Desa Pakraman Beraban sebagaimana terlihat pada gambar 5.3 berikut.

Pelaksanaan Upacara *Ngaben* di Desa Pakraman Beraban
Koleksi (Girinata, 2015)

Di tengah citra sebagai *global village, krama* Desa Pakraman Beraban terus membangun sikap religiusitas dengan melakukan perubahan modal budaya sesuai dengan konsep *tri hita karana* yang melandasi kehidupan desa adat. Dengan melakukan perubahan tersebut, diharapkan *krama desa pakraman* tidak tenggelam dalam kehidupan globalisasi yang menggandeng beragam pesona dan tatanan baru kehidupan yang didominasi ideologi pasar bersifat kapitalistik, hedonistik, dan konsumeristik. Perubahan budaya sekaligus sebagai bentuk seleksi dan brikade terhadap budaya pariwisata sehingga

pariwisata tidak memarginalkan nilai-nilai lokal berbasis etika, estetika, spiritualitas, dan solidaritas.

B. Implikasi Ekologis

Atmadja (2010: 399) menjelaskan bahwa manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari lingkungan alam. Manusia memetik sesuatu dari lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah manusia meninggal dunia juga dikubur pada lingkungan alam. Oleh karena itu, sejak manusia lahir sampai meninggal dunia manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan alam. Lebih jauh Atmadja juga menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan ditentukan oleh citra lingkungan yang dimiliki. Citra lingkungan bisa bersumberkan pada pengetahuan yang didapatkan dari hubungan mereka dengan lingkungan atau bisa pula bersumberkan, baik pada agama, kepercayaan, maupun mistik. Citra lingkungan masyarakat Bali mengarah pada ekosentrisme dalam arti manusia dan alam sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan atau tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan yang lainnya.

Citra lingkungan orang Bali menggambarkan lingkungan alam biofisik (fisikal dan biologik) yang bersifat *sekala* dan berwujud supernatural bersifat *niskala* (dewa, roh leluhur, makhluk demonik). Manusia sebagai makhluk *sekala* yang berada pada lingkungan *sekala*, tetapi tak bisa juga lepas dari lingkungan alam *niskala.* Ruang *sekala* sebagai tempat manusia beraktivitas bersama tumbuhan dan binatang, tetapi juga dihuni oleh aneka makhluk *niskala* (supernatural). Menurut Donder (2007:331), setiap orang harus sadar bahwa segala yang ada di dunia ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi nyata (fisik) dan tak nyata (infisik) atau dalam teori Atropologi dan teologi disebut sebagai profan dan sakral, sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebut dengan istilah *sakala* dan *niskala.* Keduanya, yaitu antara *sakala* dan *niskala* tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan. Seseorang harus dapat melihat hal yang profan dan yang sakral sebagai satu kesatuan yang utuh.

Alam semesta ini tidak hanya dihuni oleh manusia, binatang, dan tumbuhan sebagai yang tampak (*sekala*), tetapi juga dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak tampak oleh mata biasa (*niskala*). Oleh karena itu, manusia dalam melakukan aktivitasnya tidak bisa mengabaikan makhluk *niskala* karena makhluk *niskala* kuasa melakukan apa saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Manusia harus

dapat menjadikannya sahabat agar segala yang dilakukannya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial yang hidup dalam sistem sosial atau struktur sosial mengelola lingkungan memerlukan dan atau terikat pada infrastruktur material, seperti teknologi, sistem ekonomi, dan kependudukan. Selain terikat pada struktur material, pengelolaan lingkungan juga terikat pada sistem budaya atau superstruktur ideologi, yakni nilai, norma, agama, kepercayaan, dan mitos. Keberhasilan pengelolaan lingkungan pada infrastruktur material sangat besar ditentukan oleh superstruktur ideologi sehingga masyarakat Hindu Bali melakukan secara bersamaan.

Lingkungan holistik pada masyarakat Bali terkristalisasi pada ideologi tri hita karana. Ideologi ini mengidealkan harmonisasi hubungan manusia dengan Ida *Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) termasuk tata cara melakukannya, harmonisasi hubungan manusia dengan manusia dalam struktur sosial *(pawongan*), dan harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*). Menurut Chang (dalam Atmadja, 2010:404), baik agama Hindu maupun kearifan lokal Bali, menganut etika ekosentrisme atau sistem pemikiran ekologis dalam melihat hubungan manusia dengan alam. Hubungan itu sangat erat sehingga bahan baku yang membangun tubuh manusia bisa dikembalikan pada unsur-unsur yang ada di dalam alam, yakni *panca maha bhuta.* Eratnya hubungan manusia dengan lingkungan alam maka wajar jika agama Hindu dan kearifan tradisional Bali mengharuskan orang Bali hidup harmonis dengan alam. Manusia merupakan alam mikrokosmos sebagai unsur terkecil tidak bisa dipisahkan dengan alam macrocosmos sebagai unsur terbesar karena sesungguhnya alam mikrokosmos juga merupakan alam makrokosmos itu sendiri. Hal itu sebagaimana dijelaskan kitab suci *Chandogya* III.14.3 (dalam Donder, 2007: 245) bahwa Tuhan bersemayam di dalam mikrokosmos sebagai unsur yang terkecil dan bersemayam di luar makrokosmos sebagai unsur yang terbesar. Alam semesta ini tidak hanya diresapi dan diliputi tetapi alam semesta ini adalah Tuhan. Tuhan menguasai segala tempat, di mana pun manusia akan bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan memenuhi ruang dan waktu.

Kitab *Brhad-aranyaka Upanisad*, III.7.3 menjelaskan bahwa *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) ada di dalam tanah atau di dalam bumi.

"Yah prthivyam tistham prthivya antara, yam prtivi na veda, yasya prthivi sariram, yah prthivim antaro yamayati, esa ta atmantaryamy amrttah

Artinya :

Dia yang berada di bumi (tanah) ini dan masih di dalam bumi, yang mengendalikan bumi dari dalam bumi, dia adalah *atman*, pengendali dari dalam yang abadi" (Sugiharto, t.t.: 81).

Kepercayaan terhadap Tuhan ada di dalam tanah (bumi) melahirkan sikap positif berupa penghargaan terhadap bumi. Melalui sikap kepercayaan itu, maka muncul istilah "tanah suci". Dalam Hinduisme bumi yang berasal dari kata *bhu* dipandang sebagai ibu karena memang Tuhan bersabda dalam kitab suci *Veda* bahwa Ia adalah ibu alam semesta. Dalam wujud fisik bumi inilah ibu semua makhluk sebab dari bumi ini manusia dapat hidup.

Secara aksilogis, penjelasan kitab suci di atas sesungguhnya sudah tertanam sebagai suatu kepercayaan dalam hati sanubari umat Hindu dengan tidak sewenang-wenang merusak bumi atau mengeksploitasi kandungan bumi secara berlebihan tanpa memperhatikan kesinambungan ekosistem, yang dapat menyebabkan ibu pertiwi (alam) marah. Jadi, hubungan antara mikrokosmos dengan makrokosmos merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai hubungan antara anak dan ibu. Manusia selalu mengharapkan kebahagiaan dari ibu (alam) dan selanjutnya memformulasikan pemeliharaan ibu (alam) ke dalam falsafah *tri hita karana* sebagai tiga hal yang dapat membahagiakan hidup manusia.

Terjadinya harmonisasi hubungan *tri hita karana* berimplikasi pada tercapainya empat tujuan hidup manusia sesuai dengan falsafah *catur purusahartha* yang meliputi *dharma, artha, kama, dan moksha*. *Dharm*a adalah kebenaran, *artha* adalah hasil, *kama* adalah keinginan, dan *moksha* adalah kebebasan (dalam kehidupan diartikan sebagai kebahagiaan). Keempat hal ini merupakan tujuan hidup manusia, yang dapat dicapai dengan jalan menjunjung tinggi ideologi *tri hita karana* melalui harmonisasi hubungan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa,* manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Ketiga hubungan itu hanya dapat diwujudan apabila dilandasi dengan *dharma* (kebenaran).

Sesungguhnya umat Hindu memiliki konsep kearifan tradisional yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yakni melalui superstruktur ideologi menyangkut tentang nilai, norma, kepercayaan, dan mitos yang terimplementasi dalam bentuk ritual dan perbuatan (tingkah laku). Ritual merupakan refleksi dari kepercayaan terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan) sebagai pencipta alam lingkungan, sedangkan perbuatan (tingkah laku) adalah refleksi dari orang tua (leluhur) sebagai ahli waris sebelumya yang memelihara lingkungan alam dan selanjutnya diteruskan kepada generasi berikutnya. Atas dasar pertimbangan nilai, norma, kepercayaan, dan mitos, umat Hindu dalam mengelola lingkungan alam selalu dengan asas kehati-hatian. Umat Hindu tidak berani sembarangan melakukan penebangan pohon, membangun, dan menjual bagian lingkungan alam karena takut kena peringatan niskala dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan dari leluhurnya yang lebih dikenal dengan istilah *kapongor*.

Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi yang sarat akan modernisasi, terutama pada pesatnya perkembangan pariwisata yang merambah sampai ke tingkat-tingkat desa. Idealisme tentang kepercayaan terjadinya *kapongor* sebagai dampak dari kesalahan dalam menjaga alam lingkungan sedikit demi sedikit menjadi tergusur. Virus inovasi telah menjalar di segala aspek kehidupan manusia menuju pembaruan dengan motif berprestasi tinggi. Hal itu sejalan dengan gagasan Wilbert Moore (dalam Sztompka, 2004:152) bahwa modernisasi adalah transportasi total masyarakat tradisional atau pramodern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia Barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil.

Berdasarkan pendapat Wilbert Moore di atas, diketahui bahwa identitas budaya tradisional masyarakat Hindu Bali tampak adanya kecenderungan mengarah pada konstruksi budaya barat (putih). Budaya Barat (putih) selalu dipandang lebih baik dan merupakan target capaian untuk status sosial, sedangkan budaya tradisional yang merupakan warisan leluhur dipandang kuno dan kampungan. Akhirnya, dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi persaingan hidup spekulatif terdorong sikap emosional agar dapat mengikuti budaya Barat (putih).

Situasi seperti ini berdampak pada pertaruhan superstruktur ideologi yang berlandaskan pada nilai, norma, agama, kepercayaan, dan mitos. Bagi mereka yang hidup dalam kondisi serba

berkecukupan, perjuangan menuju pada kehidupan budaya modern menjadi tidak bermasalah. Namun, bagi masyarakat yang banting tulang kerja hanya untuk kebutuhan makan sementara karena status sosial yang semakin mendesak dan agar tidak selalu dipandang kampungan, maka superstruktur ideologi menjadi ancaman. Lingkungan alam tidak lagi merupakan tempat yang harus dipertahankan dan tidak dapat mengancam secara *niskala* seperti *kapongor* apabila diproduksi dalam bentuk lain. Akhirnya, lingkungan alam dijadikan sebagai media komoditas, dikomodifikasi melalui alih fungsi lahan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu untuk keperluan pengembangan pariwisata. Implikasi terhadap pemanfaatan ekologi kawasan suci Pura Tanah Lot menimbulkan gejala perubahan yang berdimensi pada lahan produktif semakin menyempit.

Tingginya dampak perkembangan pariwisata Bali berimplikasi pada ekosistem alam Bali sehingga harus disikapi dengan kebijakan yang berorientasi pada penyelamatan lingkungan. Menteri Pariwisata Pusat selaku pengelola kebijakan wajib hukumnya ikut menjaga Bali. Menteri Pariwisata bersama pemimpin di daerah jangan hanya berorientasi menjual Bali. Target-target peningkatan kunjungan pariwisata dan investasi dalam mengelola pariwisata Bali harus diimbangi dengan komitmen menjaga alam dan budaya Bali. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Ir. I Nengah Manumudita, M.M. (*Bali Post*, 20 Agustus 2015: 1) menjelaskan secara umum mengkritisi kebijakan pengelolaan pariwisata selama ini cederung menjual dan mengeksploitasi Bali.

Pencapaian target keuntungan yang tinggi dan investasi yang tinggi, faktanya hanya sebagian kecil dinikmati orang Bali. Orientasi pengelolaan pariwisata berbasis pasar akhirnya memicu kerusakan ekosistem alam Bali. Jangka panjang laju pariwisata tanpa kendali akan memarginalkan manusia Bali sebagai penyangga budaya Bali. Menteri Pariwisata sebagai pemegang kebijakan harus melakukan reorientasi kebijakan dalam mengelola pariwisata Bali. Terjadinya eksploitasi terhadap alam Bali merupakan bentuk ketidakpahaman dalam menjabarkan tri hita karana. Pengelolaan pariwisata yang berbasis pesisir nyata-nyata telah membuat termarginalnya beberapa profesi masyarakat menjadi tergusur, seperti nelayan dan pertanian.

Ekologi dalam penelitian ini dimaknai sebagai hubungan antara masyarakat dan lingkungan dengan mengedepankan kondisi lahan produktif yang merupakan wilayah Desa Pakraman Beraban.

Pembahasan selanjutnya menekankan pada konsekuensi masyarakat dalam mempertahankan kearifan lokal yang diwarisi dari leluhurnya, baik dalam dimensi individu terhadap tanah warisan utamanya berupa sawah dan ladang maupun dalam dimensi kolektif menyangkut batas-batas wilayah yang disepakati bersama untuk menjaga kesucian tertentu, terutama kesucian areal Pura Tanah Lot.

Menurut Ananda Kusuma (1966:81), sawah (*subak*) adalah hal yang sangat berarti bagi umat Hindu yang ada di Pulau Bali. Menurut sejarah perkembangan agama Hindu di Bali, seorang Resi agung yang pertama kali menginjakkan kaki di Bali yang dapat dicatat oleh sejarah ialah *Resi Markandeya*. Konon *Rsi Markandia* ialah Rsi Agung berasal dari *Jambu Dwipa* (India). Rsi Agung ini pernah berasrama di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Pegunungan Dieng terkenal karena keindahan dan getaran bioenerginya yang sangat kuat, kemudian disebut *Siwa Peateu* (Dataran tinggi Siwa). Di sanalah *Rsi Agung Markandeya* pernah berasrama, mungkin beliau terpikat dengan keindahan alam *Dieng* dan kesuciannya. Entah beberapa tahun *Rsi Markandeya* tinggal di Dieng akhirnya beliau melanjutkan *dharma yatra* ke Gunung Raung, Jawa Timur. Dari Jawa Timur (Gunung Raung) beliau mengajak para *sisiya*nya beberapa ratus orang pergi ke Pulau Bali dengan membuka lahan untuk dibagi – bagi *(puak atau puakan)* sambil mengajarkan mengolah ladang dari sawah (*suak*/ *kasuakan*), kemudian menjadi kata *subak.* Diperkirakan istilah subak berasal dari usaha *Rsi Markandeya* membangun pertanian sawah di Bali.

Terkait dengan hal tersebut di atas, sejak kedatangan *Empu Kuturan* di Bali dan disusul oleh kedatangan *Dang Hyang Empu Kuturan*, *subak* sangat banyak mendapat perhatian karena sebagai salah satu sumber ekonomi kerajaan dan ekonomi rakyat. Di samping itu, subak sebagai salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan yang berwawasan filsafat *tri hita karana*, *subak* merupakan salah satu aspek yang ada di dalamnya. Sebagai contoh unsur *tri hita karana* di dalam subak ialah unsur *parahyangan* dalam subak dibuktikan dengan *pelinggih* di subak berupa *Pura Ulun Suwi* atau *Ulun Carik* atau *Pura Bedugul*. Sebagai unsur *pawongan* di subak ditandai dengan adanya krama subak dan sebagai unsur *palemahan* dibuktikan dengan adanya *palemahan* subak (Suratmini dkk., 2003: 125 **).**

Bagi umat Hindu di Bali subak merupakan suatu *palemahan* yang disucikan, tempat yang diyakini bernilai magis religius, karena subak merupakan tempat menanam padi, sedangkan padi merupakan simbol lingga *stana Dewi Sri*, sakti *Dewa Wisnu* sebagai Dewi kemakmuran. Padi merupakan salah satu sumber amerta yang dapat memberikan hidup, khususnya pada manusia. Dengan demikian, sangat logis dan ilmiah apabila umat Hindu di Bali memandang tanah sawah dengan subaknya sebagai tempat yang sangat berharga, bahkan bernilai magis religius.

Atas dasar itulah umat Hindu memperlakukan subak dengan sangat istimewa agar dapat memberikan kesejahteraan pada warga masyarakat subak pada khususnya dan umat Hindu pada umumnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam beberapa kegiatan di subak pasti didahului dengan ritual (upacara *yadnya*).

Tanah warisan (sawah) dikonotasikan memiliki makna kesucian yang sama dengan tempat suci. Dengan demikian, masyarakat Hindu Bali dalam memberdayakan tanahnya sarat akan pertimbangan etika religius, yaitu pantang menjual warisan, kecuali sebagai alternatif terakhir. Jika alternatif ini terjadi, biasanya dilakukan melalui suatu proses yang cukup panjang sesuai dengan keyakinan agar kelak setelah menjadi milik orang lain tidak menimbulkan masalah. Oleh sebab itulah, biasanya dilakukan permakluman secara rohani kepada leluhur (orang tua terdahulu) melalui bertanya (*matuun*) lewat paranormal (*dasaran*). Selanjutnya melalui perantara media *dasaran* terjadi komunikasi antara yang mau menjual warisan dengan leluhur. Dalam proses seperti ini selain direstui ataupun tidak direstui, biasanya terdapat beberapa pesan dari leluhurnya terhadap keluarga ahli waris.

Masyarakat Desa Pakraman Beraban juga percaya seperti masyarakat Hindu Bali umumnya bahwa tanah juga dipandang sebagai tempat suci. Oleh karena itu, sering dilakukan ritual tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma di sawah, seperti berzinah, buang air besar, termasuk berkata yang tidak senonoh pun pantang di sawah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab suci *Atharva Veda*, 3-17-8 (dalam Somvir, 2004) berikut ini.

Site Vandamahe tvarvacim subhage bhava
Yatha nah sumana aso yatha
Nah suphala bhuvah

Artinya :

> Ibu Pertivi (*Site*) kami menghormati-Mu (*vandamahe*) Engkau penuh keberuntungan (*subhage*) selalu berada dekat kita (*arvaci bhava*). Berikanlah kebahagiaan kepada kami (*sumanah*) dan berikanlah keberhasilan yang cukup kepada kita semua (nah suphala).

Lebih jauh Somvir juga menjelaskan bahwa tanah disebut juga sebagai Ibu Pertiwi adalah simbol seorang ibu dengan anaknya (manusia). Hubungan antara Ibu Pertiwi dengan manusia ibarat hubungan antara seorang ibu dan anaknya. Andai kata menjual tanah itu sama artinya menjual ibu kita sendiri.

Di samping fanatisme terhadap tanah warisan, kepercayaan tentang kesucian Pura Tanah Lot juga sangat dalam bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban sehingga sampai sekarang masih tetap menjaga batas-batas kesucian wilayah pura yang telah diwarisi sejak dulu. Menurut Pitana (1999/2000:25) tanpa dibatasinya pengeluaran izin pembangunan, restoran, perdagangan, dan perhotelan, sangat banyak membuka dan mendesak ruang-ruang produktif modal budaya mengalami perubahan fungsi dan makna di tengah pengembangan pariwisata, akhirnya berdampak pula pada semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk. Desa Pakraman Beraban sebagai tempat pariwisata terekenal di mancanegara tak terhindar dari masalah yang menyangkut penggerogotan terhadap bidang ekologi. Sawah dan ladang banyak dijual. Selain itu, ada pula yang dikontrakkan dijadikan bangunan-bangunan pelayanan pariwisata. Kawasan suci Pura Tanah Lot semula berupa sawah, kini hampir seluruhnya terpenuhi bangunan. Modal budaya berupa bangunan rumah tempat tinggal dengan ciri khas arsitektur Bali yang mengandung falsafah, sekarang mulai tergeser dibangun dengan rumah bertingkat agar sebagian, terutama pada bagian bawahnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Hal ini mencerminkan bahwa faktor ekonomi memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu mengalahkan norma-norma kearifan lokal yang sejak dahulu sangat diyakini dan dipatuhi karena konsekuensi bagi yang melanggar berhadapan dengan peringatan *niskala*. Komodifikasi terjadi dalam dinamika social budaya semakin tak terkontrol dan terjadi sangat cepat, seperti tampak pada gambar 5.4 berikut.

Tempat yang semula hijau dan subur, kini dipenuhi dengan bangunan kios-kios sepanjang jalan dari tempat parkir sampai pinggir pantai (Koleksi Girinata, 2015).

Terjadinya masalah yang serius tentang ekologi di Desa Pakraman Beraban tampak ketika dimulainya kasus pendirian BNR di kawasan suci Pura Tanah Lot. Kasus pendirian BNR menimbulkan konflik kepentingan yang menyangkut perebutan sumber daya alam (*natural resources*). Secara umum terjadi perebutan ruang yang di dalamnya terdapat tanah (lahan) dan air. Lahan-lahan yang digunakan untuk lokasi BNR di samping berdimensi ruang untuk kehidupan ekonomi masyarakat (sawah), juga berdimensi pada ruang yang mengandung nilai religius karena berada pada zona kawasan suci Pura Tanah Lot. Karena karakteristik Pura Tanah Lot sebagai pura *kahyangan jagat*, maka perebutan ruang tersebut berimplikasi pada ruang lebih luas, yaitu Bali, maka terjadilah protes dengan mengatasnamakan umat Hindu. Pemanfaatan ruang yang dipandang memiliki nilai kesucian di kawasan pura (khususnya pura/ *kahyangan jagat*) telah diatur sesuai Perda Nomor 4, Tahun 1996.

Kasus perebutan ruang seluas 121 ha tanah pertanian subur dalam pembangunan BNR secara jelas mendobrak Perda Nomor 4, Tahun 1996 sehingga secara ekologis menyebabkan permasalahan tentang tanah dan air. Selanjutnya akibat luasnya lahan untuk pembangunan BNR maka sawah-sawah yang produktif berubah menjadi bangunan pariwisata sehingga berpengaruh pada struktur sosial kehidupan masyarakat, terutama para pemilik sawah.

Pengoperasian BNR membutuhkan banyak air sehingga berpengaruh pada aktivitas pertanian di sekitar BNR.

Menurut Mudana (2005:414), dalam kasus pembebasan lahan untuk pembangunan BNR, di dalamnya berperan pemerintah menghegemoni masyarakat yang kemudian berpengaruh pada hubungan masyarakat dan lingkungan sehingga terjadi ketidakseimbangan sistem. Tanah dan air hilang dari kekuasaan manusia yang bernama masyarakat. Padahal, menurut Poerwanto (2000: 65), terpeliharanya keseimbangan sistem atau homeostatis merupakan kekuatan pengatur "perimbangan alam" (*the balance of nature*). Dapat dikatakan bahwa alam setempat menjadi rusak setelah BNR dibangun. Dampak lainnya secara sosial ekonomi yang menimbulkan alih profesi masyarakat yang semula sebagai petani, yang selanjutnya belum didukung dengan kesiapan mental. Dampak lain terjadi pada aspek budaya, yang berangsur-angsur menghilangkan tata cara sistem pertanian yang menjadi kekuatan penting sebagai identitas masyarakat Bali, khususnya Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras.

Lebih jauh Mudana (2005:416) menjelaskan bahwa amdal hampir tak mempunyai kekuatan yang sesungguhnya untuk menopengi BNR, tetapi hanya bersifat formalitas bahwa amdal dibuat justru setelah BNR dipermasalahkan dan dibuat oleh sekumpulan pakar yang telah terkontaminasi oleh kekuasaan. Dalam perspektif Gramscian, kelompok seperti itu disebut intelektual organik. Intelektual organik mendukung kekuasaan yang berlangsung dan mereka menjadi pelegitimasi (pembenar) kekuasaan yang dijalankan. Sebagai pimpinan penyusun amdal saat itu adalah N.K. Mardani Rata saat itu menjabat sebagai Kakanwil Deparpostel Bali bersama Rektor Udayana (Ida Bagus Oka).

Perkembangan pariwisata Pura Tanah Lot berdampak pada semakin meluasnya terjadi eksploitasi terhadap alam lingkungan setelah kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur No.528 Th.1993 tentang 21 Kawasan Wisata di Bali. Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 31, Tahun 1988 pada 13 Januari 1988. Isi surat keputusan ini tentang pengembangan kawasan wisata Tanah Lot dengan menetapkan dua desa yaitu Desa Beraban dan Desa Belalang, tetapi Desa Beraban tetap sebagai pusat pengembangannya. Konsekuensi surat itu semakin luas

memberikan ruang tentang keterancaman ekologi untuk pemanfaatan pariwisata, terutama tanah-tanah produktif. Akibatnya, para kaum kapitalis menjadi gelisah melakukan berbagai terobosan ingin menanam modalnya untuk melakukan praktik-praktik industri pariwisata secara kompetitif melakukan pendekatan kepada para pemilik lahan dengan tawaran harga yang fantastis. Akibatnya, pola pikir masyarakat ikut menjadi gelisah, yaitu di satu sisi mengedepankan pertimbangan ekonomis dengan lebih baik menjual tanah kemudian hasil penjualan dibungakan akan mendapat keuntungan jauh dari produksi pertanian. Di sisi lain masih ada dengan pertimbangan moral keleluhuran bahwa tanah yang dimilikinya adalah warisan leluhur sehingga pantang dijual karena tanah dimaknai memiliki makna simbol religiusitas.

Proses pembebasan menunjukkan ketidakadilan dari segi harga tanah dan dari proses pelaksanaan jual beli dan sewa-menyewa. Tekanan elite struktural formal semakin menjadi karena mempunyai harapan yang besar terhadap kontribusi DTW Tanah Lot untuk pendapatan daerah Kabupaten Tabanan. Dengan simbol kekuasaannya yang kental pada era orde baru memanfaatkan aparat (ABRI) untuk memuluskan suatu tujuan, sehingga mental psikologis masyarakat menjadi semakin redup. Selain itu, ditambah kentalnya kekuatan politik saat itu maka segala macam bentuk praktik penghegomonian kalangan atas membuat masyarakat pemilik tanah tak bergeming.

Praktik hegemoni keras terjadi dirasakan masyarakat ketika sudah dipandang sepakat terhadap apa yang diwacanakan. Selanjutnya dilakukan dengan realisasi transaksi pembayaran kepada para petani pemilik lahan. Dalam proses ini terjadi praktik hegemoni dan kontra hegemoni sebagaimana pandangan Gramsci (dalam Adhita, 2012:15) bahwa terjadi reaksi dalam hubungan antara penghegemoni (pemerintah) dan yang dihegemoni (masyarakat petani). Dalam prosesnya tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus karena masyarakat petani (sebagai terhegemoni) tidak seluruhnya bisa menerima kebijakan pihak penghegemoni (pemerintah). Oleh karena itu, terjadilah kontra hegemoni yang ditunjukkan melalui reaksi penolakan oleh mereka yang tidak sepakat terhadap kebijakan pemerintah karena dianggap merugikan dirinya. Namun, biasanya reaksi penolakan semacam ini sering tidak berhasil karena tidak mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pihak penghegemoni (pemerintah). Akhirnya, dengan keadaan terpaksa

menyerah walaupun dalam dirinya tetap tertanam rasa menolak yang diekspresikan dengan sikap lebih baik diam demi keselamatan.

Praktik ini pun terjadi ketika pihak BNR mulai melakukan transaksi pembayaran atas lahan para petani. Pemerintah tanpa diawali kompromi dengan para pemilik lahan dalam menetapkan taksiran harga tanah. Salah satu sumber menyebutkan bahwa untuk pembangunan BNR telah terjadi pembebasan tanah seluas 121 ha di kawasan Tanah Lot. Saat itu pemerintah hanya menetapkan harga ganti rugi sebesar Rp 2.000.000,00 per are. Harga ini sesuai dengan harga dasar tanah pertanian kelas IV yang berlaku untuk Desa Beraban merujuk pada Keputusan Bupati Tabanan Nomor 234/1989 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Tahun 1989/1990 (*Kompas*, 25 September 1990).

Ada sejumlah masyarakat pemilik lahan bersedia melepas tanahnya dengan harga tersebut dengan alasan telah menjadi keputusan pemerintah. Di samping itu, mereka juga berpikir bahwa dengan harga seperti itu bisa dikompensasi untuk membeli tanah di tempat lain dengan harga Rp 1.000.000,00 per hare, sebagaimana pernyataan I Ketut Suitra (wawancara, 9 Juni 2015).

> *"tiyang sareng ngelah tanah drika (*lokasi BNR*) akedik. Yen puponin tiyang merasa nanggung (*tak mencukupi*) anggen tiyang nunas ajeng ajak keluarga. Mangkin syukur wenten pemerintah numbas aji duang juta. Pameline raris tumbasan tiyang tanah carik di subak baler ne (di Pandak) hargane aji juta per are. Pameline pah teluan simpen tiyang alih tiyang bungane. Kewala kanggean tiyang ngejohang tiyang megae ke carike.*

Di lain pihak juga banyak masyarakat yang tidak setuju karena merasa harga tanah yang ditetapkan pemerintah sangat tidak sesuai dengan harga standar pariwisata seperti daerah lainnya di Bali. Atas dasar itulah menjadikan proses transaksi mengalami beberapa tahap sehingga terjadi harga bervariasi sejak awal mulainya pembayaran, sebagaimana pernyataan Pan Gejor (wawancara, 9 Juni 2015) yang tanahnya diganti dengan harga Rp 2.100.000,00 per are. Masih banyak pemilik tanah lainnya merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang dirasakan memaksa untuk menyerahkan hak miliknya, tetapi tetap mencoba bertahan tanpa pendamping.

Situasi seperti ini berlangsung cukup lama hingga tahun 1993-an yang menyebabkan para pemilik tanah menjadi tidak berdaya dan penuh keraguan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Hal itu terjadi karena sama sekali tidak ada organisasi yang mendampingi mereka dalam berhadapan melawan aparat pemerintah. Tekanan semakin keras dirasakan oleh para pemilik lahan pertanian dengan dilakukan pemutusan saluran air secara tiba-tiba. Sebagaimana penjelasan Nyoman Sutarya bahwa *Pekaseh* juga tidak bisa berbuat banyak pada saat itu karena menurut pengakuannya telah mendapatkan surat perintah dari bupati, tetapi tidak mampu menunjukkan bukti (Sutarya, wawancara 9 Juni 2015).

Karena hasil yang dicapai dirasakan tidak maksimal, akhirnya pemerintah melibatkan kekuatan militer melalui gerakan tekanan mental dengan memanggil setiap warga yang belum menyerahkan hak miliknya datang menghadap ke Kodim Kediri, Tabanan. Hal itu disertai dengan pernyataan bahwa para warga yang belum mau menerima uang pembelian tanah agar mengambil langsung di kantor Pengadilan Tabanan (I Ketut Suitra, wawancara 15 Juni 2015).

Cara-cara pembebasan lahan untuk pembangunan BNR sebagaimana diuraian di atas menunjukkan adanya kompleksitas praktik hegemoni atas kekuatan kapitalis (pemodal) dalam melakukan kompromi terhadap pemerintah. Akhirnya karena merasa tidak mempunyai kekuatan dan dengan berpegang teguh pada janji-janji untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, maka para pemilik lahan secara pelan-pelan menyerahkan haknya. Kesediaaan masyarakat menyerahkan lahannya menunjukkan seolah-olah sangat membutuhkan BNR karena mereka membutuhkan pekerjaan sesuai dengan wacana kalangan elite. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, mereka tidak menyadari sebagai korban hegemoni melalui pembangunan.

Baru akhirnya setelah itu terjadi reaksi protes pendirian BNR yang sangat keras bersifat umum mengatasnamakan umat Hindu, membantu masyarakat pemilik lahan Desa Pakraman Beraban yang sebelumnya merasa tidak mempunyai kekuatan hegemoni pemerintah di bawah gerakan kalangan elite masyarakat Bali dan elemen masyarakat sipil lainnya. Dasar perlawanan dengan mengedepankan masalah kesucian kawasan suci Pura Tanah Lot dengan adanya pembangunan BNR dan pembebasan tanah yang menyertainya.

Mudana (2005:222) menjelaskan bahwa perlawanan kalangan elite berada di sekitar identitas kebalian yang suci dan manusia lokal emansipatoris dan bebas dari segala bentuk tekanan yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, baik pemerintah maupun pengusaha luar. Tokoh yang mengemuka saat perlawanan itu adalah sebagai bagian dari kalangan elite *sublimatif* yang terdiri atas pemimpin moral keagamaan, seni, dan intelektual. Ada sederetan nama muncul pada saat itu, di antaraya I Gusti Ngurah Bagus, Adnyana Manuaba, Kusuma Kelakan, Nyoman Gelebet, I Gede Sudibya, A.A.M. Jelantik, Ibu Gedong, dan lain-lainnya. Mereka dengan segala konsep dan jurus melakukan perlawanan melawan kalangan elite yang *integratif* (terdiri atas para pemimpin politik dan organisasi). Tuntutan protes disampaikan bahwa ketika pihak Bakrie mulai meratakan tanah adalah belum mendapat persetujuan dari pemiliknya dan belum memiliki izin pendirian dan amdal. Sikap protes itu juga termuat dalam media *Bali Post* (Rabu, 17 November 1993) ditulis oleh Adnyana Manuaba. Tulisan Adnyana Manuaba tergolong sangat berani pada era orde baru sehingga menjadikan dirinya sebagai tokoh terpenting selain I Gusti Ngurah Bagus dalam mengungkap kasus BNR. Rupanya artikel ini yang membuat masyarakat Bali akhirnya secara jelas mengetahui kenyataan dibangunnya BNR di wilayah kawasan suci Pura Tanah Lot.

Selanjutnya barulah dimulai perlawanan perjuangan masyarakat pemilik lahan yang bermula dari ungkapan-ungkapan rasa senasib dari sekelompok petani pemiik lahan di lokasi BNR merasa mendapatkan ketidakadilan dalam proses jual beli. Mereka beberapa kali berkumpul untuk melakukan resistensi. Pengakuan mereka jika tidak menyerahkan lahannya diancam, ditakut-takuti, digertak oleh orang preman. Salah satu yang menjadikan ketakutan mereka karena mereka dicap sebagai PKI.

Hal menarik dari kalangan elite integratif adalah posisi Anak Agung Made Arwata sebagai bagian dari Pemda Bali dalam jabatannya sebagai pimpinan lembaga pemerintah yang mengeluarkan izin permohonan amdal. Ia menolak mengeluarkan izin amdal karena alasan yang tidak jelas. Akhirnya digeser dari jabatannya digantikan oleh Ni Wayan Sudji sehingga proses izin amdal bisa diterbitkan (Arwata, wawancara 18 September 2015).

Pembangunan BNR di kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai bagian dari pengembangan pariwisata yang kontroversial dan

bermasalah, baik bagi masyarakat desa setempat maupun bagi masyarakat Hindu Bali dan yang berada luar Bali. Pembangunan BNR merupakan sebuah konflik perebutan yang saling berkepentingan. Konflik secara laten terjadi ketika pembebasan tanah mulai dilakukan. Konflik manifes (terbuka) antara mansyarakat dan pemerintah tampak ketika pembangunan BNR mulai dilaksanakan sejak tahun 1993 sampai tahun 1997. Selama itu pihak eksekutif, legislatif, dan pihak BNR cenderung menyalahkan masyarakat dan media massa yang selalu memberitakan pembangunan BNR.

C. Implikasi Soaial Ekonomi

Perkembangan DTW Tanah Lot memberikan kontribusi sangat tinggi terhadap kehdupan perekonomian masyarakat Desa Pakraman Beraban, baik sebagai individu maupun struktural kelembagaan sebagai lembaga Desa Pakraman Beraban. Adapun implikasinya adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Pengembangan kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai daerah tujuan wisata sangat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan perekonomian Desa Pakraman Beraban. Oleh karena itu, kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai modal dasar pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Beraban dimaknai sebagai salah satu sumber kesejahteraan bagi *krama* desa pakraman. Hal ini menurut Ardika (2007: 120), sesuai dengan tujuan pengembangan pariwisata budaya, yakni pengembangan pariwisata harus dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal. Di samping itu, karena sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22, Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanegaragaman daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 1990 tentang Kepariwisataan juga menegaskan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memupuk rasa cinta tanah air, serta meningkatkan persahabatan antarbangsa.

Sejalan dengan penegasan undang-undang di atas*, Asia Pacifik Tourism Ex-change Center* (APTEC) telah menyempurnakan konsep pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan berkelanjutan (*Sustainable Tourism Community Based Development)*, pada tahun 2001. Penyempurnaan itu menekankan bahwa langkah awal pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan harus dimulai dari rasa cinta kepada masyarakat *(love is the underlying requirement for community development). (Tourism-based community development also starts with love for the community).* Dari uraian itu, diketahui bahwa tampaknya pariwisata diharapkan tumbuh maju dan dinamis, yaitu pariwisata Indonesia memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berperan secara signifikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Peran tersebut dapat diwujudkan, baik dalam kerangka pembangunan perekonomian, melailui devisa yang dihasilkan, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, kelestarian lingkungan, dan memberikan kontribusi terhadap pengayaan budaya (Ardika, 2001:3).

Implikasi dari undang-undang di atas, maka tidak dapat dimungkiri lagi bahwa pariwisata di Bali mempunyai peranan besar sebagai lomokotif pembangunan ekonomi. Menurut Pitana (2008:78; Yasa, 2006:1; Batter, 1995:78), pariwisata berperan positif dalam penciptaan pendapatan bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, sumber penghasil devisa, pendorong ekspor khsususnya barang-barang hasil industri kerajinan, dan pengubah struktur perekonomian Bali ke arah yang lebih berimbang. Pariwisata dan industri budaya telah menjadi generator penggerak dalam pembangunan ekonomi dan lomokotif dalam perubahan sosial budaya Bali.

Pariwisata di kawasan suci Pura Tanah Lot mampu mendukung perekonomian Desa Prakraman Beraban, bahkan seluruh *desa pakraman* yang ada di wilayah Kecamatan Kediri kecipratan hasil pengelolaan wisata kawasan suci Pura Tanah Lot. Sesuai dengan perjanjian kerja sama pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban Nomor 12, Tahun 2011 Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot, diuraikan bahwa dari hasil pendapatan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya pengembangan, biaya pengelolaan, biaya operasional, dan biaya promosi, pembagian hasilnya adalah 60% untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan, 24% untuk Desa Pakraman Beraban, 7,5% untuk Pura Luhur Tanah Lot, 4% untuk pura-pura

yang terkait dengan kawasan suci Pura Tanah Lot, dan 4,5% untuk *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri.

Khusus bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban, pengembangan pariwisata telah berperan penting dalam menggerakkan pebangunan ekonomi masyarakat *desa pakraman*, meningkatkan kesejahteraan *krama desa pakraman*, dan mendorong terjadinya perubahan modal budaya. Oleh karena itu, makna kesejahteraan dalam kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai dasar pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Beraban bisa dilihat dari dinamisnya aktivitas perekonomian dari hasil beberapa jenis uasaha yang dikelola oleh *desa pakraman*, yaitu unit usaha pedagang, unit usaha pasar seni, dan unit usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Dinamika unit usaha ini dikontrol oleh pengurus *desa pakraman* dan dipertanggung-jawabkan perkembangannya setiap tahun sekali dalam *paruman* (rapat) *desa pakraman* sebagaimana penjelasan berikut.

> "Kami menyadari bahwa Desa Pakraman Beraban sangat tergantung pada pariwisata untuk membiayai pembangunan *desa pakraman*, pelestarian budaya yang menjadi daya tarik wisata, dan meningkatkan kesejahteraan *krama* desa adat. Oleh karena itu, peluang –peluang ekonomi pariwisata kami kelola dalam bentuk usaha di bawah naungan *desa pakraman*. Di samping itu, *krama* desa juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri, berusaha secara mandiri dalam usaha jasa wisata atau jenis usaha lainnya sesuai dengan kemampuan, tingkat pengetahuan, dan modal yang dimilliki. LPD selalu siap memberikan bantuan modal bagi *krama desa pakraman* yang mengembangkan usahanya. Ternyata perkembangan usaha di bawah naungan *desa pakraman* ini cukup bagus dan menjadi andalan untuk membiayai pembangunan dan menambah kekayaan desa adat. Dari hasil usaha inilah *krama desa* membangun desanya, baik yang menyangkut *palemahan, pawongan, maupun parahyangan* (I Made Subawa, wawancara, 29 Juni 2015).

Unit-unit usaha yang dikelola oleh Desa Pakraman Beraban, yakni unit usaha pedagang kios-kios, unit usaha pasar seni dengan masing-masing dibebani retribusi, dan unit usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Saat ini unit-unit usaha itu berjalan dengan

baik dan dikelola secara professional. Perkembangannya dipantau oleh Pemerintah Daerah Bali dan secara struktur manajemen operasional berinduk pada Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Tabanan sehingga tidak ada yang mengalami kerugian. Belum pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dipercayakan Desa Pakraman Beraban kepada *krama desa pakraman* yang bertugas di tiap-tiap jenis usaha tersebut.

LPD Desa Pakraman Beraban, menurut I Ketut Suitra, memang bertujuan untuk membangun perekonomian *desa pakraman* dan membantu *krama* Desa Pakraman Beraban. Penghasilan dari pariwisata harus dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menyimpan uang atau meminjam uang guna membiayai kebutuhan hidup, upacara agama, atau untuk mengembangkan usaha. Dengan jasa pelayanan yang dikembangkan itu, LPD Beraban sangat menunjang dan mendukung sektor perekonomian di kawasan Desa Pakraman Beraban. LPD Desa Pakraman Beraban secara rutin mengadakan gebyar hadiah dalam rangka merayakan ulang tahunnya. Acara ini merupakan salah satu strategi dalam mempromosikan LPD secara luas kepada masarakat. Adapun hadiah-hadiah yang diperebutkan, seperti sepeda motor, televisi, kulkas, mesin cuci, *handphone*, sepeda *meuble*, dan hadiah-hadiah lainnya (wawancara, 29 Mei 2015).

Lebih lanjut Suwitra menyatakan gembira melihat kontribusi yang telah diberikan oleh LPD unit usaha pasar seni, dan pedagang yang sangat besar sehingga *krama desa* sangat terbantu dalam membiayai kegiatan ritual keagamaan dan merenovasi tempat suci yang berada di bawah nauangan *desa pakraman*. Dengan modal besar yang didapat dari berkembangnya uasaha tersebut *krama* Desa Pakraman Beraban membangun desanya, baik di bidang *perahyangan, palemhan,* maupun *pawongan*. Selain pembangunan fisik yang megah tempat-tempat suci tersebut, setip 210 hari atau enam bulan sesuai dengan perhitungan kalender Bali juga dilaksanakan *piodalan* (upacara keagamaan di tiap-tiap pura *khayangan* Desa Pakraman Beraban. Seluruh biaya untuk keperluan *piodalan* diambil dari khas Desa Pakraman Beraban, sedangkan *krama desa pakraman* hanya *ngayah* (sebgai pelaksana), menyukseskan seluruh rangkaian prosesi *piodalan* tersebut.

I Wayan Arwata, mantan Bendesa Desa Pakraman merasa bersyukur karena biaya upacara dan pembangunan pura bisa

ditanggung oleh *desa pakraman*. Lebih jauh I Wayan Arwata menjelaskan sebagai berikut.

> "Keadaan zaman sekarang jauh berbeda dengan zaman kami dulu saat Desa Pakraman belum bisa mengelola usaha sendiri. Pariwisata memang sudah masuk ke Desa Pakraman Beraban, tetapi saat itu pendapatan masih kecil sehingga untuk makan sehari-hari sangat sulit, apalagi untuk membangun pura atau melaksanakan upacara tentu lebih sulit lagi. Masing-masing *krama* harus bergototng royong mengeluarkan biaya agar bisa membngun tempat suci dan membiayai upacara. Namun, sekarang *Ida Sang Hyang Widhi* tampaknya sudah *suweca* (berkenan) melimpahkan rejeki melalui kegiatan pariwisata sehingga *desa pakraman* bisa membangun *parahyangan* dan melaksanakan upacara dengan baik. Krama *desa pakraman* sekarang bisa lebih berbahagia melaksanakan *aci puja wali* (upacara) di pura karena tidak lagi memikirkan masalah biaya yang harus di tanggung sendiri" (wawancara 2 Juli 2015).

Implikasi di bidang *parhyangan* secara langsung dapat memotivasi *krama desa pakraman* untuk ikut merawat dan menata pura yang ada di wilayah kawasan suci Pura Tanah Lot dan membangun *palemahan*nya (wilayah *desa pakraman*) agar tetap menjadi daerah pariwisata yang menarik bagi wisatawan. Bendesa Pakraman Beraban juga mengaku selalu bersinergi dengan Desa Dinas Beraban dalam melaksanakan program kerja kelurahan, baik yang berkaitan dengan *parahyangan, pawongan* maupun *palemahan*.

Di Desa Pakraman Beraban terdapat kelompok profesi jasa tukang foto/ pemotretan yang bernaung di bawah *desa pakraman* dan, dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Wisata Tanah Lot. Menurut Manajer Pengelola Wisata Tanah Lot (I Ketut Toya Adnyana), jumlah tukang foto amatir yang menjajakan jasanya dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jadwal (sit) yang ditentukan. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu areal tertentu dalam kawasan saja. Artinya, mereka aktif mencari konsumen di sekitar pinggir pantai dengan ramah menawarkan jasa. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan bahasa tamu/wisatawan yang dihadapi, sebagaimana terlihat pada gambar 5.5 berikut.

Tukang foto sedang mencari pelanggan (koleksi, Girinata 2015)

Perkembangan wisata kawasan suci Pura Tanah Lot telah mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Desa Pakraman Beraban, karena dapat melibatkan tenaga kerja cukup banyak. Menurut Manager Pengelola (I Ketut Toya Adnyana), sesuai dengan struktur operasional pengelolaan sampai saat ini dipekerjakan tenaga sebanyak 189 orang dan di luar struktur sejumlah 200 orang *pecalang* juga dioperasikan untuk menjaga keamanan. Dari jumlah itu semua tenaga kerja berasal dari Desa Pakraman Beraban yang direkrut melalui mekanisme internal (wawancara 11 Juli 2015).

Menurut I Ketut Toya Adnyana, semenjak pariwisata kawasan suci Pura Tanah Lot dikelola oleh Desa Pakraman Beraban, belum pernah terjadi pemecatan anggota. Para pedagang mematuhi semua tata tertib dan aturan yang telah ditetapkan. Lebih jauh I Ketut Toya Adnyana menjelaskan sebagai berikut.

> "Kami selalu melakukan pendekatan dan pembinaan secara kekeluargaan dengan para karyawan dan para jasa wisata lainnya agar mereka selalu mematuhi aturan yang telah didisepakati. Kami mengingatkan, setiap pedagang dan pengunjung pantai Beraban kawasan suci Pura Tanah Lot, harus tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan

supaya citra sebagai daerah wisata tidak bercoreng (wawancara, 11 Juli 2015).

Menurut I Wayan Suarka, masyarakat selain direkrut di lembaga pengelola wisata kawasan suci Pura Tanah Lot, masyarakat Desa Pakraman Beraban juga banyak terserap bekerja di hotel BNR. Manajemen pengelolaan hotel BNR secara struktur tidak ada hubungannya dengan lembaga pengelola wisata kawasan suci Pura Tanah Lot. Namun, setiap berencana mencari tenaga kerja (merekrut tenaga kerja) selalu didahului dengan melakukan koordinasi dengan Bendesa Pakraman Beraban dan Perbekel Desa Beraban. Dalam koordinasi itu tenaga yang dibutuhkan diutamakan berasal dari daerah setempat sesuai dengan besik yang diperlukan. Jika tidak ada, barulah pihak hotel (BNR) mencari tenaga di luar Desa Pakraman Beraban (wawancara 6 Juni 2015).

Kerja sama antara desa adat, pemerintah, dan pengusaha pariwisata dalam membangun atau memperbaiki infrastruktur wilayah Desa Pakraman Beraban terus dilakukan. Misalnya, menata pinggir pantai dengan penghiajuan, pembuatan *planter box* yang ditanami dengan pohon katang-katang, pembuatan toilet umum, pembangunan gerbang utama masuk pantai, dan pembangunan *bale pasayuban* di aeral strategis. Di samping itu, juga telah dibuat sebuah bangunan wantilan besar di pinggir pantai dekat Pura Tanah Lot yang juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, baik bagi para *pamedek* maupun wisatawan yang datang. Untuk menambah suasana alami, di sebelah wantilan ditanami tanaman peneduh dan rumput yang dirawat secara rutin. Di beberapa sudut disiapkan beberapa tong sampah agar masyarakat yang berkunjung tidak membuang sampah sembarangan. Dengan penataan ini, kawasan menjadi tampak asri dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan. Untuk menciptakan kebersihan, keamanan, keindahan, dan kelestarian lingkungan *setra* (kuburan) di Desa Pakraman Beraban telah dilakukan penataan *setra* dengan baik. Selain itu, *kerama* desa tidak dibenarkan membuat pusara kuburan secara permanen, tetapi hanya dengan menanam langsung di tanah setelah simbolis upacara *ngaben* membakar mayat selesai.

Dari data-data keberhasilan Desa Pakraman Beraban menangkap peluang ekonomi dengan mengelola unit usaha dalam pengembangan pariwisata dan jumlah aset yang dimilikinya telah tercermin tujuan pengembangan pariwisata budaya dan memberikan

pengaruh secara signifikan dalam meningkatakan kesejahteraan *krama dea adat*. Hal itu sejalan dengan pandangan Picard (2006 : 192) bahwa hegonomi pariwisata dengan ideologi pasar kapitalis dianggap positif oleh *krama* Desa *Pakraman* Beraban karena dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan mereka.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tabanan, Ni Putu Sri Ratnawati (wawancara 14 Juni 2015) juga menyakinkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia memang terus difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, yang sesungguhnya sebagai pelaku praktik budaya, pemilik, dan ahli waris kebudayaan yang menjadi daya tarik pariwisata. Oleh karena itu, adanya opini atau pendapat tentang kekhawatiran akan terdesaknya masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata patut disikapi dengan bijaksana dan pikiran positif dalam kehidupan masyarakat Bali. Sikap tersebut sudah terakomodasi dalam kearifan lokal *tri hita karana* yang dipakai sebagai kanopi mewujudkan kehidupan yang harmonis bagi Desa *Pakraman* Beraban. Selanjutnya Ni Putu Sri Ratnawati menjelaskan sebagai berikut.

> "Kesejahteraan yang diharapkan dari implementasi *tri hita karana* dalam pengembangan pariwisata budaya, tidak bisa dipandang dari sisi ekonomi semata, tetapi harus juga dilihat dari sisi terjalinya kehidupan harmonis dalam masyarakat, baik harmonis dengan lingkungannya, sesama, maupun harmonis dengan kekuatan yang bersifat rohani dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa.* Dengan menjungjung tinggi kearifan lokal *tri hita karana*, berarti seluruh *stakeholder* kepariwisataan di Bali secara nyata telah menunjukkan kepedulian, komitmen, konsistensi dalam menjaga keutuhan Bali. Dengan pengembangan pariwisata secara berkesinambungan dan mengacu pada perinsip-perinsip perkembangan pariwisata berkelanjutan, maka kesejahteraan masyarakat yang diharapkan bisa terwujud.

Apa yang disampaikan oleh Ni Putu Sri Ratnawati, sesungguhnya telah dilakukan oleh *krama* Desa Pakraman Beraban. Artinya, mereka telah berpikir positif dengan mengubah budayanya dalam pengembngan pariwisata sehingga terjadi keseimbangan antara

kepentingan *desa pakraman* yang dilandasi konsep *tri hita karana* dengan kepentingan pariwisata yang diladasi ideologi pasar.

Berbagai bentuk praktik budaya sebagai wujud perubahan modal budaya dilakukan Desa Pakraman Beraban dalam pengembangan pariwisata. Menurut Bendasa Pakraman Beraban, I Made Subawa, hal itu memang diyakini sebagai langkah positif dan tepat dalam menyiasati desakan ideologi pasar kapitalis. Keberadaan unit usaha pasar kios-kios kecil tempat menjual cendera mata, pedagang oleh-oleh yang dikelola oleh masyarakat lokal, dan LPD Desa Pakraman Beraban yang dikelola oleh Desa Pakraman, dianggap sebagai suatu ikon atau simbol kekuasaan Desa Pakraman Beraban untuk menghadapi persangian dengan ideologi pasar kapitalis dalam pengembangan pariwisata. Dikatakan demikian, sebab kapitalisme menurut Winardi (dalam Sumadi, 2009: 325) bekerja berdasarkan kondisi-kondisi persaingan. Masyarakat dimotivasi oleh kekuatan ekonomi untuk mencapai keuntungan besar dengan biaya sekecil-kecilnya. Kapitalisme melegitimitasi dan mendorong perhatian masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.

Mantan Bendesa Pakraman I Wayan Arwata menjelaskan bahwa dengan keterlibatan masyarakat lokal yang membuka usaha dagang jasa pariwisata , maka kesejahteraan ekonomi yang dapat diraih tidak akan merusak nilai, norma, dan memarginalkan kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban. Lebih jauh mereka menjelaskan bahwa perubahan budaya itu dilakukan agar kami, krama desa adat dapat mencari pekerjaan di bidang pariwisata yang saat ini menunjukkan persainganya semakin susah. Kalau kami tidak melakukan perubahan, bisa-bisa kami terdesak dari desa sendiri oleh para pendatang yang lebih banyak mempunyai waktu dan keterampilan. Unit-unit yang dikelola oleh Desa Pakraman dan kegiatan budaya yang dipromosikan untuk pariwisata menunjukkan bahwa kami telah berusaha melakukan penyesuaian diri agar kehidupan Desa Pakraman tetap terjaga dan pariwisata terus berkembang di Desa Pakraman Beraban" (wawancara 25 Juni 2015).

Dari perkembangan unit usaha dan pernyataan *krama desa pakraman* di atas, diketahui bahwa makna kesejahteraan perubahan modal budaya di Desa Pakraman Beraban juga bisa dilihat dalam bentuk kemampuan *krama* Desa Pakraman Beraban menyikapi perbedaan distribusi dan penguasaan modal dalam pengembangan pariwisata. Sejalan dengan Bourdieu (dalam Fashri, 2007: 98--99),

karakteristik bentuk modal yang dimiliki masyarakat dapat dipertukarkan satu sama lain. Modal budaya, modal sosial, dan modal ekonomi yang bergerak dinamis dalam pengembagan pariwisata menandakan bahwa modal dapat berkurang dan bertambah. Semakin besar Desa Pakraman Beraban mengakomulasi modal tertentu semakin besar pula peluang mengorvesi antar- modal. Desa Pakraman Beraban yang memiliki modal ekonomi atau uang dari unit usaha yang dikelola misalnya, telah dikorvesi untuk biaya melestarikan budaya. Dengan demikian, Desa Pakraman Beraban mendapat legitimasi atau modal simbolik sebagai daerah tujuan wisata yang kuat mempertahankan kebudayaannya, sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman. Demikian pula modal budaya dikorvesi menjadi modal ekonomi, yaitu praktik-praktik budaya dijadikan daya tarik wisata dan promosi pariwisata sehingga Desa Pakraman Beraban semakin ramai dikunjungi wisatawan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengusaha pariwisata merasa senang dan bisa memberikan kontribusi lebih besar berupa *dana puni* ke desa adat.

Dengan kemampuan menyikapi perbedaan distribusi dan penguasaan modal tesebut maka saat ini *krama* Desa Pakraman Beraban tidak lagi terjebak pada bentuk-bentuk manipulasi simbolik seperti yng dilakukan oleh aparat pemerintah pada zaman orde baru dalam menentukan tingkat kesejahteraan masnyarakat. Pada zaman orde baru Desa Pakraman Beraban selalu masuk dalam peringkat masyarakat bebas keluarga miskin sehingga Desa Pakraman Beraban mendapat simbol sebagai Desa Pakraman yang makmur. Akibat manipulasi simbolik itu, menurut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menggulirkan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kecamatan Beraban, banyak orang luar menganggap *krama* Desa Pakraman Beraban bergelimang dolar dan tidak ada keluarga miskin seirama dengan semakin ramainya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pura Tanah Lot.

Meskipun masyarakat Desa Pakraman Beraban telah memiliki simbol kekuasaan dan kekuatan berupa unit usaha dagang kios-kios kecil dan LPD, belum mampu sepenuhnya menyejahterakan *krama* desanya di tengah krisis ekonomi dan desakan kekuatan ideologi pasar. Penyebabnya tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan *krama* desa adat sehingga tidak bisa menangkap peluang-peluang ekonomi pariwisata yang ada. Oleh karena itu, pendidikan harus

ditingkatkan agar pengetahuan dan wawasan warga masyarakat semakin meningkat. Pendidikan bisa meningkatkan kesadaran seseorang untuk lebih kreatif, inovatif, dan memenangkan persaingan dalam dunia kerja. Dengan kenyataan tersebut, saat ini Desa Pakraman Beraban terus berkoordinasi dengan perbekel, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan *bendesa pakraman* untuk membantu meningkatkan sumber daya warga masyarakat dalam bidang pendidikan sehingga pada ahkhirnya mereka bisa mandiri. Program ini tampaknya membuahkan hasil yang optimal karena dari pengelola hotel BNR ikut berpartisifasi memberikan dukungan beasiswa kepada warga masyarakat yang berprestasi untuk melanjutkan sekolah. Pihak BNR juga ikut membiayai kursus bahasa warga masyarakat yang berminat dengan tujuan agar setiap masyarakat mampu berkomunikasi (sekalipun pasif) ketika bertemu dengan wisatawan untuk minta bantuan petunjuk.

Karena citra wisata Tanah Lot telah melesat ke seluruh dunia sebagai daerah tujuan wisata favorit, secara otomatis Desa Pakraman Beraban menjadi barometer perkembangan pariwisata Bali. Namun, sayang pemerintah belum mampu memberikan perhatian yang maksimal kepada *desa pakraman* di seluruh Kabupaten Tabanan, padahal masyarakat lokal sebagai tulang punggung secara tidak langsung ikut menunjang kemajuan pariwisata. Ketidakadilan ini harus dihentikan dan kesejahteraan masyarakat lokal daerah Kabupaten Tabanan harus mendapat prioritas dalam pengelolaan pendapatan pariwisata. Pariwisata harus dikembangkan lebih berkualitas oleh seluruh *stakeholder,* yakni pemerintah, pengusaha pariwisata, dan masyarakat. Berkualitas berarti masyarakat tetap bersatu, lebih kuat, utuh, dan ber-*taksu* dalam pengembangan pariwisata. Utuh dan memiliki *taksu* berarti, sebagai masyarakat harus tetap memiliki karakter dan jati diri yang kuat sebagai implementasi *tri hita karana.* Di samping itu, nilai-nilai budaya lokal menghormati pluralisme, keragaman budaya, etnis, dan agama.

Uraian di atas, sejalan dengan pendapat Foucoult tentang wacana, kuasa, pengetahuan, dan kebenaran. Artinya, saat ini *krama* Desa Pakraman Beraban telah menyadari bahwa untuk melawan ketidakadilan hegemoni pariwisata yang menggandeng ideologi pasar, mulai didukung dengan wacana dan penguasaan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menjadi alat penguasaan manusia atas manusia, artinya dapat mengendalikan dan memengaruhi keputusan yang

dipandang sebagai sutu kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, tetapi berada di dalam kekuasaan itu sendiri (Lubis, 2004:163). Sikap masyarakat Desa Pakraman Beraban dalam pengembangan pariwisata sesungguhnya telah menunjukkan pengetahuan yang sudah cukup kuat untuk melawan ideologi pasar. Akan tetapi, ideologi pasar ternyata lebih kuat karena berada di tangan penguasa dan pengusaha pariwisata. Oleh karena itu, kesejahteraan modal budaya sebagai dasar pengembangan pariwisata sesuai dengan pandangan Bourdieu (Fashri, 2007:102--104), bisa direbut melalui strategi dalam ranah kekuasaan.

Menurut Bourdieu, strategi itu harus bersandarkan jumlah modal yang dimiliki dan struktur modal dalam posisinya di ruang sosial. Dalam posisi dominan, strategi harus diarahkan kepada upaya pelestarian dan mempertahankan *status quo* agar kelompok yang didominasi mengubah distribusi modal, aturan main, dan posisi-posisinya sehingga terjadi kenaikan jenjang sosial. Dalam hal ini strategi investasi simbolik sangat penting artinya karena merupakan upaya melestarikan dan meningkatkan pengakuan sosial, legitimasi, atau kehormatan melalui skema-skema persepsi dan apresiasi yang paling cocok dengan keadaan kelomok tertentu.

Dalam posisi dominan sebagai pemilik wilayah, pelaku, dan ahli waris praktik budaya, Desa Pakraman Beraban memang dituntut dapat melakukan strategi investasi simbolis. Strategi investasi ini berupa perjuangan politik praktis, politik kebudayaan, dan terus menebar wacana makna kesejahteraan dalam pengembangan pariwisata. Dengan semakim banyaknya muncul calon kesejahteraan itu Foucoult dan Bourdieu meyakinkan bahwa dengan menebar kata atau wacana akan diraih kuasa. Dikatakan demikian, sebab bahasa, kuasa, kata, atau wacana berperan penting bagi pembentukan makna. Wacana menduduki posisi strategis bagi penyemaian ideologi yang ada di tangan penguasa, yakni Desa Pakraman Beraban sebagai penguasa modal budaya dalam pengembangan pariwisata. Wacana makna kesejahteraan dari perubahan modal budaya akan mengikis habis bentuk-bentuk manipulasi simbolis yang memarginalkan *krama* Desa Pakraman Beraban dalam pengembangan pariwisata.

2. Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dan Desa *Pakraman* Kecamatan Kediri

Pembahasan mengenai pendapatan anggaran daerah menganalogikan bagaimana hasil atau pendapatan dari potensi daya tarik kawasan suci Pura Tanah Lot didistribusikan ke pada pihak-pihak yang dipandang berhak. Komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot yang dilakukan dengan mereproduksi kawasan untuk pelayanan pariwisata menyebabkan para wisatawan berkunjung semakin meningkat. Secara otomatis pendapatan juga pasti meningkat. Komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot bermakna sangat positif dalam peningkatan pendapatan. Hal itu berarti pula telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pakraman Beraban, baik secara individu maupun secara struktur, sebagai Desa Pakraman Beraban. Demikian pula halnya bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan bahwa kawasan suci Pura Tanah Lot yang dijadikan sebagai bahan komoditas melalui reproduksi telah dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan daerah. Perkembangan pembangunan kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai daya tarik wisata dan statusnya sebagai pura *kahyangan jagat*, maka memerlukan peran serta Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mengatur dan mengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Nomor: 170/1976/DPRD, 23 September 2011 diketahui bahwa pengelolaan objek wisata Tanah Lot dilakukan oleh dua belah pihak (Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban) dalam bentuk Badan Pengelola.

Kebijakan pengelolaan seperti itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan (Bupati Tabanan bersama DPRD) karena sebelumnya pernah terjadi sistem pengelolaan dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta. Ketika itu menurut mantan Bendesa Pakraman Desa Pakraman Beraban, I Wayan Arwata pendapatan dari objek wisata Tanah Lot sangat sedikit berkontribusi ke Desa Pakraman Beraban. Atas dasar itulah masyarakat Desa Pakraman Beraban selaku bagian dari objek wisata secara struktural mengusulkan agar terlibat langsung dalam pengelolaan dan mohon tidak lagi melibatkan pihak swasta (wawancara, 22 Mei 2015). Akhirnya, keluar Surat Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri Nomor 12, Tahun 2011, Nomor 358/DPBRB/XI/2011, dan Rekomendasi

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Nomor: 170/1976/DPRD, 23 September 2011. Surat ini menerangkan bahwa pengelolaan objek wisata Tanah Lot dilakukan oleh dua belah pihak, yakni PIHAK PERTANA, Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos., Bupati Tabanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan. Di pihak lain dr. I Wayan Arwata, M.M., Bendesa Pakraman Beraban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Pakraman Beraban selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Antara pihak pertama dan pihak ke dua termasuk sebagai subjek perjanjian.

Sebagai objek perjanjian sebagaimana isi Surat Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban Kecamatan Kediri sesuai dengan isi pasal 4. Selanjutnya terakomodasi dalam pendistribusian dari hasil pendapatan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Adapun isi penjelasan pasal 4 dimaksud meliputi hal-hal berikut.

1. Pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot meliputi areal tanah milik Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pura Luhur Tanah Lot, Pura Pakendungan, Pura Dangin Bingin, Pura Penataran, Pura Jro Kandang, Pura Batu Mejan, Pura Batu Bolong, Pura Hyang Api, Pura Bomo, dan Pura Sisian dan/ atau di areal tanah negara di sepanjang pantai Tanah Lot dengan luas paling barat Pangkung Yeh Kutikan dan sebelah timur tanah milik I Wayan Lepud dari Beraban. Semua ini berada di *wewidangan* Desa Pakraman Beraban.
2. Pengembangan tempat daya tarik wisata Tanah Lot.
3. Semua objek sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak boleh dipakai jaminan utang dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.
4. Selain pura-pura sebagaimana dimaksud angka 1, semua bangunan yang ada dan bangunan baru atas pengembangan kawasan tempat daya tarik wisata Tanah Lot akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para PIHAK sejak masa perjanjian berakhir.
5. Bangunan-bangunan yang ada pada tanah milik Pemerintah Kabupaten Tabanan setelah berakhirnya perjanjian ini akan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya pasal 5 menyangkut keorganisasian yang isinya meliputi hal-hal berikut.

1. PIHAK-PIHAK yang membuat perjanjian kerja sama ini sepakat untuk membentuk Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola.
2. Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk MOBP. Untuk dapat melaksanakan tugas pengelolaan secara profesional.
3. Organisasi, keanggotaan, dan uraian tugas Pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Organisasi dan uraian tugas Manajemen Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan pengurus manajemen operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Perjanjian kerja sama pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot berlangsung untuk jangka waktu lima belas tahun terhitung mulai dari 17 November 2011 dan berakhir pada 17 November 2016. Penghentian kerja sama dapat dilakukan atas persetujuan pihak-pihak dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara terlutis sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya.

Pendapatan wisata kawasan suci Pura Tanah Lot menurut salah seorang karyawan Badan Pengelola, I Ketut Nurbawa (wawancara, 20 Juni 2015) rata-rata setiap hari kurang lebih antara 100 juta sampai 120 juta selain hari raya. Total pendapatan itu bersumber dari penerimaan penjualan karcis masuk, pendapatan dari penjualan karcis parkir untuk roda dua, roda empat, roda enam, dan penerimaan sewa tempat kios/ toko, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Badan Pengelola secara terus-menerus berupaya melakukan promosi, baik lewat media elektronik, kerja sama dengan biro jasa perjalanan wisata, maupun menampilkan atraksi budaya secara rutin setiap tahun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tabanan. Segala biaya promosi diatur sesuai dengan surat perjanjian kerja sama sebesar 15% dari penerimaan bruto setelah dikurangi biaya operasional manajemen. Perkembangan pendapatan DTW Tanah Lot sepuluh tahun terakhir (tahun 2005 – 2015) tercatat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perkembangan Pendapatan DTW Tanah Lot

TAHUN	PENDAPATAN (Rupiah)	PERTUMBUHAN (Persen)
2005	2.273.341.400	-
2006	5.512.396.583	142,48
2007	6.553.617.595	18,89
2008	8.616.628.242	31,48
2009	10.656.220.494	23,67
2010	13.301.422.250	24,82
2011	14.519.147.750	9,15
2012	26.974.888.596	85,79
2013	33.519.717.827	24,26
2014	40.589.501.282	21,09
2015	41.427.942.260	2,07

Perkembangan pendapatan DTW Tanah Lot dari tahun 2005-2015. Sumber: Badan Operasional DTW Tanah Lot (2015)

Data di atas merupakan perkembangan hasil pendapatan DTW Tanah Lot tiap tahun dimulai sejak tahun 2005 – 2015 setelah dikurangi biaya operasional dan promosi sebanyak 15% dari pendapatan bruto. Penelitian ini hanya menampilkan pendapatan DTW Tanah Lot untuk tahun tarakhir yaitu pada tahun 2015 setelah dipotong biaya operasional yang jumlahnya mencapai Rp 41.427.942.260,00. Jumlah itu mengalami peningkatan 2,07% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Dari jumlah itu sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten dengan Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri Nomor 12, Tahun 2011 Nomor 358/DPBRB/XI/2011, tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah

Lot, sesuai isi pasal 9 ayat (1) tentang pembagian hasil. Selanjutnya didistribusikan kepada beberapa pihak seperti belikut.

Distribusi Kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan

Sesuai dalam surat perjanjian, pendapatan bruto pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot setelah dikurangi biaya operasional manajemen, dan 15% untuk biaya promosi dan pengembangan, maka sisanya diakumulasi kembali menjadi 100% seperti tercatat pada tabel 7.1. Pendapatan untuk tahun 2015 mencapai angka Rp 41.427.942.260,00. Jumlah itu, kemudian didistribusikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang bertindak sebagai pihak pertama sebanyak 60%. Dengan demikian, pendapatan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2015 dari wisata Tanah Lot sebanyak Rp 24.856.765.356,00. Peruntukan dana itu kemudian menjadi tanggungjawab dan kebijakan Kepala Pemerintah Daerah (Bupati) untuk menopang pembangunan daerah Kabupaten Tabanan. Penelitian ini tidak meneliti lebih jauh tetang proses pendistribusian.

Distribusi Kepada Desa Pakraman Beraban

Pembagian untuk Desa Pakraman Beraban sebagai wilayah tempat keberadaan wisata Tanah Lot, tahun 2015 mendapatkan pembagian sebesar 24% dari Rp 41.427.942.260,00. Sehingga Desa Pakraman Beraban pada tahun 2015 mendapatkan bagian sebanyak Rp 9.942.706.142.40,00. Dari jumlah itu, dikembalikan menjadi 100%, dan didistribusikan ke lima belas *banjar pakraman* di bawah pemerintahan Desa Pakraman Beraban, yang jumlahnya sama rata diatur berdasarkan hasil rapat pada saat itu. Kemudian tiap-tiap banjar menggunakan dana itu untuk meningkatkan pembangunan di banjar masing-masing. Menurut I Wayan Suteriya, semenjak keterlibatan Desa Pakraman Beraban ikut mengelola detinasi wisata Tanah Lot, maka segala bentuk *urunan* untuk program pembangunan, tidak lagi membebani masyarakat. Tidak ada disposisi khusus dari *Bendesa Pakraman* kepada tiap-tiap *banjar* dalam hal dari pembagian itu untuk mendukung suatu kepenggunaan dana itu. Namun, diberikan kebebasan untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap *banjar pakraman*. Maka dari itu, realisasi penggunaan dana tidak sama antara *banjar pakraman* satu dengan banjar *pakraman lainnya*. Pengelolaannya dilakukan oleh pimpinan tiap-tiap banjar, dan

kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Suwitra, wawancara 22 Juni 2015).

Distribusi untuk Pura Tanah Lot

Pura Tanah Lot yang menjadi karakteristik dan objek wisata terkenal di mancanegara untuk tahun 2015 mendapat pembagian sebanyak 7,5 % dari Rp 41.427.942.260,00. Sehingga jumlah yang diterima oleh *pangempon* pura Tanah Lot adalah Rp3.107.095.669.50. Menurut I Wayan Arwata, koordinator *pangempon* Pura Suci Tanah Lot, dana itu langsung diterima oleh panitia setiap bulan. Peruntukan pembagian itu menurut Jro Mangku Aris (wawancara, 9 Mei 2015) sejak perkembangan pariwisata Tanah Lot, kini *kahyangan* suci Pura Tanah Lot lebih terawat, bahkan sudah bisa membeli tanah untuk *labe*. Para *pemangku* bisa diberikan honor piket setiap bulan sebesar Rp 500.000,00. Kontribusi dana bagian itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan upacara yang dilaksanakan, terutama ketika hari *odalan*, di samping hasil *dana punia* umat. Sekarang para *pengempon* tidak pernah lagi dikenai *urunan* terkait dengan segala keperluan untuk pura.

Distribusi untuk Pura yang Ada di Kawasan Suci Pura Tanah Lot

Di kawasan suci Pura Tanah Lot terdapat sepuluh jenis pura yang *di-emong* oleh kelompok-kelompok warga dengan *pemangku* yang juga berbeda. *Pangemong* tiap-tiap pura tidak saja berasal dari warga masyarakat Desa Pakraman Beraban, tetapi banyak juga yang berasal dari *desa pakraman* di luar Kecamatan Kediri demikian juga yang menjadi *pemangku*. Kesepuluh pura dimaksud tidak diketahui secara jelas bagaimana proses berdirinya dan mengapa warga dari luar Kecamatan Kediri bisa membangun pura di sekitar kawasan suci Pura Tanah Lot. Kesepuluh pura itu juga pada tahun 2015 mendapat pembagian pendapatan sebesar 4% dari Rp 41.427.942.260,00, dengan total penerimaan berjumlah sebanyak Rp 1.657.117.690.40. Jumlah itu dikembalikan menjadi 100%, kemudian didistribusikan kesepuluh pura dengan besarannya berbeda untuk setiap pura. Pura Pakendungan mendapat 35%, Pura Dangin Bingin mendapat 10%, Pura Penataran sebanyak 10%, Pura Jero Kandang mendapat 5%, Pura Batu Mejan sebanyak 10%, Pura Batu Bolong sebanyak 10%, Pura Hyang Api mendapat 5%, Pura Boma mendapat 5%, Pura Sisian 5%, dan untuk

Pura Enjung Galuh mendapatkan 5%. Dana itu dimanfaatkan sesuai keperluan dan menjadi tanggungjawab *pangempon* tiap-tiap pura

Distribusi kepada *Desa Pakraman* se-Kecamatan Kediri

Seluruh *desa pakraman* yang berada di wilayah Kecamatan Kediri juga mendapat pembagian dari pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot untuk tahun 2015 sebesar 4,5% dari Rp 41.427.942.260,00 sehingga dana yang diterima sejumlah Rp 2.692.816.246.90. Dari jumlah itu kemudian dibagi sama rata menjadi 31 bagian dengan perincian, 22 *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri, empat banjar adat di Desa Bengkel, tiga banjar adat di Desa Pangkung Tibah, satu banjar adat di Desa Belalang (Pacung), dan satu banjar adat di Desa Abian Tuwung (Ganter). Sesuai dengan data statistik Kabupaten Tabanan, secara struktur formal kelembagaan Desa Pakraman bahwa 4 (empat) Banjar Adat Desa Bengkel, 3 (tiga) Banjar Adat di Desa Pangkung Tibah, dan 1 (satu) Banjar Adat di Desa Belalang (Pacung) termasuk dalam struktur Desa Pakraman Bedha di Kecamatan Tabanan. Namun, karena keberadaannya secara geografis di wilayah Kecamatan Kediri dan dalam struktur Pemerintahan Kedinasan juga termasuk Desa Dinas Pemerintahan Kecamatan Kediri.

D. Implikasi Sosial Budaya

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai individu, manusia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorong dirinya berbuat dan bertindak. Selanjutnya dari apa yang diperbuat dan dari sikap hidupnya, manusia dapat mengetahui pribadi orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia tentu ingin hidup senang, bahagia, dan menghindar dari segala yang menyusahkan. Akhirnya, manusia terdorong dan berusaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani yang dipandang dapat memberikan kesenangan dan kebahagiaan pada dirinya. Akibatnya, timbullah hak seseorang atas sesuatu seperti hak atas sesuatu benda, hak menuntut ilmu, hak menikmati kesenangan, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya. Namun, sebagai makhluk individu, semua hak itu tidak bisa didapat dengan selalu hidup dalam kesendirian, tetapi harus berhubungan dengan manusia lainnya. Artinya, manusia di samping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Manusia hanya akan dapat hidup dengan sebaik-baiknya dan mempunyai arti apabila hidup

bersama-sama dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Hanya dalam hidup bersama, manusia dapat berkembang dengan wajar dan sempurna.

Sejak lahir sampai meninggal manusia memerlukan bantuan orang lain, baik jasmani maupun rohani, untuk kesempurnaan hidupnya. Manusia sangat memerlukam pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan-tanggapan emosional yang sangat penting artinya bagi pergaulan dan kelangsungan hidup yang sehat dan bahagia. Hal itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Tak ada seorang pun yang dapat mengingkari hal ini karena manusia baru dapat disebut sebagai manusia ketika dalam hubungannya dengan orang lain, bukan dalam kesendirian. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian tanpa bantuan orang lain sehingga sikap tolong-menolong dan kesetiakawanan sangat dibutuhkan. Hal ini memberikan kewajiban untuk memperhatikan keperluan-keperluan sesamanya. Koentjaraningrat (1992 :55) menyatakan bahwa setiap manusia yang hidup dalam masyarakat akan terikat oleh suatu bentuk kesatuan sosial karena adanya ikatan wilayah atau tempat kehidupan. Sebagai suatu kesatuan hukum sosial, warga masyarakat biasanya mempunyai perasaan kesatuan yang dapat mewujudkan rasa kepribadian kelompok, yaitu perasaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri-ciri kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lain.

Keberadaan masyarakat di Bali tidak dipandang sebagai badan yang terpisah dari individu dan golongan, tetapi merupakan bagian dari masyarakat. Maksudnya, masyarakat mengakui hak-hak individu dan individu mengakui hak-hak masyarakat sebagai suatu kepentingan bersama. Dalam sistem nilai masyarakat Bali terdapat tiga asas pandangan yang memiliki nilai tinggi bagi suatu kehidupan jika didasarkan atas asas kebersamaan, asas kekeluargaan, dan asas berbakti. Ketiga asas tersebut bersumber pada pandangan hidup masyarakat bahwa manusia tidak hidup sendiri di dunia, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Asas kebersamaan dapat mendorong manusia untuk berorientasi kepada sesamanya, asas kekeluargaan mendorong manusia mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta asas berbakti menumbuhkan loyalitas untuk mengabdi. Rasa bakti masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu diwujudkan dalam bentuk *yadnya* yang ditujukan ke

hadapan *Hyang Widhi* (Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, 1992/1993:9). Pandangan hidup masyarakat tersebut juga terdapat di Kabupaten Tabanan yang dipandang dapat menggerakkan dan mewujudkan perbuatan-perbuatan nyata dalam masyarakat berupa tolong-menolong, gotong royong, dan *suka duka* dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem sosial masyarakat Bali memotivasi warga masyarakat untuk berorientasi kepada pentingnya nilai *suka duka* di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai *suka duka* tersebut memancar dalam semangat gotong royong yang tampak dalam aktivitas-aktivitas sosial. Di samping itu, nilai *suka-duka* merupakan refleksi dari solidaritas sosial yang muncul dari asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Hal itu mendorong warga masyarakat untuk menyelaraskan kehidupan dengan sesamanya yang dilandasi oleh ajaran *tat twam asi.* Gotong royong sebagai realisasi pernyataan solidaritas dalam persekutuan hidup bersama dalam kelompok sosial merupakan suatu proses yang mengarah kepada kegiatan sosialisasi. Maksudnya suatu proses belajar berperan sosial, belajar tentang norma-norma dalam masyarakat, dan belajar tentang nilai-nailai kepribadian. Dalam konteks ini tampak terdapat hubungan antara kewajiban dan hak, hubungan jasa dengan sanksi sosial, hubungan belajar dengan mengajar, dan hubungan pendidikan mental dengan perilaku (Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, 1992/1993 :10--11). Bagi masyarakat Bali memandang konsep sikap solidaritas sangat perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan ini.

Koentjaraningrat (1992: 62) menyatakan bahwa solidaritas mencerminkan sistem nilai budaya Indonesia, yakni sebagai berikut. Pertama, manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian, tetapi dikelilingi oleh komunitas dan alam sekitarnya. Kedua, segala aspek kehidupan manusia bergantung kepada sesamanya. Ketiga, mereka harus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya dengan dilandasi dengan jiwa sama rata dan sama rasa. Keempat, mereka selalu berusaha sedapat mungkin bersifat *conform*, bekerja sama dalam komunitas yang dijiwai oleh jiwa sama tinggi dan sama rendah.

Ditinjau dari aspek sosiologis, manusia dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan interaksi sosial. Gilin and Gilin (Triguna, 1994: 38) mengatakan bahwa bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Selain itu, interaksi sosial juga

merupakan hubungan sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan, baik orang perorangan, antara kelompok dan kelompok, maupun antara orang perorangan dan kelompok. Proses interaksi sosial sering kali diawali dengan kontak dan komunikasi.

Beberapa persepsi tentang pesatnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali akan berdampak pada lunturnya nilai kehidupan masyarakat di bawah kanopi falsafah *tri hita karana*. Menurut sudut pandang Naya Sujana (dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, 1994: 45), manusia Bali kini berada di tengah perubahan sosial dan budaya atau di bawah pergeseran struktur sosial atau diliputi perkembangan sosial dan budaya yang kurang terkendali dan berhadapan dengan arus globalisasi yang deras dan intensif. Di samping itu, sedang memberikan reaksi keras terhadap segala campur tangan luar yang mencoba meruntuhkan manusia dan kebudayaan Bali. Pendapat Naya Sujana berangkat dari pendekatan Antropologi dengan melihat masyarakat Bali memiliki kesadaran yang kuat tentang perjalanan sejarah, ikatan sosial, dan solidaritas, baik dalam arti individual maupun kolektif. Beberapa sifat dan karakter orang Bali yang dianggap dominan selama ini, baik dalam perspektif individu maupun kolektif, seperti terbuka, ramah dan luwes, jujur, kreatif dan estetis, kolektif, kosmologis, religius, dan moderat, kini telah memasuki eksistensi yang lebih ke atas, yaitu menjadi manusia ekonomis atau manusia industri yang lebih menghargai nilai uang dan materi, menghatgai efisiensi, menguasai status, mengutamakan investasi dengan orientasi kesenangan. Beberapa proses sosial dan budaya menjadikan manusia Bali mengalami transisi yang dapat menghanyutkan, bahkan menenggelamkan manusia Bali. Secara teoretis, lingkungan sosial dan budaya transisi telah membentuk dan memengaruhi sifat, sikap, dan perilaku manusia Bali.

Sistem sosial masyarakat Hindu di Bali tergolong unik karena antara agama Hindu, adat istiadat, dan budaya memiliki kaitan yang erat. Masyarakat Hindu di Bali berpandangan bahwa perwujudan nilai budaya Bali dijiwai oleh agama Hindu. Pandangan hidup tersebut merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dan diyakini kebenarannya sehingga masyarakat Bali membangkitkan tekad warganya untuk mewujudkannya. Selain itu, masyarakat Bali juga beranggapan bahwa suatu kehidupan bernilai tinggi jika didasarkan atas asas kebersamaan, asas kekeluargaan, dan asas berbakti. Ketiga asas ini berpangkal pada pandangan hidup bahwa

manusia tidak hidup sendiri di dunia, tetapi dikelilingi oleh komunitas, masyarakat, dan alam sekitarnya (Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, 1992/1993 : 9).

Asas kebersamaan mendorong manusia untuk berorientasi pada sesamanya dan mewujudkan persatuan dan kesatuan, sedangkan asas berbakti menumbuhkan loyalitas untuk mengabdi pada keyakinan agama yang dianutnya. Rasa bakti masyarakat Hindu di Bali ditujukan dalam bentuk *yadnya*, yaitu kurban suci secara tulus ikhlas yang dipersembahkan ke hadapan *Ida Hyang Widhi* beserta manifestasi-Nya, manusa, dan alam lingkungannya. Berbagai *yadnya* yang dilaksanakan dapat menggerakkan dan mewujudkan perbuatan nyata dalam masyarakat berupa tolong-menolong, gotong royong, *suka duka* dalam kehidupan bermasyarakat dan melaksanakan aktivitas agama.

Dalam upaya memahami kehidupan masyarakat Hindu di Kabupaten Tabanan, khususnya masyarakat Desa Pakraman Beraban tentu tidak bisa lepas dari sistem umat Hindu Bali secara umum. Berbagai rasa kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap lunturnya identitas serta jati diri sebagai umat Hindu yang santun, toleransi, ramah, jujur, dan lugu selalu menjadi wacana sosial. Namun, setelah mencoba masuk dalam kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban, segala bentuk yang menjadi kekhawatiran lunturnya identitas orang Bali hingga saat sekarang ini secara umum inti hakikatnya masih tetap terjaga. Masyarakat Desa Pakraman Beraban baik individu maupun kolektif, masih konsisten menjaga keutuhan falsafah *tri hita karana* yang diyakini sebagai tiga hal yang menimbulkan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam prosesnya sudah melalui suatu kemasan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pola hidup interaksi sosial kemasyarakatan sebagai salah satu bagian dari *tri hita karana* di Desa Pakraman Beraban perjalanannya masih membumi. Sikap kepekaan sosial yang terimplementasi dalam kehidupan toleransi, gotong royong, dan kasih sayang dijadikan sebagai prioritas utama. Hal tersebut sebagaimana penjelasan dari I Made Jedog dan I Nyoman Sutarya (wwancara 16 Mei 2015) sebagai berikut.

> "Sekalipun masyarakat Desa Pakraman Beraban merupakan bagian dari pariwisata Pura Tanah Lot serta masyarakatnya banyak terlibat dalam pengelolaan pariwisata, namun interaksi sosial kehidupan masyarakat tetap terjaga dalam suasana hidup gotong royong saling asah saling asuh. Masyarakat masih tetap menjalankan kewajiban, baik dalam kapasitas sebagai pribadi

maupun kewajiban organisasi. Kewajiban organisasi hakikatnya masih tetap seperti dahulu seperti melaksanakan kewajiban *ngayah* ketika ada salah satu warga melaksanakan upacara *yadnya*. Hanya saja tekniknya dilakukan perubahan karena kita juga melihat perkembangan zaman. Kita tidak ingin karena urusan kewajiban organisasi menjadikan warga masyarakat dihambat waktu dan kesempatannya untuk mencari nafkah. Kalau dahulu menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk *ngayah* dalam suatu kegiatan secara langsung *prajuru mepengarah* ke rumah masing-masing warga, tetapi sekarang cukup diinformasikan dengan menggunakan media telepon (Hp). Cara seperti ini tidak menjadi masalah di antara kami dan sudah merupakan kesepakatan. Di samping itu, juga kalau dahulu masyarakat terlalu lama mempergunakan waktu untuk melaksanakan kewajiban *ngayah,* tetapi sekarang paling lama menelan waktu tiga hari, bahkan sudah biasa *ngayah* dua kali kalau ada warga masyarakat melaksanakan upacara *yadnya.* Masyarakat Desa Pakraman Beraban sekarang sudah sangat menghargai waktu dan memang terikat pada waktu. Karena hampir seluruh masyarakat di tempatnya kerja sangat ketat dan susah minta izin cuti. Atas dasar itulah kami sepakat untuk merubah tata cara melakukan kewajiban desa bergotong royong mencari waktu pulang kerja dan komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan media telepon genggam serta pengeras suara. Walaupun demikian, esensi kerja sama yang diwasisi sejak dulu tidak hilang, justru kami lebih semangat bekerja sesuai dengan waktu pekerjaan bisa diselesaikan. Tanggung jawab terhadap pekerjaan semakin meningkat karena setiap orang sesuai dengan kelompoknya masing-masing mendapat tugas. Sebagai bukti kondisi masyarakat Desa Pakraman Beraban masih eksis dalam menjalankan hidup gotong royong dapat dilihat pada gambar 5.6.

Masyarakat Desa Pakraman Beraban Sedang
Gotong royong (*ngayah*) di rumah salah satu warga kematian
(Koleksi, Girinata, 2015)

Perkembangan pariwisata Pura Tanah Lot mampu menumbuhkan sikap empati terhadap sesama warga yang diwujudkan, baik secara individual maupun kolektif. Ketika ada salah seorang warga masyarakat terkena musibah sakit, terutama sakit gangguan jiwa, maka atas nama Desa Pakraman Beraban bertanggung jawab memberikan biaya pengobatan sejak berangkat terus menuju rumah sakit tempat dirawat. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh I Nyoman Suwarka berikut.

> "*Desa pakraman* di sini karena sudah mempunyai dana yang cukup, maka kalau ada salah satu warga menderita sakit gangguan jiwa atau gila ditanggung biayanya oleh desa mulai dari awal sampai akhir. Di sini kebetulan sudah ada menderita sakit seperti itu dua orang dan dirawat di Rumah Sakit Bangli, semua biayanya ditanggung desa (wawancara, 25 Mei 2015).

Bidang peningkatan sumber daya manusia, untuk mendukung kelangsungan kepariwisataan terutama komunikasi dengan para wisatawan, secara melembaga mewajibkan setiap warga untuk bisa berkomunikasi paling tidak memberikan petunjuk jika ada salah seorang wisatawan bertanya tentang sesuatu. Khusus generasi muda diberikan bantuan biaya pendidikan bahasa asing bagi yang berkeinginan mengikuti kursus bahasa dengan jadwal yang telah ditetapkan. Di pihak lain generasi muda yang berminat melanjutkan pendidikan di bidang kepariwisataan juga disediakan beasiswa yang dibantu oleh hotel (BNR) dengan perjanjian apabila telah tamat nanti, bersedia bekerja di hotel (BNR). Semua biaya upacara perpisahan pada setiap akhir tahun bagi anak-anak sekolah dasar di lingkungan Desa Pakraman Beraban dibantu oleh *desa pakraman*. Untuk tingkat sekolah dasar siswa yang berprestasi mendapat juara diberikan penghargaan dari *desa pakraman* (I Nyoman Siwitra, wawancara 25 Mei 2015).

Menurut I Made Subawa (wawancara, 25 Mei 2015), dengan kontribusi dari pariwisata Pura Tanah Lot, kami sebagai pengurus desa termotivasi dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal di sini, terutama bidang budaya seni. Dari biaya itu justru kami menggali kembali potensi budaya seni dari warisan leluhur yang sempat redup. Tiap-tiap banjar kami *suport* dengan dana agar membangkitkan kembali kelompok-kelompok seni yang ada mulai tingkat generasi muda sampai seni kalangan lanjut usia, terutama seni sakral. Di Desa Pakraman Beraban untuk kelompok *sekeha teruna* ada sebanyak lima belas kelompok, *sekeha santhi* sebanyak sepuluh kelompok, *sekeha gong* sebanyak empat belas kelompok, *sekeha* seni profan sebanyak tiga kelompok (*sekeha cak, barong bangkung*, dan *joged bumbung*), dan *sekeha* lainnya sebanyak tiga kelompok (*sekeha geguntangan, sekeha mancagra*, dan *sekeha* wayang). Jadi, jumlah total *sekeha* yang ada di Desa Pakraman Beraban sebanyak 45 kelompok.

Pitana (dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, 1994:3) menjelaskan bahwa perubahan merupakan suatu fenomena yang selalu mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan kebudayaannya. Setiap masyarakat selalu mengalami transformasi dalam fungsi waktu sehingga selalu terjadi perubahan dari masa ke masa. Di Desa Pakraman Beraban secara kasat mata identitas sebagai warga masyarakat Hindu Bali yang memiliki kepribadian *saling asah saling asuh, salunglung sabayantaka* dalam interaksi sosial

kemasyarakatan secara kolektif masih terlihat berjalan dengan baik disebabkan oleh terikat pada adanya aturan (*awig-awig*). Namun, di balik itu ternyata juga telah terjadi pergeseran budaya yang menunjukkan sikap individualistis, hanya ekspresi intensitasnya lebih kecil daripada intensitas kewajiban kolektif. Di tengah perkembangan hidup yang semakin mengglobal yang menekankan pada persaingan hidup dan status sosial sesungguhnya masyarakat di Desa Pakraman Beraban telah terjadi proses perjuangan yang individualistis dengan jargon *mati iba hidup kae,* tetapi masih pada tatanan perasaan keindividuan.

Sekarang tidak ada lagi pertolongan warga masyarakat dimaknai sebagai suatu sikap kepedulian atau empati kepada seseorang karena kondisi ekonominya di bawah rata-rata (miskin) sehingga orang yang datang menolong, terutama yang memiliki hubungan keluarga tidak terikat pada penerimaan upah atau imbalan. Karena orang mempunyai *gawe* merasa tidak mempunyai modal dana, maka mereka yang menolong pun datang secara spontanitas tanpa diminta, kecuali karena mereka mempunyai hubungan keluarga. Akan tetapi, sekarang sikap itu telah berubah yang harus didahului dengan komunikasi (perjanjian upah) dengan tanpa memandang keluarga atau saudara bahwa apabila dia bekerja kemudian dapat bayaran.

E. Implikasi Ideologis

Lull (dalam Atmadja, 2010: 73) menyatakan bahwa salah satu dimensi globalisasi adalah mengalirnya ideologi dari negara maju ke negara-negara sedang berkembang. Salah satu bentuk ideologi tersebut adalah kapitalisme, ideologi pasar, atau juga disebut dengan istilah agama pasar. Evers (1997: 80) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap kekuasaan pasar atas kehidupan manusia adalah akibat dari globalisasi yang sudah menjadi bagian dari budaya dunia (*world culture*). Globalisasi yang menyatukan Bali dengan negara-negara kapitalisme mengakibatkan agama pasar dengan cepat masuk ke sistem sosiobudaya masyarakat Bali. Lebih-lebh Bali sebagai pusat pariwisata dunia menimbulkan implikasi agama pasar memperoleh penguatan, sebab pariwisata sebagai *ethnoscape* berintikan pada kegiatan bisnis

Globalisasi melalui pariwisata tidak saja di Bali terjadi *ethnoscape*, yakni migrasi temporer yang dilakuan, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, tetapi diikuti pula dengan

finanscape masuknya uang (dolar, yen,euro, gulden, dan lainnya) sehingga pemberlakuan agama pasar pada masyarakat Bali menjadi semakin kokoh. Ruang jangkauan agama pasar semakin luas sampai ke desa. Karakteristik agama pasar menjadikan uang sebagai objek yang dipuja dengan memperlemah pemujaan pada Tuhan. Bali sebagai salah satu bagian dari negara Indonesia yang sedang berkembang sangat berpeluang sebagai tempat berkembangnya agama pasar dan sangat mudah mendapatkan pengikut di tengah perkembangan pariwisata yang sangat maju. Cahyono (2005:14) menjelaskan bahwa kehebatan agama pasar dalam mencari pengikut terletak pada kecerdikannya mengeksploitasi hasrat, nafsu, atau keinginan manusia. Dalam rangka menyalurkan hasrat atau keinginannya, agama pasar memiliki tempat suci, yakni pasar. Pasar menguasai manusia karena segala keinginan mereka bisa dipenuhi oleh pasar.

Pasar sebagai tempat suci agama pasar tidak saja berbentuk pasar tradisional, tetapi yang lebih penting adalah pasar modern yang lazim disebut dengan istana belanja, seperti *shopping mall, supermarket,* ataupun *hypermarket*. *Shopping mall* merupakan tempat suci paling penting bagi agama pasar karena menyediakan tempat yang menyenangkan dengan fasilitas ruangan nyaman, tetapi juga persediaan barangnya yang lengkap dan beragam. Artinya, pembeli bisa memilih barang yang hendak dibeli secara impersonal tanpa diganggu oleh orang lain. Berbelanja di *mall* dimaknai tidak hanya sekadar membeli dengan memilih barang sekehendak hati, tetapi juga sebagai tempat untuk jalan-jalan menghilangkan kejenuhan. Pemaknaan yang melekat pada kunjungan masyarakat ke *supermarket* atau *mall* memerlukan ikatan emosional dan kefanatikan yang bisa membuat orang keasyikan untuk mencari, memilih, dan mengejar suatu produk yang dipujanya.

Pesatnya perkembangan *shopping mall* atau *supermarket* tidak saja di kota-kota besar seperti Denpasar, tetapi juga di kota-kota kabupaten di Bali, seperti Kota Tabanan. *Supermarket* yang terkenal di Kota Tabanan adalah Hardy's, merupakan istana belanja yang sangat nyaman dan terbesar sehingga selalu ramai dikunjungi masyarakat. Hardy's menyediakan fasilitas yang sangat lengkap termasuk ruang bermain untuk anak-anak. Aspek lain yang tidak kalah menariknya, di desa-desa tak terkecuali di Desa Pakraman Beraban, muncul *minimarket* yang merupakan keturunan dari *supermarket* yang ada di kota. Barang-barang yang dijual tidak kalah beragamnya

dibandingkan dengan *supermarket* di kota. Model pelayanannya mencontoh *supermarket*, yakni bersifat impersonal. Kondisi seperti ini menandakan betapa kuatnya pengaruh agama pasar, baik di kota maupun di pedesaan. Akan tetapi, apa pun bentuk dan label tempat berbelanja, baik warung, pasar tradisional, toko, *minimarket*, *mall,* maupun *supermarket*, kepemilikan uang mutlak adanya karena pada ruang ini berlaku sistem ekonomi uang. Asalkan ada uang apa pun yang diinginkan bisa didapat secara mudah. Dengan kenyataan itu maka menjadi kaya merupakan harapan utama bagi manusia. Menurut Marguire (2004), manusia yang terjerat pada agama pasar akan mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem keyakinan mereka, yakni tidak lagi hanya berpegang pada *monoteisme,* tetapi bergeser ke arah *moneytheisme,* uang manjadi pujaan utama mereka dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, bahkan dapat pula dipakai sebagai alat memenuhi kebutuhan sosial, politik, budaya, dan psikologis. Kepemilikan atas uang dipandang dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam status sosial.

Kini pola seperti itu juga telah terjadi di Desa Pakraman Beraban sebagaimana penjelasan I Wayan Mandia ketika melaksanakan salah satu upacara, yaitu upacara perkawinan beberapa warga masyarakat semakin merasa bangga jika mampu mengadakan persta perkawinan secara meriah dengan mengundang banyak teman dan orang-orang berpangkat. Pemberian yang dilakukan oleh undangan terutama sebagai anggota masyarakat *desa pakraman* dahulu berbentuk benda (beras, jajan tradisional, gula, kopi, dan yang lainnya), tetapi sekarang digantikan dengan uang. Gejala seperti itu mencerminkan bahwa pengaruh agama pasar semakin mendalam terhadap masyarakat Desa Pakraman Beraban sehingga melakukan releksivitas terhadap tradisi, lalu menggantikannya dengan sesuatu yang lebih praktis (wawancara 19 Desember 2015).

Atmadja (2010: 92) menjelaskan bahwa mencermati kehidupan orang Bali maka ada dua nilai yang dikaburkan, yakni nilai guna dan nilai simbolik. Apa yang dikonsumsi oleh orang Bali sering kali tidak didasarkan atas kebutuhan, tetapi pada keinginan. Akibatnya, orang Bali tidak menjadi *user*, tetapi menjadi *consumer*. *Consumerisme* tidak semata-mata bertalian dengan anutan pada nilai simbolik, tetapi berkaitan pula dengan persoalan identitas. Pesatnya perkembangan pariwisata Tanah Lot telah mennjukkan tanda-tanda merasuknya virus budaya konsumerisme terhadap masyarakat Desa

Pakraman Beraban. Sebagaimana gagasan Clammer (2005:84) bahwa konsumsi bukanlah semata-mata urusan belanja atau pengambilalihan benda-benda untuk menjadi milik sendiri atas dasar nilai guna, melainkan juga merupakan pembelian identitas. Oleh karena itu, tren masyarakat Desa Pakraman Beraban mengonsumsi benda-benda untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidupnya, namun juga dari benda-benda yang dibelinya sarat dengan tujuan agar mereka mendapat pengakuan dalam interaksi sosial dengan masyarakat lingkungan. Hal itu menunjukkan bahwa konsumsi menjadi sarana bagi seseorang untuk memahami dan berkomunikasi secara simbolik antara orang yang satu dan orang yang lain.

Muthahari (dalam Atmaja, 2010:92) menjelaskan bahwa keterperangkapan manusia ke dalam budaya konsumen tidak dapat dilepaskan dari kepiawaian agama pasar dalam memanfaatkan sifat manusia, yakni" selalu ingin mencapai kesempurnaan, kecukupan, dan keanekaragaman". Sikap dasar kerap kali dikaitkan dengan kepemilikan benda yang banyak dan beragam, seperti memiliki lebih dari satu mobil dengan merek yang berbeda. Benda yang dimiliki harus diperbarui karena manusia memiliki kelemahan, yakni takut terhadap ketuaan. Sebaliknya, selalu menginginkan sesuatu yang baru. Kondisi seperti ini mengakibatkan pola hidup masyarakat Desa Pakraman Beraban berubah secara mendasar dengan kecenderungan kepemilikan terhadap benda-benda komplementer menjadi ajang kompetitif.

Permainan budaya konsumerisme semakin kompetitif tampak di kalangan kaum berduit dengan berusaha mengoleksi benda-benda original dan bermerek inport. Akan tetapi masyarakat kelas bawah pun tak mau dipandang sebagai orang yang ketinggalan zaman, dengan dibukanya peluang oleh pelaku ekonomi kalangan elite disediakan barang-barang imitasi dengan harga terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Atas dasar itu kepercayaan diri kalangan masyarakat bawah ikut sibuk menonsumsi produksi imitasi (asli palsu), yang wajah, model, bahkan ada merek yang sama, tetapi berbeda kualitas. Budaya konsumerisme semakin berkembang juga sebagai akibat dari permainan media masa iklan, terutama TV. Masyarakat tidak saja memanfaatkan TV sebagai media untuk mendapatkan informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai agen penyebar konsumerisme atau komersialisasi yang mendorong manusia sebagai konsumer yang patuh, terutama pada penampilan kemasan iklan yang menarik.

Fenomena seperti itu menunjukkan suatu keberhasilan permainan kaum kapitalis dalam menggoyang ideologi masyarakat Desa Pakraman Beraban melalui hegemoni ekonomi secara halus masuk pada tataran psikologis.

Ideologi yang diwarisi secara menstradisi oleh masyarakat Hindu tentang keyakinan filosofis Pura Tanah Lot sebagai bagian dari *pura sad kahyangan* Batukaru yang dimaknai sebagai tempat pendakian spiritual dikonotasikan sebagai "*sunya* (Pura Batukaru), *ramya* (pusat kota raja) *dan sunya* (Pura Tanah Lot dan Pura Srijong)". *Sunya* (sepi) juga dalam falsafah Hindu dimaknai sebagai tempat stana Ida Sang Hyang Widhi berserta manifestasi beliau. Dengan kata lain, orang yang pergi sembahyang ke Pura Batukaru, Pura Tanah Lot, dan Pura Srijong dapat diartikan sama dengan mencari *sunya* (sepi) atau pergi ke tempat stana *Ida Sang Hyang Widhi Wasa.* Ketika Tabanan belum menjadi daerah tujuan wisata, Pura Batukaru, Pura Tanah Lot, dan Pura Srijong kondisinya memang benar-benar *sunya* (sepi) dikunjungi orang. Masyarakat datang melakukan sembahyang sifatnya insidental yaitu ketika ada upacara *odalan* dan untuk tujuan tertentu, yang juga disebabkan karena keterbatasan fasilitas. Tetapi kemudian, pada periode tahun 1970-an sampai sekarang ketika beberapa daerah Tabanan dipersifikasi menjadi destinasi pariwisata, tempat *sunya* (Pura Batukaru dan Pura Tanah Lot) mengalami perubahan sangat drastis menjadi *ramya* (ramai). Di samping untuk tujuan berwisata, setiap hari pasti ada saja umat Hindu yang datang bersembahyang khususnya ke Pura Tanah Lot. Bahkan, dalam komunikasi sosial tampak adanya pergeseran komunikasi. Jika sebelumnya masyarakat menggunakan istilah mengajak keluarga atau temannya ke Tanah Lot untuk bersembahyang, namun sekarang, sering terdengar komunikasi itu menjadi *melali* ke Tanah Lot sambil sembahyang.

BAB VI

PENUTUP

Penelitian komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot dan implikasinya terhadap masyarakat Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pada bagian simpulan disimpulkan hasil penelitian yang telah dibahas, dan temuan. Pada bagian saran diuraikan hal-hal yang dapat dianjurkan dan direkomendasikan sebagai bahan masukan, baik untuk kepentingan akademik maupun kepentingan praktis. Berdasarkan analisis yang dibuat pada bab-bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama; Alasan terjadinya komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot disebabkan oleh adanya sejumlah faktor. *Pertama*, perkembangan Bali sebagai daerah tujuan wisata ke seluruh daerah. Salah satu di antaranya adalah Pura Tanah Lot di Kabupaten Tabanan. *Kedua*, kemagisan dan keindahan alam pantai Pura Tanah Lot. *Ketiga,* Pemerintah Kabupaten Tabanan membutuhkan dana finansial untuk pendapatan asli daerah. *Keempat,* Desa Pakraman Beraban juga berharap mendapatkan dana dari pemasukan DTW Tanah Lot untuk mendukung progam pembangunan desa. *Kelima*, kuren juga berharap dengan tujuan mempunyai kesempatan ikut meraih rezeki. *Keenam*, semakin pesatnya perkembangan pariwisata Tanah Lot maka terjadi reinterpretasi terhadap makna kesucian kawasan suci Pura Tanah Lot sesuai dengan kearifan lokal. *Ketujuh,* pemertahanan kesucian kawasan dilakukan secara preventif (dibuatkan peraturan) dan kuratif (solusi yang terbaik). *Kedelapan*, Hal-hal yang dipandang mencemari kawasan suci Pura Tanah Lot, dipulihkan dengan ritual.

Kedua; Komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot terjadi secara berproses. Semula para pengunjung tidak dikenai biaya. Selanjutnya setelah mulai dirintis oleh Pemda Tabanan para pengunjung hanya dikenai donasi. Semakin ramainya kunjungan wisatawan yang datang akhirnya dikenai karcis. Pada perkembangan selanjutnya dibentuk badan pengelola melalui kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan pihak pengusaha swasta CV Ari Jasa Wisata. Melalui kerja sama itu terbentuk pengelolaan segi tiga, yaitu

antara CV Ari Jasa Wisata, Desa Pakraman Beraban, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Setelah itu hingga sekarang pengelolaan DTW Tanah Lot dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan selaku pihak I dan Desa Pakraman Beraban selaku pihak II. Operasionalnya dikendalikan oleh Badan Pengelola yang dibentuk kedua belah pihak dengan struktur kepengurusan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.

Areal kawasan suci Pura Tanah Lot kemudian direproduksi ditata agar kelihatan indah untuk memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan. Pengembangan pariwisata Tanah Lot akhirnya memunculkan praktik-praktik ekonomi. Artinya, kemudian terjadi pembebasan tanah dan pembangunan yang tak terkontrol sehingga memicu munculnya konflik kepentingan. Konflik sebagai wujud protes keras dari masyarakat umat Hindu terjadi pada saat dimulainya pendirian hotel besar BNR yang dibangun di dalam zona kesucian. Pembangunan hotel itu dinilai menodai kawasan suci Pura Tanah Lot. Pembangunan BNR dalam membebaskan lahan dibantu oleh pihak elite integratif yang secara struktural melibatkan kekuatan ABRI. Mereka menghegemoni para pemilik lahan dengan berbagai macam wacana, terutama melalui isu politik. Masyarakat pemilik lahan merasa diperlakukan tidak adil karena tanahnya dibuldoser tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di samping itu juga dibayar dengan sangat murah. Masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan. Akhirnya, dengan pasrah membiarkan tanahnya dijadikan lokasi pembangunan BNR. Karena merasa tidak mempunyai kekuatan untuk menolak, lebih baik mencari selamat dengan cara diam. Namun dalam hatinya tetap menolak.

Ketiga, Implikasi komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot untuk pelayanan pariwisata terhadap masyarakat Desa Pakraman Beraban tampak pada religius magis, yaitu pariwisata DTW Tanah Lot telah memberikan kekuatan yang merangsang ideologi masyarakat Desa Pakraman Beraban melakukan praktik-praktik budaya di tempat terbuka, seperti prosesi *ritual melasti, tawur kesanga, pengerupukan,* atau *nangluk merana* dilaksanakan dengan ditata secara estetis sehingga sekaligus menjadi tontonan wisata yang menarik. Demikian pula praktik budaya yang berkaitan dengan mata pencaharian dan interaksi sosial sehari-hari sangat kuat memperhitungkan nilai ekonomis pariwisata. Artinya, warga masyarakat mulai melakukan

langkah-langkah inovatif terhadap modal budaya dan agama yang berkaitan dengan mata pencaharian untuk merebut peluang ekonomi di sektor pariwisata.

Implikasi ekologis, yaitu komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot dengan syarat konseptual pembangunan berkelanjutan bidang ekologis tidak dipenuhi karena banyak mengurangi lahan produktif pertanian. Akibat dari alih fungsi lahan tidak selamanya memberikan kontribusi positif karena mendapat uang yang banyak bagi warga yang menjual tanah, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap tatanan pola kekerabatan antara anak, saudara, dan orang tua.

Implikasi ekonomi, yaitu komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidup warga masyarakat, baik individu maupun struktural dalam komunitas *desa pakraman*. Hasil dari pengelolaan DTW Tanah Lot setelah dikurangi biaya operasional manajemen dan 15 % biaya pengembangan dan promosi, didistribusikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan sebanyak 60% (sebagai pihak pertama), 24% untuk Desa Pakraman Beraban yang didistribusikan kepada lima belas *banjar adat*. Pura Tanah Lot mendapatkan 7,5%, kesepuluh pura yang ada di kawasan suci Pura Tanah Lot mendapatkan 4%, dan desa pakraman se-Kecamatan Kediri mendapatkan 4,5%.

Implikasi sosial budaya, yaitu kini waktu luang masyarakat Desa Pakraman Beraban untuk bercengkerama bersama sesama warga *desa pakraman* mulai berkurang. Sistem kekerabatan mengalami pergeseran yang selalu diukur dengan waktu dan uang. Kaum perempuan juga memiliki kesibukan baru menjajakan minuman buah kelapa muda, *jaje klepon*, suvenir, membuka kios, menawarkan fasilitas transportasi, dan sebagainya kepada wisatwan.

Implikasi ideologis, yaitu masyarakat umat Hindu Desa Pakraman Beraban tetap menjunjung falsafah *tri hita karana* sebagai kanopi dalam mewujudkan keharmonisan. Seiring dengan lajunya perkembangan globalisasi sebagai daerah tujuan wisata Pura Tanah Lot terkenal di mancanegara, masyarakat Desa Pakraman Beraban juga terperangkap ke dalam budaya konsumerisme melalui tanda-tanda selalu ingin mencapai kesempurnaan, kecukupan, dan keanekaragaman". Uang merupakan tujuan yang paling utama dalam memperjuangkan hidupnya. Dengan uang kemudian dibeli benda-benda yang tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga memiliki

nilai simbolik. Dengan barang-barang yang dibelinya diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam status sosial.

Ada beberapa fakta yang ditemukan ketika melihat Kawasan Suci Pura Tanah Lot saat ini. *Pertama,* ideologi *tri hita karana* yang sudah mapan pada masyarakat mengalami penetrasi tekanan ideologi global yaitu ideologi pasar. Hasil penelitian menunjukkan ideologi global berhasil mengalahkan ideologi *tri hita karana*, dapat dibuktikan dari adanya komodifikasi yang tidak saja menyebabkan komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot, tetapi juga komodikasi di areal persawahan di sekitarnya. Temuan ini memperkuat gagasan-gagasan teoretik yang dikembangkan kalangan orang-orang yang mengkaji tentang ideologi global sebagaimana dinyatakan oleh Atmadja (2010: 73) yang menyatakan bahwa keperkasaan ideologi global mampu menekan atau mengalahkan ideologi-ideologi lokal termasuk *tri hita karana*.

Kedua, kalau dahulu Pura Tanah Lot dipakai sebagai tempat menyepi untuk melaksanakan persembahyangan, tetapi sekarang berbeda bahwa Pura Tanah Lot justru dipakai mencari keramaian untuk melakukan berbagai aktivitas. Temuan ini menunjukkan bahwa di Tanah Lot sekarang sulit memisahkan antara yang sakral dengan yang profan. Tidak jauh berbeda dengan gagasan-gagasan tentang globalisasi bahwa jika ideologi pasar sudah kuat, maka pada akhirnya apapun bisa dijual. Kalau sudah dijual maka urusan yang menyangkut sakral maupun profan menjadi sulit dibedakan. Dahulu orang ke Pura Tanah Lot sudah dipastikan untuk melakukan sembahyang, namun sekarang sulit dibedakan antara orang sembahyang dengan rekreasi. Bahkan, dalam komunikasi sosial tampak adanya pergeseran istilah. Jika sebelumnya masyarakat menggunakan istilah mengajak keluarga atau temannya ke Tanah Lot untuk bersembahyang namun sekarang, sering terdengar komunikasi menjadi *melali* ke Tanah Lot sambil sembahyang. Jadi, ideologi pasar berkaitan dengan pergeseran terhadap nilai guna menjadi nilai simbolik.

Ketiga, kalau dahulu kawasan suci Pura Tanah Lot sebagai pusat spiritualitas, tetapi sekarang sudah menjadi pusat kegiatan bisnis. Dahulu orang ke Pura Tanah Lot langsung merasakan memasuki suasana wilayah spiritual, tetapi sekarang orang yang ke Pura Tanah Lot terlebih dahulu masuk atau ketemu dengan suasana pasar, setelah itu baru ke wilayah tempat suci. Temuan ini menandakan, semakin lama antara bisnis dengan spiritual menjadi

bercampur baur dan tidak ada lagi pemisahan yang jelas antara bisnis dengan non bisnis, terlebih lagi sekarang orang yang datang ke Pura Tanah Lot bukan hanya orang Hindu melainkan banyak yang datang dari berbagai macam daerah dan berbagai macam agama. Sekarang Pura Tanah Lot dengan kawasan suci yang ada di sekitarnya adalah menjadi ruang pembauran, ruang tempat kontestasi mengenai segala hal yang bercampur aduk seperti antara pasar dengan ritual, pembauran antara pengunjung dari berbagai daerah, pembauran antara orang sembahyang dengan rekreasi. Semua itu yang menyatukan mereka adalah kepentingan ekonomi.

Keempat, komodifikasi menjadi melemahkan ikatan petani dengan tanah. Terjadi pertaruhan superstruktur ideologi yang berlandaskan pada nilai, norma, agama, kepercayaan, dan mitos. Citra yang menggambarkan lingkungan alam biofisik (fisikal dan biologik) yaitu bersifat *sekala* adalah sebagai tempat aktivitas manusia dan juga bersifat *niskala* adalah tanah juga dihuni oleh makhluk gaib (supernatural). Kalau dahulu petani dengan tanah menunjukkan adanya ikatan emosi religius magis, sehingga tanah tidak boleh dijual karena jika dijual bisa menyebabkan *kapongor* atau mendapatkan peringatan secara *niskala* dari leluhur. Tetapi sekarang hubungan petani dengan tanah menjadi ikatan ekonomis. Kemudian untuk memutuskan ikatan ekonomis lalu memakai rasionalisasi sebagai salah satu ciri manusia modern. Ciri-ciri manusia modern adalah menjunjung pemikiran rasional. Akhirnya dengan alasan karena generasi muda tidak mau bekerja menggarap sawah maka lebih baik dijual dan uangnya disimpan di bank, atau karena nilai hasil produksi petani tidak seimbang dengan biaya yang dihabiskan. Pekerjaan petani sekarang tidak lagi dipandang menguntungkan, sehingga pertanian adalah masa lalu sedangkan pariwisata adalah masa depan.

Kelima, otoritas *desa adat* (*desa pakraman*) sangat kuat, terbukti *bhisama* yang menyatakan kawasan suci Pura Tanah Lot dengan radius 2 km keliling terbebas dari bangunan kecuali untuk pura, dan Perda nomor 16 Tahun 2009 tentang wilayah yang masuk dalam kawasan radius kesucian Pura juga menetapkan dua kilometer untuk puluhan Pura berstatus *pura dang kahyangan*. Dalam radius tersebut tidak diperbolehkan membangun apapun termasuk fasilitas hiburan dan pariwisata. Kenyataannya bisa diterobos oleh *awig-awig* Desa Pakraman Beraban sehingga *bhisama* sepertinya tidak berguna. Benar seperti apa yang dikatakan Covarrubias (dalam Atmadja,

2015:5) bahwa *desa pakraman* yang ada di Bali adalah sebuah republik kecil. Bisa disahkan secara magis, memiliki penduduk sebagai warganya, memiliki sistem pemerintahan berbentuk dewan desa atau *krama desa*, dan memiliki hak untuk membuat tata aturan sendiri dan sekaligus menerapkan dan mengenakan sangsi bagi pelanggarnya. Dengan demikian *desa pakraman* memiliki otonomi luar biasa. Siapapun tidak boleh mengganggu apalagi dengan adanya adagium "*desa, kala, dan patra*", dengan konsekuwensi siapapun yang dari luar wilayah tidak bisa melakukan penekanan. Hal itu terjadi di kawasan suci Pura Tanah Lot bahwa, *bhisama* menyatakan tidak boleh membangun di areal kawasan suci tetapi Desa Pakraman Beraban menyatakan boleh. Karena Desa Pakraman Beraban mempunyai hak otonomi sehingga punya hak untuk mengatur dan mengelola sendiri sesuai dengan ideologi *tri hita karana.* Hal itu memungkinkan munculnya hegemoni masyarakat kecil. Terbukti di Desa Pakraman Beraban di tengah beroperasinya BNR akhirnya terikat dengan berbagai aturan *awig-awig desa pakraman*. Salah satunya setiap BNR merekrut karyawan terlebih dahulu menyampaikan kepada desa melalui Perbekel dan *Bendesa Pakraman* untuk dicarikan karyawan dari penduduk asli setempat. Jika tidak ada yang memenuhi syarat, baru akhirnya dicarikan ke luar dari Desa Pakraman Beraban.

Sebelum pengembangan dan terjadinya komodifikasi terhadap kawasan suci Pura Tanah Lot, kehidupan mayoritas masyarakat Desa Pakraman Beraban bertumpu pada hasil pertanian mengolah sawah. Masyarakat Desa Pakraman Beraban bahkan hampir semua masyarakat petani di Kabupaten Tabanan melakukan pola cocok tanam dengan menanam padi. Tanaman kebun berupa sayur seperti kacang, *klongkang, gondo* dan sebagainya adalah merupakan tanaman sela yang sengaja membiarkan sedikit lahan untuk menanam. Semua itu dikerjakan secara tradisional tanpa bantuan alat teknologi dan bahan kimiawi. Sehingga keberhasilan dari pertaniannya mutlak dipercayakan kepada anugerah *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Jika terjadi musibah yang mengancam keberlangsungan tanaman dimaknai sebagai *merana* (kemurkaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) atas kelalaian para petani berbakti kepada Tuhan. Maka dari itu alternatif penanganannya dilakukan dengan melaksanakan persembahan berupa upacara (ritual) *nangluk merana*. Tanah sawah bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban dipandang memiliki arti sangat utama dan religius.

Sehingga saat itu sawah tidak dapat diukur dengan nilai uang, namun sawah adalah harta yang dapat menentukan seseorang dalam status sosial.

Dengan adanya perkembangan pariwisata, maka lahan sawah di Desa Pakraman Beraban terutama yang berada di sekitar kawasan suci Pura Tanah Lot sangat diminati pasar. Harga tanah kian lama kian meningkat sejalan dengan perkembangan pariwisata. Lahan-lahan berupa tebing yang dulu dipandang tidak produktif sekarang justru menjadi incaran pasar. Sawah yang berada pada posisi lepas pantai yang dipandang tidak produktif menghasilkan panen, kini justru memiliki nilai jual yang sangat tinggi dimanfaatkan pasar untuk pembangunan pasilitas pariwisata.

Namun demikian ketika mulai didirikannya hotel besar Bali Nirwana Resort (BNR), sejak itu pula terjadi protes melalui demonstrasi dari sebagian besar umat Hindu Bali yang dikomandoi kalangan intelektual dan tokoh agama, menuntut agar ketentuan pemeliharaan kawasan suci sesuai *Bhisama* yang berjarak dua kilo meter dari Pura Tanah Lot harus ditepati dan bebas dari pembangunan. Sedangkan masyarakat Desa Pakraman Beraban sendiri memiliki pedoman kawasan suci yang diwarisi secara menstradisi yang disebut *karang kekeran/ alas kekeran*. Luas *karang kekeran* berjarak sekitar satu kilo meter dari Pura Tanah Lot, sehingga ketika terjadi protes terhadap BNR, hampir tidak ada warga masyarakat Desa Pakraman Beraban yang ikut terlibat dalam aksi protes. Namun bukan berarti masyarakat tidak ada yang protes terhadap BNR, hanya saja sikap protesnya bukan menolak pendirian BNR yang dipandang berada pada kawasan suci, melainkan mereka protes karena merasa tidak mendapat keadilan atas nilai tukar tanah mereka yang dibayar sangat murah di bawah standar. Oleh karena mereka tidak berdaya atas kekuatan hegemoni pihak elit secara struktural, akhirnya mereka memilih lebih baik diam sebab kalau melawan secara psikologis akan berdampak buruk bagi dirinya.

Dengan terbitnya Perda sampai keluarnya *bhisama* yang mengatur tentang kawasan suci, akhirnya terdapat dua versi tentang tatacara mejaga kawasan suci Pura Tanah Lot. Versi *bhisama* menunjukkan bahwa sejauh kawasan yang sesuai dengan ketentuan *bhisama* harus bebas dari bentuk pembangunan. Sedangkan kawasan suci menurut tradisi masyarakat Desa Pakraman Beraban, dimungkinkan adanya pembangunan, sepanjang bangunan itu

peruntukannya jelas menurut kajian awig-awig tidak menodai kesucian Pura Tanah Lot.

Seiring dengan lajunya perkembangan pariwisata, tampaknya pasar sangat membutuhkan lahan untuk pengembangan pariwisata. Disebabkan karena lahan ataupun ruang kawasan suci Pura Tanah Lot dapat dikomodifikasikan menjadi sangat bernilai. Bahkan tidak menutup kemungkinan bukan hanya pasar untuk kepentingan pariwisata saja yang membutuhkan lahan, tetapi juga pasar properti semakin gencar mencari lahan untuk pemukiman. Hal ini dipandang dapat mensejahterakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung baik secara individu maupun kolektif sebagai masyarakat *desa pakraman* melalui diversifikasi usaha, mata pencaharian, dan peluang kesempatan kerja. Sehingga dimungkinkan akan selalu terjadi komodifikasi ruang kawasan suci Pura Tanah Lot.

Ke depan, akan sangat mungkin terjadi pengalihan lahan produktif lebih meluas merembet ke daerah tetangga Desa Pakraman Beraban, sehingga mengancam kebertahanan identitas daerah Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras. Untuk itu pemerintah mesti hati-hati dan konsekuwen dalam menerapkan aturan tentang batas-batas lahan yang ditetapkan setatusnya agar bebas dari pembangunan, jangan sampai aturan tentang tata ruang pembangunan hanya sebagai macan kertas hanya karena pemegang kuasa sendiri yang merasa berkepentingan dalam hal itu.

Atas dasar pemaparan di atas, maka ada beberapa hal perlu diupayakan kedepannya, sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pakraman Beraban khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tabanan hendaknya tetap dapat menjaga keberlangsungan pariwisata, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai luhur budaya dan religiusitas keagamaan.
2. Kepada desa adat yang lain di Bali agar tetap menjaga identitas budaya yang dipakai sebagai modal dasar dalam perkembangan pariwisata dengan tanpa menghilangkan aspek kebudayaan yang bersifat produktif, sehingga terjamin tetap terjaganya identitas budaya lokal.
3. Para pelaku industri pariwisata diharapkan meningkatkan kontribusinya kepada *desa pakraman* di Bali sebagai wujud implementasi perkembangan pariwisata budaya berbasis

masyarakat. Pelaku pariwisata tidak memarginalkan budaya dan masyarakat lokal sehingga tercipta hubungan timbal balik yang selaras antara pariwisata dan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. 1986. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Anonim. 2006. *Kumpulan Peraturan di Bidang Kepariwisataan*. Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Anonim, 1999. *Ketetapan MPR RI dan GBHN 1999--2004*. Jakarta: CV Tamita Utama.

Anonim, 1999. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu*, I-IV. Denpasar: Pemda Tingkat I Bali.

Anonim, 2002. "Bali The Best Island In The World". Majalah News Letter, Oktober-Nopember. Denpasar: BPD PHRI Bali. II: 4.

Anonim, 2003. *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3, Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3, Tahun 2001 tentang Desa Pakraman*. Denpasar: Biro Hukum Dan HAM Setda Provinsi Bali.

Adhika, I Made. 2012. "Komodifikasi Kawasan Suci Pura Uluwatu". Denpasar, Udayana University Press.

Ardika, I Wayan. 2003. "*Komponen Budaya Bali sebagai Daya Tarik Pariwisata*. " I Wayan Ardika (penyunting). *Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global.* Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana.

Ardika, I Wayan, 2006. "*Prinsip Multikultural dan Implementasinya*". Makalah Kuliah Anfulen Program S3 Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.

Ardika, I Wayan, 2007. "*Strategi Pengembangan SDM Pariwisata dalam Era Kompetisi"* Naskah lengkap makalah seminar nasional Universitas Udayana, Denpasar 16 Juni.

Ardika, I Wayan, 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pusaa Sari.

Ardika, I Wayan, 2008. Pariwisata dan Komodifikasi Kebudayaan Bali. *Dalam Pusaka Budaya dan Nilai-Nilai Religiusitas*. Denpasar: Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Ardika, I Gede. 2001. "Pembangunan Pariwisata Bali Berkelanjutan yang Berbasis Kerakyatan", Naskah Lengkap Seminar Nasional Bali, *The Last or The Lost Paradise*, Denpasar, 1 Desember.

Arwati, Ni Made Sri, 1995, *Upacara Upakara*, Denpasar: Upada Sastra.

Atmadja, Bawa I Nengah, 2007. "*Penerapan Teori Kritis dan Postmodern dalam Kajian Budaya"* naskah lengkap seminar Penyempurnaan Kurikulum Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana, Denpasar, 2 Mei.

Atmadja, Bawa I Nengah, 2009. "*Masimakrama* sebagai Kekerasan Simbolik dan Ekonomi pada Pesta Demokrasi di Bli" Makalah International Symposium on Cultural Studies. Program Magister dan Doktor Kajian Budaya Unud, 28--29 Agustus.

Atmadja, Bawa I Nengah, 2010. *Komodifikasi Tubuh Perempuan Joged "Ngebor" Bali.* Denpasar: Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.

Atmadja, Bawa I Nengah, 2010. *Ajeg Bali Gerakan, Identitas Kultural*, dan Globalisasi. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.

Atmadja, Bawa I Nengah, Ananta Wikrama Tungga Atmadja, Luh Putu Sri Ariyani, 2015. *Tajen di Bali* (perspektif Homo Complexus, Denpasar: Pustaka Larasan.

Bagus, I Gusti Ngurah (editor). 1975. *Bali dalam Sentuhan Pariwisata*. Denpasar: universitas Udayana.

Barker, Chris. 2002. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publication.

Carthy, Mc Thomas, 2009. *Teori Kritis Jurgen Hebermas*. Bantul: Kreasi Wacana.

Capra, Fritjof. 2004. *Titik Balik Peradaban* (Terjemahan Thoyibi). Yogyakarta: Bentang.

Chaney, David. 2009. *Lifestyles*: *Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.

Dharmayuda, I Made Suasthawa. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat adat Di Provinsi Bali*. Denpasar: Upada Sastra.

Dherana, Tjokorda Raka. 1982. *Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisataan di Bali.* Denpasar: UP Visva Vira.

Duija, I Nengah. 2007. *Ideologi dan Politik Kebudayaan di Era Global*. Denpasar: Sari Kahyangan.

Dwyer, Larry and Peter Forsyth. 1996. "Valuing Hertage Conservation: An Economic Perspective". Makalah dalam The International Conference on Tourism and Heritage Management" Toward a Sustainable Future: Balancing Concervation and Development, Yogyakarta, Indonesia.

Egger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Eiseman, Jr, Fred B. 1990. *Bali Sekala Dan Niskala*. Periplus Editions. California: Barkeley.

Fakih, Mansour. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar.

Fashri, Fausi. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol. Apropriasi Reflektif Pemikiran Piere Bourdieu.* Yogyakarta. Juxtapose.

Featherstone, Mike. 2001. *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geriya, I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Surabaya: Paramita.

Geriya, I Wayan. 2008. "*Fenomena Ekslusivisme Soroh: Refleksi Involusi Sosial Masyarakat Bali" dalam Dinamika Sosial Masyarakat Bali dalam Lintasan Sejarah*. Denpasar: Fakultas Sastra Unud.

Geriya, I Wayan. 2006. "Implementasi Konsep Pariwisata Budaya untuk Bali dalam Teropong Harmoni dan Paradoks" naskah lengkap makalah dialog pariwisata Bali di Universitas Udayana, 10 Oktober.

Gidden, Anthony. 2001. *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta: Gramedia.

Ibrahim, Idi Subandi. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.

Kasiyam. 2008. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*. Yagyakarta: Ombak.

Kebayantini, Ni Luh Nyoman. 2010. "Komodifikasi Upacara *Ngaben* "Gotong Royong di Gerya Tamansari Lingga, Kelurahan Banyuasri, Kabupaten Buleleng". Disertasi Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Kirk, Jand M.L. Miller. 1986. *Reability and Validity In Qualitative Research*. Beverly Hills: SAGE Publication.

Koentjaraningrat. 2000. *Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.

Koesters, Paul Heinz. 1987. *Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia. Pemikiran-Pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita*. Terjemahan Titi Soentoro Effendi. Jakarta: Gramedia.

Lawang, Robert M.Z. 1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Karunia dan Universitas Terbuka.

Lee, Martyn J. 2006. *Budaya Konsumen Terlahir Kembali*. Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Liliweri, Alo. 2009. *Prasangka & Komflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural.* Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang.

Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Masih Adakah Tempat Berpijak bagi Ilmuwan*. Bogor: Akademia.

Lubis, Nur A.Fadhil. 2006. "Agama sebagai Poros Perubahan". Teuku Kemal Fasya (editor) *Kata dan Luka Kebudayaan*. Medan: USU Press.

MacRae, Graeme S. 1999. "Economy, Ritual And History In A Balinese Tourist Town" (Disertasi) Auckland: University of Aukland in Partial Fulfillement of The Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy.

Mangunwijaya. Y.B.1982. *Sastra dan Religious*. Jakarta: Sinar Harapan.

Maunati, Yekti, 2006. *Identitas Dayak, Komoditi dan Politik Kebudayaan*. Yogjakarta: LkiS

Mudana, I Gede. 2000. "Industrialisasi Pariwisata Budaya di Bali: Studi Kasus Biro Perjalanan Wisata di Kelurahan Kuta". (Tesis) Denpasar: Universitas Udayana.

Muljadi, A.J. 2010. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurjaya, Gede. 2005. "Peranan Pariwisata dalam Penguatan Budaya Bali". *Makalah* Bidang Agama, Adat dan Budaya. Denpasar.

Pals, Daniel L. 2001. *Seven Theories of Religion, dari Animisme EB Taylor, Materialisme Kart Marx, hingga Antropologi Budaya C Geertz.* (Alih Zaman). Yogyakarta: Qalam.

Parimartha, I Gede. 2004. "Desa Adat, Desa Dinas, dan *Desa Pakraman* di Bali: Tinjauan Historis Kritis". Dalam I Wayan Ardika dan Dharma Putra (Editor) *Politik Kebudayaan dan*

Identitas Etnik. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Bali Mngsi Press, hal. 13--43.

Patria, Nezar & Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci*, *Negara & Hegemoni*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Pendit, Nyoman S. 1996. *Hindu Dharma Abad XXI Menatap Masa Depan Peradaban Umat Manusia*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.

Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Terjemahan Jean Couteau dan Warih Wisatsana, Jakarta: Gramedia.

Piliang, Yasraf Amir. 1999. *Hiper-Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.

Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna,* Yogjakarta: Jalasutra.

Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.

Pitana, I Gede. 1994. *Mosaik Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: BP.

Pitana, I Gede. 1998. "Tourisfikasi, Internasionalisasi, dan Indegenisasi: Pembangunan Bali Menyongsong Milenium Ketiga dan Era Reformasi Total". Naskah Lengkap Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-36 Universitas Udayana. Denpasar 29 September.

Pitana, I Gede. 2006. *Industri Budaya dalam Pariwisata: Reproduksi, presentasi, Konsumsi dan Konsentrasi, dalam Bali Bangkit Bali Kembali*. Denpasar: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Universitas Udayana.

Pitana, I Gede. 2008. *Kepariwisataan Bali dalam Jejaring Nasional. Dalam Kebudayaan dan Modal Budaya Bali dalam Teropong Lokal, Nasional, Global* (Yudha Triguna, Editor). Denpasar: Widya Dharma.

Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Jalasutra.

Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: PT Gramedia.

Prameswari, Ariningtyas, Y. 2005. "Faktor-Faktor Pendorong dan Penarik Wisatawan Memilih Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata", (Tesis). Denpasar: Universitas Udayana.

Pujaastawa, I B.G. 1994. "Protes Masyarakat terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Pembangunan Proyek Bali Nirwana Resort, Tanah Lot, Bali", Makalah Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.

Purwita, Ida Bagus Putu, 1984, *Desa Adat dan Banjar-Banjar di Bali*, Denpasar: Kawi Sastra.

Putra, I Nyoman Dharma. 1998. "Space and Person in Recent Balinese Poetry". RIMA, Volume I, Number 1, June. Queensland The Asian Experts, Australia, hal. 179-214.

Rumadi. 2006." *Agama sebagai Spirit Perubahan"*. Teuku Kemal Fasya (Editor) *Kata & Luka Kebudayaan*. Medan: USU Press.

Segara, Yoga. 2000. *Mengenal Barong dan Rangda*. Surabaya: Paramita.

Sirtha, I Nyoman. 2001. "Pariwisata dalam Kaitannya dengan Sosiokultural Masyarakat Bali." Naskah Lengkap Matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata Unud, Tahun 2001/2002. Denpasar: 11 Agustus.

Sirtha, I Nyoman. 2001. "Bentuk-Bentuk Pola Kemitraan Desa Adat dan Industri Pariwisata di Kawasan Wisata Nusa Dua". Majalah Dinamika Kebudayaan. Denpasar: Universitas Udayana. Vol III. 2: 57-63.

Sivananda, Shri Svami. 2005. *Apa yang Terjadi dengan Jiwa Setelah Kematian* (Terjemahan I Wayan Punia). Surabaya: Paramita.

Soebandi, Ktut. 1983. *Sejarah Pembangunan Pura-Pura di Bali.* Denpasar. CV. Kayumas Agung.

Soedarsono, R.M. 1999. *Rangkuman Esai tentang Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata*. Yogyakarta: BP ISI.

Soekadijo, R.G. 2000. *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Stokes, Jane. 2007. *How To Do Media And Cultural Studies*. (Terjemahan Santi Indra Astuti). Yogjakarta: Bentang.

Storey, John. 2007. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Terjemahan Laily Rahmawati. Yogyakarta: Jalasutra.

Strinati, Dominic. 2009. *Popular Culture, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Terjemahan Abdul Mukhid. Yogjakarta: Bintang Budaya.

Subrata, I Wayan, 2012. "Komodifikasi Seni Pertunjukan Barong di Banjar Denjalan Batur, Desa Batubulan, Gianyar".

Sumadi, Ketut. 2003. "Ritual Agama Hindu sebagai Daya Tarik Pariwisata Budaya Bali (Kasus Pelaksanaan Ritual di Desa Adat Kuta). (Tesis). Denpasar: Universitas Udayana.

Sumadi, Ketut. 2008. "*Kepariwisataan Indonesia Sebuah Pengantar*. Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia.

Sugiharto, Bambang. 1996. *Postmodernisme.* Yogjakarta: Kanisius.

Suwardjoko P. Warpani dan Indira P. Warpani. 2007. *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung: ITB.

Supartha, Ngurah Oka. 1995. *Pura Luhur Tanah Lot di Segara Kidul*. Tabanan: Panitia *Karya Agung Pamungkah, Pamelaspas,* dan *Pangenteg Linggih* Pura Luhur Tanah Lot, Desa Adat Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Daerah Tingkat II Tabanan.

Swasti, Wijaya Bandem. 1997. "Busana Tari Sebuah Refelksi dan Tantangan" dalam Mutda Jurnal Seni dan Budaya, No: V Tahun V. Denpasar: Sekolah Tinggi Seni Indonesia.

Sztompka, Piotr. 2007. *Soiologi Perubahan Sosial*. Terjemahan Alimandan, Jakarta: Prenada, Media Group.

Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Kompas.

Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Magelang: Indonesia Tera.

Thompson, John B. 2006. *Kritik Ideologi Global, Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi Dan Komunikasi Massa*. Yogyakarta: IRCiSod.

Triguna, Ida Bagus Gde Yudha. 1994. "Pergeseran Dalam Pelaksanaan Agama*: Menuju Tattwa" dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. (Pitana, ed). Denpasar: Bali Post.

Trijana, Lambang. 2006. "Gerakan Sosial Baru dari Refleksi Menuju Aksi". Teuku Kemal Fasya (Editor) *Kata & Luka Kebudayaan*. Medan: USU Press.

Vellas Francois dan Becherel Lionel. 2008. *Pemasaran Pariwisata Internasional: Sebuah Pendekatan Strategis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wojowasito, S. dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris, dengan Ejaan Yang Disempurnakan.* Bandung: Hasta.

Yoeti, H. Oka A. 2005. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogjakarta: Tiara Wacana

TENTANG PENULIS

Dr. Drs. I Made Girinata, M.Ag lahir di Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan pada 9 Juni 1963. Anak kedua dari lima bersaudara: Ni Wayan Wirati, S.Ag., Ni Nyoman Winasih, I Nyoman Wirata, S.Pi., (almarhum), dan I Ketut Wiratmaja, S.Ag., M.Pd. Anak dari pasangan I Ketut Tageg (almarhum) dengan Ni Nyoman Repun. Riwayat pendidikan: Tamat Sekolah Dasar Negeri 2 Penarukan tahun 1976. Tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri Kerambitan tahun 1980. Tamat Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tabanan tahun 1983. Tamat S1 di Institut Hindu Dharma (IHD) Denpasar tahun 1988. Tamat S2 di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Denpasar tahun 2004. Diangkat menjadi PNS (Tenaga Pengajar) di Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (APGAHN) Denpasar tahun 1994 yang sekarang menjadi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar. Menikah dengan Dra. I Gusti Made Adnyani tahun 1989 kemudian karena sakit, meninggal pada tahun 2001dengan meninggalkan dua putra yaitu: I Putu Agus Aryatnaya Giri, S.Ag., M.Pd.H., lahir pada 5 Juli 1991, dan Kadek Agus Yoga Dwipranata lahir pada 21 Oktober 1998. Kemudian pada 12 Maret 2007 menikah lagi dengan Ni Luh Ardini, S.Ag., bekerja di Kementerian Kabupaten Tabanan sebagai Guru Agama Hindu, dan dikaruniai seorang putri bernama Komang Tri Adnya Dewi, lahir pada 29 Januari 2008.

Riwayat pekerjaan Penulis adalah sejak tahun 1994 sampai sekarang Tenaga Pengajar di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar; 2005 – 2009 menjadi Dekan Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar; Tahun 2017 – sekarang menjadi Dekan Fak. Brahma Widya, IHDN Denpasar.

Kawasan Suci

Pura Tanah Lot
dan Destinasi Wisata

Alasan terjadinya komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot disebabkan oleh adanya sejumlah faktor. Pertama, perkembangan Bali sebagai daerah tujuan wisata ke seluruh daerah. Salah satu di antaranya adalah Pura Tanah Lot di Kabupaten Tabanan. Kedua, kemagisan dan keindahan alam pantai Pura Tanah Lot. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Tabanan membutuhkan dana finansial untuk pendapatan asli daerah. Keempat, Desa Pakraman Beraban juga berharap mendapatkan dana dari pemasukan DTW Tanah Lot untuk mendukung progam pembangunan desa. Kelima, kuren juga berharap dengan tujuan mempunyai kesempatan ikut meraih rezeki. Keenam, semakin pesatnya perkembangan pariwisata Tanah Lot maka terjadi reinterpretasi terhadap makna kesucian kawasan suci Pura Tanah Lot sesuai dengan kearifan lokal. Ketujuh, pemertahanan kesucian kawasan dilakukan secara preventif (dibuatkan peraturan) dan kuratif (solusi yang terbaik). Kedelapan, Hal-hal yang dipandang mencemari kawasan suci Pura Tanah Lot, dipulihkan dengan ritual.

Kedua; Komodifikasi kawasan suci Pura Tanah Lot terjadi secara berproses. Semula para pengunjung tidak dikenai biaya. Selanjutnya setelah mulai dirintis oleh Pemda Tabanan para pengunjung hanya dikenai donasi. Semakin ramainya kunjungan wisatawan yang datang akhirnya dikenai karcis. Pada perkembangan selanjutnya dibentuk badan pengelola melalui kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan pihak pengusaha swasta CV Ari Jasa Wisata. Melalui kerja sama itu terbentuk pengelolaan segi tiga, yaitu antara CV Ari Jasa Wisata, Desa Pakraman Beraban, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Setelah itu hingga sekarang pengelolaan DTW Tanah Lot dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan selaku pihak I dan Desa Pakraman Beraban selaku pihak II. Operasionalnya dikendalikan oleh Badan Pengelola yang dibentuk kedua belah pihak dengan struktur kepengurusan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.

IHDN PRESS

PURA TANAH LOT
ISBN: 978-602-52589-2-3
9 786025 258923